



TESIS - KS142501

**ANALISIS HUBUNGAN IMPLEMENTASI
E-GOVERNMENT TERHADAP PENINGKATAN
PENANAMAN MODAL DI DAERAH
(STUDI KASUS: PEMERINTAH KABUPATEN
BANYUWANGI)**

BENY PRASETYO
5214201001

DOSEN PEMBIMBING
Tony Dwi Susanto, S.T.,M.T.,Ph.D.

PROGRAM MAGISTER
JURUSAN SISTEM INFORMASI
FAKULTAS TEKNOLOGI INFORMASI
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2016



THESIS - KS142501

THE RELATIONSHIP ANALYSIS OF E-GOVERNMENT IMPLEMENTATION ON INCREASING CAPITAL INVESTMENT IN REGION (CASE STUDY: BANYUWANGI CITY)

BENY PRASETYO
5214201001

SUPERVISOR
Tony Dwi Susanto, S.T.,M.T.,Ph.D.

MAGISTER PROGRAM
DEPARTMENT OF INFORMATION SYSTEMS
FACULTY OF INFORMATION TECHNOLOGY
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
SURABAYA
2016

LEMBAR PENGESAHAN TESIS

Tesis disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar
Magister Komputer (M.Kom)

Di
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

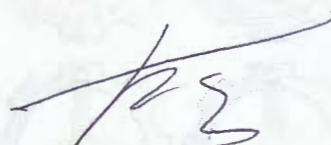
Oleh :
Beny Prasetyo
NRP. 5214201001

Tanggal Ujian : 27 Juni 2016

Periode Wisuda : September 2016

Disetujui oleh:

1. Tony Dwi Susanto, S.T., M.T., Ph.D.
NIP. 19751211 200812 1 001



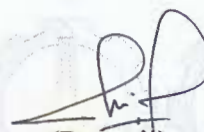
(Pembimbing)

2. Dr. Apol Pribadi Subriadi, S.T., M.T.
NIP. 19700225 200912 1 001



(Penguji)

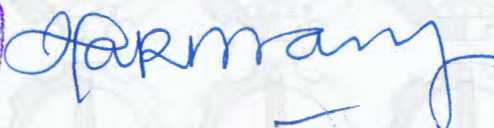
3. Mahendrawathi ER, S.T., M.Sc., Ph.D.
NIP. 19761011 200604 2 001



(Penguji)



Direktur Program Pascasarjana



Prof. Ir. Djauhar Manfaat, M.Sc., Ph.D
NIP. 19601202 198701 1 001

**ANALISIS HUBUNGAN IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT
TERHADAP PENINGKATAN PENANAMAN MODAL DI DAERAH (Studi
Kasus: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi)**

Nama Mahasiswa : Beny Prasetyo
NRP : 5214201001
Dosen Pembimbing : Tony Dwi Susanto, S.T.,M.T.,Ph.D

ABSTRAK

Beberapa tahun terakhir, iklim investasi di Indonesia semakin meningkat, dimana realisasi proyek penanaman modal pada triwulan I tahun 2014 mencapai Rp. 106,6 triliun. Meningkatnya nilai investasi tersebut tidak lepas dari peran daya tarik investasi yang memikat hati para investor. Banyak faktor yang dapat membentuk daya tarik investasi yaitu dapat dikelompokkan menjadi faktor tradisional dan faktor ICT. Beberapa faktor tradisional yaitu tenaga kerja, infrastruktur, kondisi ekonomi, sosial politik. Faktor ICT yang berpengaruh dalam membentuk daya tarik investasi yaitu *e-government* dari sebuah negara tuan rumah (*host country*).

Dengan diimplementasikannya *e-government* akan membawa dampak pada reformasi birokrasi pemerintahan yang lebih baik. Dengan tata kelola pemerintahan yang baik, maka akan meningkatkan investasi asing maupun investasi domestik/lokal. Selama ini, pandangan yang berkembang menyebutkan bahwa negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) cenderung akan lebih menerima investasi apabila dibandingkan dengan negara dengan tata kelola pemerintahan yang kurang baik.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus tunggal. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan pengamatan data longitudinal. Berdasarkan pengamatan data longitudinal terhadap implementasi *e-government* sebelum dan sesudah implementasi *e-government* secara masif yaitu tahun 2011 dan sesudahnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan baik dari sisi infrastruktur maupun aplikasi. Dalam hal *good governance*, juga ditemukan bahwa implementasi aplikasi *e-government* berdampak pada peningkatan masing-masing komponen *good governance*. Begitu pun dari sisi nilai investasi mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Hasil penelitian didapatkan bahwa implementasi *e-government* yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2011 sangat berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan mampu membentuk citra dan public trust di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Dengan kualitas tata kelola pemerintah yang baik dapat menjadi pertimbangan sendiri bagi calon investor untuk berinvestasi di Kabupaten Banyuwangi. Selain itu promosi potensi investasi Kabupaten Banyuwangi melalui website dan media sosial juga turut membantu mempengaruhi minat investasi bagi calon investor untuk masuk ke Kabupaten Banyuwangi.

Kata kunci: *e-government*, *good governance*, penanaman modal, pendekatan kualitatif.

**THE RELATIONSHIP ANALYSIS OF e-GOVERNMENT
IMPLEMENTATION ON INCREASING CAPITAL INVESTMENT IN
REGION (Case Study: Banyuwangi City)**

By : Beny Prasetyo
Student Number : 5214201001
Supervisor : Tony Dwi Susanto, S.T.,M.T.,Ph.D.

ABSTRACT

In recent years, the investment climate in Indonesia is increasing, where the realization of capital investment projects in the first quarter of 2014 reached IDR, 106.6 trillion. The increased capital investment can not be separated from the investment attractiveness in Indonesia. Some traditional factors are labor, infrastructure, economic, social and political, while ICT factor which have influenced on shaping investment attractiveness is e-government of host country.

Implementation of e-government have impact on the reform of government bureaucracy and increasing the good governance quality. Good governance increasing foreign direct investment (FDI) and domestic direct investment (DDI). This research will analyze the relationship between e-government implementation at local government level (city) as one of the strategies to realize good governance. With good governance will influence the investors to come for invest. To answer this research, researcher used a qualitative approach with a single case study is Banyuwangi City in East Java Province, Indonesia. Case study used to explore more details about this research topic. Longitudinal observations are used for observe the e-government, good governance, and capital investment before and after e-government implementation massively.

The result of this research showed the implementation of e-government in Banyuwangi City since 2011 have impact on improvement the quality governance and capable to shaping the image and public trust in society and business sectors. The good governance can be considered for investors to invest in Banyuwangi City. Furthermore, the investment promotion of Banyuwangi government through websites and social media also influence the investment interest for invest to Banyuwangi City.

Key words: e-government, good governance, capital investment, qualitative research.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	iv
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT.....	viii
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR	xviii
DAFTAR TABEL.....	xx
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah	8
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
1.4 Kontribusi Penelitian	9
1.4.1 Kontribusi di Bidang Keilmuan.....	9
1.4.2 Kontribusi di Bidang Bisnis.....	9
1.5 Batasan Penelitian.....	9
1.6 Sistematika Penulisan	11
BAB 2 KAJIAN PUSTAKA	13
2.1 Kajian Teori	13
2.1.1 Electronic Government (<i>e-Government</i>)	13
2.1.1.1 Definisi e-Government.....	13
2.1.1.2 Manfaat E-government.....	14
2.1.1.3 Tipe Relasi <i>E-government</i>	17
2.1.1.4 Implementasi <i>E-government</i>	18
2.1.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (<i>Good governance</i>)	25
2.1.2.1 Definisi Good governance.....	25
2.1.2.2 Indikator Good governance	26
2.1.2.3 Manfaat Good governance	32
2.1.3 Penanaman Modal	33
2.1.3.1 Definisi Penanaman Modal	33
2.1.3.2 Jenis Penanaman Modal	34
2.1.3.3 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	34

2.1.3.4	Penanaman Modal Asing (PMA)	35
2.1.3.5	Faktor yang Mempengaruhi Investasi	35
2.1.3.6	Indikator Peningkatan Nilai Investasi	38
2.1.4	Penelitian Kualitatif	38
2.1.4.1	Definisi dan Karakteristik	38
2.1.4.2	Tipe Pendekatan Kualitatif	40
2.1.4.3	Pendekatan Studi Kasus	41
2.1.4.4	Tipe Pendekatan Studi Kasus	42
2.1.4.5	Analisis Data Penelitian Kualitatif	43
2.1.4.6	Pengecekan Keabsahan Data Kualitatif	45
2.2	Kajian Penelitian Terdahulu	49
2.2.1	<i>E-government: The Gate for Attracting Foreign Investments.</i> (Al-Azzam dan Abu Shanab, 2014)	49
2.2.2	Information Technology, FDI and Economic Growth: An India Case Study. (Bala Veeramacheneni, Richard Vogel, Ekanayake, 2006)	50
2.2.3	A Model of Success Factors for Implementing Local <i>E-government</i> in Uganda. (Robinah Nabafu dan Gilbert Maiga, 2012)	51
2.2.4	Governance and FDI Attractiveness: Some Evidence from Developing and Developed Countries. (Yosra Saidi, Anis Ochi, Houria Ghadri, 2013)	53
2.2.5	The Role of <i>Good governance</i> in the Knowledge-Based Economic Growth of East Asia – A Study on Japan, Newly Industrialized Economies, Malaysia and China. (Debnath Chandra dan Kenji Yokoyama, 2011)	56
2.2.6	E-Government in Marketing a Country: A Strategy for Reducing Transaction Cost of Doing Business in Tanzania (Muhajir Kachwamba dan Oystein Saebo, 2011)	57
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL		59
3.1	Konseptual Model	59
3.2	Domain Penelitian	61
3.2.1	Implementasi E-Government	61
3.2.2	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)	63
3.2.3	Peningkatan Penanaman Modal	64
3.3	Proposisi	67
3.3.1	Proposisi Minor	67
3.3.2	Proposisi Mayor	67

BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN	69
4.1 Tahapan Penelitian.....	69
4.1.1 Identifikasi Masalah.....	70
4.1.2 Studi Literatur.....	70
4.1.3 Rancangan Penelitian Kualitatif	70
4.1.3.1 Setting Lokasi dan Waktu Penelitian	71
4.1.3.2 Setting Informan Penelitian.....	73
4.1.3.3 Setting Instrumen Penelitian	77
4.1.4 Pengumpulan Data.....	77
4.1.4.1 Studi Pustaka	77
4.1.4.2 Wawancara.....	77
4.1.4.3 Observasi.....	78
4.1.5 Pengamatan Data secara Longitudinal.....	78
4.1.6 Analisis Data.....	78
4.1.7 Pengecekan Keabsahan Data Penelitian	79
BAB 5 HASIL DAN PEMBAHASAN	81
5.1 Gambaran Umum Studi Kasus.....	81
5.1.1 Kualifikasi Studi Kasus	81
5.1.2 Karakteristik Studi Kasus	81
5.1.3 Kualifikasi Informan.....	82
5.1.4 Karakteristik Informan.....	83
5.1.4.1 Profil Informan Internal (Pemerintah).....	84
5.1.4.2 Profil Informan Eksternal (Penanam Modal)	86
5.2 Pengumpulan Data	89
5.3 Pengamatan Data Secara Longitudinal	90
5.3.1 Perkembangan Implementasi e-Government di Kabupaten Banyuwangi	91
5.3.1.1 Data Perkembangan Infrastruktur ICT	91
5.3.1.2 Data Perkembangan Anggaran IT	99
5.3.1.3 Data Perkembangan Aplikasi e-Government	101
5.3.1.4 Data Perkembangan Staff IT	117
5.3.1.5 Data Perkembangan Master Plan IT	119
5.3.2 Perkembangan Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	124

5.3.2.1	Data Perkembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.....	124
5.3.2.2	Data Penghargaan terkait Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.....	127
5.3.3	Perkembangan Nilai Investasi di Kabupaten Banyuwangi.....	128
5.3.3.1	Data Perkembangan Nilai Investasi	128
5.3.3.2	Data Perkembangan Realisasi Izin Investasi.....	129
5.4	Analisis Data Studi Kasus.....	131
5.4.1	Penjodohan Pola (<i>Pattern Matching</i>)	131
5.4.1.1	Identifikasi Pola Prediksi	131
5.4.1.1.1	Sub-pola 1 : Manfaat implementasi e-Government	131
5.4.1.1.2	Sub-pola 2 : Manfaat <i>Good Governance</i>	133
5.4.1.1.3	Sub-pola 3 : Pembentuk daya tarik investasi daerah.....	134
5.4.1.1.4	Pola Prediksi Penelitian	135
5.4.1.2	Identifikasi Pola Aktual.....	136
5.4.1.2.1	Implementasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	137
5.4.1.2.2	Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	151
5.4.1.2.3	Daya Tarik Investasi Kabupaten Banyuwangi.....	167
5.4.1.2.4	Pola Aktual Hasil Penelitian	177
5.4.2	Pembuatan Eksplanasi (<i>Explanation Building</i>)	178
5.4.2.1	Membuat pernyataan teoritis atau proposisi awal	179
5.4.2.2	Membandingkan temuan kasus awal dengan proposisi awal	180
5.4.2.3	Memperbaiki kembali proposisi.....	189
5.5	Temuan dan Model Akhir Penelitian.....	196
5.5.1	Temuan Penelitian	196
5.5.2	Model Akhir Penelitian.....	208
5.6	Pengecekan Keabsahan Data Penelitian.....	209
5.6.1	Uji Kredibilitas	209
5.6.1.1	Triangulasi.....	209
5.6.1.2	Member Checking.....	211
5.6.2	Uji Transferability	211
5.6.3	Uji Dependability dan Uji Confirmability	211
5.7	Kontribusi Penelitian	211

5.7.1	Kontribusi Teoritis.....	211
5.7.2	Kontribusi Praktis.....	212
5.8	Keterbatasan Penelitian.....	212
BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN		213
6.1	Kesimpulan	213
6.2	Saran	215
DAFTAR PUSTAKA		217
LAMPIRAN.....		223
A.	Transferability Hasil Penelitian	223
B.	Pedoman Wawancara.....	227
C.	Validasi Hasil Penelitian (Member Checking)	235
BIODATA PENULIS		241

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Komponen Telecommunication Infrastructure Index (TII).....	21
Gambar 2.2 Komponen Human Capital Index (HCI)	22
Gambar 2.3 Model Konseptual Penelitian Alaraj dan Ibrahim (2014)	33
Gambar 2.4 Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif.....	46
Gambar 2.5 Triangulasi sumber data	47
Gambar 2.6 Triangulasi teknik pengumpulan data	47
Gambar 2.7 Triangulasi waktu pengumpulan data	47
Gambar 2.8 Model Kesuksesan Implementasi <i>E-government</i> di Uganda.....	52
Gambar 3.1 Model Konseptual Penelitian	61
Gambar 4.1 Tahapan Penelitian	69
Gambar 4.2 Salah satu <i>screenshot</i> situs utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.....	73
Gambar 4.3 Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif.....	80
Gambar 5.1 Osing Deles Tampak Depan.....	88
Gambar 5.2 Produk Osing Deles.....	88
Gambar 5.3 Ketersediaan Wifi di Ruang Taman Hijau (RTH)	96
Gambar 5.4 Ketersediaan Wifi di Rumah Sakit.....	97
Gambar 5.5 Ketersediaan Wifi di SKPD (Dinas Kesehatan).....	97
Gambar 5.6 Ketersediaan Wifi di Sekolah.....	98
Gambar 5.7 Monitoring Koneksi Internet Kecamatan Se-Kab. Banyuwangi.....	98
Gambar 5.8 Tampilan Situs Resmi Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi	107
Gambar 5.9 Tampilan Situs Resmi Dinas Pariwisata Kab. Banyuwangi.....	107
Gambar 5.10 Tampilan Situs Resmi DPRD Kab. Banyuwangi	108
Gambar 5.11 Tampilan Situs Resmi Kecamatan Purwoharjo.....	109
Gambar 5.12 Tampilan Situs Resmi Kecamatan Banyuwangi	110
Gambar 5.13 Tampilan Situs Resmi Kecamatan Genteng.....	110
Gambar 5.14 Grafik Perkembangan Aplikasi e-Government di Kab. Banyuwangi	116
Gambar 5.15 Data Staff IT bidang kominfo Dishubkominfo Kab. Banyuwangi	118
Gambar 5.16 Data Nilai Investasi di Kab. Banyuwangi Tahun 2010 - TW1 2016	129
Gambar 5.17 Perkembangan Realisasi Izin Investasi di Kab. Banyuwangi Tahun 2010- TW1 2016	130
Gambar 5.18 Sub-pola manfaat implementasi e-Government	133
Gambar 5.19 Sub-pola manfaat good governance	134
Gambar 5.20 Sub-pola pembentuk daya tarik investasi daerah	135
Gambar 5.21 Pola Prediksi Penelitian.....	136
Gambar 5.22 Sub-pola Aktual 1: Manfaat Implementasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	151
Gambar 5.23 Menu Transparansi di Situs Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	154
Gambar 5.24 Data Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015	155
Gambar 5.25 Data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	157
Gambar 5.26 Data Laporan Pertanggungjawaban Anggaran.....	157
Gambar 5.27 Aplikasi e-Kinerja untuk Monitoring Kinerja Pegawai	158
Gambar 5.28 Responsifitas Bupati dalam menanggapi pertanyaan masyarakat.....	160
Gambar 5.29 Responsifitas Instansi dalam Menanggapi Pengaduan Masyarakat	161

Gambar 5.30 Layanan Banyuwangi Children Center	161
Gambar 5.31 Sub-pola Aktual 2: Manfaat Good Governance di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	167
Gambar 5.32 Sub-pola Aktual 3: Daya Tarik Investasi di Kabupaten Banyuwangi.....	177
Gambar 5.33 Pola Aktual Hasil Penelitian	178
Gambar 5.34 Perkembangan Implementasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan sisi aplikasi	198
Gambar 5.35 Data Nilai Investasi di Kab. Banyuwangi Tahun 2010 - TW1 2016	202
Gambar 5.36 Perkembangan Realisasi Izin Investasi di Kab. Banyuwangi Tahun 2010- TW1 2016	202
Gambar 5.37 Pola Aktual Hasil Penelitian yang Mendukung Temuan Penelitian	204
Gambar 5.38 Model Akhir Penelitian	209

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Top Developing Countries Ranked according to A.T Kearney's FDI Convidence Index 2007	16
Tabel 2.1 <i>Benefit</i> Implementasi <i>E-government</i>	16
Tabel 2.2 Pergeseran paradigma pelayanan publik yang dihasilkan oleh <i>e-government</i> ..	18
Tabel 2.3 Rangkuman Faktor-faktor yang harus dipersiapkan dalam implementasi <i>e-government</i>	23
Tabel 2.4 Rangkuman indikator <i>good governance</i>	30
Tabel 2.5 Tipe Pendekatan Kualitatif	40
Tabel 2.6 Perbedaan Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif	45
Tabel 2.7 Hasil Analisis Pengaruh PSAV, RQUAL dan CBRT Terhadap FDI pada seluruh sampel	54
Tabel 2.8 Hasil Analisis Pengaruh RL, GEFF dan VA Terhadap FDI pada seluruh sampel	55
Tabel 2.9 Hasil Analisis Pengaruh PSAV, RQUAL, CBRT dan GEFF terhadap FDI pada Negara Maju.....	55
Tabel 2.10 Hasil Analisis Pengaruh PSAV dan RQUAL terhadap FDI pada Negara Berkembang	55
Tabel 3.1 Indikator Domain Implementasi E-Government.....	62
Tabel 3.2 Indikator Domain Implementasi <i>Good Governance</i>	63
Tabel 3.3 Domain dan Unsur Penelitian	65
Tabel 5.1 Perbandingan Kondisi Infrastruktur ICT di Kabupaten Banyuwangi antara tahun 2008 dan tahun 2012	91
Tabel 5.2 Pernyataan Penting tentang Perkembangan Infrastruktur ICT dari Para Informan.....	93
Tabel 5.3 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur ICT di Kabupaten Banyuwangi sebelum dan sesudah masa implementasi e-Government	95
Tabel 5.4 Pernyataan Penting tentang Perkembangan Anggaran IT dari Para Informan	100
Tabel 5.5 Daftar Aplikasi e-Government di SKPD Pemkab Banyuwangi Tahun 2008 .	102
Tabel 5.6 Daftar Situs Resmi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	105
Tabel 5.7 Daftar Situs Resmi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi	108
Tabel 5.8 Daftar aplikasi pendukung e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	111
Tabel 5.9 Perkembangan e-Government dilihat dari sisi aplikasi.....	114
Tabel 5.10 Pemetaan Jenis Aplikasi e-Gov ke dalam Konsep Good Governance.....	116
Tabel 5.11 Rencana Pengembangan Sistem Informasi tahun 2008-2012	120
Tabel 5.12 Realisasi Rencana Pengembangan Aplikasi RSTI tahun 2008-2012.....	121
Tabel 5.13 Perbandingan Ketercapaian Rencana Pengembangan Aplikasi Baru berdasarkan RSTI.....	122
Tabel 5.14 Perkembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ..	124
Tabel 5.15 Penghargaan Banyuwangi dalam hal Tata Kelola Pemerintahan	127
Tabel 5.16 Data Nilai Investasi Tahun 2010 - TW1 2016	128

Tabel 5.17 Perkembangan Realisasi Izin Investasi di Kab. Banyuwangi Tahun 2010-TW1 2016	129
Tabel 5.18 Identifikasi sub-pola Manfaat Implementasi e-Government.....	132
Tabel 5.19 Identifikasi sub-pola Manfaat Good Governance	134
Tabel 5.20 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur ICT di Kabupaten Banyuwangi sebelum dan sesudah masa implementasi e-Government secara masif	197
Tabel 5.21 Perkembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi ..	199
Tabel 5.22 Temuan Baru diluar Prediksi Penelitian	205
Tabel 5.23 Triangulasi Waktu Pengumpulan Data	210

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Beberapa tahun terakhir, iklim investasi di Indonesia semakin meningkat. Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Tahun 2014, realisasi investasi proyek penanaman modal pada triwulan I (Januari – Maret) tahun 2014 adalah Rp. 106,6 triliun yang kembali memecahkan rekor tertinggi dan ketiga kalinya sejak triwulan III tahun 2013 menembus angka Rp. 100 triliun. Jumlah realisasi investasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) sebesar Rp. 34,6 triliun, sedangkan jumlah realisasi investasi penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp. 72 triliun (BKPM, 2014).

Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara dengan indeks *Foreign Direct Investment* (FDI) yang cukup baik di dunia. Tabel 1.1 dibawah ini merupakan data ranking negara berkembang dengan *FDI Confidence Index* dan *Network Readiness Index* terbaik tahun 2006-2007 menurut World Economic Forum.

Tabel 1.1 Top Developing Countries Ranked according to A.T Kearney's FDI Confidence Index 2007 and the corresponding Network Readiness Index 2006-2007

Country Ranking	Country	FDI Confidence Index	Networked Readiness Index
1	China	2.21	3.7
2	India	2.09	4.1
3	Hongkong	1.78	5.4
4	Brazil	1.78	3.8
5	Russia	1.7	3.5
6	Vietnam	1.67	3.4
7	Malaysia	1.63	4.7
8	South Africa	1.61	4.0
9	Mexico	1.59	3.9
10	Turkey	1.59	3.9
11	Indonesia	1.58	3.6
12	Poland	1.58	3.7
13	South Korea	1.57	5.1
14	Czech Republic	1.56	4.3

(Sumber: Economou, 2008)

Indeks diatas disusun dari tiga komponen pembentuk nilai yaitu 1. Lingkungan ICT yang ditawarkan oleh sebuah negara, 2. Kesiapan *key stakeholder* (individu, bisnis, dan pemerintah), 3. Penggunaan ICT di lingkungan *key stakeholder*. Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa peran ICT baik infrastuktur maupun penggunaannya sangat berpengaruh dalam meningkatkan nilai jual sebuah negara dalam menarik minat investor untuk melakukan penanaman modal.

Meningkatnya nilai investasi tidak lepas dari peran daya tarik investasi yang memikat hati para investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing (KPPOD, 2004). Menurut Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) KPPOD(2004), pembentukan daya tarik investasi berlangsung secara terus menerus dan dipengaruhi oleh banyak aspek. Faktor ekonomi, politik dan kelembagaan, sosial dan budaya diyakini merupakan beberapa faktor pembentuk daya tarik investasi suatu negara atau daerah (KPPOD, 2004).

Danciu & Strat (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi investor melakukan investasi di wilayah tertentu antara lain: *labor factor*, *infrastructure factor*, *cost factor*, *market size factor*, *knowledge factor* dan *market size factor*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Villaverde & Maza (2012) mengusulkan beberapa faktor yang mempengaruhi *foreign direct investment* (FDI) antara lain potensial ekonomi, kondisi tenaga kerja, daya saing dan ukuran pasar. Setelah dilakukan penelitian menunjukkan faktor potensial ekonomi, kondisi tenaga kerja dan daya saing memiliki pengaruh positif terhadap FDI, sedangkan ukuran pasar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap FDI.

Penelitian serupa dilakukan oleh Kazmi & Manarvi (2009), hasil penelitiannya menyebutkan ada empat faktor yang mempengaruhi daya tarik investasi asing antara lain, peraturan pemerintah, SDM, kualitas infrastruktur dan profil perusahaan. Sementara risiko negara (ketidakstabilan politik, hukum yang lemah dan situasi keamanan negara yang kurang baik) akan berdampak buruk terhadap peluang investasi. Keberhasilan sebuah negara dalam menciptakan iklim ekonomi yang baik (*economic governance*) juga akan memiliki hubungan positif terhadap investasi asing (Maiti & Mukherjee, 2013). Berdasarkan standarisasi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Tahun 2004 telah

menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik investasi di daerah atau kabupaten di Indonesia yaitu faktor kelembagaan, sosial politik, ekonomi daerah, tenaga kerja dan produktivitas dan infrastruktur fisik.

Beberapa faktor yang telah disebutkan diatas termasuk ke dalam kelompok faktor tradisional. Penelitian yang telah dilakukan oleh (Danciu & Strat, 2014; Villaverde & Maza, 2012; Kazmi & Manarvi, 2009; KPPOD, 2004) membuktikan bahwa faktor tradisional memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap keputusan investor untuk melakukan kegiatan FDI. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, keputusan investor untuk melakukan investasi di suatu negara juga dipengaruhi oleh kemampuan *Information, Communication and Technology* (ICT) khususnya *e-government* negara tuan rumah (*host country*) (Addison & Heshmati, 2003; Al-Azzam & Abu-Shanab, 2014; Alshehri & Drew, 2010; Azubuike, 2006; Buss & Karkowski, 2005; DeBenedicts, et.al, 2002; Economou, 2008; Kachwamba, 2011; Loibl & Hira, 2009; Torre & Moxon, 2001).

Information and Communication Technology (ICT) saat ini bukan lagi menjadi pendukung sebuah aktivitas bisnis (*supporting business*), melainkan telah menjadi alat utama sebuah bisnis (*core business*). Dengan ICT, segala aktivitas bisnis dapat dilakukan dengan mudah dan tentu berimbas terhadap peningkatan profit sebuah usaha. Melihat potensi dari ICT, pemerintah semakin gencar menerapkan *e-government* sebagai alat kelembagaan yang inovatif untuk aksesibilitas informasi publik yang efektif dan sistem birokrasi yang transparan dan efisien (Kachwamba, 2011). Pengimplementasian dengan benar dan tepat, *e-government* dapat membantu pemerintah untuk menciptakan lingkungan bisnis lokal yang kompetitif. Kondisi ini dapat dilihat dari peningkatan akses informasi publik yang dapat mengurangi biaya pencarian investor, dan meningkatkan efisiensi birokrasi yang dapat mengurangi biaya suap (Buss & Karkowski, 2005). Daerah yang memiliki infrastruktur ICT yang baik akan berpotensi untuk menarik minat investor untuk datang melakukan investasi (Addison & Heshmati, 2003).

E-government dikenal dengan istilah yang berbeda-beda seperti *electronic government*, *electronic governance*, *digital government*, *online government*, *e-Gov* dan lain-lain (Gronlund & Horan, 2004). Menurut World Bank (2002), *e-*

government berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti *wide area network*, internet dan *mobile computing*) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan. Fang(2002) mendefinisikan *e-government* sebagai cara pemerintah yang paling inovatif dalam menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK), khususnya aplikasi berbasis *web* untuk menyediakan dan memfasilitasi masyarakat dan bisnis dalam mengakses informasi dan layanan pemerintah yang lebih mudah. *E-government* juga dapat meningkatkan kualitas layanan dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses dan institusi demokrasi.

Implementasi *e-government* akan membawa dampak pada reformasi birokrasi pemerintahan yang lebih baik (Al-Azzam & Abu-Shanab, 2014; Lau, 2005), peningkatan efisiensi birokrasi (Al-Azzam & Abu-Shanab, 2014), menurunnya angka korupsi (Al-Azzam & Abu-Shanab, 2014), meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Mucavele, 2003; NOIE, 2003; OECD, 2009) merupakan beberapa benefit yang diperoleh dari implementasi *e-government*. Dengan implementasi *e-government*, pemerintah akan semakin meningkatkan pelayanan publik terhadap masyarakat, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas hingga mereformasi proses pemerintahan berbasis teknologi (*online*). Dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan iklim ekonomi yang baik akan meningkatkan FDI maupun investasi domestik / lokal (Mucavele, 2003; Al-Azzam & Abu-Shanab, 2014). *Good governance* adalah salah satu faktor penting untuk mempromosikan FDI dimana meliputi efisiensi administrasi publik, regulasi yang efisien, tingkat korupsi yang rendah dan transparansi di lingkungan pemerintahan (idm).

Ada beberapa penelitian dan pedoman terkait proses implementasi-*government* baik di pemerintahan lokal maupun nasional. Menurut International Telecommunication Union (ITU, 2009), implementasi-*government* dapat dibentuk melalui beragam aspek yang membentuknya. ITU telah menetapkan empat dimensi yang menjadi alat ukur implementasi-*government* antara lain: (1) *outreach*, (2) *governance*, (3) *policy*, dan (4) *infrastructure*. Pedoman lain yang dikeluarkan oleh United Nations Department of Economic and Social Affairs

(UNDESA) (UNDESA, 2002) menyebutkan bahwa ada beberapa area atau *key factors* yang perlu disiapkan ketika akan mengimplementasikan *e-government* antara lain: (1) *political conditions*, (2) *regulatory framework*, (3) *organizational conditions*, (4) *cultural and human resources conditions*, (5) *financial conditions*, (6) *communication environment*, (7) *technological infrastructure* dan (8) *data and information systems*. Sementara itu Nkohkwo & Islam (2013) dalam penelitiannya menghasilkan beberapa aspek yang harus diperhatikan dan menjadi tantangan bagi pemerintah ketika mengimplementasikan *e-government* di negara-negara Sub-Sahara Africa (SSA) antara lain: (1) *financial aspects*, (2) *organizational aspects*, (3) *political aspects*, (4) *socio-economic aspects*, (5) *human aspects*, dan (6) *infrastructural aspects*.

Menurut Azubuike (2006), terdapat lima alasan mengapa *e-government* dapat membantu calon investor dalam mengambil keputusan sebelum melakukan FDI antara lain: (1) akan meningkatkan pengetahuan investor terkait lingkungan (target) termasuk perekonomian target, (2) akan mengurangi ketidakpastian tentang kemungkinan perubahan peraturan dan administrasi di lingkungan bisnis, (3) meningkatkan transparansi transaksi yang melibatkan pejabat pemerintah maupun non pemerintah, (4) berkontribusi untuk menciptakan image negara dan mempengaruhi persepsi investor, (5) memberikan kontribusi data dan perspektif tentang bagaimana proyek investasi dapat diimplementasi dan dikelola. Meskipun sumber daya yang kuat dan fundamental ekonomi yang sangat baik, masih memungkinkan sebuah negara untuk kurang memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Negara dapat membentuk citra / *image* positif di lingkungan investasi dengan menerapkan informasi elektronik yang dapat diakses dengan mudah oleh investor (Azubuike, 2006).

Menurut studi yang dilakukan Kaufmann et.al dari World Bank pada tahun 1999 dan diperbaharui setiap tahunnya (Kaufmann et.al, 2010), hasil penelitiannya menetapkan enam (6) indikator dari *good governance* antara lain: 1) *voice and accountability*, 2) *political stability*, 3) *government effectiveness*, 4) *regulatory quality*, 5) *rule of law* dan 6) *control of corruption*. The United Nations Development Program (UNDP) juga telah menetapkan prinsip *good governance* yang dikenal dengan sebutan “*The Five Good governance Principles*”. Lima (5)

prinsip tersebut diantaranya: 1) *legitimacy and voice*, 2) *direction*, 3) *performance*, 4) *accountability* dan 5) *fairness*.

Ketika sebuah pemerintahan telah mencapai atau sedang pada proses untuk mencapai *good governance*, maka dampak atau manfaat yang didapatkan oleh pemerintah akan sangat banyak. Praktek *good governance* akan memberikan kepercayaan (*trust*) publik yang lebih terhadap pemerintah (Ala-araj & Ibrahim, 2014), meningkatkan kinerja organisasi (Fadilah, 2013), meningkatkan proses pengambilan keputusan oleh top level manajemen (OECD, The Tangible benefits of Good Governance), menciptakan iklim investasi yang baik (Subasat & Bellos, 2013; Saidi, et.al, 2013) hingga menarik investor asing untuk melakukan FDI (Subasat & Bellos, 2013; Saidi, et.al, 2013; World Bank, 2002).

Menurut (World Bank, 2002), kebijakan / peraturan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik akan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga akan menarik FDI. Sebaliknya, ketika sebuah negara dengan tata kelola yang kurang baik maka akan berdampak pada kurangnya FDI yang masuk di negara tersebut. Selama ini, pandangan yang berkembang menyebutkan bahwa negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) cenderung akan lebih menerima FDI (World Bank, 2002; Globerman, Shapiro, & Tang, 2004; La Porta, Lopez de Silanes, Shleifer, & Vishny, 1998), hal ini dikarenakan investasi tidak dapat berjalan dan bertahan di dalam lingkungan tata kelola pemerintahan yang lemah atau kurang baik (Globerman, Shapiro, & Tang, 2004), dan tata kelola yang kurang baik (*poor governance*) cenderung meningkatkan costs dan ketidakpastian (Cazzura-Cuervo, 2008). Sedangkan menurut (World Bank, 2010), negara dengan regulasi yang tidak jelas, proses yang tidak efisiensi dan pengelolaan yang kurang baik cenderung nilai FDI nya kecil.

Di Indonesia, melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika mendukung penuh upaya pemerintah daerah dalam melakukan reformasi birokrasi menuju tercapainya predikat *good governance*. Implementasi *e-government* telah memberikan dampak yang positif terhadap kemajuan ekonomi daerah di Indonesia. Contoh daerah yang telah melakukan pengembangan *e-government* yaitu Kabupaten Sragen. Kabupaten Sragen telah melakukan implementasi *e-government* sejak tahun 2002. Nilai investasi di Kabupaten Sragen terus

mengalami peningkatan sejak reformasi birokrasi dengan mengimplementasikan *e-government* pada tahun 2002. Nilai investasi tahun 2002 sebesar 592 milyar, 2003 sebesar 703 milyar, 2004 sebesar 926 milyar, 2005 sebesar 955 milyar, dan tahun 2006 mencapai 1,2 triliun (Sulihanto, 2007).

Beberapa penelitian terdahulu masih berfokus pada meneliti hubungan antara implementasi *e-government* terhadap good governance (Raghupathi & Wu, 2011; Kettani, Moulin, & El Mahdi, 2008; Navarro, Pachon, & Cegarra, 2012), hubungan antara good governance terhadap peningkatan investasi khususnya FDI (*foreign direct investment*) (Saidi & Yared, 2002; Subasat & Bellos, 2013; Chandra & Yokoyama, 2011) dan implementasi *e-Government* terhadap investasi FDI (Al-Azzam & Abu-Shanab, 2014; Kachwamba, 2011). Beberapa penelitian diatas belum meneliti secara komprehensif dampak implementasi *e-Government* terhadap peningkatan nilai investasi melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Selain itu, dari sisi data penelitian terdahulu masih banyak menggunakan data sekunder yang dipublikasikan oleh World Bank, The Worldwide Governance Indicator dan UNDP, belum adanya penelitian yang menggunakan data primer berupa wawancara terhadap investor maupun pegawai pemerintahan sebagai sumber data penelitian. Dari sisi metode yang digunakan banyak dari penelitian tersebut menggunakan regresi dan perhitungan terhadap data-data publikasi tersebut. Dan dari sisi jenis investasi yang diteliti masih berfokus pada investasi FDI pada level negara.

Dari uraian latar belakang diatas, peneliti ingin melakukan penelitian terkait dampak dari implementasi *e-government* pada level pemerintah daerah terhadap peningkatan nilai investasi di daerah melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang baik (good governance). Hal lain yang ingin diteliti adalah untuk membuktikan secara empiris kajian teori dan penelitian yang berkembang yang menyebutkan bahwa terwujudnya *good governance* akan menarik investasi asing (FDI) masuk ke sebuah negara. Teori dan hasil penelitian itu, oleh peneliti ingin dibuktikan pada level pemerintah daerah di Indonesia. Untuk menjawab penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kasus untuk dapat mengeksplorasi lebih detail terkait topik penelitian ini.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan dan ditambah dengan sepanjang pengetahuan peneliti belum adanya penelitian di bidang *e-government* di Indonesia yang mengkaji dampak dari implementasi *e-government* terhadap *good governance* yang mempengaruhi meningkatnya nilai investasi di daerah, maka pertanyaan besar yang ingin dijawab melalui penelitian ini yaitu “*bagaimana dampak dari implementasi e-government di level pemerintah daerah terhadap peningkatan nilai investasi di daerah melalui peningkatan kualitas good governance pada pemerintah daerah?*”. Untuk memperjelas lebih detail, perumusan masalah (*research question*) dalam penelitian ini diuraikan sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak implementasi e-government terhadap peningkatan kualitas *good governance* pada level pemerintah daerah ?
2. Bagaimana dampak kualitas *good governance* pada level pemerintah daerah terhadap peningkatan nilai investasi di daerah?
3. Bagaimana dampak implementasi e-government terhadap peningkatan nilai investasi di daerah?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menjawab pertanyaan besar penelitian ini yaitu untuk membuktikan secara empiris bahwa implementasi *e-government* di pemerintah daerah akan berdampak pada terwujudnya *good governance* yang secara langsung berpengaruh terhadap peningkatan nilai investasi di daerah. Selain itu penelitian ini juga memiliki beberapa sub-tujuan lain yaitu:

1. Untuk memberikan kajian empiris tentang dampak implementasi e-government terhadap peningkatan kualitas *good governance* pada level pemerintah daerah.
2. Untuk memberikan kajian empiris tentang dampak peningkatan *good governance* pada level pemerintah daerah terhadap peningkatan daya tarik investasi daerah.

3. Untuk mengetahui dampak dari implementasi e-government pada level pemerintah daerah terhadap daya tarik investasi daerah.

Manfaat dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kontribusi implementasi *e-government* di lingkungan pemerintah kabupaten/kota sebagai salah satu faktor yang membentuk terwujudnya *good governance*, dimana *good governance* tersebut akan mempengaruhi daya tarik investasi daerah sehingga akan meningkatkan nilai penanaman modal di daerah.

1.4 Kontribusi Penelitian

1.4.1 Kontribusi di Bidang Keilmuan

Hasil dari penelitian ini memberikan sebuah model penelitian yang komprehensif di bidang dampak e-government terhadap peningkatan nilai investasi melalui peningkatan *good governance* dengan menggunakan pengamatan longitudinal dan data primer berbasis kualitatif.

1.4.2 Kontribusi di Bidang Bisnis

Kontribusi penelitian di bidang bisnis antara lain:

1. Memberikan penjelasan terkait hubungan antara implementasi e-government terhadap peningkatan nilai investasi di daerah melalui peningkatan *good governance*
2. Memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai investasi di daerah dengan cara meningkatkan kualitas *good governance* dan salah satu caranya yaitu meningkatkan kualitas e-government.

1.5 Batasan Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang akan menjadi batasan dalam penelitian ini. Batasan penelitian ini antara lain:

1. Yang dimaksud investasi dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN).

2. Objek yang menjadi penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang terletak di Propinsi Jawa Timur dengan karakteristik sebagai berikut:
- a. Wilayah demografi Banyuwangi yang terdiri dari 24 kecamatan, 189 desa, 28 kelurahan dan 10 pulau. Luas wilayah 5.782,50 km², panjang perbatasan 335,997 km, dan panjang garis pantai 175,80 km. Luas wilayah laut 175,80 km x 4 mil setara dengan ½ wilayah laut Propinsi Jawa Timur.
 - b. Strategi pengembangan *e-government* tertuang dalam RPJMD (2010-2015) yang didukung dengan Renstra Dishubkominfo 2012-2017, Instruksi Bupati No.1 2010 tentang migrasi dan penggunaan FOSS yang berlisensi bebas dan ilegal, Instruksi Bupati No.555 2012 tentang optimalisasi pemanfaatan website.
 - c. Komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif (*good governance*) yang menempatkan pada urutan pertama dalam 20 pokok pilar pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
 - d. Status Banyuwangi sebagai kota Digital Society pertama di Indonesia menjadikan praktek tiga area fokus *e-government* (G2C, G2G, G2B) terlaksana dengan baik.
 - e. Hubungan pemerintah dengan masyarakat (*government to citizen*) direalisasikan dengan pemasangan 1500 titik wifi yang tersebar di seluruh ruang publik Banyuwangi.
 - f. Hubungan pemerintah dengan pemerintah (*government to government*) direalisasikan dengan integrasi sistem dan fasilitas pertukaran data dan informasi antar SKPD dalam penyelenggaraan pemerintahan.
 - g. Hubungan pemerintah dengan bisnis (*government to business*) direalisasikan dengan pelayanan dan fasilitasi perijinan atau pengembangan usaha bagi pelaku usaha (UMKM dan Industri)
 - h. Memiliki BPPT (Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu) sebagai wujud implementasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang fokus pada pelayanan perizinan.

- i. BPPT memiliki Sistem Informasi Perizinan Online (SIPO) yang dapat digunakan masyarakat untuk pendaftaran izin melalui *online*.
- j. Memiliki program unggulan *one day service* (1 hari selesai) khusus untuk SIUP dan TDP tanpa tinjau lokasi.
- k. Tersedianya jaringan internet dan intranet yang menghubungkan 34 SKPD, 24 kecamatan, 189 desa dan 28 kelurahan dan 60 rumah sakit, puskesmas / klinik kesehatan.
- l. Tersedia 1500 titik @wifi.id yang tersebar merata di seluruh ruang publik dan sekolah se-Kabupaten Banyuwangi
- m. Kabupaten Banyuwangi menduduki peringkat 1 minat lokasi investasi PMA sampai dengan triwulan 1 tahun 2015
- n. Kawasan potensi investasi yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi
- o. Memiliki jalan nasional utama yang menghubungkan dengan Pulau Bali
- p. Memiliki infrastruktur transportasi yang terdiri dari pelabuhan penyeberangan ferry (PT. ASDP (Persero) dan pelabuhan barang dan petikemas (PT. Pelindo III Tanjungwangi), Bandar Udara Hijau (Green Airport) pertama di Indonesia, Kereta Api dan Terminal Bus.
- q. Memiliki kawasan industri terpadu yang tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Banyuwangi.
- r. Memiliki kegiatan Banyuwangi Festival, kegiatan tahunan dalam rangka promosi investasi di Banyuwangi.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan proposal penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Bab 1 Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, kontribusi penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

b) **Bab 2 Kajian Pustaka**

Bab ini berisi kajian terhadap teori dan penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya.

c) **Bab 3 Kerangka Konseptual**

Bab ini mengulas tentang kerangka konseptual yang dikembangkan dalam penelitian ini, termasuk hipotesis penelitian dan deskripsi operasional.

d) **Bab 4 Metode Penelitian**

Bab ini membahas mengenai rancangan penelitian, lokasi dan tempat penelitian, dan juga tahapan-tahapan sistematis yang digunakan selama melakukan penelitian.

e) **Daftar Pustaka**

Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penelitian ini, baik jurnal, buku maupun artikel.

BAB 2

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kajian Teori

Dasar teori berisi penjelasan teori-teori yang digunakan berdasarkan kajian pustaka yang menjadi latar belakang penelitian. Dasar teori selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.

2.1.1 Electronic Government (*e-Government*)

2.1.1.1 Definisi e-Government

E-government dikenal dengan istilah yang berbeda-beda seperti *electronic government*, *electronic governance*, *digital government*, *online government*, *e-Gov* dan lain-lain (Gronlund & Horan, 2004). Menurut World Bank (2002), *e-government* berhubungan dengan penggunaan teknologi informasi (seperti *wide area network*, internet dan *mobile computing*) oleh organisasi pemerintahan yang mempunyai kemampuan membentuk hubungan dengan warga negara, bisnis dan organisasi lain dalam pemerintahan. Fang (2002) mendefinisikan *e-government* sebagai cara pemerintah yang paling inovatif dalam menggunakan teknologi, informasi dan komunikasi (TIK), khususnya aplikasi berbasis *web* untuk menyediakan dan memfasilitasi masyarakat dan bisnis dalam mengakses informasi dan layanan pemerintah yang lebih mudah. Menurut Inpres No.3 Tahun 2003, pengembangan *e-government* merupakan upaya untuk mengembangkan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik secara efektif dan efisien.

E-government juga dapat meningkatkan kualitas layanan dan memberikan kesempatan yang lebih besar bagi mereka untuk berpartisipasi dalam proses dan institusi demokrasi. Melalui pengembangan *e-government* dilakukan penataan sistem manajemen dan proses kerja di lingkungan pemerintah dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi tersebut mencakup 2 (dua) aktivitas yang berkaitan yaitu : 1. pengolahan data, pengelolaan informasi, sistem manajemen dan proses kerja secara elektronik; 2. pemanfaatan kemajuan teknologi informasi agar pelayanan

publik dapat diakses secara mudah dan murah oleh masyarakat di seluruh wilayah negara.

2.1.1.2 Manfaat E-government

Adopsi dan penggunaan strategi *e-government* dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah dalam penyampaian informasi dan layanan yang lebih efektif dan efisien untuk seluruh sektor pemerintahan (Alshehri & Drew, 2010). Selain itu, implementasi *e-government* juga memiliki manfaat baik manfaat di bidang ekonomi (*economic benefits*) maupun manfaat di bidang sosial (*social benefits*) (Bhatnagar, 2003). Menurut (Bhatnagar, 2003), manfaat di bidang ekonomi dan sosial yang dihasilkan oleh implementasi *e-government* antara lain:

1. Social Benefits

- 1.1 Meningkatkan transparansi dan mengurangi korupsi
- 1.2 Memerangi korupsi melalui *e-government*
- 1.3 Meningkatkan efisiensi dan efektivitas *servicedelivery*
- 1.4 Pemberdayaan masyarakat pedesaan

2. Economic Benefits

- 2.1 Mengurangi biaya (*costs*) untuk layanan pemerintah
- 2.2 Pengendalian pengeluaran pemerintah
- 2.3 Pertumbuhan pendapatan pajak

Deloitte Research Group melalui hasil penelitiannya (Deloitte, 2004) menyebutkan bahwa strategi pemerintah melalui implementasi *e-government* memiliki potensi untuk mengurangi waktu, usaha dan biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat dan sektor bisnis untuk mengetahui tentang peraturan atau regulasi dari pemerintah. Dengan *e-government*, masyarakat akan lebih mudah untuk menggunakan layanan pemerintah, meningkatkan interaksi dan partisipasi antara unit pemerintah dengan bisnis, industri dan masyarakat. Selain itu manfaat lainnya yaitu meningkatkan produktivitas dan efisiensi dari pemerintah, mengurangi jumlah form dalam bentuk kertas, membuat transaksi (pembayaran pajak, permohonan ijin) menjadi lebih mudah, lebih efektif dan lebih hemat biaya.

Seifert & Bonham(2004) mengatakan ada beberapa manfaat dari diimplementasikannya *e-government*, sehingga menjadi motivasi tersendiri bagi pemerintah untuk menjadikan *e-government* sebagai alat untuk mereformasi pemerintahan. Beberapa manfaat dari *e-government* yang sering menjadi alasan dan motivasi pemerintah untuk menggunakan *e-government* antara lain: *efficiency, marketization, new and improved services, decentralization, administrative control, citizen demand, increased citizen participation, transparency, dan economic development*.

E-government juga dapat digunakan sebagai media promosi bisnis pemerintah (Al-Azzam & Abu-Shanab, 2014). Penggunaan *e-government* sebagai alat promosi akan meminimalisir hambatan masuknya investasi FDI di sebuah negara. Hambatan tersebut terutama terkait dengan informasi investasi, prosedur birokrasi dan kebijakan yang harus dihadapi oleh investor asing. Menurut (Al-Azzam & Abu-Shanab, 2014), beberapa manfaat dari implementasi *e-government* yang digunakan sebagai alat promosi investasi sebuah negara antara lain: *information accessibility and reduce uncertainty, time efficiency, cost reduction, lower corruption, dan efficient bureaucratic procedures*.

Edwin Lau dari OECD melalui penelitiannya pada tahun 2005 (Lau, 2005) membagi benefit *e-government* menjadi tiga yaitu *financial benefits, public benefits* dan *economic benefits* seperti pada gambar 2.1. *Financial benefits* yaitu keuntungan dalam finansial (uang) berupa penghematan uang untuk setiap transaksi dengan menggunakan *e-government* dibandingkan dengan biaya yang harus dikeluarkan pemerintah untuk setiap transaksi tradisional atau belum menggunakan *e-government*. Edwin Lau memberi contoh penelitian yang dilakukan oleh The National Office for The Information Economy (NOIE) pada tahun 2003 yang menyebutkan bahwa pemerintah Australia menghemat uang sekitar 14.62 AUD per transaksi untuk user dan 25 AUD per transaksi untuk bisnis setelah implementasi *e-government*. Penelitian NOIE tersebut didasarkan pada pengamatan di 38 proyek *e-government* pemerintah Australia. Selanjutnya benefit yang kedua yaitu *public benefits*, yang termasuk *public benefit* diantaranya meningkatkan kepuasan *customer* (masyarakat dan bisnis), tercapainya outcome berupa kebijakan dan peraturan dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good*

governance). Benefit yang terakhir yaitu *economicbenefits* yang terdiri dari memperbaiki lingkungan bisnis yang kompetitif, mempromosikan informasi ekonomi untuk investasi, hingga menciptakan peluang bisnis. Secara rinci rangkuman benefit dari penelitian NOIE dirangkum seperti pada tabel 2.1

Tabel 2.1 *Benefit Implementasi E-government*

<i>Beneficiaries Type Of benefit</i>	<i>Business</i>	<i>Citizens</i>	<i>Government</i>
<i>Financial (direct)</i>	<i>Reducing burden: administrative simplification</i>	<i>Reducing burden: administrative simplification</i>	<i>Efficiency savings to government: freeing resources for public and private innovation</i>
<i>Public (direct and indirect)</i>	<i>Improving trust in government: customer satisfaction and equity; achieving overall policy and program outcomes; meeting security and privacy expectations</i>		
<i>Economic (direct and indirect)</i>	<i>Supporting growth: contributing to a sound business environment, promoting the information economy, creating bbusiness opportunities</i>		

(Sumber : Lau Edwin, 2005)

Ndou (2004) dalam penelitiannya mengidentifikasi ada beberapa manfaat dari implementasi *e-government* khususnya untuk negara berkembang. Terdapat tujuh (7) manfaat yang diperoleh pemerintah ketika mengimplementasi *e-government* antara lain: (1) mengurangi anggaran (*cost*) dan meningkatkan efisiensi, (2) meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk bisnis dan masyarakat, (3) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah, (4) meningkatkan kapabilitas pemerintah, (5) membangun jaringan dan komunitas, (6) meningkatkan kualitas pengambilan keputusan, dan (7) penggunaan ICT sebagai media promosi. Dengan banyaknya manfaat dari penggunaan *e-government* di pemerintahan, saat ini pemerintah baik tingkat lokal maupun nasional berlomba-lomba untuk mulai mengimplementasi *e-government* tentu dengan tujuan untuk reformasi birokrasi dan pelayanan publik pemerintahan berbasis ICT.

2.1.1.3 Tipe Relasi *E-government*

Tipe relasi *e-government* memiliki beragam definisi, ada beberapa literatur yang membagi tipe relasi menjadi tiga (3) macam (*government to government* (G2G), *government to business* (G2B), *government to citizen* (G2C)) ada juga yang membagi tipe relasi menjadi empat, lima dan seterusnya. Alshehri & Drew (2010) mendefinisikan ada beberapa tipe dari *e-government* antara lain: *government to citizen* (G2C), *government to business* (G2B), *government to government* (G2G) dan *government to employee* (G2E).

Definisi lain mengenai tipe relasi *e-government* dikemukakan oleh (DeBenedicts, et.al, 2002) dimana mereka membagi tipe relasi *e-government* menjadi empat (4) yaitu G2G, G2B, G2C, dan C2C. Lebih dari dua penelitian diatas, telah ditemukan delapan tipe atau model *e-government* menurut (Fang, 2002) diantaranya adalah *government to citizen* (G2C), *citizen to government* (C2G), *government to business* (G2B), *business to government* (B2G), *government to government* (G2G), *government to nonprofit* (G2N), *non profit to government* (N2G) dan *government to employee* (G2E).

Government to government (G2G) adalah salah satu tipe relasi antara pemerintah dengan departemen atau unit di lingkungan pemerintah yang memungkinkan bertukar dan berbagi informasi menggunakan media komunikasi online (DeBenedicts, et.al, 2002; Alshehri & Drew, 2010; Fang, 2002). *Government to citizen* (G2C) adalah tipe relasi yang utama dari prinsip *e-government* yaitu komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat. G2C menyediakan informasi yang dapat diakses dengan mudah dan menyediakan layanan interaksi antara masyarakat dengan pemerintah (DeBenedicts, et.al, 2002; Alshehri & Drew, 2010; Fang, 2002). *Government to business* (G2B) adalah tipe relasi antara pemerintah dengan sektor bisnis. G2B memfasilitasi sektor bisnis untuk distribusi kebijakan, peraturan dan hal lain yang berkaitan dengan bisnis termasuk di dalamnya pemerintah menyediakan layanan untuk sektor bisnis seperti e-transaction ataupun e-procurement (DeBenedicts, et.al, 2002; Alshehri & Drew, 2010; Fang, 2002). *Government to employee* (G2E) adalah tipe relasi *e-government* dimana memungkinkan karyawan/pegawai pemerintah untuk

berinteraksi dengan pemerintah (DeBenedicts, et.al, 2002; Alshehri & Drew, 2010; Fang, 2002). G2E menyediakan layanan *online* khusus untuk karyawan/pegawai seperti pendaftaran cuti tahunan secara online, cek sisa cuti, cek catatan pembayaran gaji, dan lain-lain. G2E juga mendukung program pemerintah untuk membudayakan sistem kerja *paperless* dengan meminimalisir form fisik yang digantikan dengan form online (Fang, 2002).

2.1.1.4 Implementasi *E-government*

Implementasi *e-government* dapat diartikan sebagai sebuah proses yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan *e-government* di dalam birokrasi pemerintahan. Menurut Nabafu & Maiga(2012), implementasi *e-government* merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk masuk ke dalam tren global dengan memanfaatkan penggunaan ICT dalam layanan publik. Definisi lain dari inisiasi *e-government* menurut (Ndou, 2004) yaitu inisiatif dari pemerintah dan departemen untuk menggunakan aplikasi dan tools ICT, internet dan perangkat mobile untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, menguatkan relasi dan membangun kerjasama baru dengan masyarakat. Dengan implementasi *e-government*, pemerintah akan mengubah paradigma birokrasi tradisional yang cenderung tidak fleksibel, kurang efektif dan efisien dan cenderung lambat dalam hal pelayanan publik untuk masyarakat menuju ke paradigma *e-government* yang lebih fleksibel, efektif dan efisien (Ho, 2002). Tabel 2.2 dibawah ini menjelaskan perbandingan antara paradigma birokrasi tradisional dan paradigma *e-government* yang dihasilkan oleh implementasi *e-government*(Ho, 2002).

Tabel 2.2 Pergeseran paradigma pelayanan publik yang dihasilkan oleh *e-government*

Pergeseran paradigma dalam pelayanan publik		
	<i>Bureaucratic paradigm</i>	<i>E-government paradigm</i>
<i>Orientation</i>	<i>Production cost-efficiency</i>	<i>User satisfaction and control, flexibility</i>
<i>Process organization</i>	<i>Functional rationality, departmentalization, vertical hierarchy of control</i>	<i>Horizontal hierarchy, network organization, information sharing</i>

<i>Management principle</i>	<i>Management by rule and mandate</i>	<i>Flexible management, interdepartmental team work with central coordination</i>
<i>Leadership style</i>	<i>Command and control</i>	<i>Facilitation and coordination, innovative entrepreneurship</i>
<i>Internal Communication</i>	<i>Top down, hierarchical</i>	<i>Multidirectional, network with central coordination, direct communication</i>
<i>External Communication</i>	<i>Centralized, formal, limited channels</i>	<i>Formal and informal direct and fast feedback, multiple channels</i>
<i>Mode of service delivery</i>	<i>Documentary mode and interpersonal interaction</i>	<i>Electronic exchange, non face to face interaction</i>
<i>Principles of service delivery</i>	<i>Standardization, impartiality, equity</i>	<i>User customization, personalization</i>

(Sumber : Ho, 2002)

Implementasi *e-government* membutuhkan banyak sekali kebutuhan yang harus dipersiapkan oleh pemerintah. Selain itu implementasi *e-government* juga harus siap melawan beragam tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah. Menurut pedoman yang dikeluarkan oleh United Nations Public Administrative Network (UNPAN, 2014), UNPAN rutin mengadakan survei untuk perankingan implementasi *e-government* negara-negara anggota PBB di seluruh dunia. Untuk meranking peringkat *e-government* tersebut, UNPAN menggunakan pedoman yang telah menjadi standar pemeringkatan *e-government* dari tahun ke tahun yang dikenal dengan *E-government Development Index* (EGDI). EGDI terdiri dari tiga (komponen) yang menjadi indikator penilaian yaitu *online service index* (OSI), *telecommunication infrastructure index* (TII), dan *human capital index* (HCI). Ketiga komponen tersebut digunakan sebagai acuan untuk mengetahui sejauh mana tahap pengembangan *e-government* sudah berjalan di setiap negara.

Online service index (OSI) adalah salah satu komponen / indikator yang digunakan untuk mengukur penggunaan ICT oleh pemerintah untuk memberikan layanan publik di level nasional. OSI diukur dari stage *online service delivery* yang terdiri dari :

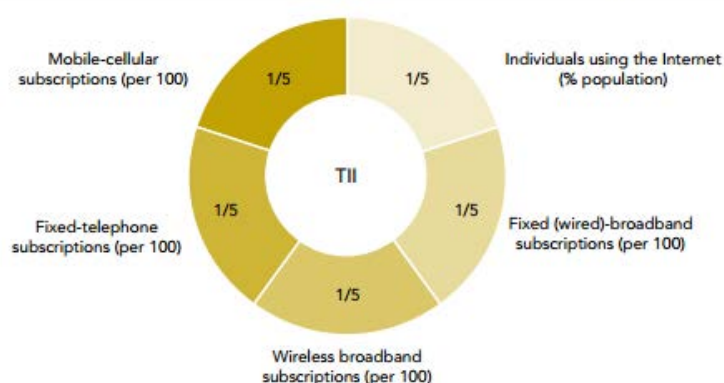
- ***Stage 1: Emerging Presence***

- *Website* pemerintah menyediakan informasi tentang kebijakan/peraturan, dokumentasi dan jenis layanan yang disediakan oleh pemerintah.
- Tersedia *link* ke kementerian/departemen di lingkup pemerintah.
- Warga dapat mengakses arsip pemerintah, termasuk didalamnya laporan-laporan.
- ***Stage 2: Enhanced Presence***
 - *Website* mulai meningkatkan komunikasi *one-way* atau *two-way* yang simpel antara pemerintah dengan warga.
 - *Website* menyediakan formulir atau aplikasi yang dapat diunduh
 - *Website* memiliki fitur audio dan video termasuk didalamnya multi bahasa.
 - Memungkinkan warga dapat mengajukan permohonan form non-elektronik.
- ***Stage 3: Transactional Presence***
 - *Website* pemerintah sudah ready untuk komunikasi two-way.
 - Warga dapat memberi masukan untuk kebijakan pemerintah, program, peraturan, dll.
 - *Website* dapat memproses transaksi non-finansial. Misalnya pengajuan pajak *online*, pengajuan izin, dll.
- ***Stage 4: Connected Presence***
 - Pemerintah mulai mengubah cara berkomunikasi dengan warganya
 - Pemerintah proaktif dalam meminta informasi, masukan dan opini dari warga dengan menggunakan *web 2.0* atau *tools* interaktif lainnya
 - Pemerintah mulai berpindah dari government-centric menuju *citizen-centric* dengan mengoptimalkan layanan *e-service* untuk berkomunikasi dengan seluruh warga.
 - Pemerintah memberdayakan warga untuk dapat terlibat dalam pengambilan keputusan di pemerintahan.

Telecommunication infrastructure index (TII) adalah salah satu komponen/indikator yang digunakan untuk mengukur ketersediaan infrastruktur

ICT sebagai penunjang untuk keberhasilan implementasi *e-government*. TII diukur dari 5 sub-indikator seperti pada gambar 2.1, kelima indikator itu antara lain: (1) jumlah *mobile cellular(handphone)* per 100 penduduk, (2) jumlah telepon tetap (*fixed-telephone*) per 100 penduduk, (3) jumlah *broadband wireless* per 100 penduduk, (4) jumlah *broadband* menggunakan kabel (*fixed broadband*) per 100 penduduk, dan (5) prosentase pengguna internet.

Figure A.2. Telecommunication Infrastructure Index (TII) and its components

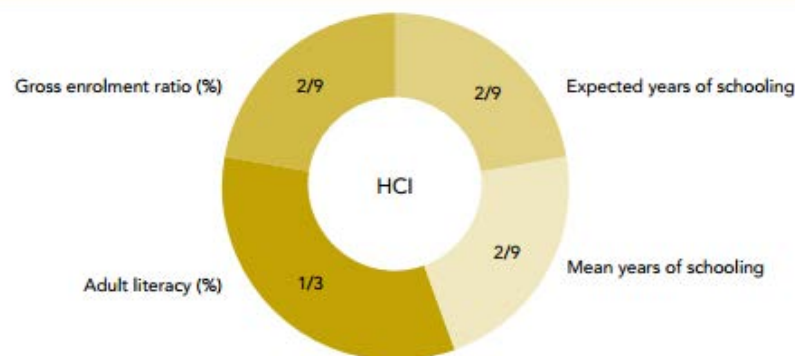


Gambar 2.1 Komponen Telecommunication Infrastructure Index (TII)

(Sumber: UNPAN, 2014)

Indikator yang terakhir yaitu *human capital index* (HCI), yaitu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan pendidikan penduduk di suatu negara. HCI terdiri dari empat (4) sub-indikator seperti pada gambar 2.2, keempat indikator tersebut antara lain: (1) prosentase warga berusia 15 tahun keatas yang dapat membaca, menulis dan berhitung serta memahami pernyataan-pernyataan singkat dalam kehidupan sehari-hari, (2) prosentasi penduduk yang sekolah di tingkat primer, sekunder dan tersier, (3) ekspektasi lama menempuh pendidikan di masing-masing level, dan (4) lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pendidikan, tidak termasuk mengulang (tidak naik kelas).

Figure A.3. Human Capital Index (HCI) and its components



Gambar 2.2 Komponen Human Capital Index (HCI)

(Sumber: UNPAN, 2014)

Menurut International Telecommunication Union (ITU, 2009), *implementasie-government* dapat dibentuk melalui beragam aspek yang membentuknya. ITU telah menetapkan empat dimensi yang menjadi alat ukur *implementasie-government* antara lain: (1) *outreach*, (2) *governance*, (3) *policy*, dan (4) *infrastructure*. Pedoman lain yang dikeluarkan oleh United Nations Department of Economic and Social Affairs (UNDESA) (UNDESA, 2002) menyebutkan bahwa ada beberapa area atau *key factors* yang perlu disiapkan ketika akan mengimplementasikan *e-government* antara lain: (1) *politicalconditions*, (2) *regulatoryframework*, (3) *organizationalconditions*, (4) *culturalandhumanresourcesconditions*, (5) *financialconditions*, (6) *communicationenvironment*, (7) *technologicalinfrastructure* dan (8) *dataandinformationsystems*.

Sementara itu (Nkohkwo & Islam, 2013) dalam penelitiannya menghasilkan beberapa aspek yang harus diperhatikan dan menjadi tantangan bagi pemerintah ketika mengimplementasie-*government* di negara-negara Sub-Saharan Africa (SSA) antara lain: (1) *financial aspects*, (2) *organizational aspects*, (3) *political aspects*, (4) *socio-economic aspects*, (5) *human aspects*, dan (6) *infrastructural aspects*. Ndou(2004) pada penelitiannya tentang analisis tantangan dan manfaat dari *implementasie-government* di negara-negara berkembang menyebutkan setidaknya ada tujuh (7) tantangan yang harus dihadapi

oleh pemerintah ketika mulai mengimplementasie-government antara lain: (1) *ICT infrastructure* meliputi *e-readiness, computer literacy, telecommunication equipment*), (2) *policy issues (legislation)*, (3) *human capital development and life long learning* meliputi *skills, capabilities, education dan learning*, (4) *change management* meliputi budaya dan fleksibilitas untuk menghadapi perubahan, (5) *partnership dan collaboration* meliputi kerjasama dengan pemerintah dan swasta, komunitas dan membangun *network*), (6) strategi meliputi visi dan misi yang jelas, (7) *leadershiprole* meliputi motivasi, dukungan dan pengaruh.

Menurut(Nabafu & Maiga, 2012) pada penelitiannya di pemerintah Uganda, menyebutkan ada beberapa faktor yang harus dipersiapkan oleh pemerintah ketika akan mengimplementasikan *e-government*antara lain: *IT skills* dari pegawai, *social-political* yang meliputi kebijakan dan peraturan dan standarisasi IT, faktor *financial resource* dan faktor infrastruktur ICT. Dari beberapa faktor-faktor yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan seperti pada tabel 2.3 dibawah ini.

Tabel 2.3 Rangkuman Faktor-faktor yang harus dipersiapkan dalam implementasi *e-government*

Referensi	Judul	Penelitian / Pedoman	Variabel
UNPAN (2014)	<i>United Nations E-government Survey 2014</i>	Pedoman	<i>Telecommunication Infrastructure Index, Online Service Index, Human Capital Index</i>
International Telecommunicati on Union (ITU) (2009)	<i>E-government Implementati on Toolkit</i>	Pedoman	<i>Outreach, governance, policy, ICT infrastructure</i>
UNDESA (2002)	<i>Plan of Action E-government for Development</i>	Pedoman	<i>politicalconditions, regulatoryframework, organizationalconditions, culturalandhumanresourcescon ditions, financialconditions, communicationenvironment, technologicalinfrastructure dan dataandinformationsystems.</i>
Nkohkwo dan Islam (2013)	<i>Challenges to the</i>	Penelitian	<i>financial aspects, organizational aspects, political</i>

	<i>Successful Implementation of e-government initiatives in Sub-Saharan Africa</i>		<i>aspects, socio-economic aspects, human aspects dan infrastructural aspects</i>
Ndou (2004)	<i>E-government for developing countries: Opportunities and Challenges</i>	Penelitian	<i>ICT infrastructure, policy issues (legislation), human capital development and life long learning, change management, partnership dan collaboration, strategi, dan leadership role</i>
Nabafu dan Maiga (2012)	<i>A model of success factors for implementing local e-government in Uganda</i>	Penelitian	<i>IT skills, social-political, financial resource, ICT infrastructure</i>

(Sumber: Diolah, 2015)

Berdasarkan referensi yang telah diuraikan diatas, dan disesuaikan dengan kondisi pemerintah daerah di Indonesia maka indikator yang akan digunakan dalam mengukur implementasi *e-government* pada penelitian ini antara lain:

1. **Infrastuktur ICT**
Infrastruktur ICT meliputi: ketersediaan layanan internet, jaringan telekomunikasi, ketersediaan software dan hardware yang mendukung.
2. **Alokasi anggaran IT**
Alokasi anggaran IT meliputi anggaran dan alokasi dana yang jelas untuk implementasi *e-government*.
3. **Jenis aplikasi *e-government***
Jenis aplikasi *e-government* yang dimaksud adalah apakah seluruh aplikasi *e-government* yang ada telah mencakup prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, responsif, dan menjadikan proses birokrasi menjadi efektif dan efisien)

4. Master Plan IT

Master plan IT digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah merencanakan strategi pengembangan *e-government* dalam kurun waktu tertentu.

5. Staff IT

Keberadaan staff IT digunakan untuk pengembangan, pemeliharaan (*maintenance*) dan pelatihan *e-government* di lingkungan pemerintah daerah.

2.1.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good governance*)

2.1.2.1 Definisi *Good governance*

Definisi tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) memiliki beragam pengertian dan konsep, namun maknanya tetap satu yaitu bagaimana kemampuan pemerintah untuk melaksanakan tugas utama sebagai penyedia pelayanan publik terhadap masyarakat dan bisnis dengan efektif dan efisien.

Merujuk pada pengertian *good governance* menurut The World Bank pada tahun 1992 yaitu pemerintahan yang baik yaitu sebuah cara dimana penggunaan kekuasaan dalam manajemen sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan. Selanjutnya menurut Kaufmann et.al dari World Bank (Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi, 2010) mendefinisikan prinsip tata kelola yang baik yaitu pengelolaan pemerintahan yang berorientasi pada prinsip *voice and accountability*, *political stability*, *government effectiveness*, *regulatory quality*, *rule of law* dan *control of corruption*.

Definisi menurut The Urban Governance Initiative (TUGI, 2003) mengenai *good governance* yaitu tata kelola yang baik antara lain kemampuan pemerintah untuk partisipatif, transparan, akuntabel, efektif dan adil dalam pemberlakuan hukum yang berlaku. *Good governance* juga memastikan bagaimana mendengarkan aspirasi/suara dari rakyat miskin sebagai prioritas dalam pengambilan keputusan alokasi sumber daya untuk pembangunan yang didasarkan pada kepentingan tiga stakeholder yaitu sektor swasta, pemerintah, dan masyarakat sipil.

Tata kelola pemerintahan yang baik dapat dijadikan sebagai dasar yang kuat untuk reformasi birokrasi di organisasi khususnya melalui interaksi budaya, intelektual dan teknologi bagi karyawan (Alaaraj & Ibrahim, 2014). Dengan prinsip tata kelola yang baik akan mendorong karyawan untuk menjadi lebih efektif dalam bekerja dan transparan dalam memberikan layanan dengan mengutamakan kualitas pelayanan (Alaaraj & Ibrahim, 2014).

2.1.2.2 Indikator Good governance

Pemerintah dikatakan telah mewujudkan *good governance* ketika sudah mencapai indikator-indikator dari *good governance*. Indikator *good governance* sendiri memiliki beragam variasi. Berikut adalah beberapa pedoman *good governance* yang dapat dijadikan sebagai acuan untuk mengetahui tingkat ketercapaian *good governance* di suatu pemerintah.

Kaufman et.al dari The World Bank (Kaufmann, Kraay, & Mastruzzi, 2010) menetapkan enam (6) indikator *good governance* yang dikenal dengan sebutan Worldwide Governance Indicators (WGI). Indikator tersebut antara lain:

1. *Voice and Accountability* (VA) : sejauh mana masyarakat dapat berpartisipasi/terlibat dalam pemilihan pemerintahan mereka, serta kebebasan berekspresi dan kebebasan media.
2. *Political Stability and Absence of Violence* (PV) : sejauh mana stabilitas keamanan dan kekerasan, stabilitas politik termasuk didalamnya kekerasan bermotif politik dan terorisme.
3. *Government Effectiveness* (GE) : kualitas pelayanan publik, kualitas pelayanan sipil dan tingkat independensi dari unsur politik, kualitas perumusan dan kebijaksanaan dan kredibilitas dan komitmen pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.
4. *Regulatory Quality* (RQ) :kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan yang sehat dan peraturan yang mengizinkan dan mendukung perkembangan usaha sektor swasta
5. *Rule of Law*(RL) : penegakkan kontrak kerja, hak milik antara pemerintah, masyarakat dan agen (swasta). Penegakkan keadilan di polisi dan pengadilan dalam mengatasi kejahatan dan kekerasan

6. *Control of Corruption* : dilihat dari kasus korupsi yang terjadi. Antisipasi dan visi yang jelas untuk menghindari korupsi di lingkup pemerintah.

United Nations Development Program (UNDP) juga mengeluarkan pedoman yang berisi indikator *good governance* yang menggambarkan karakteristik *good governance* seperti dikutip dalam (IFAD, 1999). Indikator tersebut antara lain:

1. *Participation* : keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung
2. *Rule of Law*: kerangka hukum yang adil dan diimplementasikan secara adil tanpa memihak
3. *Transparency* : masyarakat dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik. Contoh: laporan keuangan, pertanggungjawaban dan sebagainya.
4. *Responsiveness* : pemerintah dan lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap melayani stakeholder
5. *Consensus Oriented* : berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas
6. *Equity*: setiap masyarakat memperoleh kesempatan yang sama untuk memperoleh keadilan
7. *Effectiveness and efficiency* : pengelolaan sumber daya dilakukan agar berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif)
8. *Accountability* : pertanggungjawaban kepada publik atas segala kegiatan dan proses yang telah dilakukan oleh pemerintah
9. *Strategic vision* : pemerintah dan masyarakat harus bersama-sama memiliki perspektif jangka panjang yang strategis terhadap pengelolaan pemerintahan yang baik, dna pembangunan jangka panjang.

The African Development Bank (AfDB) mengidentifikasi lima (5) element yang menggambarkan *good governance* seperti dimuat pada (IFAD, 1999) antara lain:

1. *Accountability* : akuntabilitas berfokus pada kemampuan untuk memperhitungkan alokasi dana, penggunaan dan kontrol aset publik sesuai dengan standar. Akuntabilitas juga berarti penegakan aturan tata kelola pemerintah.
2. *Transparency* : kebijakan pemerintah harus dipublikasikan untuk umum.
3. *Combating corruption* : komitmen pemerintah dan aparatur untuk melawan korupsi.
4. *Participation* : partisipasi dari stakeholder untuk turut berpartisipasi dalam pembuatan keputusan oleh pemerintah, sehingga keputusan yang dihasilkan memberikan kekuatan tersendiri karena atas masukan dan partisipasi stakeholder.
5. *Legal and judicial reforms* : pembuatan hukum dan sistem peradilan yang jelas, serta diterapkan secara obyektif dan independen.

Di Indonesia, upaya pemerintah untuk mewujudkan *good governance* sejalan dengan cita-cita perjuangan bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam GBHN 1999-2004 (Keban, 2000). Menurut Yeremias Keban yang juga staff Bappenas, kinerja pemerintahan dapat diukur dari seberapa jauh lembaga dan aparat pemerintahan telah mewujudkan nilai-nilai *good governance* dan secara nyata dirasakan oleh masyarakat. Menurut Keban (2000), ada empat belas (14) prinsip tata kelola pemerintahan yang baik menurut BAPPENAS, yaitu:

1. Visi strategis: apakah pemerintahan yang ada memiliki visi yang jelas, serta misi untuk mewujudkan visi tersebut.
2. Transparansi: apakah pemerintahan yang ada menyediakan informasi ke publik secara terbuka sehingga publik dapat mempertanyakan tentang mengapa suatu keputusan dibuat, atau apa kriteria yang digunakan, sehingga masyarakat publik dapat mengontrol, memonitor lembaga-lembaga publik beserta proses kerjanya.
3. Responsivitas: apakah pemerintahan yang ada cepat tanggap dalam melayani kepentingan dari semua stakeholders
4. Keadilan: apakah pemerintahan yang ada telah memberikan semua orang kesempatan yang sama untuk memperbaiki kesejahteraannya

5. Konsensus: apakah pemerintahan yang ada telah berperan dalam menjembatani berbagai aspirasi guna mencapai persetujuan bersama demi kepentingan masyarakat
6. Efektivitas dan efisiensi: apakah pemerintahan yang ada telah memenuhi kebutuhan dengan memanfaatkan sumber daya dengan cara yang paling baik, atau melalui manajemen sektor publik yang efisien dan efektif.
7. Akuntabilitas: apakah pemerintahan yang ada harus bertanggung jawab kepada publik dalam konteks kinerja lembaga dan aparatnya baik di bidang manajemen, organisasi, maupun di bidang kebijakan publik.
8. Kebebasan berkumpul dan berpartisipasi: apakah pemerintahan yang ada telah memberikan kebebasan kepada rakyatnya untuk berkumpul, berorganisasi, dan berpartisipasi secara aktif dalam menentukan masa depannya.
9. Dukungan aturan dan hukum: apakah pemerintahan yang ada telah menciptakan aturan dan hukum yang membentuk situasi dan kondisi yang aman dan tertib, serta kondusif bagi masyarakat.
10. Demokrasi: apakah pemerintahan yang ada mendorong proses demokrasi di masyarakat.
11. Kerjasama dengan organisasi-organisasi masyarakat: apakah pemerintah yang ada telah bekerjasama atau mengikutsertakan lembaga-lembaga yang ada dalam masyarakat dalam memecahkan masalah dan memberikan pelayanan publik.
12. Komitmen pada pasar: apakah pemerintahan yang ada mendorong kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada pasar.
13. Komitmen pada lingkungan: apakah pemerintahan yang ada memperhatikan masalah-masalah yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan.
14. Desentralisasi: apakah pemerintahan yang ada telah mengembangkan dan memberdayakan unit-unit kelembagaan lokal agar dapat mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan dan situasi lokal.

Dari beberapa indikator *good governance* yang telah diuraikan diatas dapat disimpulkan seperti pada tabel 2.4 dibawah ini.

Tabel 2.4 Rangkuman indikator *good governance*

Referensi	Indikator
The World Bank (2010)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Voice and accountability</i> 2. <i>Political stability</i> 3. <i>Government effectiveness</i> 4. <i>Regulatory quality</i> 5. <i>Rule of law</i> 6. <i>Control of corruption</i>
United Nations Development Program (UNDP)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Participation</i> 2. <i>Rule of law</i> 3. <i>Transparency</i> 4. <i>Responsiveness</i> 5. <i>Consensus oriented</i> 6. <i>Equity</i> 7. <i>Effectiveness and efficiency</i> 8. <i>Accountability</i> 9. <i>Strategic vision</i>
The African Development Bank (AfDB)	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Accountability</i> 2. <i>Transparency</i> 3. <i>Combating corruption</i> 4. <i>Participation</i> 5. <i>Legal and judicial reforms</i>
Badan Perencanaan Pembangunan Republik Indonesia (BAPPENAS)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Visi strategis 2. Transparansi 3. Responsivitas 4. Keadilan 5. Konsensu 6. Efektivitas dan efisiensi 7. Akuntabilitas 8. Kebebasan berpartisipasi 9. Dukungan aturan dan hukum 10. Demokrasi 11. Kerjasama dengan organisasi masyarakat 12. Komitmen pada pasar (bisnis) 13. Komitmen pada lingkungan 14. Desentralisasi

(Sumber: Diolah, 2015)

Berdasarkan beberapa referensi indikator *good governance* yang telah diuraikan diatas, disesuaikan dengan konteks pemerintah daerah (level lokal), dan

disesuaikan dengan topik penelitian ini, maka indikator *good governance* yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Transparansi

Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan pemerintah untuk memberikan informasi (peraturan, laporan, data-data keuangan, dan lain-lain) yang dibutuhkan oleh *stakeholders* (masyarakat dan sektor bisnis).

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas yang dimaksud adalah pertanggung jawaban dari pemerintah kepada *stakeholders* terkait kinerja lembaga baik di bidang manajemen, organisasi dan pelayanan publik.

3. Kualitas Regulasi

Kualitas regulasi yaitu bagaimana kebijakan / peraturan yang dibuat oleh pemerintah mendukung sektor bisnis, tidak memberatkan masyarakat, dan juga menciptakan iklim yang tertib dan kondusif di lingkungan *stakeholders*.

4. Penegakan Hukum dan Kebijakan

Penegakan hukum dan kebijakan yaitu perumusan hingga pelaksanaan kerangka hukum dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah secara adil, dan diterapkan secara obyektif dan independen tanpa berpihak pada satu kelompok atau golongan.

5. Responsif

Responsif yang dimaksud adalah kemampuan pemerintah untuk cepat dan tanggap dalam melayani kepentingan dari semua *stakeholders*. Responsif disini juga diartikan sebagai keterbukaan pemerintah terhadap masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari *stakeholders*.

6. Efektifitas dan Efisiensi

Kemampuan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dengan cara yang paling baik (efisien) sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif.

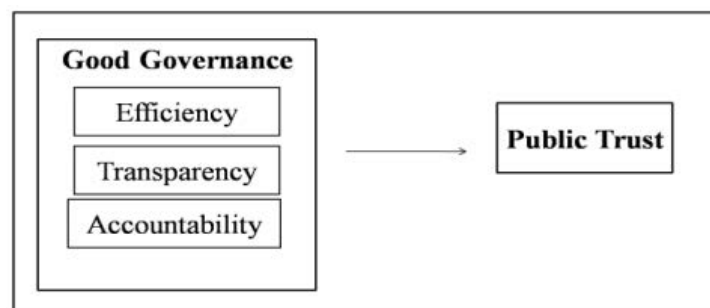
2.1.2.3 Manfaat Good governance

Manfaat dari terwujudnya *good governance* bagi pemerintah sangat banyak. Ada beberapa penelitian yang membahas manfaat yang dirasakan bagi pemerintah ketika mewujudkan *good governance*.

Penelitian yang dilakukan oleh (Saidi, Ochi, & Ghadri, 2013), menguji pengaruh aspek *good governance* dan kondisi ekonomi terhadap meningkatnya *foreign direct investment* (FDI). Indikator dari *good governance* yang digunakan yaitu PSAV (*political stability*), RQUAL (*regulatory quality*), ETAT (*the rule of law*), VA (*voice and accountability*), CBRT (*corruption and bureucratic red tape*), GEFF (*governmenteffectiveness*), dan indikator kondisi ekonomi yang terdiri dari RINF (*inflation rate*), BPCA (*balance of payments current account*), GDPG (*GDP growth rate*), OPEN (*opennes of the economy*) dan INFR (*infrastructure index*). Penelitian dilakukan di 10 negara berkembang dan 10 negara maju selama periode 1998-2010. Hasilnya adalah hanya dua indikator *good governance* yaitu *political stability* (PSAV) dan *regulatory quality* (RQUAL) yang terbukti berpengaruh terhadap FDI di seluruh sampel (negara berkembang dan negara maju). Selanjutnya spesifik di sampel 10 negara berkembang ditemukan hanya satu indikator yaitu *regulatory quality* (RQUAL) yang berpengaruh signifikan, sedangkan pada 10 negara maju ditemukan empat indikator yang berpengaruh signifikan terhadap FDI yaitu PSAV, RQUAL, CBRT dan GEFF. Kesimpulan dari penelitian ini membuktikan bahwa *good governance* menjadi daya tarik tersendiri untuk menarik FDI di sebuah negara.

Sri Fadilah (Fadilah, 2013) dalam penelitiannyayang berjudul *The Influence of Good governance Implementation to Organization Performance: Case Study on Institution Amil Zakat Indonesia*, meneliti dampak dari implementasi *good governance* terhadap kinerja organisasi. Pada penelitian tersebut, peneliti menguji pengaruh implementasi *good governance* terhadap peningkatan kinerja organisasi. Hasil penelitiannya membuktikan bahwa *good governance* memiliki efek yang signifikan terhadap kinerja organisasi. Dengan terwujudnya *good governance*, maka kinerja organisasi akan semakin meningkat.

Penelitian selanjutnya yang memberikan fakta manfaat dari *good governance* yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hassan Alaaraj dan Fatimah Ibrahim terkait dampak *good governance* terhadap peningkatan kepercayaan publik (public trust) (Alaaraj & Ibrahim, 2014). Peneliti mengambil studi kasus di pemerintah Lebanon untuk membuktikan secara empiris praktek *good governance* di Lebanon apakah meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah atau tidak. Peneliti menggunakan tiga (3) indikator *good governance* yaitu efisiensi, transparansi dan akuntabilitas seperti pada gambar 2.3.



Gambar 2.3 Model Konseptual Penelitian Alaaraj dan Ibrahim (2014)

(Sumber: Alaaraj & Ibrahim, 2014)

Hasil penelitiannya membuktikan bahwa ketiga variabel *efficiency*, *transparency*, dan *accountability* berpengaruh signifikan terhadap kepuasan publik (*public trust*). Dapat diartikan bahwa semakin baik pengelolaan pemerintahan maka kepuasan publik juga akan semakin meningkat.

2.1.3 Penanaman Modal

2.1.3.1 Definisi Penanaman Modal

Definisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan. Menurut UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal didefinisikan sebagai bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Definisi yang sama

dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melalui Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No.5 Tahun 2013 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan penanaman modal, dimana disebutkan bahwa penanaman modal adalah sebagai bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia.

Tujuan pengeluaran untuk investasi adalah pembelian barang-barang yang memberi harapan menghasilkan keuntungan di masa yang akan datang (Sitompul, 2007). Kegiatan investasi dapat dilakukan oleh pemerintah maupun swasta.

2.1.3.2 Jenis Penanaman Modal

Menurut UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan dipertegas lagi melalui Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No.5 Tahun 2013 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan penanaman modal, disebutkan penanaman modal di Republik Indonesia terbagi menjadi dua yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) atau *Domestic Direct Investment* (DDI) dan Penanaman Modal Asing (PMA) atau disebut juga *Foreign Direct Investment* (FDI).

2.1.3.3 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Menurut UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan dipertegas lagi melalui Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No.5 Tahun 2013 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan penanaman modal, penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.

Penanam modal dalam negeri adalah perseorangan warga negara Indonesia, badan usaha Indonesia, negara Republik Indonesia atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan modal dalam negeri adalah modal yang dimiliki oleh negara Republik Indonesia,

perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.

2.1.3.4 Penanaman Modal Asing (PMA)

Menurut UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan dipertegas lagi melalui Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia No.5 Tahun 2013 tentang pedoman dan tata cara perizinan dan non perizinan penanaman modal, penanaman modal asing (PMA) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam negeri.

Penanam modal asing adalah perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, dan atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di wilayah negara Republik Indonesia. Sedangkan modal asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.

2.1.3.5 Faktor yang Mempengaruhi Investasi

Meningkatnya nilai investasi tidak lepas dari peran daya tarik investasi yang memikat hati para investor, baik investor dalam negeri maupun investor asing (KPPOD, 2004). Menurut Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) KPPOD(2004), pembentukan daya tarik investasi berlangsung secara terus menerus dan dipengaruhi oleh banyak aspek. Pemilihan lokasi investasi muncul karena persepsi investor terhadap lokasi investasi cukup baik dan lokasi tersebut memiliki daya tarik investasi (UNIDO, 2003).

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masuknya investasi di sebuah daerah atau negara. Danciu & Strat (2014) dalam penelitiannya mengatakan bahwa beberapa faktor yang mempengaruhi investor melakukan investasi di wilayah tertentu antara lain: *labor factor*, *infrastructure factor*, *cost factor*, *market size factor*, *knowledge factor* dan *market size factor*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Villaverde & Maza (2012) mengusulkan beberapa faktor yang mempengaruhi

foreign direct investment (FDI) antara lain potensial ekonomi, kondisi tenaga kerja, daya saing dan ukuran pasar. Setelah dilakukan penelitian menunjukkan faktor potensial ekonomi, kondisi tenaga kerja dan daya saing memiliki pengaruh positif terhadap FDI, sedangkan ukuran pasar tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap FDI.

Penelitian serupa dilakukan oleh Kazmi & Manarvi (2009), hasil penelitiannya menyebutkan ada empat faktor yang mempengaruhi daya tarik investasi asing antara lain, peraturan pemerintah, SDM, kualitas infrastruktur dan profil perusahaan. Berdasarkan standarisasi Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Tahun 2004 telah menetapkan faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik investasi di daerah atau kabupaten di Indonesia yaitu faktor kelembagaan, sosial politik, ekonomi daerah, tenaga kerja dan produktivitas dan infrastruktur fisik.

Beberapa faktor-faktor yang disebutkan diatas merupakan faktor non-IT yang dapat mempengaruhi masuknya investasi. Namun, seiring dengan berkembangnya teknologi yang semakin canggih, keputusan investor untuk melakukan investasi di suatu negara juga dipengaruhi oleh kemampuan *Information, Communication and Technology* (ICT) khususnya *e-government* negara tuan rumah (*host country*) (Addison & Heshmati, 2003; Al-Azzam & Abu-Shanab, 2014; Alshehri & Drew, 2010; Azubuike, 2006; Buss & Karkowski, 2005; DeBenedicts, et.al, 2002; Economou, 2008; Kachwamba, 2011; Loibl & Hira, 2009; Torre & Moxon, 2001).

Pemerintah semakin gencar menerapkan *e-government* sebagai alat untuk mengurangi biaya informasi yang harus dikeluarkan oleh investor asing (Kachwamba, 2011). Pernyataan itu dapat dijadikan sebagai solusi dari fakta yang dibuat oleh (UNIDO, 2003) dalam surveynya menyebutkan bahwa 75% investor asing pada saat sebelum investasi (*pre-investment*) membutuhkan beberapa informasi antara lain: (1) informasi tentang pajak dan insentif, (2) informasi prosedur penanaman modal, termasuk regulasi tentang tenaga kerja, (3) informasi tentang iklim investasi seperti stabilitas politik dan perekonomian, (4) informasi tentang harga properti, material dan upah tenaga kerja, dan terakhir adalah informasi tentang tarif dan regulasi ekspor dan impor. Menurut Kachwamba

(2011), dua alasan mengapa negara-negara berlomba untuk mengembangkan *e-government*. Pertama, dengan menggunakan *e-government* menunjukkan reformasi kelembagaan untuk menarik minat investor asing. Kedua, sebagai respon terhadap daya saing yang tinggi antar negara terkait daya tarik investasi asing. Dalam pencarian lokasi pra-investasi sebagian besar investor asing mencari informasi tentang persiapan bisnisnya meliputi izin yang dibutuhkan, prosedur lisensi bisnis, peraturan tenaga kerja, informasi iklim investasi politik termasuk hukum dan kestabilan politik, biaya tenaga kerja dan biaya properti (Kotler & Gertner 2002; UNIDO, 2003).

Menurut Azubuike(2006), terdapat lima alasan mengapa *e-government* dapat membantu calon investor dalam mengambil keputusan sebelum melakukan FDI antara lain: (1) akan meningkatkan pengetahuan investor terkait lingkungan (target) termasuk perekonomian target, (2) akan mengurangi ketidakpastian tentang kemungkinan perubahan peraturan dan administrasi di lingkungan bisnis, (3) meningkatkan transparansi transaksi yang melibatkan pejabat pemerintah maupun non pemerintah, (4) berkontribusi untuk menciptakan image negara dan mempengaruhi persepsi investor, (5) memberikan kontribusi data dan perspektif tentang bagaimana proyek investasi dapat diimplementasi dan dikelola.

Implementasi *e-government* akan membawa dampak pada reformasi birokrasi pemerintahan yang lebih baik (Al-Azzam & Abu-Shanab, 2014; Lau, 2005). Peningkatan efisiensi birokrasi (Al-Azzam & Abu-Shanab, 2014), menurunnya angka korupsi (Al-Azzam & Abu-Shanab, 2014), meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pemerintah (Mucavele, 2003; NOIE, 2003; OECD, 2009) merupakan beberapa benefit yang diperoleh dari implementasi *e-government*. Ketika sebuah pemerintahan mulai mengimplementasie-*government*, maka pada saat yang bersamaan pemerintahan tersebut sedang menuju tercapainya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dengan tata kelola pemerintahan yang baik dan iklim ekonomi yang baik akan meningkatkan FDI maupun investasi domestik / lokal (Mucavele, 2003; Al-Azzam & Abu-Shanab, 2014). *Good governance* adalah salah satu faktor penting untuk mempromosikan FDI dimana meliputi efisiensi administrasi publik, regulasi yang efisien, tingkat korupsi yang rendah dan transparansi di lingkungan pemerintahan (idm).

2.1.3.6 Indikator Peningkatan Nilai Investasi

Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), melalui laporan setiap quarter perkembangan realisasi investasi di Indonesia, peningkatan nilai investasi suatu daerah dapat dilihat dari jumlah proyek dan nilai investasi (dalam rupiah) itu sendiri. Peningkatan investasi dapat mendorong perkembangan dunia usaha dan terciptanya kesempatan kerja, sehingga dengan investasi akan menyerap banyak tenaga kerja (Salim, 2011).

Salah satu contoh daerah yang mengalami peningkatan investasi adalah Kabupaten Banyuwangi. Pada tahun 2013 dan 2014, Kabupaten Banyuwangi memperoleh penghargaan *Investment Award* dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai penyelenggara pelayanan satu pintu terbaik dua tahun berturut-turut (Banyuwangi, 2015). Pada tahun 2013, Kabupaten Banyuwangi juga memperoleh penghargaan *Investment Award* 2013 Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana pelayanan penanaman modal di bidang promosi investasi terbaik kesatu tahun 2013 (Banyuwangi, 2015). Pada tahun 2013, nilai investasi di Kabupaten Banyuwangi mencapai Rp. 3,2 triliun, angka ini meningkat 175% dari nilai investasi tahun 2012 sebesar Rp. 1,1 triliun (Hidayat, 2014; Jajeli, 2014; Kusbiantoro, 2014). Di tahun 2014, naik 1,7 persen atau meningkat menjadi Rp. 3,44 triliun dan hingga awal maret 2015 investasi yang sudah masuk di level Rp. 586,57 miliar (Andriansyah, 2015). Menurut Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar anas seperti dimuat oleh Andriansyah (2015), peningkatan investasi ini mampu mendorong kesejahteraan masyarakat, terbukti dengan pendapatan per kapita yang naik tajam 70 persen dari Rp. 14,97 juta pada 2010 menjadi Rp. 25,5 juta di 2014. Sedangkan PDRB naik tajam 71 persen dari Rp. 23,56 triliun pada 2010 menjadi Rp. 40,48 triliun pada 2014

2.1.4 Penelitian Kualitatif

2.1.4.1 Definisi dan Karakteristik

Penelitian kualitatif memiliki definisi yang beragam dari para ahli. Metode kualitatif adalah suatu metode penelitian yang memiliki istilah yang luas dan dapat diterapkan untuk berbagai pendekatan penelitian yang memiliki teori asal

usul dalam berbagai disiplin ilmu seperti, antropologi, sosiologi, filsafat, psikologi sosial dan linguistik (Moriarty, 2011). Menurut Hancock, et.al, (2009) penelitian kualitatif berkaitan dengan mengembangkan fenomena sosial yang sedang terjadi. Hal ini bertujuan untuk membantu pemahaman dunia sosial dimana manusia hidup dan berinteraksi dengan sosial. Sedangkan menurut (Sugiyono, 2014), metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.

Karakteristik penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Biklen (1982) dalam (Sugiyono, 2014) antara lain: (1) penelitian dilakukan langsung kepada sumber data, dimana peneliti adalah instrumen kunci, (2) penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif. data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka, (3) lebih menekankan pada proses daripada produk atau *outcome*, (4) penelitian kualitatif melakukan analisis data secara induktif, (5) penelitian kualitatif lebih menekankan makna (data dibalik yang teramati). Selanjutnya (Moriarty, 2011) dalam bukunya yang berjudul *Qualitative Methods Overview* menyebutkan setidaknya ada lima (5) karakteristik utama dari penelitian kualitatif yaitu:

1. Tujuan diarahkan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan penafsiran tentang sosial, pengalaman, perspektif dan cerita sejarah dari partisipan.
2. Jumlah sampel yang kecil dan dipilih berdasarkan kriteria yang paling menonjol dan mampu untuk memberikan informasi secara mendalam.
3. Metode pengumpulan data biasanya melibatkan kontak erat antara peneliti dengan partisipan secara interaktif dan dimungkinkan pengembangan eksplorasi terhadap masalah-masalah yang muncul.
4. Data sangat detail, informasi yang luas. Analisis digunakan untuk membuka ide-ide yang muncul dan dapat menghasilkan deskripsi rinci dan klasifikasi, mengidentifikasi pola hubungan atau mengembangkan tipologi atau penjelasan.

5. Output cenderung berfokus pada interpretasi makna sosial melalui pemetaan (mapping) dan menjelaskan ulang dunia sosial dari partisipan.

2.1.4.2 Tipe Pendekatan Kualitatif

Menurut Moriarty (2011), ada lima (5) pendekatan penelitian kualitatif yang dirangkum dari beberapa ahli antara lain: *grounded theory*, *case studies*, *conversation analysis*, *ethnography* dan *life history and narrative approaches*. Sedangkan menurut Hancock et.al(2009), beberapa tipe pendekatan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif antara lain: *ethnography*, *grounded theory*, *interpretative phenomenological analysis*, *discourse analysis*, *conversation analysis*, *content analysis*, dan *narrative analysis*. Tabel 2.5 dibawah ini merupakan rangkuman dari definisi dan implikasi pengumpulan data dari beberapa pendekatan penelitian kualitatif yang diolah dari berbagai sumber.

Tabel 2.5 Tipe Pendekatan Kualitatif

Tipe Pendekatan	Definisi / Tujuan	Implikasi Pengumpulan Data
<i>Phenomenology</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus terhadap pengalaman individu dan persepsi 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan dan observasi bertujuan untuk menggali persepsi dan pengalaman individu • Wawancara yang mendalam dan focus group adalah metode yang ideal untuk mengumpulkan data fenomenologis.
<i>Ethnography</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Cenderung kepada permasalahan budaya/ sejarah 	<ul style="list-style-type: none"> • Pertanyaan dan observasi umumnya terkait dengan proses sosial dan budaya • Pengamatan partisipan adalah metode yang cocok untuk pendekatan ethnography
<i>Grounded Theory</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data bersifat induktif dan metode analisis • Membangun teori dari analisis data yang dilakukan secara sistematis 	<ul style="list-style-type: none"> • Wawancara yang mendalam dan focus group adalah metode yang ideal untuk mengumpulkan data Grounded Theory • Ukuran sampel lebih sedikit, karena proses analisis lebih intens dan memakan waktu

	dan lengkap	
<i>CaseStudies</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Analisis dari satu atau beberapa kasus yang sesuai dengan topik penelitian • Analisis terutama fokus untuk mengeksplor studi kasus 	<ul style="list-style-type: none"> • Obyek (kasus) yang dipilih adalah yang berkualitas • Pertanyaan dan pengamatan fokus pada penggalian informasi secara mendalam terkait topik
<i>Narrative Analysis</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Narasi (storytelling) digunakan sebagai sumber data • Narasi dapat dari beberapa sumber (wawancara, literatur, surat, buku harian) 	<ul style="list-style-type: none"> • Jika menghasilkan narasi melalui wawancara yang mendalam, maka pertanyaan harus difokuskan untuk memunculkan cerita serta pentingnya cerita. Juga memungkinkan untuk menemukan makna yang lebih luas.

(Sumber: Diolah, 2015)

2.1.4.3 Pendekatan Studi Kasus

Diantara beberapa pendekatan penelitian kualitatif yang ada, salah satunya yaitu pendekatan studi kasus. Yin(2003) mengatakan bahwa studi kasus adalah salah satu metode pendekatan pada penelitian ilmu-ilmu sosial dimana secara umum pendekatan tersebut lebih sesuai apabila pokok pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan ”bagaimana” atau ”mengapa”. Pendapat lain mengenai studi kasus menurut Nasution (2007) yaitu, studi kasus adalah bentuk penelitian yang mendalam tentang suatu aspek lingkungan sosial termasuk manusia di dalamnya. Studi kasus dapat dilakukan terhadap individu, sekelompok manusia, lingkungan hidup manusia, dan lain sebagainya. Fokus studi kasus adalah spesifikasi kasus dalam suatu kejadian baik itu yang mencakup individu, kelompok budaya ataupun suatu potret kehidupan.

Lebih lanjut Yin(2003) juga mengatakan penelitian studi kasus adalah sebuah metode penelitian yang secara khusus menyelidiki fenomena kontemporer yang terdapat dalam konteks kehidupan nyata, yang dilaksanakan ketika batasan-batasan antara fenomena dan konteksnya belum jelas dengan menggunakan berbagai sumber data. Obyek yang dapat diangkat sebagai kasus bersifat

kontemporer, yaitu yang sedang berlangsung atau telah berlangsung tetapi masih menyisakan dampak dan pengaruh yang luas, kuat atau khusus pada saat penelitian dilakukan (Yin, 2003). Creswell (2015) mengemukakan beberapa karakteristik dari suatu studi kasus yaitu: (1) mengidentifikasi kasus untuk suatu studi; (2) kasus tersebut merupakan sebuah sistem yang terikat oleh waktu dan tempat; (3) studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam pengumpulan datanya untuk memberikan gambaran secara rinci dan mendalam tentang respon dari suatu peristiwa dan (4) dengan menggunakan pendekatan studi kasus, peneliti akan membutuhkan waktu yang cukup banyak dalam menggambarkan konteks untuk suatu kasus.

2.1.4.4 Tipe Pendekatan Studi Kasus

Yin (2015) mengatakan penelitian studi kasus terdiri dari sebuah kasus tunggal (*a single-case study*) atau dua atau lebih kasus (*a multiple-case study*). Pemilihan dari kedua tipe di atas ditentukan dengan kondisi alamiah kasus yang akan diteliti. Penelitian studi kasus tunggal (*single-case study research*) adalah penelitian yang menempatkan sebuah kasus sebagai fokus penelitian (Yin, 2003). Sedangkan penelitian studi kasus jamak (*multiple-case study research*) yaitu penelitian yang menggunakan lebih dari satu kasus (Yin, 2003).

Pemilihan penggunaan *single-case* atau *multiple-case* memiliki beberapa alasan yang dapat disesuaikan dengan kondisi penelitian. Yin (2003) menjelaskan setidaknya terdapat 5 (lima) alasan pemilihan *single-case* dalam penelitian studi kasus antara lain:

1. Kasus yang dipilih dapat menjadi bukti dari teori yang telah dibangun. Teori yang dibangun memiliki proposisi yang jelas, sesuai dengan kasus tunggal yang dipilih sehingga dapat dipergunakan untuk membuktikan kebenarannya.
2. Kasus yang dipilih merupakan kasus yang unik. Kasus tersebut dapat berupa kejadian, keadaan, program, atau kegiatan yang jarang terjadi sehingga layak untuk diteliti sebagai suatu kasus.
3. Kasus yang dipilih merupakan kasus tipikal (*typical case*) atau perwakilan dari kasus lain yang sama. Pemilihan satu kasus dengan maksud untuk

lebih menghemat waktu dan biaya. Namun kasus dipandang mampu merepresentasikan dari kasus lainnya.

4. Kasus dipilih karena peneliti memiliki kesempatan khusus terhadap akses penelitian. Tanpa adanya kesempatan tersebut, peneliti mungkin tidak memiliki akses untuk melakukan penelitian terhadap kasus tersebut.
5. Kasus dipilih karena bersifat longitudinal, yaitu terjadi dalam dua atau lebih periode waktu yang berlainan. Kasus yang demikian sangat tepat untuk penelitian yang dimaksudkan untuk membuktikan terjadinya perubahan pada suatu kasus akibat berjalannya waktu.

2.1.4.5 Analisis Data Penelitian Kualitatif

Tahapan analisis data penelitian kualitatif merupakan rangkaian tahapan yang dilalui oleh peneliti mulai dari analisis data sebelum di lapangan hingga akhir menghasilkan kesimpulan yang menjawab rumusan masalah penelitian. Pada penelitian ini, peneliti akan menggunakan 3 tahap analisis data yaitu terdiri dari analisis saat pengumpulan data, analisis setelah pengumpulan data, dan terakhir adalah analisis data studi kasus.

a. Analisis Saat Pengumpulan Data

Terkait dengan analisis data pada saat di lapangan, peneliti menggunakan beberapa saran dari Bogdan dan Biken (1998), Glesne dan Peshkin (1992) dan Mantja (2007) seperti yang dimuat pada Ulfatin(2015) sebagai berikut

1. Mengupayakan untuk mempersempit bidang kajian.
2. Membuat ringkasan data sementara dan merencanakan pengumpulan data berikutnya
3. Menulis sebanyak-banyaknya deskripsi / informasi dari lapangan
4. Menulis “memo” untuk diri sendiri tentang sesuatu yang harus dipelajari atau apa yang segera dilakukan oleh peneliti.
5. Mencoba mengungkap gagasan-gagasan dan tema-tema dalam pokok persoalan.
6. Mengkaji sumber kepustakaan sementara peneliti di lapangan penelitian.
7. Bermain kata dengan menggunakan analogi.

8. Menggunakan alat-alat perlengkapan visual

b. Analisis Data Studi Kasus

Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan teknik analisis data studi kasus. Teknik analisis data studi kasus dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan, disamping melakukan analisis data mengacu pada Miles dan Huberman (1994), peneliti juga melakukan analisis data studi kasus mengacu pada Yin (2003). Tiga (3) teknik analisis studi kasus menurut Yin (2003) antara lain:

1. Menjodohkan Pola

Penjodohan pola dilakukan dengan membandingkan pola yang didasarkan atas data di lapangan dan pola yang didasarkan atas kajian teori sebelum pengumpulan data. Jika keduanya terjadi kesamaan, maka hasilnya akan menguatkan validitas internal studi kasus.

2. Membuat Eksplanasi

Tujuan pembuatan eksplanasi yaitu untuk membuat kejelasan kasus yang sedang diteliti. Pembuatan eksplanasi dilakukan dengan cara:

- a. Membuat penjelsan naratif secara berurutan dari pertama sampai dengan akhir.
- b. Serangkaian pengulangan eksplanasi yang dilakukan dengan:
 1. Membuat suatu pernyataan teoritis atau proposisi awal
 2. Membandingkan temuan kasus awal dengan pernyataan prososisi awal
 3. Memperbaiki pernyataan teoritis atau proposisi
 4. Membandingkan temuan kasus lebih lanjut untuk memperbaiki proposisi
 5. Memperbaiki kembali proposisi
 6. Begitu seterusnya hingga temuan-temuan telah ditemukan secara lengkap dan dirasa cukup oleh peneliti.

3. Analisis Deret Waktu

Analisis deret waktu ini dilakukan dengan mengikuti pola prosedural suatu tindakan. Deret waktu dapat terjadi dengan berpasangan antara

kecenderungan butir-butir dibandingkan dengan kecenderungan teoritis. Pada penelitian ini akan digunakan jenis deret waktu sederhana, karena penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal yang hanya melibatkan fenomena tunggal saja.

2.1.4.6 Pengecekan Keabsahan Data Kualitatif

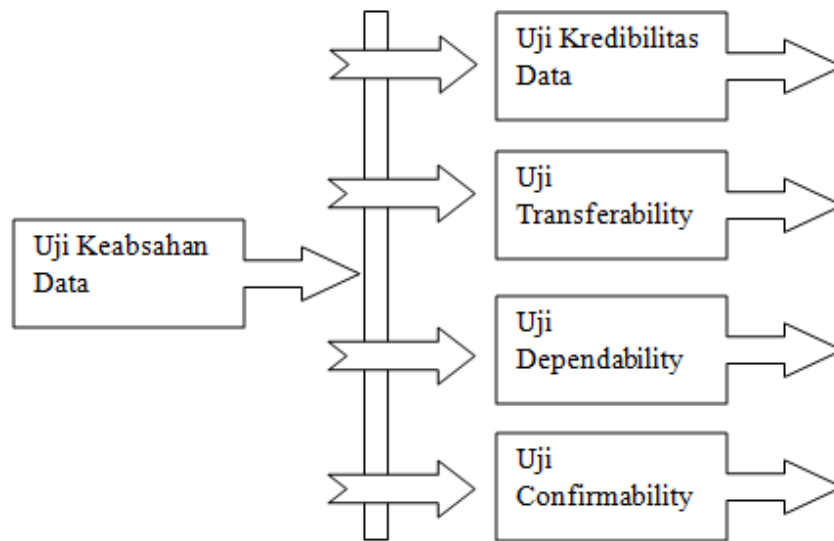
Menurut Sugiyono(2014), uji keabsahan data dalam penelitian, sering ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Dalam penelitian kuantitatif, kriteria utama terhadap data hasil penelitian adalah, valid, reliabel dan obyektif. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian. Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda dengan penelitian kuantitatif. Perbedaan tersebut akan dijelaskan pada tabel 2.6 sebagai berikut :

Tabel 2.6 Perbedaan Metode Penelitian Kualitatif dan Penelitian Kuantitatif

Aspek	Metode Kualitatif	Metode Kuantitatif
Nilai Kebenaran	Validitas Internal	Kredibilitas
Penerapan	Validitas Eksternal (generalisasi)	Transferability
Konsistensi	Reliabilitas	Auditability Dependability
Naturalitas	Obyektivitas	Confirmability

(Sumber : Sugiyono, 2014)

Menurut Sugiyono(2014), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (kredibilitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas) seperti pada gambar 2.4 dibawah ini.



Gambar 2.4 Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif
(Sumber: Sugiyono, 2014)

1. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas dapat dilakukan dengan melakukan beberapa kegiatan antara lain:

1.1 Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dilakukan untuk melakukan pengamatan wawancara lagi dengan informan. Dengan perpanjangan pengamatan, maka hubungan antara peneliti dengan informan akan semakin akrab (tidak ada jarak, tidak ada kecanggungan lagi), semakin terbuka sehingga tujuan akhirnya adalah tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Untuk pengujian kredibilitas dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti fokus pada pengujian kebenaran dan kesesuaian antara data yang diperoleh saat awal bertemu dengan data setelah perpanjangan apakah berubah atau tidak.

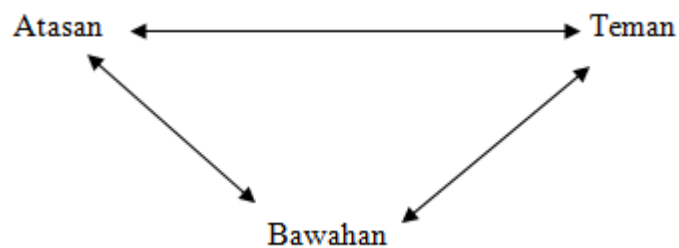
1.2 Peningkatan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan dalam uji kredibilitas penelitian kualitatif sangat diperlukan. Dengan meningkatkan ketekunan, maka peneliti akan melakukan pengamatan lebih cermat. Cara yang dapat dilakukan yaitu dengan mengecek kembali instrumen wawancara apakah ada yang salah atau tidak dalam kesesuaian

dengan tujuan instrumen, selain itu peneliti juga dapat mengecek kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak.

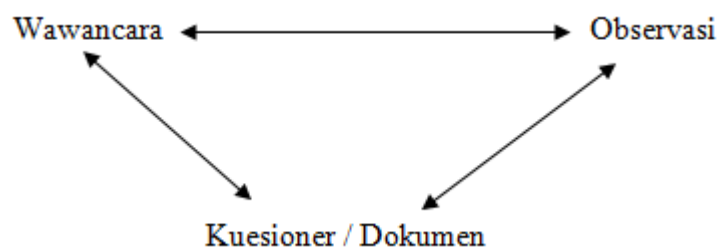
1.3 Triangulasi

Triangulasi dalam uji kredibilitas dapat diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Menurut Sugiyono (2014), ada tiga jenis triangulasi yang digunakan dalam uji kredibilitas seperti pada gambar 2.5 hingga 2.7.



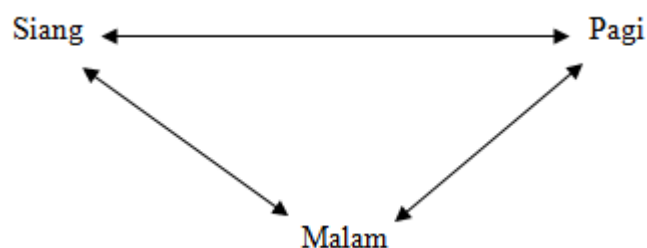
Gambar 2.5 Triangulasi sumber data

(Sumber: Sugiyono, 2014)



Gambar 2.6 Triangulasi teknik pengumpulan data

(Sumber: Sugiyono, 2014)



Gambar 2.7 Triangulasi waktu pengumpulan data

(Sumber: Sugiyono, 2014)

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Sumber yang dimaksud dapat berupa bawahan, atasan, dan teman.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuisioner.

c. Triangulasi Waktu

Triangulasi waktu dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari, belum banyak masalah, sehingga lebih valid.

1.4 Analisis Kasus Negatif

Kasus negatif adalah kasus yang tidak sesuai atau berbeda dengan hasil penelitian hingga pada saat tertentu. Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan.

1.5 Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara.

1.6 Mengadakan *Member Checking*

Member Checking adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada informan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh informan. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para informan berarti data tersebut valid. Pelaksanaan *member check* dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan atau kesimpulan.

2. Uji *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Peneliti harus membuat

laporannya dengan memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya sehingga pembaca menjadi jelas dengan hasil penelitian tersebut.

3. Uji *Dependability*

Uji *dependability* (reliabilitas) dilakukan untuk mengaudit data yang telah diperoleh di lapangan merupakan data yang valid. Uji *dependability* dapat dilakukan oleh auditor yang independen atau pembimbing untuk mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti dalam melakukan penelitian.

4. Uji *Confirmability*

Sebuah penelitian dikatakan obyektif apabila hasil penelitiannya telah terkonfirmasi atau disepakati oleh banyak orang. Uji *confirmability* dapat dilakukan bersamaan dengan uji *dependability*. Uji *confirmability* dapat dilakukan dengan mengaudit proses-proses yang menjadi tahapan selama penelitian apakah telah dilakukan sesuai standar yang berlaku.

2.2 Kajian Penelitian Terdahulu

2.2.1 *E-government: The Gate for Attracting Foreign Investments.* (Al-Azzam dan Abu Shanab, 2014)

Al-Azzam dan Abu-Shanab pada tahun 2014 melakukan penelitian untuk menganalisis hubungan antara pengembangan *e-government* terhadap investasi asing atau disebut *foreign direct investment* (FDI). Untuk mengukur FDI digunakan sebuah variabel yaitu *Global Opportunity Index* (GOI), sedangkan untuk *e-government* peneliti menggunakan model pengukuran *e-government* dari UNPAN yang dikenal dengan *E-government Readiness Index* (EGRI yang terdiri dari tiga (3) dimensi yaitu *web measure index* atau disebut juga *online service index*, *telecommunication infrastructure index* dan *human capital index*, dan ditambah satu dimensi yaitu *e-participation*.

Tujuan dari penelitian ini yaitu peneliti ingin mengetahui hubungan antara kesiapan atau kesediaan (*readiness*) pengembangan *e-government* di sebuah negara terhadap peluang masuknya FDI ke sebuah negara. Data didapatkan dari responden sebanyak 90 negara. Untuk analisis data, peneliti menggunakan uji regresi linier sederhana. Peneliti merumuskan hipotesis pada penelitian ini yaitu:

H1: EGRI signifikan dalam memprediksi GOI

H1a: *E-participation index* berpengaruh signifikan terhadap GOI

- H1b: *Web measure index* berpengaruh signifikan terhadap GOI
H1c: *Infrastructure index* berpengaruh signifikan terhadap GOI
H1d: *Human capital index* berpengaruh signifikan terhadap GOI

Hasil dari penelitian ini ada beberapa hipotesis yang diterima maupun ditolak. Hipotesis yang diterima antara lain H1, H1a, H1b dan H1c. Sedangkan satu-satunya hipotesis yang ditolak yaitu H1d.

2.2.2 Information Technology, FDI and Economic Growth: An India Case Study. (Bala Veeramacheneni, Richard Vogel, Ekanayake, 2006)

Penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi hubungan antara investasi di bidang ICT dengan FDI dan implikasinya terhadap pertumbuhan ekonomi di India. India terkenal dengan industri *software* yang telah diekspor ke segala penjuru dunia. Penelitian ini menggunakan data *time series* berupa nilai pertumbuhan ICT, GDP dan FDI India dari periode 1970-2005. Data ICT yang digunakan yaitu nilai investasi di bidang telekomunikasi.

Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan analisis *granger causality*. *Granger causality* digunakan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih, apakah hubungannya satu arah saja (*one-directional*) atau dua arah (*bi-directional*). Dipilihnya *granger causality* juga karena penelitian ini menggunakan data *time series* dimana peneliti ingin membandingkan data pada dua periode apakah pergerakan nilai pada data tersebut dipengaruhi oleh variabel dalam hal ini ICT, GDP, dan FDI. Setelah melalui beberapa tahapan analisis dalam *granger causality*, maka didapatkan beberapa temuan dari hasil analisis.

Temuan pertama dari penelitian ini yaitu antara variabel ICT dan GDP berkorelasi dua arah (*bi-directional*), hal ini menguatkan beberapa teori yang mengatakan bahwa faktor ICT di sebuah negara akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sebuah negara. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di India salah satunya dibentuk oleh pertumbuhan sektor ICT. Temuan kedua yaitu hubungan yang kuat antara FDI dan GDP yang berkorelasi dua arah, hasil ini juga menambah bukti dari teori dan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa tingginya nilai FDI akan berpengaruh terhadap meningkatnya nilai GDP di suatu negara. Temuan yang terakhir yaitu hubungan yang kuat antara ICT dan FDI.

Temuan ini menjawab dari tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis hubungan pertumbuhan sektor ICT dengan pertumbuhan FDI. Dengan demikian dapat disimpulkan dari penelitian ini yaitu peran sektor ICT khususnya sektor telekomunikasi di India yang meningkat drastis pada kurun waktu 1970-2005 terbukti memberikan dampak yang sangat positif terhadap meningkatnya FDI yang dilakukan oleh investor asing, sehingga dengan meningkatnya FDI maka akan berdampak pada meningkatnya GDP India yang juga turut mengalami kenaikan pada periode tersebut.

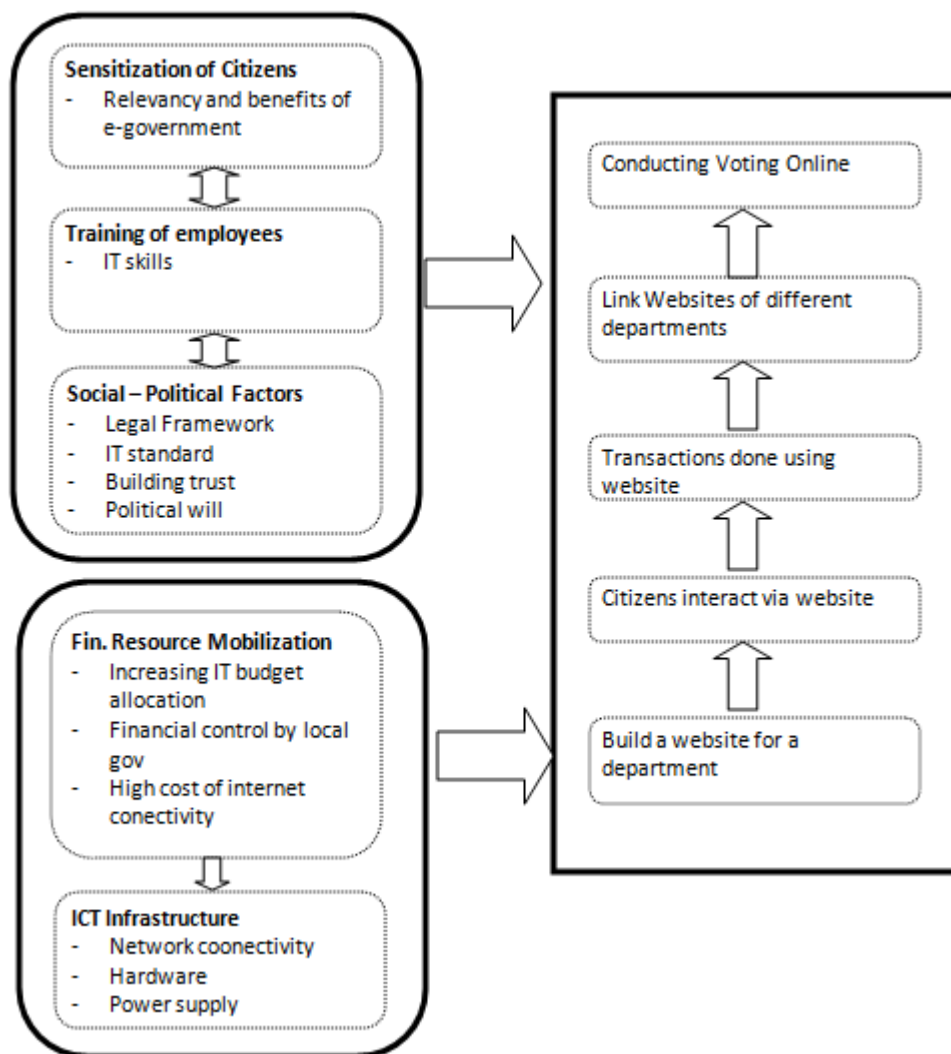
2.2.3 A Model of Success Factors for Implementing Local *E-government* in Uganda. (Robinah Nabafu dan Gilbert Maiga, 2012)

Robinah Nabafu dan Gilbert Maiga pada tahun 2012 melakukan penelitian dengan judul diatas yang tujuannya yaitu untuk membuat sebuah model kesuksesan implementasi *e-government* untuk level pemerintah lokal di negara Uganda. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kesenjangan (*gap*) antara model kesuksesan implementasi *e-government* yang ada khususnya untuk level pemerintah nasional pada negara-negara maju dengan kondisi yang ada pada negara transisi seperti Uganda dimana dari tingkat perekonomian hingga infrastruktur IT masih jauh tertinggal dengan negara-negara maju. Selain itu penelitian ini juga spesifik untuk membuat sebuah model kesuksesan implementasi *e-government* pada level pemerintah lokal, dimana peneliti memilih sampel enam distrik di Uganda.

Peneliti menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data berupa *requirement* atau kebutuhan untuk implementasi *e-government* pada pemerintah lokal. Peneliti menggunakan model kesuksesan implementasi *e-government* Uganda yaitu pada level nasional yang terdiri dari faktor finansial, infrastruktur ICT, pelatihan, dan faktor sosial politik sebagai acuan untuk dispesifikasikan lagi pada konteks pemerintah lokal. Responden yang digunakan yaitu manager dan administrator dari masing-masing distrik sebanyak 6 distrik dengan total kuesioner tersebar sebanyak 160 dan kuesiner yang dikembalikan dan terisi sebanyak 128 kuesioner. Penggalan data dikategorikan menjadi beberapa tema yang menjadi obyektifitas dari penelitian ini antara lain: ketersediaan *website*,

penggunaan atau pemanfaatan, manfaat, tantangan, dan *requirement* untuk implementasi *e-government* pada pemerintahan lokal.

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu berupa model implementasi *e-government* untuk pemerintah lokal di Uganda. Model terdiri dari beberapa dimensi yaitu: (1) *financial resources mobilization*, (2) *building an ICT infrastructure*, (3) *training*, (4) *sensitization*, (5) *socialpolitical factors*. Secara keseluruhan model seperti pada gambar 2.8.



Gambar 2.8 Model Kesuksesan Implementasi *E-government* Pemerintah Lokal di Uganda

(Sumber: Nabafu dan Maiga, 2012)

2.2.4 Governance and FDI Attractiveness: Some Evidence from Developing and Developed Countries. (Yosra Saidi, Anis Ochi, Houria Ghadri, 2013)

Pada penelitian ini Yosra Saidi dkk ingin meneliti dampak dari indikator *good governance* dari World Bank terhadap daya tarik *foreign direct investment* (FDI) di 20 negara berkembang dan maju dalam kurun waktu 1998-2011 dengan menggunakan *fixed effects* model regresi panel. Penelitian ini dilatarbelakangi dari berbagai penelitian sebelumnya yang sering menjadi perdebatan. Menurut beberapa ahli, temuan secara empiris yang mengatakan bahwa *good governance* akan meningkatkan daya tarik investasi sebuah negara tidak sepenuhnya berlaku di seluruh negara. Salah satu yang disinggung oleh peneliti yaitu masalah level pengembangan negara yang sering terbagi menjadi dua yaitu negara berkembang (*developing countries*) dan negara maju (*developed countries*).

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: (1) variabel dependen yaitu *FDI net inflows*, (2) variabel independen yaitu *corruption and bureucratic red tape* (CBRT), *the rule of law* (RL), *political stability and the absence of violence* (PSAV), *voice and accountability* (VA), *regulatory quality* (RQUAL) dan *government effectiveness* (GEFF), (3) variabel kontrol yaitu *the inflation rate* (RINF), *balance of payments current account (% of GDP)* (BPCA), *GDP growth* (GDPG), *opennes of the economy* (OPEN), dan *infrastructure index* (INFR). Selanjutnya 20 negara maju dan berkembang yang menjadi sampel dalam penelitian ini antara lain: United States, Japan, Germany, France, Italy, Canda, Greece, United Kingdom, Portugal, Netherlands, Algeria, Tunisia, Morocco, Egypt, Nigeria, Kenya, Indonesia, Malaysia, Albania dan Cameroon.

Peneliti merumuskan enam (6) hipotesis dalam penelitian ini antara lain:

1. (H1) *Political stability and theabsence of violence* (PSAV) berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya tarik FDI
2. (H2) *Regulatory quality* (RQUAL) berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya tarik FDI
3. (H3) *Corruption and bureucratic red tape* (CBRT) berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya tarik FDI

4. (H4) *Voice and accountability* (VA), *rule of law* (RL), dan *government effectiveness* (GEFF) berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya tarik FDI
5. (H5) *GDP growth* (GDPG) dan *openness of the economy* (OPEN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya tarik FDI
6. (H6) *Inflation rate* (RINF) berpengaruh negatif terhadap FDI

Selanjutnya yaitu pengujian data. Peneliti membagi tahap pengujian data menjadi tiga bagian yaitu (1) pengujian terhadap seluruh sampel, (2) pengujian terhadap 10 negara maju, dan (3) pengujian terhadap 10 negara berkembang.

1. Pengujian terhadap seluruh sampel (20 negara maju dan berkembang)

Pertama penguji meneliti pengaruh variabel PSAV, RQUAL, dan CBRT terhadap FDI. Peneliti menggunakan *fisher statistic* untuk menguji signifikansi model untuk menjawab hipotesis. Tabel 2.7 dibawah ini merupakan hasil pengujian untuk variabel PSAV, RQUAL, dan CBRT terhadap FDI pada seluruh sampel 20 negara maju dan negara berkembang.

Tabel 2.7 Hasil Analisis Pengaruh PSAV, RQUAL dan CBRT Terhadap FDI pada seluruh sampel

Variabel	Nilai F	Nilai Koefisien	Nilai t- students	Status Hipotesis
PSAV	0,0011	1,282464**	1,99	Diterima
RQUAL	0,0003	2,708162*	2,68	Diterima
CBRT	0,0054	0,204065	0,23	Ditolak

Pengujian yang kedua yaitu meneliti pengaruh dari variabel RL, GEFF dan VA terhadap FDI. Tabel 2.8 dibawah merupakan hasil pengujian untuk variabel RL, GEFF, dan VA terhadap FDI pada seluruh sampel 20 negara maju dan negara berkembang.

Tabel 2.8 Hasil Analisis Pengaruh RL, GEFF dan VA Terhadap FDI pada seluruh sampel

Variabel	Nilai F	Nilai Koefisien	Nilai t- students	Status Hipotesis
RL	0,0049	0,6337362	0,50	Ditolak
GEFF	0,0049	0,6731652	0,53	Ditolak
VA	0,0029	-1,387986	-1,26	Ditolak

2. Pengujian terhadap 10 negara maju (developed countries)

Pengujian selanjutnya yaitu terhadap 10 negara maju. Dari hasil analisis ditemukan 4 dari 6 indikator *good governance* memiliki peran yang sangat penting untuk menarik FDI masuk ke negara-negara tersebut. Hasil lengkap analisis pada sampel negara maju dapat dilihat pada tabel 2.9.

Tabel 2.9 Hasil Analisis Pengaruh PSAV, RQUAL, CBRT dan GEFF terhadap FDI pada Negara Maju

Variabel	Nilai F	Nilai Koefisien	Nilai t- students	Status Hipotesis
PSAV	0,0035	2,702201**	2,39	Diterima
RQUAL	0,0000	3,010073*	3,71	Diterima
CBRT	0,0000	1,772752*	3,28	Diterima
GEFF	0,0000	2,406599*	3,67	Diterima

3. Pengujian terhadap 10 negara berkembang (developing countries)

Pengujian selanjutnya yaitu terhadap 10 negara berkembang. Dari hasil analisis ditemukan hanya 1 indikator *good governance* yaitu regulatory quality (RQUAL) yang memiliki peran yang sangat penting untuk menarik FDI masuk ke negara-negara tersebut. Hasil lengkap analisis pada sampel negara berkembang dapat dilihat pada tabel 2.10.

Tabel 2.10 Hasil Analisis Pengaruh PSAV dan RQUAL terhadap FDI pada Negara Berkembang

Variabel	Nilai F	Nilai Koefisien	Nilai t- students	Status Hipotesis

PSAV	0,0153	0,1968477	0,29	Ditolak
RQUAL	0,0023	2,351847**	2,20	Diterima

2.2.5 The Role of *Good governance* in the Knowledge-Based Economic Growth of East Asia – A Study on Japan, Newly Industrialized Economies, Malaysia and China. (Debnath Chandra dan Kenji Yokoyama, 2011)

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran *good governance* dalam menarik FDI masuk ke negara, dimana FDI tersebut berkontribusi untuk pengembangan *knowledge-based economic* (KBE) sebuah negara. *Knowledge-based economic* disini diartikan sebagai iklim perekonomian yang berbasis pengetahuan, dimana peran *knowledge* / pengetahuan sangat penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi sebuah negara.

Penelitian ini fokus pada negara Jepang, China, Malaysia dan Negara NIES (*Newly Industrialized Economies*) dalam hal ini Hongkong, Singapura, Korea Selatan dan Taiwan. Data terkait 6 indikator *good governance* yang digunakan yaitu data dari tahun 1998-2007. 6 indikator tersebut merujuk pada indikator dari Kaufmann tahun 1999 antara lain *Voice & Accountability*, *Political Stability*, *Lack of Violence/Terrorism*, *Government effectiveness*, *Regulatory Quality*, *Rule and Law*, dan *Control of Corruption*. Metode yang digunakan yaitu analisis komparatif dengan membandingkan data dari satu negara dengan negara lain.

Dari data perbandingan masing-masing indikator *good governance* diatas, terlihat bahwa Singapura, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Malaysia menunjukkan nilai masing-masing indikator *good governance* diatas 60%, jauh mengungguli China yang menduduki peringkat paling bawah dengan rata-rata setiap indikator sekitar 40%. Dengan demikian dapat disimpulkan tata kelola pemerintahan Republik China sangat lemah. Namun kondisi ini tidak membuat China lemah dalam urusan investasi asing langsung (FDI). Data menunjukkan bahwa aliran nilai FDI yang masuk ke negara-negara diatas secara mengejutkan China menjadi yang terbaik dan jauh mengungguli negara-negara yang dalam hal tata kelola pemerintahannya sangat baik.

Selanjutnya, peneliti mencoba membandingkan data selanjutnya yaitu status *knowledge-based economy* (KBE) negara-negara tersebut. Untuk mengukur KBE, digunakan dua parameter yaitu *knowledge index* (KI) dan *knowledge economy index* (KEI). KI terdiri dari tiga variabel pembentuk yaitu *human resources*, *scientific infrastructure* dan *technology infrastructure*. Sedangkan KEI dibentuk dari empat variabel yaitu *role of government*, *education and human resources*, *scientific infrastructure* dan *technology infrastructure*. Hasilnya yaitu negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik cenderung lebih baik dalam menciptakan KBE di negaranya masing-masing, sehingga perekonomian negara akan semakin maju.

Kesimpulan yang diambil oleh peneliti adalah (1) negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan menjadi daya tarik tersendiri bagi sebuah negara untuk menarik FDI masuk, (2) negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) lebih cepat dan baik dalam menciptakan KBE di negaranya sehingga perekonomian negara akan semakin maju, (3) untuk kasus China, negara dengan tata kelola pemerintahan yang kurang baik namun nilai FDI nya terbaik diantara negara-negara diatas karena beberapa faktor diluar indikator *good governance* seperti; kekuasaan pemerintah yang baik, infrastruktur yang baik, tenaga kerja yang banyak dan berpendidikan dan pasar domestik yang sangat besar.

2.2.6 E-Government in Marketing a Country: A Strategy for Reducing Transaction Cost of Doing Business in Tanzania (Muhajir Kachwamba dan Oystein Saebo, 2011)

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran e-government sebagai alat promosi dan menghilangkan hambatan foreign direct investment (FDI) yang masuk di Tanzania, khususnya hambatan yang terkait dengan aksesibilitas informasi dan prosedur birokrasi yang dihadapi oleh investor dalam proses perizinan usaha.

Metode penelitian yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif studi kasus dengan studi kasus jamak (*multiple case study*) dan bersifat *exploratory case study*. Studi kasus yang digunakan yaitu Tanzania Investment Centre (TIC) dan Zanzibar Investment Promotion Authority (ZIPA). Pemilihan studi kasus TIC

dikarenakan TIC dinominasikan oleh World Association of Investment Promotion Agencies (WAIPA) sebagai salah satu badan investasi terbaik. Di sisi lain ZIPA dipilih karena secara kelembagaan dekat dengan TIC dan dianggap cocok untuk kasus komparatif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melalui dokumen, wawancara semi terstruktur dengan pegawai senior di TIC dan ZIPA, wawancara melalui email dengan investor asing dan observasi.

Hasil penelitian ditemukan bahwa e-government memiliki manfaat bagi investor asing yaitu mengurangi biaya informasi (*information cost*) dan biaya birokrasi (*bureaucratic costs*). Secara logsi, temuan ini menjawab hipotesis yang diusulkan dimana e-government dapat mempromosikan FDI. Oleh karena itu peran penggunaan ICT di IPA memenuhi syarat sebagai penentu FDI yang selama ini masih menjadi perdebatan dengan memasukkan e-government (ICT) ke dalam model FDI. Karena kenyataannya e-government dapat mengurangi *information cost* dan *bureaucratic costs*, dan juga memudahkan investor asing untuk *approval* perizinan investasi.

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL

3.1 Konseptual Model

Dalam penelitian ini, peneliti mengembangkan sebuah model yang akan dijelaskan sebagai kerangka konseptual. Kerangka konseptual disusun untuk menjadi acuan dasar yang berisi kajian teori dan penelitian terdahulu yang memunculkan sebuah permasalahan yang dapat dikaji lebih lanjut melalui penelitian ini.

Penelitian ini berfokus pada analisis hubungan implementasi *e-government* yang dapat membentuk sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) (Al-Azzam & Abu-Shanab, 2014; Lau, 2005; Saidi & Yared, 2002; Alaaraj & Ibrahim, 2014; Mucavele, 2003; NOIE, 2003; OECD, 2009), terhadap meningkatnya penanaman modal yang masuk ke pemerintah daerah (Mucavele, 2003; Al-Azzam & Abu-Shanab, 2014; Subasat & Bellos, 2013; Saidi, et.al, 2013; World Bank, 2002).

Untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah telah mengimplementasikan *e-government*, dalam penelitian ini menggunakan 5 indikator yang telah diolah dari berbagai sumber yaitu infrastruktur ICT, alokasi anggaran IT, jumlah aplikasi *e-government* yang sudah digunakan (*online*), *master plan* IT, dan staff IT. Selanjutnya untuk indikator *good governance* yang digunakan yaitu transparansi, akuntabilitas, kualitas regulasi dan penegakan hukum, responsif dan efektifitas dan efisiensi. Untuk mengetahui peningkatan kegiatan penanaman modal di daerah, pada penelitian ini digunakan dua indikator yaitu jumlah proyek dan nilai investasi itu sendiri.

Penelitian ini didasari oleh beberapa kesenjangan (*gap*) yang didapatkan dari studi literatur dan penelitian terdahulu yang telah dibahas pada bab sebelumnya. (1) berdasarkan beberapa teori tentang model kesuksesan implementasi *e-government* pada level nasional telah terbukti membawa dampak yang sangat signifikan bagi pemerintah khususnya terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik ini sesuai dengan (Al-Azzam & Abu-Shanab, 2014; Lau, 2005; Saidi & Yared, 2002; Alaaraj & Ibrahim, 2014; Mucavele, 2003; NOIE,

2003; OECD, 2009; Bhatnagar, 2003; Deloitte, 2004; Seifert & Bonham, 2004), namun ternyata pada level pemerintah lokal / daerah terjadi perbedaan kondisi dibandingkan level pemerintah level nasional seperti kondisi keuangan, kondisi infrastruktur ICT, hingga ketersediaan staff IT yang berkompeten dalam pengembangan *e-government* hal ini sesuai dengan Nabafu & Maiga(2012). (2) berdasarkan beberapa teori dan penelitian terdahulu yang menyebutkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) akan berdampak positif terhadap daya tarik investasi asing FDI di sebuah negara sesuai dengan (Mucavele, 2003; Al-Azzam & Abu-Shanab, 2014; Subasat & Bellos, 2013; Saidi, et.al, 2013; World Bank, 2002). Namun merujuk pada hasil penelitian Saidi, Ochi, & Ghadri (2013) untuk kasus negara berkembang termasuk Indonesia sebagai data dalam penelitian tersebut hanya indikator kualitas regulasi (*regulatory quality*) yang berpengaruh dalam menarik FDI masuk ke negara-negara berkembang tersebut. Penelitian lain yang menambah kesenjangan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Chandra & Yokoyama (2011) dimana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa Republik China dengan tata kelola pemerintahan yang kurang baik yang hanya bernilai tidak lebih dari 40 dari nilai maksimal 100 justru menjadi negara dengan nilai FDI tertinggi jauh mengungguli nilai FDI dari negara-negara dengan tata kelola pemerintahan yang baik seperti Singapura, Hongkong, Jepang, Korea Selatan, Taiwan dan Malaysia.

Berdasarkan kesenjangan diatas, maka penelitian ini berfokus pada konteks pengembangan *e-government* pada level pemerintah daerah, dan penanaman modal yang dimaksud adalah penanaman modal asing (PMA) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN). Maka secara umum, konstruk model penelitian ini dapat dibangun seperti pada gambar 3.1 dibawah ini.



Gambar 3.1 Model Konseptual Penelitian

3.2 Domain Penelitian

Terdapat tiga domain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Domain Implementasi *E-government*

Domain ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana ketercapaian (progress) implementasi *e-government* di pemerintah daerah yang diukur dari beberapa dimensi.

2. Domain Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (*Good Governance*)

Domain ini digunakan untuk mengetahui ketercapaian pemerintah daerah dalam mewujudkan *good governance* yang diukur dari beberapa dimensi.

3. Domain Peningkatan Penanaman Modal

Domain ini digunakan untuk mengetahui peningkatan nilai penanaman modal di daerah baik PMA maupun PMDN yang diukur dari dua dimensi.

3.2.1 Implementasi E-Government

Implementasi *e-government* dapat diartikan sebagai sebuah proses yang sedang dilakukan oleh pemerintah untuk menerapkan *e-government* di dalam birokrasi pemerintahan. Menurut Nabafu & Maiga(2012), implementasi *e-government* merupakan bagian dari usaha pemerintah untuk masuk ke dalam tren global dengan memanfaatkan penggunaan ICT dalam layanan publik. Implementasi *e-government* membutuhkan banyak sekali kebutuhan yang harus dipersiapkan oleh pemerintah. Untuk mengetahui sejauh mana pengembangan *e-government* dalam rangka mencapai *good governance*, diperlukan beberapa indikator yang digunakan seperti pada tabel 3.1 dibawah ini:

Tabel 3.1 Indikator Domain Implementasi E-Government

Domain	Indikator	Definisi Operasional	Referensi
Good Governance	Infrastruktur ICT	Infrastruktur ICT meliputi: ketersediaan layanan internet, jaringan telekomunikasi, ketersediaan software dan hardware yang mendukung.	UNPAN ,2014; ITU, 2009; UNDESA, 2002; Nkohkwo & Islam, 2013; Ndou, 2004; Nabafu & Maiga, 2012
	Alokasi Anggaran IT	Alokasi anggaran IT meliputi anggaran dan alokasi dana yang jelas untuk pengembangan <i>e-government</i> .	Nkohkwo & Islam, 2013; Nabafu & Maiga, 2012
	Jenis Aplikasi E-Government	Jenis aplikasi e-government yang dimaksud adalah apakah seluruh aplikasi e-government yang ada telah mencakup prinsip-prinsip <i>good governance</i> (transparansi, akuntabilitas, responsif, dan menjadikan proses birokrasi menjadi efektif dan efisien)	Saidi & Yared, 2002; Alaraj & Ibrahim, 2014
	Master Plan IT	<i>Master plan</i> IT digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah merencanakan strategi pengembangan IT dalam kurun waktu tertentu.	ITU, 2009; UNDESA, 2002; Ndou, 2004
	Staff IT	Keberadaan staff IT digunakan untuk pengembangan, pemeliharaan (<i>maintenance</i>) dan pelatihan <i>e-government</i> di lingkungan pemerintah daerah.	Nabafu & Maiga, 2012; Nkohkwo & Islam, 2013; UNPAN ,2014)

3.2.2 Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

Pemerintah dikatakan telah mewujudkan *good governance* ketika sudah mencapai indikator-indikator dari *good governance*. Indikator *good governance* sendiri memiliki beragam variasi. Beberapa indikator *good governance* yang akan digunakan dalam penelitian ini antara lain seperti pada tabel 3.2 dibawah ini:

Tabel 3.2 Indikator Domain Implementasi *Good Governance*

Domain	Indikator	Definisi Operasional	Referensi
Good Governance	Transparansi	Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan pemerintah untuk memberikan informasi (peraturan, laporan, data-data keuangan, dan lain-lain) yang dibutuhkan oleh <i>stakeholders</i> (masyarakat dan sektor bisnis).	World Bank, 2010; UNDP dalam IFAD, 1999; AfDB dalam IFAD, 1999; BAPPENAS dalam Keban, 2000
	Akuntabilitas	Akuntabilitas yang dimaksud adalah pertanggung jawaban dari pemerintah kepada <i>stakeholders</i> terkait kinerja lembaga baik di bidang manajemen, organisasi dan pelayanan publik.	World Bank, 2010; UNDP dalam IFAD, 1999; AfDB dalam IFAD, 1999; BAPPENAS dalam Keban, 2000
	Kualitas Regulasi dan Penegakan Hukum	Kualitas regulasi yaitu bagaimana kebijakan / peraturan yang dibuat oleh pemerintah mendukung sektor bisnis, tidak memberatkan masyarakat, dan juga menciptakan iklim yang tertib dan kondusif di lingkungan <i>stakeholders</i> . Penegakan hukum yaitu bagaimana penerapan regulasi secara adil, obyektif dan tidak berpihak pada satu golongan.	World Bank, 2010; BAPPENAS dalam Keban, 2000; UNDP dalam IFAD 1999; AfDB dalam IFAD, 1999.
	Responsif	Responsif yang dimaksud adalah kemampuan pemerintah untuk cepat dan tanggap	UNDP dalam IFAD, 1999; BAPPENAS

		dalam melayani kepentingan dari semua <i>stakeholders</i> . Responsif disini juga diartikan sebagai keterbukaan pemerintah terhadap masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari <i>stakeholders</i> .	dalam Keban, 2000
	Efektif dan Efisiensi	Kemampuan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dengan cara yang paling baik (efisien) sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif.	World Bank, 2010; UNDP dalam IFAD, 1999; BAPPENAS dalam Keban, 2000

3.2.3 Peningkatan Penanaman Modal

Menurut UU No.25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, penanaman modal didefinisikan sebagai bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), melalui laporan setiap quarter perkembangan realisasi investasi di Indonesia, peningkatan nilai investasi suatu daerah dapat dilihat dari jumlah proyek dan nilai investasi (dalam rupiah) itu sendiri. Domain dan unsur penelitian dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3 Domain dan Unsur Penelitian

No	Domain	Unsur	Penggunaan Instrumen Pertanyaan Wawancara
1	Implementasi E-government	<i>Keseluruhan instrumen pertanyaan mengenai kondisi (progress) implementasi e-government di pemerintah daerah</i>	
	Infrastruktur ICT	• Ketersediaan jaringan <i>fixed</i> internet	Pertanyaan tentang ketersediaan jaringan fixed internet
		• Ketersediaan <i>wireless</i> internet	Pertanyaan tentang ketersediaan wireless internet
		• Ketersediaan saluran telepon	Pertanyaan tentang ketersediaan saluran telepon
		• Ketersediaan PC	Pertanyaan tentang ketersediaan PC
	Alokasi Anggaran IT	• Alokasi anggaran IT yang jelas	Pertanyaan tentang anggaran IT yang jelas
		• Ketersediaan sumber dana	Pertanyaan tentang ketersediaan sumber dana
		• Mekanisme penggunaan anggaran IT	Pertanyaan tentang mekanisme penggunaan anggaran IT
	Jenis Aplikasi E-Government	• Jumlah aplikasi e-gov yang sudah <i>online</i>	Pertanyaan tentang jumlah aplikasi e-gov yang sudah online
		• Jumlah aplikasi yang sudah <i>online</i> dan digunakan	Pertanyaan tentang jumlah aplikasi yang sudah online dan digunakan
		• Jumlah aplikasi yang sudah <i>online</i> tetapi tidak digunakan	Pertanyaan tentang jumlah aplikasi yang sudah online tetapi tidak digunakan
		• Kesesuaian jenis aplikasi dengan prinsip <i>good governance</i>	Pertanyaan tentang kesesuaian jenis aplikasi dengan prinsip good governance
	Master Plan IT	• Tersedia master plan IT (pengembangan e-gov)	Pertanyaan tentang ketersediaan master plan pengembangan e-gov
	Staff IT	• Memiliki staff IT	Pertanyaan tentang ketersediaan staff IT
		• Pelatihan untuk staff IT	Pertanyaan tentang adanya pelatihan untuk staff IT
2	Good governance	<i>Keseluruhan instrumen pertanyaan mengenai tata kelola pemerintah daerah yang baik (good governance)</i>	
	Transparansi	• Publikasi data keuangan, penggunaan anggaran	Pertanyaan tentang publikasi data keuangan dan penggunaan anggaran pemerintah
		• Publikasi peraturan / kebijakan	Pertanyaan tentang publikasi peraturan/kebijakan
	Akuntabilitas	• Pertanggungjawaban anggaran	Pertanyaan tentang pertanggungjawaban anggaran
		• Pertanggungjawaban kinerja pemerintah	Pertanyaan tentang pertanggungjawaban kinerja pemerintah

	Kualitas Regulasi dan Penegakan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> • Kebijakan dan peraturan yang sehat dan adil bagi semua stakeholders 	Pertanyaan tentang kebijakan dan peraturan pemerintah
		<ul style="list-style-type: none"> • Sanksi yang tegas dan adil terhadap pelanggaran kebijakan 	Pertanyaan tentang sanksi yang tegas dan adil terhadap pelanggaran kebijakan
		<ul style="list-style-type: none"> • Dukungan kerangka hukum yang kuat 	Pertanyaan tentang kerangka hukum yang kuat
	Responsif	<ul style="list-style-type: none"> • Cepat dan tanggap terhadap kritik dan saran 	Pertanyaan tentang respon pemerintah terhadap kritik dan saran
		<ul style="list-style-type: none"> • Cepat dan tanggap dalam melayani stakeholders 	Pertanyaan tentang kecepatan dan ketanggapan dalam melayani stakeholders
	Efektifitas dan Efisiensi	<ul style="list-style-type: none"> • Pemanfaatan sumber daya secara optimal 	Pertanyaan tentang bagaimana pemerintah memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal/berdaya guna (efisien)
		<ul style="list-style-type: none"> • Birokrasi pelayanan publik lebih mudah dan efektif 	Pertanyaan untuk mengetahui tingkat kompleksitas birokrasi pelayanan publik terhadap masyarakat dan swasta
3	Peningkatan Penanaman Modal	<i>Keseluruhan instrumen pertanyaan mengenai peningkatan nilai investasi di daerah</i>	
	Peningkatan Realisasi Izin Usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi izin usaha investasi PMA meningkat 	Pertanyaan untuk mengetahui peningkatan realisasi izin investasi PMA
		<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi izin usaha investasi PMDN meningkat 	Pertanyaan untuk mengetahui peningkatan realisasi izin investasi PMDN
		<ul style="list-style-type: none"> • Realisasi izin usaha investasi daerah meningkat 	Pertanyaan untuk mengetahui peningkatan realisasi izin investasi daerah
	Peningkatan Nilai Investasi	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai investasi PMDN meningkat 	Pertanyaan untuk mengetahui peningkatan nilai PMDN
		<ul style="list-style-type: none"> • Nilai investasi PMA meningkat 	Pertanyaan untuk mengetahui peningkatan nilai PMA
		<ul style="list-style-type: none"> • Nilai investasi daerah meningkat 	Pertanyaan untuk mengetahui peningkatan nilai investasi daerah

3.3 Proposisi

Menurut Emory & Cooper (1991), proposisi adalah pernyataan mengenai suatu konsep yang dapat dinilai salah atau benar dan mengacu pada fenomena yang dapat diamati. Proposisi didasarkan pada suatu alasan teoritis yang dijelaskan dalam kerangka teoritis atau landasan teori.

3.3.1 Proposisi Minor

Proposisi minor merupakan pernyataan/dugaan yang didasarkan pada setiap domain yang digunakan pada penelitian ini. Proposisi minor pada tahap ini adalah sebagai dugaan awal terhadap model konseptual yang dijadikan pedoman dalam penelitian ini. Proposisi minor pada penelitian ini antara lain:

1. Implementasi *e-government* di tingkat pemerintah daerah akan menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*)
2. Tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) akan meningkatkan daya tarik investasi daerah, sehingga penanaman modal di daerah akan meningkat.

3.3.2 Proposisi Mayor

Proposisi mayor merupakan pernyataan secara umum berdasarkan kesimpulan yang diperoleh pada proposisi minor. Proposisi mayor pada penelitian ini antara lain:

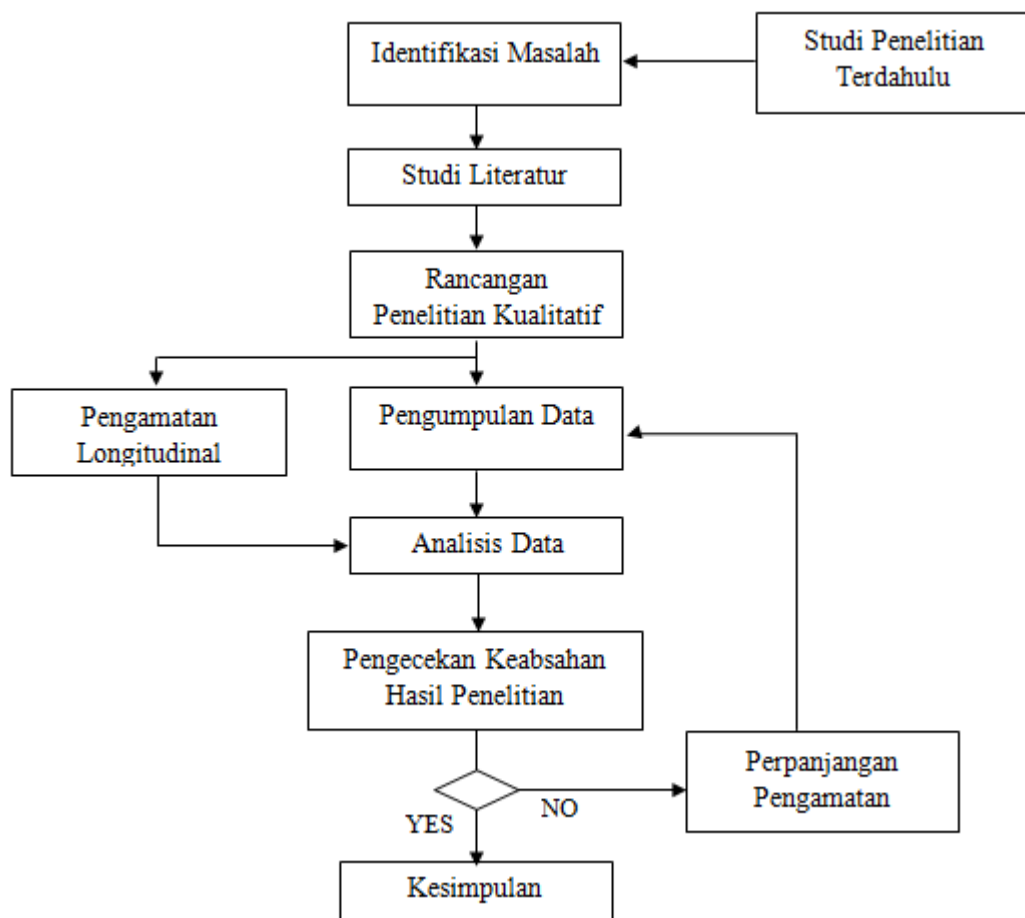
1. Penanam modal (investor) mempertimbangkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai indikator dalam memilih lokasi investasi.
2. Penanam modal (investor) menyukai daerah yang pengembangan *e-government* nya sudah berjalan.

(Halaman sengaja dikosongkan)

BAB 4 METODOLOGI PENELITIAN

4.1 Tahapan Penelitian

Berikut ini merupakan tahapan yang akan dilakukan dalam penelitian ini seperti pada gambar 4.1 dibawah ini.



Gambar 4.1 Tahapan Penelitian

4.1.1 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus, dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan implementasi *e-government* terhadap peningkatan penanaman modal oleh investor di daerah. Tujuan dari pengidentifikasian masalah yaitu untuk menemukan *research question* penelitian yang telah dibahas pada bagian sebelumnya. Pengidentifikasian masalah didasarkan pada studi penelitian terdahulu dan ditemukannya kesenjangan (*gap*) yang dapat menjadi celah penelitian selanjutnya.

4.1.2 Studi Literatur

Studi literatur dalam penelitian ini bersumber dari buku, media, pakar ataupun dari hasil penelitian orang lain. Pemahaman terhadap literatur bertujuan untuk menyusun dasar teori terkait yang digunakan dalam melakukan penelitian. Studi literatur dapat membantu peneliti mulai dari merumuskan permasalahan hingga penyusunan tesis.

4.1.3 Rancangan Penelitian Kualitatif

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan perspektif kajian sistem informasi. Alasan menggunakan pendekatan kualitatif karena peneliti ingin menggali topik penelitian secara mendalam, menemukan pola, dan menggali lebih luas keterkaitan antara implementasi *e-government* di pemerintah daerah dengan meningkatnya nilai penanaman modal di daerah. Pada pendekatan ini, peneliti membuat suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami. Rancangan penelitian kualitatif ini merujuk pada acuan teoritis yang ditulis John W. Creswell (2015) dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Kualitatif dan Desain Riset” dan buku Prof. Sugiyono (2014) dengan judul “Memahami Penelitian Kualitatif”.

Pendekatan kualitatif menekankan pada makna dan pemahaman dari dalam (*verstehen*), penalaran, definisi suatu situasi tertentu (dalam konteks tertentu), dan lebih banyak meneliti hal-hal yang berhubungan dengan fenomena. Pendekatan kualitatif, lebih lanjut, mementingkan pada proses dibandingkan dengan hasil

akhir, oleh karena itu urutan kegiatan dapat berubah-ubah tergantung pada kondisi dan banyaknya gejala-gejala yang ditemukan.

4.1.3.1 Setting Lokasi dan Waktu Penelitian

a. Lokasi Penelitian

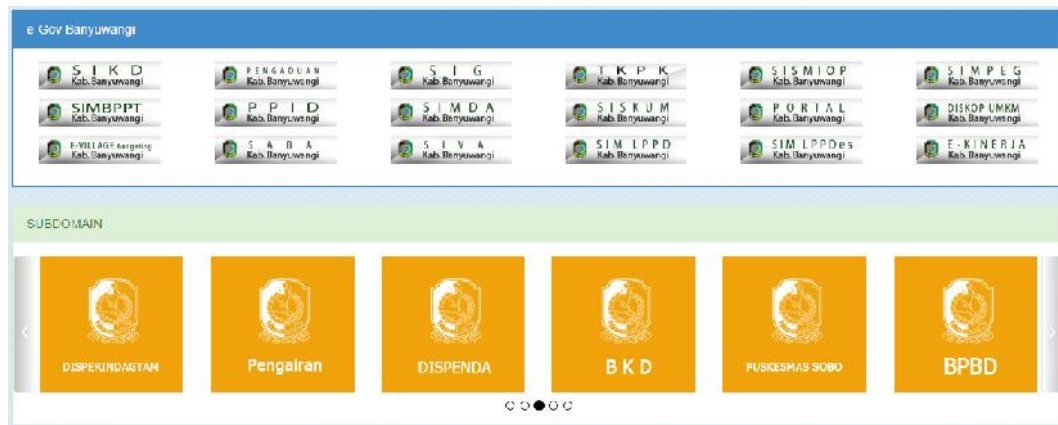
Lokasi penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan beberapa alasan diantaranya:

- Sesuai dengan sub bab 2.1.4.4 poin nomor 1 tentang alasan pemilihan *single-case study*, Pemkab Banyuwangi dengan kondisi saat ini (*existing condition*) terkait topik penelitian sudah cukup layak untuk dijadikan sebagai obyek pembuktian teori dan proposisi yang telah dibangun.
- Sesuai dengan sub bab 2.1.4.4 poin nomor 2 tentang alasan pemilihan *single-case study*, Pemkab Banyuwangi dengan kondisi saat ini dianggap telah terjadi perubahan yang sangat drastis baik sisi pemanfaatan IT maupun perekonomian pada beberapa tahun terakhir yang dibuktikan dengan data-data terkait nilai investasi, PDRB maupun prestasi lainnya.
- Sesuai dengan sub bab 2.1.4.4 poin nomor 3 tentang alasan pemilihan *single-case study*, peneliti memilih Pemkab Banyuwangi dikarenakan faktor jarak, waktu dan biaya yang lebih singkat apabila dibandingkan dengan pemilihan obyek kabupaten lain yang memiliki tipikal yang sama.
- Sesuai dengan sub bab 2.1.4.4 poin nomor 4 tentang alasan pemilihan *single-case study*, peneliti memilih Pemkab Banyuwangi karena memiliki beberapa kemudahan diantaranya kemudahan akses data yang dibutuhkan, dan juga prinsip yang ditanamkan oleh Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang menginstruksikan kepada seluruh jajaran SKPD untuk terbuka terhadap kerjasama penelitian yang mendukung kemajuan Kabupaten Banyuwangi.
- Sesuai dengan sub bab 2.1.4.4 poin nomor 5 tentang alasan pemilihan *single-case study*, karena peneliti ingin mengetahui kondisi nilai investasi sebelum diimplementasikannya e-government hingga saat ini dengan

pengumpulan data secara longitudinal maka sangat tepat sesuai alasan pemilihan single-case study menurut Yin (2003) pada poin nomor 5.

- Kabupaten Banyuwangi memperoleh penghargaan Investment Award dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagai penyelenggara pelayanan satu pintu terbaik dua tahun berturut-turut yaitu tahun 2013 dan 2014 (Banyuwangi, 2015).
- Kabupaten Banyuwangi juga memperoleh penghargaan *Investment Award* 2013 Provinsi Jawa Timur sebagai pelaksana pelayanan penanaman modal di bidang promosi investasi terbaik kesatu tahun 2013 (Banyuwangi, 2015).
- Data terbaru bulan Oktober 2015, Kabupaten Banyuwangi juga kembali meraih penghargaan yang sama dari BKPM Propinsi Jawa Timur sebagai pelaksana pelayanan penanaman modal di bidang promosi investasi terbaik kesatu tahun 2015 (BKPM Jawa Timur, 2015)
- Pada tahun 2013, nilai investasi di Kabupaten Banyuwangi mencapai Rp. 3,2 triliun, angka ini meningkat 175% dari nilai investasi tahun 2012 sebesar Rp. 1,1 triliun (Hidayat, 2014; Jajeli, 2014; Kusbiantoro, 2014).
- Pada tahun 2015, Banyuwangi menjadi terbaik kedua untuk kelompok kabupaten dengan kategori *e-government* dan terbaik ketiga untuk kategori *e-tourism* pada Indonesia Digital Society Award (IDSA) 2015 (IDSA, 2015)
- Berdasarkan pengamatan awal melalui situs utama www.banyuwangikab.go.id sudah mencapai tujuan dari Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2003, standarisasi Depkominfo dan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Inpres tersebut tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan *e-government*. Situs www.banyuwangikab.go.id memuat informasi yang *up to date*, diantaranya berita prestasi dan penghargaan yang dicapai, produk hukum berupa peraturan daerah dan kebijakan investasi, data kependudukan, data wilayah administrasi, selang pandang, struktur pemerintah, laporan perencanaan dan pengalokasian APBD, potensi daerah yang diintegrasikan ke dalam webGIS (*Geographic Information Systems*), dan link yang

menghubungkan ke aplikasi *e-government* yang dimiliki oleh pemkab dan SKPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi seperti pada gambar 4.2.



Gambar 4.2 Salah satu *screenshot* situs utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
(Sumber: www.banyuwangikab.go.id, 2015)

b. Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan kurang lebih selama 3 bulan yaitu bulan Desember – Februari 2016. Untuk lebih detail mengenai waktu beserta aktivitas penelitian dapat dilihat pada tabel 4.1.

4.1.3.2 Setting Informan Penelitian

Peneliti mengambil sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *non probability sampling* yaitu *purposive sampling*. *Purposive sampling* dipilih karena peneliti memilih sampel berdasarkan pertimbangan tertentu yang didasarkan pada topik penelitian ini. Sampel yang dipilih harus mengetahui tentang obyek penelitian ini yaitu terkait *e-government*, *good governance*, dan penanaman modal.

Informan pada penelitian ini dibedakan menjadi dua kelompok yaitu kelompok informan dari internal Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan kelompok eksternal dari pelaku penanam modal (investor) yang melakukan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan informan pada penelitian ini sebagai berikut:

a. Kelompok informan internal

1. Bupati Banyuwangi

- Informasi yang ingin didapatkan: perkembangan pemanfaatan IT dalam pengembangan e-government di Banyuwangi, dampak pemanfaatan e-government terhadap birokrasi pemerintahan, informasi pembentuk daya tarik investasi, penilaian terhadap pemanfaatan e-government di lingkungan pemerintahan.
- Alasan pemilihan informan: secara kapasitas informan tersebut sangat berkompeten dalam memberikan informasi terkait penelitian ini dikarenakan beberapa hal antara lain: (1) informan tersebut merupakan kepala daerah aktif terhitung mulai tahun 2010-2015, dan 2015-2020 praktis informan akan banyak mengetahui tentang apa yang ingin digali dalam penelitian ini. (2) informan tersebut merupakan penggagas konsep Smart Kampung (Kampung Pintar) dimana fokus utama dari konsep tersebut yaitu memaksimalkan IT di desa-desa seluruh Banyuwangi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan meningkatkan mutu masyarakat di desa.

2. Kepala Bidang Penanaman Modal Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Banyuwangi.

- Informasi yang ingin didapatkan: proses pelayanan perizinan investasi, data nilai investasi (PMA dan PMDN), layanan berbasis IT yang digunakan dalam pelayanan perizinan, tata kelola birokrasi di BPPT.
- Alasan pemilihan informan: secara kapasitas informan tersebut dianggap lebih menguasai data dan informasi yang ingin didapatkan oleh peneliti karena menangani bidang penanaman modal yang menjadi fokus penelitian. Tidak menutup kemungkinan akan dibantu oleh staff lain untuk pengumpulan data-data sekunder yang dibutuhkan

3. Kasie Teknologi Informasi Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Banyuwangi.

- Informasi yang ingin didapatkan: data sesuai domain pertama yaitu implementasi *e-government*, informasi dampak yang ditimbulkan oleh implementasi *e-government* terhadap tata kelola di pemerintahan.

- Alasan pemilihan informan: secara kapasitas informan tersebut dianggap lebih menguasai informasi yang dibutuhkan, karena e-government berada dibawah tanggung jawab area kerja Kasie Teknologi Informasi. Selain itu terkait penyusunan Master Plan IT juga dilakukan oleh bidang tersebut. Tidak menutup kemungkinan akan dibantu oleh staff lain untuk pengumpulan data-data sekunder yang dibutuhkan.
4. Kasie. Pengelolaan Data Elektronik Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Kabupaten Banyuwangi
- Informasi yang ingin didapatkan: data terkait *e-government*, data elektronik yang menjadi *core* dari e-government, informasi dampak yang ditimbulkan oleh implementasi *e-government* terhadap tata kelola di pemerintahan.
 - Alasan pemilihan informan: secara kapasitas informan tersebut menjabat sebagai Kasie. PDE yang tupoksinya antara lain yaitu menyusun rencana pengolahan data dan elektronik dan menyajikan dan penyebarluasan informasi elektronik melalui *e-government*.
- b. Kelompok informan eksternal
1. Founder dan CEO UMKM Nagud! Banyuwangi
- Informasi yang ingin didapatkan: validasi hasil penelitian dari informan internal terhadap fakta dilapangan dari sudut pandang penanam modal. Selain itu untuk memvalidasi bahwa keputusan investasi di Banyuwangi salah satunya karena dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan yang baik dimana kondisi tersebut hasil dari implementasi e-government di Pemkab Banyuwangi. Sangat dimungkinkan mendapatkan informasi faktor-faktor diluar topik penelitian yang mendorong informan melakukan penanaman modal di Banyuwangi.
 - Alasan pemilihan informan: informan mewakili kelompok skala investasi UMKM dengan rentang nilai investasi antara kurang dari Rp. 50.000.000 hingga Rp. 500.000.000. Selain itu Nagud! Juga mulai beroperasi sejak tahun 2012 disaat reformasi birokrasi menggunakan IT di Banyuwangi mulai berjalan.

2. Manager Pusat Oleh-Oleh Khas Banyuwangi “Osing Deles”

- Informasi yang ingin didapatkan: validasi hasil penelitian dari informan internal terhadap fakta dilapangan dari sudut pandang penanam modal. Selain itu untuk memvalidasi bahwa keputusan investasi di Banyuwangi salah satunya karena dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan yang baik dimana kondisi tersebut hasil dari implementasi e-government di Pemkab Banyuwangi. Sangat dimungkinkan mendapatkan informasi faktor-faktor diluar topik penelitian yang mendorong informan melakukan penanaman modal di Banyuwangi.
- Alasan pemilihan informan: informan mewakili kelompok skala investasi menengah dengan rentang nilai investasi antara Rp. 500.000.000 hingga Rp. 10.000.000.000. Alasan lain yaitu Osing Deles awalnya pada tahun 2010 sebuah toko art shop di selatan Kota Banyuwangi, pada tahun 2015 membuka art shop yang lebih besar di jantung Kota Banyuwangi.

3. General Manager Hotel Santika Banyuwangi

- Informasi yang ingin didapatkan: validasi hasil penelitian dari informan internal terhadap apa dilapangan dari sudut pandang penanam modal. Selain itu untuk memvalidasi bahwa keputusan investasi di Banyuwangi salah satunya karena dipengaruhi oleh tata kelola pemerintahan yang baik dimana kondisi tersebut hasil dari implementasi e-government di Pemkab Banyuwangi. Sangat dimungkinkan mendapatkan informasi faktor-faktor diluar topik penelitian yang mendorong informan melakukan penanaman modal di Banyuwangi.
- Alasan pemilihan informan: informan mewakili kelompok skala skala investasi besar dengan nilai investasi lebih dari Rp. 10.000.000.000. Hotel Santika mulai beroperasi sejak awal tahun 2014 dengan nilai investasi sebesar Rp. 50 Miliar. Sangat tepat dijadikan informan karena Hotel Santika mulai melakukan pra investasi ketika tata kelola pemerintahan di Banyuwangi sudah baik dan juga implementasi *e-government* juga sudah berjalan

4.1.3.3 Setting Instrumen Penelitian

Jenis instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman wawancara, alat perekam, alat tulis dan sebagainya. Pedoman wawancara ini dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan terbuka yang telah disusun sebelumnya berdasarkan definisi domain pada bab 3 sebelumnya.

4.1.4 Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data akan dilakukan pada kondisi yang alamiah yaitu kondisi subjek sama sekali tidak dijamah oleh perlakuan yang dikendalikan oleh peneliti seperti halnya di dalam penelitian eksperimental. Teknik yang akan digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini antara lain:

4.1.4.1 Studi Pustaka

Teknik pengumpulan data yang pertama yaitu studi pustaka. Studi pustaka dilakukan untuk mengumpulkan data-data dan informasi untuk mendukung latar belakang permasalahan, teori yang berkaitan dengan permasalahan serta data penunjang lainnya. Data-data tersebut diperoleh dari penelitian terdahulu, buku, artikel internet serta sumber pustaka lain yang sesuai dengan penelitian.

4.1.4.2 Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para informan yang mengetahui tentang hal yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dengan wawancara diharapkan diperoleh gambaran umum yang berkaitan dengan penelitian. Wawancara dengan informan menggunakan pedoman wawancara berupa daftar pertanyaan terbuka untuk menggali secara mendalam informasi yang dibutuhkan dalam penelitian.

Pada penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur dan mendalam artinya peneliti menggunakan pedoman wawancara yang akan diajukan pada informan. Apabila data – data yang digali dari wawancara tersebut belum begitu mendalam maka dapat dikembangkan lagi dengan pertanyaan yang lain yang dapat memancing informasi lebih dalam dari informan tapi tetap berada pada fokus penelitian.

4.1.4.3 Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan pada objek penelitian yaitu data pengembangan *e-government* dan data investasi di Kabupaten Banyuwangi. Observasi juga dapat diarahkan ke observasi naturalistik/alamiah terhadap situasi dan pandangan sosial.

4.1.5 Pengamatan Data secara Longitudinal

Pengamatan data secara longitudinal yaitu peneliti mengamati data nilai investasi sebelum diimplementasikannya *e-government* dan sesudah diimplementasikannya *e-government*. Hal ini dilakukan untuk memberi dugaan awal keterkaitan antara implementasi *e-government* dengan peningkatan nilai investasi di Kabupaten Banyuwangi.

4.1.6 Analisis Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data studi kasus. Teknik analisis data studi kasus dilakukan setelah pengumpulan data dilakukan. Tiga (3) teknik analisis studi kasus yang akan digunakan menurut Yin (2003) antara lain:

1. Menjodohkan Pola

Penjodohan pola dilakukan dengan membandingkan pola yang didasarkan atas data di lapangan dan pola yang didasarkan atas kajian teori sebelum pengumpulan data. Jika keduanya terjadi kesamaan, maka hasilnya akan menguatkan validitas internal studi kasus.

2. Membuat Eksplanasi

Tujuan pembuatan eksplanasi yaitu untuk membuat kejelasan kasus yang sedang diteliti. Pembuatan eksplanasi dilakukan dengan cara:

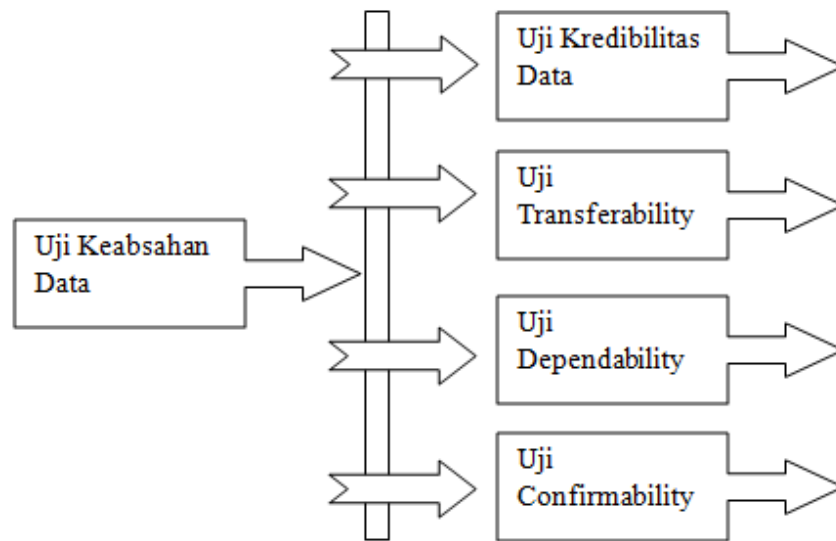
- a. Membuat penjelsan naratif secara berurutan dari pertama sampai dengan akhir.
- b. Serangkaian pengulangan eksplanasi yang dilakukan dengan:
 1. Membuat suatu pernyataan teoritis atau proposisi awal
 2. Membandingkan temuan kasus awal dengan pernyataan prososisi awal

3. Memperbaiki pernyataan teoritis atau proposisi
 4. Membandingkan temuan kasus lebih lanjut untuk memperbaiki proposisi
 5. Memperbaiki kembali proposisi
 6. Begitu seterusnya hingga temuan-temuan telah ditemukan secara lengkap dan dirasa cukup oleh peneliti.
3. Analisis Deret Waktu

Analisis deret waktu ini dilakukan dengan mengikuti pola prosedural suatu tindakan. Deret waktu dapat terjadi dengan berpasangan antara kecenderungan butir-butir dibandingkan dengan kecenderungan teoritis. Pada penelitian ini akan digunakan jenis deret waktu sederhana, karena penelitian ini menggunakan studi kasus tunggal yang hanya melibatkan fenomena tunggal saja.

4.1.7 Pengecekan Keabsahan Data Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti melakukan beberapa uji yang digunakan untuk menjamin validitas data dalam penelitian seperti yang direkomendasikan oleh Sugiyono (2014). Menurut Sugiyono(2014), uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (kredibilitas eksternal), *dependability* (reliabilitas), dan *confirmability* (obyektivitas) seperti pada gambar 4.3 dibawah ini. Penjelasan masing-masing uji keabsahan data telah dibahas pada sub bab 2.1.4.6 Bab 2.



Gambar 4.3 Uji Keabsahan data dalam penelitian kualitatif
(Sumber: Sugiyono, 2014)

BAB 5

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas proses penelitian dan hasil penelitian yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Bab ini menguraikan gambaran umum studi kasus meliputi profil informan, karakteristik informan, tahap pengumpulan data proses analisis data hingga menghasilkan sebuah hasil dari analisis penelitian.

5.1 Gambaran Umum Studi Kasus

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus tunggal. Studi kasus yang digunakan pada penelitian ini yaitu Kabupaten Banyuwangi yang mencakup area pemerintahan maupun lingkungan bisnis di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Informan pada penelitian ini terbagi menjadi dua kelompok yaitu (1) informan dari internal pemerintahan, (2) informan dari sisi penanam modal.

5.1.1 Kualifikasi Studi Kasus

Kualitas penelitian studi kasus sangat bergantung pada kualitas studi kasus itu sendiri. Pada penelitian ini kualifikasi studi kasus sebagai berikut:

1. Daerah yang memiliki grafik peningkatan nilai investasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir.
2. Daerah yang mengalami peningkatan dalam hal perkembangan implementasi e-government dalam beberapa tahun terakhir yang didukung dengan penghargaan-penghargaan terkait.

5.1.2 Karakteristik Studi Kasus

Beberapa karakteristik dari Kabupaten Banyuwangi yang memenuhi kelayakan studi kasus untuk penelitian ini antara lain:

1. Nilai investasi di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Nilai investasi pada tahun 2010 sebesar Rp. 272 miliar dan terus meningkat hingga tahun 2014 yang mencapai Rp. 3,4 triliun.
2. Kabupaten Banyuwangi memperoleh penghargaan Investment Award dua tahun berturut-turut (2014, 2015) dari Badan Koordinasi

Penanaman Modal sebagai penyelenggara pelayanan penanaman modal terbaik.

3. Kabupaten Banyuwangi memperoleh penghargaan Investment Award tahun 2015 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal di bidang promosi investasi terbaik kesatu tahun 2015.
4. Kabupaten Banyuwangi dinobatkan sebagai Kota Digital Society pertama di Indonesia oleh Kemenkominfo pada tahun 2013 pada Indonesia Digital Society Award (IDSA) tahun 2013.
5. Kabupaten Banyuwangi menjadi terbaik kedua untuk kelompok kabupaten dengan kategori e-government dan terbaik ketiga untuk kategori e-tourism pada Indonesia Digital Society Award (IDSA) tahun 2015.
6. Dari sisi implementasi e-government, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah memiliki banyak layanan online yang memiliki fungsi dan konsep e-Office, e-Planning, e-Procurement, e-Performance, e-Audit.
7. Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2014 telah meluncurkan layanan online untuk permohonan perizinan SIUP, TDP, IMB, HO, dan lain-lain melalui alamat sipo.banyuwangikab.go.id.

5.1.3 Kualifikasi Informan

Penentuan sampel yang akan menjadi informan dalam penelitian kualitatif sangat berbeda dengan penelitian kuantitatif. Pemilihan informan harus memenuhi kualifikasi informan penelitian, dengan harapan supaya informasi yang diperoleh saat pengumpulan data memiliki kualitas yang sangat baik dari segi validitas. Pada penelitian ini, peneliti menetapkan beberapa kualifikasi yang harus dipenuhi supaya layak menjadi informan. Kualifikasi tersebut antara lain:

- a. Pejabat pemerintah yang mampu dan terpercaya dalam memberikan data dan informasi terkait segala hal yang berkaitan dengan pengembangan IT di Kabupaten Banyuwangi khususnya e-government.

- b. Pejabat pemerintah yang mampu dan terpercaya dalam memberikan data dan informasi terkait segala hal yang berkaitan dengan proses pelayanan perizinan dan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi.
- c. Pejabat pemerintah yang mampu dan terpercaya dalam memberikan informasi terkait perkembangan kemajuan investasi di Kabupaten Banyuwangi.
- d. Pejabat pemerintah yang mampu dan terpercaya dalam memberikan informasi terkait dampak implementasi e-government terhadap birokrasi di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- e. Penanam modal skala mikro dan kecil (nilai investasi Rp. 0 – Rp. 500 juta) yang mulai menjalankan usahanya di Kabupaten Banyuwangi setelah tahun 2011 atau beroperasi sebelum tahun 2011 namun nilai investasinya semakin bertambah setelah tahun 2011.
- f. Penanam modal skala menengah (nilai investasi Rp. 500 juta – Rp. 10 miliar) yang mulai menjalankan usahanya di Kabupaten Banyuwangi setelah tahun 2011 atau beroperasi sebelum tahun 2011 namun nilai investasinya semakin bertambah setelah tahun 2011.
- g. Penanam modal skala besar (nilai investasi > 10 miliar) yang mulai menjalankan usahanya di Kabupaten Banyuwangi setelah tahun 2011 atau beroperasi sebelum tahun 2011 namun nilai investasinya semakin bertambah setelah tahun 2011.

5.1.4 Karakteristik Informan

Pemilihan karakteristik informan menggunakan teknik purposive sampling dimana memilih informan dengan menggunakan pertimbangan / kriteria-kriteria. Pada penelitian ini peneliti memilih informan yang sesuai dengan kualifikasi informan seperti yang dijelaskan pada bagian 5.1.3 diatas. Berikut adalah profil informan dalam penelitian ini:

5.1.4.1 Profil Informan Internal (Pemerintah)

1. Profil Informan 1 : Bupati Banyuwangi

Nama : Abdullah Azwar Anas, M.Si
Usia : 43 Tahun
Jabatan : Bupati Banyuwangi periode 2010 -2015 dan 2016 – 2021

Informan 1 merupakan Bupati Banyuwangi periode 2010-2015 dan 2016-2021 yang saat ini masih aktif menjabat. Sejak memimpin Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2010, informan langsung mereformasi birokrasi di segala aspek secara bertahap. Aspek lain diluar pemerintahan pun turut dibenahi secara bertahap. Salah satu komponen yang dijadikan alat untuk mereformasi birokrasi adalah melalui IT. Beberapa aplikasi/layanan online dibangun untuk meningkatkan kualitas pelayanan pemerintahan baik untuk manajemen internal pemerintahan maupun pelayanan publik terhadap masyarakat. Dimasa kepemimpinan informan ini pula titik balik penguatan komponen IT di Kabupaten Banyuwangi dimulai. Kerjasama dengan pihak swasta gencar dilakukan untuk membantu program penguatan IT salah satunya kerjasama dengan PT. Telkom yang ditandatangani pada tahun 2013 dengan mengusung program pengadaan 1000 titik @wifi.id pada awalnya dan hingga kini berkembang menjadi 1400 titik yang tersebar di seluruh kantor pemerintah, ruang publik, RTH, sekolah dan pusat aktivitas warga di desa.

Dibawah kepemimpinan informan, banyak penghargaan yang diraih baik secara individual maupun pemerintahan. Penghargaan People of The Year tahun 2013, penghargaan bupati inovatif di bidang kesehatan, penghargaan Inspiring Young Leader tahun 2014 oleh Presiden Joko Widodo, Best Marketer regent tahun 2015 dari Media Group, Tokoh Republika tahun 2015, Kepala Daerah Inovatif tahun 2015, dan Marketeer of The Year tahun 2015 merupakan beberapa penghargaan individual yang diraih oleh informan selama menjabat sebagai Bupati Banyuwangi. Selain itu penghargaan untuk Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga banyak diraih dibawah kepemimpinan informan ini (data terlampir).

2. Profil Informan 2 : Kepala Bidang Penanaman Modal BPPT

Nama : Ilzam Nuzuli, SE.
NIP : 19750923 200501 1 002
Usia : 41 Tahun
Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi

Informan 2 merupakan Kepala Bidang Penanaman Modal di BPPT. Bidang penanaman modal memiliki tugas pokok menyusun dan menetapkan kebijakan pengembangan penanaman modal daerah. Sedangkan informan selaku Kepala Bidang Penanaman Modal sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 63 Tahun 2011 mempunyai tugas diantaranya menyusun rencana bidang penanaman modal, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanaman modal. Pemilihan informan sangat tepat karena sesuai kapasitas, informan sangat paham dengan konteks informasi yang ingin digali oleh peneliti khususnya terkait penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi.

3. Profil Informan 3 : Kasie. Teknologi Informasi Dishubkominfo

Nama : Agustinus Suko Basuki, S.T.
NIP : 19770502 200604 1 026
Usia : 39 Tahun
Jabatan : Kasie. Teknologi Informasi, Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.

Informan 3 merupakan Kasie. Teknologi Informasi di Dishubkominfo Kabupaten Banyuwangi. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2011, Kasie. Teknologi Informasi memiliki beberapa tugas diantaranya menyiapkan database untuk pembangunan dan pengembangan sistem informasi, menyelenggarakan penyusunan panduan pemakaian piranti keras dan piranti lunak, menyelenggarakan pembangunan dan pengembangan sistem bank data Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Sesuai dengan kapasitas,

informan sangat menguasai segala informasi terkait mulai dari rencana, pengembangan hingga evaluasi IT di Kabupaten Banyuwangi. Tugas dan fungsi informan juga memiliki peran penting dalam proses pengembangan e-government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

4. Profil Informan 4 : Kasie. Pengelolaan Data Elektronik Dishubkominfo

Nama : Joni Priyanto, S.ST
NIP : 19720823 200501 1 002
Usia : 44 Tahun
Jabatan : Kasie. Pengelolaan Data Elektronik (PDE), Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuwangi.

Informan 4 merupakan Kasie. Pengelolaan Data Elektronik (PDE) di Dishubkominfo Kabupaten Banyuwangi. Sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 50 Tahun 2011, Kasie PDE memiliki beberapa tugas diantaranya memberikan pelayanan terhadap penggunaan data elektronik, menyajikan / menyebarluaskan informasi, menyelenggarakan pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi, menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi. Secara kapasitas, informan sangat menguasai terkait pengelolaan data elektronik yang diintegrasikan di beberapa aplikasi e-government. Informan lebih menguasai terkait data terkait e-government.

5.1.4.2 Profil Informan Eksternal (Penanam Modal)

1. Profil Informan 5 : Owner UMKM Nagud! Banyuwangi

Nama : Annisa Febby Chaurina
Usia : 26 Tahun
Nama Usaha : Nagud! Banyuwangi
Kelompok Investasi : Investasi Kecil (Rp. 50 juta – Rp. 500 juta)
Nilai Investasi : Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah)



Informan 5 merupakan owner Nagud! Banyuwangi yang merupakan alumni Jurusan Desain Produk ITS. Nagud! Banyuwangi merupakan UMKM yang bergerak di bidang kaos etnik dan oleh-oleh khas Banyuwangi. Awal mula berdirinya pada tahun 2012 seiring dengan momen kemajuan Banyuwangi khususnya di bidang pariwisata. Informan juga merupakan leader salah satu rangkaian Banyuwangi Festival yaitu Banyuwangi Ethno Carnival. Selain mengurus usahanya, informan juga aktif di kegiatan seni dan budaya di Banyuwangi. Prestasi terbarunya yaitu sebagai desainer kostum tradisional Puteri Indonesia Jawa Timur yang meraih 3 (tiga) besar kostum tradisional terbaik di ajang Puteri Indonesia 2016. Selain itu di ajang Miss Supermodel International 2016, kostum yang dipakai oleh Miss Supermodel Indonesia dengan tema “sunar udara barong banyuwangi” juga meraih Best National Costume.

2. Profil Informan 6 : Owner Osing Deles

Nama : dr. Zunita Ahmadah

Usia : 39 Tahun

Nama Usaha : Pusat Kaos dan Oleh-oleh Khas Banyuwangi “Osing Deles”

Kelompok Investasi : Investasi Menengah (Rp. 500 juta – Rp. 10 miliar)

Nilai Investasi : Rp. 5.800.000.000 (lima miliar delapan ratus juta rupiah)



Informan 6 merupakan owner Osing Deles yang juga merangkap sebagai Direktur Utama Rumah Sakit PTP XII Bhakti Husada Banyuwangi. Osing Deles merupakan pusat kaos dan oleh-oleh terbesar di Banyuwangi. Pada tahun 2013 awal mula berdirinya Osing Deles di selatan kota Banyuwangi dengan menempati sebuah ruko dengan nilai investasi sekitar Rp. 1 miliar. Seiring berjalannya waktu dan kemajuan usahanya, owner memutuskan untuk mengembangkan usahanya dengan membuka cabang di pusat kota pada tanggal 26 juni 2015 dengan total nilai investasi awal Rp. 5,8 miliar. Untuk operasional manajemen di toko, owner memiliki manajer toko yang diberi tugas sebagai leader operasional setiap harinya. Gambar 5.1 dan 5.2 dibawah ini merupakan foto Osing Deles cabang Banyuwangi kota.



Gambar 5.1 Osing Deles Tampak Depan
(Sumber : foto pribadi)



Gambar 5.2 Produk Osing Deles
(Sumber : foto pribadi)

3. Profil Informan 7 : Manajer Toko Osing Deles

Nama : Fatati Noeryana
Usia : 30 tahun
Jabatan : Manajer Toko Osing Deles



Informan 7 saat ini menjabat sebagai manajer toko Osing Deles. Wawancara terhadap informan 7 atas rekomendasi dari informan 6 selaku owner Osing Deles. Informan 7 terlibat dalam proses persiapan pembukaan cabang Osing Deles di Kota Banyuwangi termasuk proses pengajuan perizinan pengaturan strategi marketing dan sebagainya. Operasional sehari-hari di Osing Deles dibawah tanggung jawab informan 7.

4. Profil Informan 8 : HRD Manager Hotel Santika Banyuwangi

Nama : S Hadi Putra, S.Psi
Usia : 32 tahun
Jabatan : HRD Manager Hotel Santika Banyuwangi
Nama Usaha : Hotel Santika Banyuwangi
Kelompok Investasi : Investasi Besar (> Rp. 10 miliar)
Nilai Investasi : Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah)



Informan 8 merupakan HRD Manager Hotel Santika Banyuwangi. Informan 8 menjabat sebagai HRD Manager sejak awal beroperasinya Hotel Santika di Banyuwangi yaitu tanggal 11 Maret 2015. Hotel Santika mulai investasi di Banyuwangi sejak tahun 2013 yaitu dimulai dari proses perizinan dan pembangunan hotel. Nilai investasi Hotel Santika di Banyuwangi kurang lebih sebesar Rp. 50 miliar.

5.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan untuk menggali informasi terkait implementasi e-government yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai salah satu cara untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan juga berdampak pada pembentukan daya tarik

investasi di Banyuwangi. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada tujuh informan yang terdiri dari empat informan dari pemerintahan, dan tiga informan dari penanam modal di Banyuwangi. Wawancara dilakukan dengan dua cara, yaitu cara yang pertama dengan mendatangi informan di kantor ataupun dilokasi usaha untuk penanam modal, cara yang kedua wawancara dengan informan 1 (Bupati Banyuwangi) dilakukan dengan tatap muka dan juga wawancara melalui email pribadi. Waktu interview untuk informan pemerintahan dilakukan pada saat jam kerja 08.00 – 16.00, sedangkan untuk informan penanam modal waktu lebih fleksibel dengan perjanjian terlebih dahulu. Wawancara direkam menggunakan ponsel. Selain wawancara, pengumpulan data juga dilakukan dengan mengumpulkan data-data pendukung seperti data investasi, data layanan e-government, data regulasi terkait topik penelitian dan data-data pendukung lainnya yang dibutuhkan.

5.3 Pengamatan Data Secara Longitudinal

Pengamatan data secara longitudinal yaitu peneliti mengamati beberapa data dalam beberapa tahun terakhir. Peneliti menetapkan titik tengah yang menjadi titik pembandingan yaitu tahun 2011. Kurun waktu yang dibandingkan adalah kondisi sebelum tahun 2011 dan sesudah tahun 2011. Pengamatan data longitudinal pada penelitian ini mengamati beberapa data antara lain: (1) data investasi, (2) data implementasi e-government. Penetapan tahun 2011 didasarkan beberapa alasan yang menjadi fakta di lapangan antara lain:

1. Tahun 2011 merupakan momen dimana implementasi IT di Kabupaten Banyuwangi mulai mengalami peningkatan di beberapa aspek seperti infrastruktur, layanan, kebijakan dan lain-lain.
2. Tahun 2011 merupakan momen dimana reformasi birokrasi di Kabupaten Banyuwangi digalakkan melalui pemanfaatan IT untuk pelayanan publik.
3. Tahun 2011 merupakan momen dimana terjadi pelonjakan yang signifikan dalam hal investasi di Kabupaten Banyuwangi.

5.3.1 Perkembangan Implementasi e-Government di Kabupaten Banyuwangi

Implementasi e-government di Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara bertahap sesuai dengan master plan IT yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pengamatan data implementasi e-government ini dilakukan melalui wawancara maupun observasi data fisik berupa laporan maupun gambar pendukung.

5.3.1.1 Data Perkembangan Infrastruktur ICT

- a. Pengamatan melalui dokumen Rencana Strategis Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Peneliti menggunakan dua buah dokumen yaitu (1) Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Pemkab. Banyuwangi Tahun 2008-2012, dan (2) Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Pemkab. Banyuwangi Tahun 2012-2017. Untuk mengamati kondisi implementasi IT sebelum tahun 2011 digunakan dokumen RSTI Tahun 2008-2012 dengan pengambilan data pada tahun 2008, sedangkan kondisi implementasi IT setelah tahun 2011 digunakan dokumen RSTI Tahun 2012-2017 dengan pengambilan data pada tahun 2012. Berikut hasil pengamatan kondisi infrastruktur ICT pada tahun 2008 dan 2012 di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi seperti pada tabel 5.1 dibawah ini.

Tabel 5.1 Perbandingan Kondisi Infrastruktur ICT di Kabupaten Banyuwangi antara tahun 2008 dan tahun 2012

Komponen	Kurun Waktu	
	Sebelum Implementasi e-Gov secara masif (2008)	Setelah Implementasi e-Gov secara masif (2012)
Personal Computer (PC)	<ul style="list-style-type: none">• 75% pemanfaatan PC masih untuk pengetikan, pembuatan laporan. Hanya 25% pemanfaatannya untuk penerapan / penggunaan sistem	<ul style="list-style-type: none">• Rasio jumlah komputer aktif cukup besar yaitu 1 : 3,2.• 10% dari jumlah komputer berupa laptop yang dapat digunakan

	<p>informasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah komputer dengan jumlah pegawai tidak seimbang. Contoh: Dinas Kimpraswil jumlah pegawai 233 orang, namun komputer hanya 1 buah dengan spesifikasi pentium II. • Jumlah komputer secara keseluruhan ada 198 PC, sedangkan pejabat struktural di Pemkab Banyuwangi sebanyak 336 pejabat. 	secara mobile.
Komunikasi Data	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar komputer tanpa koneksi (stand alone). • Hanya sekitar 40% SKPD yang sudah memiliki jaringan LAN. • Koneksi WLAN ke Kantor Arsip dan PDE sebesar 70%, ke Telkom (Speedy) 30%. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekitar 2/3 komputer sudah terhubung dengan LAN/WLAN • 71,4% SKPD sudah memiliki LAN/WLAN. 28,6% belum memiliki jaringan, dan 2/3 nya berada di SKPD kecamatan/kelurahan. • Sekitar 92% SKPD yang sudah memiliki LAN/WLAN terhubung dengan jaringan Dishubkominformasi.

(Sumber : Dokumen RSTI 2008-2012 dan RSTI 2012-2017)

b. Pengamatan melalui wawancara

Hasil pengamatan dengan melakukan wawancara terhadap informan internal pemerintah terkait perkembangan infrastruktur ICT disajikan pada tabel 5.2 dibawah ini.

Tabel 5.2 Pernyataan Penting tentang Perkembangan Infrastruktur ICT dari Para Informan

Pernyataan Penting	Makna Pernyataan
<p>“Kalau untuk ketersediaan LAN di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada umumnya untuk tingkat SKPD sudah terkoneksi semua ada yang memakai media fiber optik (FO) ada juga yang memakai media wireless” (Wcr.Pem.Agus.Stat01)</p> <p>“Kalau LAN seluruh ruangan sudah tersedia, setiap PC sudah tersambung LAN” (Wcr.Pem.Ilzam.Stat01)</p> <p>“Saya rasa sudah banyak peningkatannya, cuma secara nominal berapa-berapanya yang jelas semua SKPD sudah tercover, semua kecamatan sudah tercover, semua desa juga 95% sudah tercover” (Wcr.Pem.Joni.Stat04)</p>	<p>Infrastruktur ICT berupa jaringan LAN (fixed internet) sudah terkoneksi di semua SKPD, kecamatan hingga desa.</p>
<p>“Kita terbentuk tahun 2011, sebelum tahun 2011 kita masih belum menggunakan sistem masih manual. Termasuk wifi, LAN juga masih sangat kurang, memang masa transisi setelah 2011 baru pengadaan wifi dan LAN digenjut” (Wcr.Pem.Ilzam.Stat02)</p> <p>“Jadi begini ya ketersediaan layanan ya semuanya baik LAN maupun yang dikantor kita memang secara bertahap. Tapi, intinya ya katakanlah setelah tahun 2011 dan tahun 2012 itu di semua skpd sudah terkoneksi dengan kita” (Wcr.Pem.Joni.Stat01)</p> <p>“Jadi kalau sampai saat ini terus terang ya jelas banyak peningkatan, ada peningkatannya. Termasuk kita juga sampai ke desa, puskesmas dan sebagainya.” (Wcr.Pem.Joni.Stat03)</p>	<p>Infrastruktur ICT berupa jaringan LAN (fixed internet) mengalami peningkatan secara bertahap. Setelah tahun 2011 mengalami peningkatan yang signifikan.</p>
<p>“Kalau wifi kita di Banyuwangi Digital Society launching tahun 2013. MoU kerjasama dengan telkom salah satu pakatnya adalah pembangunan wifi di sarana publik itu meliputi dari RTH, kemudian ditempat-tempat umum misalkan di kantor pemerintahan, perbankan ataupun pasar atau</p>	<p>Infrastruktur ICT berupa ketersediaan wireless sudah tersedia di sarana publik seperti RTH, kantor pemerintahan, bank dan pasar.</p> <p>Setelah tahun 2013 terjadi peningkatan</p>

<p>segala macamnya. Nah sebelum tahun 2013 kita maksimal hanya di kecamatan atau hanya beberapa desa saja yang aware terhadap akses data. Namun 2013 itu digenjot sangat besar lagi oleh telkom mereka memasang 1200 titik wifi pada awalnya. Sampai sekarang berkembang laporan terakhir 1400 titik.” (Wcr.Pem.Agus.Stat04_Stat05)</p>	<p>yang signifikan dalam hal ketersediaan titik wifi di Banyuwangi.</p> <p>Sebelum tahun 2013 wifi maksimal hanya di kecamatan dan beberapa desa yang aware terhadap akses data.</p>
<p>“Kalau telepon sudah semua lah. Karena Banyuwangi dicanangkan sebagai salah satu pilot project pengembangan broadband, nah saat ini sedang proses migrasi dari penggunaan kabel cooper (coax) diganti dengan FO sampai ke desa pun sudah ada proses migrasi untuk penggantian FO” (Wcr.Pem.Agus.Stat07)</p>	<p>Seluruh kantor pemerintah sudah tersedia saluran telepon.</p> <p>Banyuwangi sedang proses migrasi penggantian kabel cooper (coax) menjadi fiber optik (FO)</p>
<p>“Sudah sudah ada, PC tidak hanya sekedar untuk alat mengetik tapi juga sebagai tools alat bantu untuk bekerja. Kalau kami di TIK ya buat monitoring, instalasi, dan juga hal hal lain yang kaitannya dengan network, kalau yang programmer biasanya untuk coding” (Wcr.Pem.Agus.Stat08)</p> <p>“Nggih, jadi termasuk pengembangan penambahan infrastruktur PC, laptop, gadget dan lain-lain ya ini tentunya pasti juga bertambah”(Wcr.Pem.Joni.Stat05)</p> <p>“Semua personal sudah memiliki untuk masing-masing pelayanan. Di depan ada 2 PC untuk front office, kemudian ada PC 1 unit untuk pemohon, karena kita pelayanannya by sistem jadi setiap pegawai punya PC” (Wcr.Pem.Ilzam.Stat05)</p>	<p>Setiap pegawai / staff sudah memiliki PC masing-masing untuk mendukung pelayanan maupun untuk pekerjaan sehari-hari.</p>
<p>“Ya ada peningkatan, karena sebelum 2011 masih sifatnya offline, jumlah PC nya sangat terbatas masih gantian, tapi karena sekarang masing-masing orang sudah memiliki tupoksi secara online maka dia harus pegang PC sendiri-sendiri.”(Wcr.Pem.Ilzam.Stat06)</p> <p>“Karena memang rata-rata bila dibandingkan sebelum tahun 2011 itu kan komputer masih yang lama-lama, tapi kalau sekarang itu apa ya istilahnya</p>	<p>Dari segi kuantitas telah terjadi peningkatan dibandingkan sebelum tahun 2011. Dari segi kualitas perangkat juga mengalami peningkatan sejak tahun 2011.</p>

itu yang semi portable. Artinya kalau yang digunakan di kantor itu bisa laptop ya, terus PC nya juga menggunakan LCD-LCD yang seperti ini, kemudian juga menggunakan perangkat yang kekinian semacam tablet smartphone dsb” (Wcr.Pem.Joni.Stat06)	
<p>“Dulu kita belum punya server sebagai bantalan dari seluruh aktivitas pelayanan hingga ke kecamatan, sekarang kita sudah punya itu Dishubkominfo. Ada banyak contoh peningkatan lainnya.” (Wcr.Pem.Anas.Stat05)</p> <p>“Dulu bandwidthnya sebelum 2010 hanya 4 MB sekarang sudah 200 MB” (Wcr.Pem.Agus.Stat37)</p> <p>“Termasuk juga penambahan sarana-prasarana dari sisi infrastruktur yang dulu hanya mengandalkan katakanlah hanya gelombang radio dengan bandwidth yang cukup sekian sehingga banyak komplain dari masyarakat yang jauh dari kita (masyarakat di desa) sedikit demi sedikit kita fasilitasi (Wcr.Pem.Joni.Stat36)</p>	Infrastruktur ICT mengalami peningkatan setelah tahun 2011 seperti penambahan sarana-prasarana seperti server, bandwidth, dan lain-lain.

Secara garis besar peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur ICT di Kabupaten Banyuwangi antara sebelum masa implementasi e-Government secara masif (sebelum tahun 2011) dan setelah masa implementasi e-Government secara masif (setelah tahun 2011) disajikan pada tabel 5.3 dibawah ini.

Tabel 5.3 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur ICT di Kabupaten Banyuwangi sebelum dan sesudah masa implementasi e-Government

Komponen	Kurun Waktu	
	Sebelum MasaImplementasi e-Government secara Masif (Sebelum Tahun 2011)	Sesudah MasaImplementasi e-Government secara Masif (Sesudah Tahun 2011)
Jaringan Fixed Internet (LAN)	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar PC tanpa koneksi (stand alone) • Hanya 40% SKPD yang sudah terkoneksi dengan jaringan LAN • Bandwidth 4 MB 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekitar 2/3 dari total PC sudah terkoneksi dengan LAN • Seluruh SKPD, kecamatan dan 95% desa sudah terkoneksi dengan Dishubkominfo • Bandwidth 200 MB

Jaringan Wireless	<ul style="list-style-type: none"> • Belum seluruh SKPD tersedia jaringan wifi. • Maksimal hanya di kecamatan dan beberapa desa yang aware 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersebar di seluruh kantor pemerintahan, rumah sakit, sekolah dan ruang publik (RTH, pasar) di seluruh Banyuwangi • Tahun 2013 sebanyak 1200 titik @wifi.id • Tahun 2015 sebanyak 1400 titik @wifi.id
Saluran Telepon	<ul style="list-style-type: none"> • Masih menggunakan kabel cooper (coax) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sedang proses migrasi dari kabel cooper menjadi kabel fiber optik (FO)
Personal Computer (PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah PC secara keseluruhan 198 buah, sedangkan total pejabat struktural di Pemkab Banyuwangi sebanyak 336 orang 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio jumlah PC dengan Pegawai 1:1

(Sumber: Informan 1,2,3,4 dan Dokumen RSTI)

c. Pengamatan melalui gambar pendukung



Gambar 5.3 Ketersediaan Wifi di Ruang Taman Hijau (RTH)
(Sumber : Foto Pribadi)



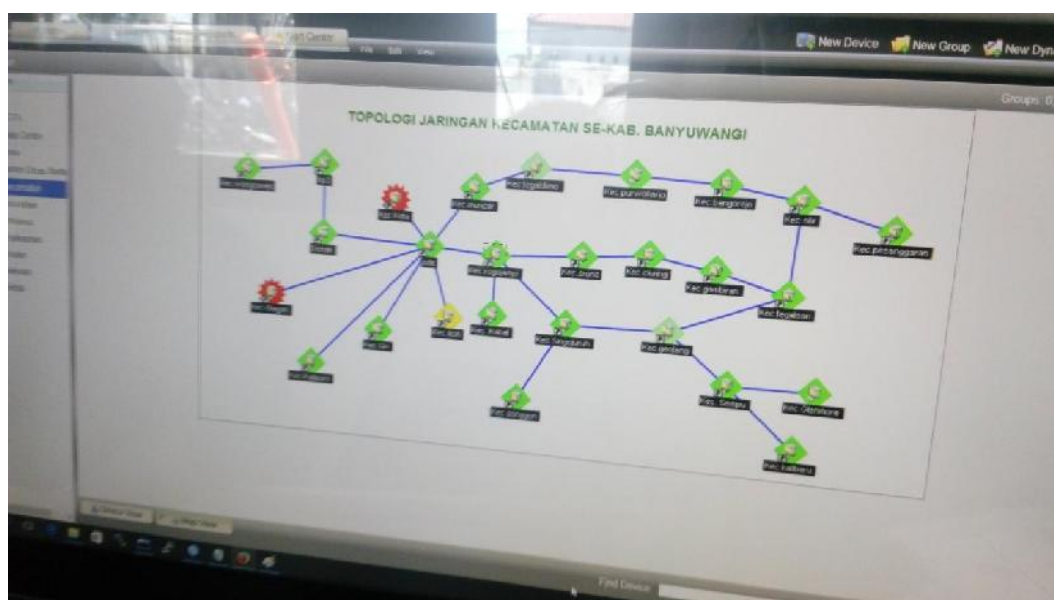
Gambar 5.4 Ketersediaan Wifi di Rumah Sakit
(Sumber : Foto Pribadi)



Gambar 5.5 Ketersediaan Wifi di SKPD (Dinas Kesehatan)
(Sumber : Foto Pribadi)



Gambar 5.6 Ketersediaan Wifi di Sekolah
(Sumber : Foto Pribadi)



Gambar 5.7 Monitoring Konektivitas Koneksi Internet Kecamatan Se-Kab.
Banyuwangi
(Sumber : Foto Pribadi)

5.3.1.2 Data Perkembangan Anggaran IT

- a. Pengamatan melalui dokumen Rencana Strategis Teknologi Informasi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan pengamatan melalui analisis *existing conditions* pada dokumen RSTI tahun 2008-2012 dimana pada saat itu segala proses yang menyangkut pengembangan IT berada dibawah otoritas Kantor Arsip dan PDE, pada tahun 2008 banyak mengalami kendala/permasalahan yang dihadapi dalah satu diantaranya yaitu menyangkut ketersediaan dana. Ketersediaan dana untuk anggaran pengembangan dan pemeliharaan IT pada saat itu masih sangat terbatas. Ketersediaan anggaran disebabkan oleh beberapa kondisi antara lain: (1) secara kelembagaan, Kantor Arsip dan Pengelolaan Data Elektronik masih dalam tingkatan kantor dan belum menjadi sebuah badan, (2) pada saat itu pembangunan teknologi informasi untuk mendukung manajemen pemerintahan daerah belum menjadi prioritas utama dalam pembangunan daerah, (3) anggaran pembangunan IT hanya bergantung pada anggaran daerah (APBD).

Kondisi ketersediaan anggaran IT setelah tahun 2011 mulai meningkat seiring dengan perwujudan dari rencana strategis pengembangan IT. Fokus utama pada tahun 2012 yaitu bagaimana komitmen pemerintah untuk menguatkan infrastruktur berupa perangkat keras dimana sebelum tahun 2012 kondisinya masih sangat jauh dari ideal. Berdasarkan data pada dokumen RSTI tahun 2012-2017, disebutkan bahwa anggaran IT difokuskan untuk pendanaan pengembangan perangkat dan pendanaan perawatan perangkat. Pada tahun 2012, prosentase pendanaan untuk pengembangan perangkat yaitu 79% untuk pengembangan perangkat keras, 15% untuk pengembangan perangkat lunak dan 6% untuk pengembangan perangkat komunikasi. Sedangkan prosentase pendanaan untuk perawatan perangkat yaitu 69% untuk perawatan perangkat keras, 25% untuk perawatan perangkat lunak dan 6% untuk perawatan perangkat komunikasi.

b. Pengamatan melalui wawancara

Tabel 5.4 Pernyataan Penting tentang Perkembangan Anggaran IT dari Para Informan

Pernyataan Penting	Makna Pernyataan
<p>“Jelas meningkat jumlahnya, tetapi terkadang fluktuatif tergantung e... apa namanya modul pengembangan dan pemeliharaanya seperti apa.” (Wcr.Pem.Ilzam.Stat14)</p> <p>“Kalau soal itu saya juga belum pernah bikin grafiknya, tapi secara ini ada peningkatan tapi nggak terlalu banyak per tahunnya. Karena pos-pos anggaran itu menyesuaikan dengan kebutuhan, misalkan tahun ini kita besar sekali anggarannya untuk pembangunan mikrotik di seluruh SKPD tahun depannya kan tinggal pemeliharaan. Jadi tetep menyesuaikan kebutuhan nggak bisa dipatok bahwa harus selalu meningkat. Meningkat iya tapi nggak terlalu tajam menyesuaikan juga dengan pagu anggaran dan kebutuhan.” (Wcr.Pem.Agus.Stat15_Stat16)</p> <p>“Selain dari APBD, kami juga mengajak perusahaan menyalurkan CSR untuk sektor ICT. Setiap tahun ada peningkatan anggaran pengembangan IT, seperti untuk beli bandwidth, namun jumlahnya fluktuatif tergantung kebutuhan.” (Wcr.Pem.Anas.Stat11_Stat13)</p> <p>“Kalau saat ini kita membuat, maka tahun depannya kita tinggal maintenance dan itu anggarannya kecil. Yang jelas itu anggaran untuk maintenance pasti ada.”(Wcr.Pem.Joni.Stat14)</p> <p>“Kalo itu menyangkut termasuk pengelolaan tadi, itu yang jadi salah satu keunggulan banyuwangi, karena sistem kita yang perencanaan (SIKD) sudah menyatu juga dengan penatausahaan keuangan tidak hanya budgeting untuk perncanaan anggaran. Tidak perlu entry dua kali, tapi cukup nanti diambil dari sistem.” (Wcr.Pem.Agus.Stat18)</p>	<p>Anggaran pengembangan IT mengalami peningkatan setiap tahun, namun fluktuatif tergantung kebutuhan.</p> <p>Anggaran IT tidak dapat dipastikan meningkat setiap tahunnya, karena menyesuaikan kebutuhan dan pagu anggaran.</p> <p>Perencanaan anggaran hingga penatausahaan laporan keuangan (anggaran IT) dilakukan menggunakan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD)</p> <p>Selain dari APBD, dana CSR perusahaan turut membantu dalam pengembangan IT di Banyuwangi.</p> <p>Anggaran pemeliharaan selalu ada.</p>

Berdasarkan kutipan wawancara pada tabel 5.4 diatas, ada beberapa pernyataan penting yang dapat disimpulkan terkait kondisi anggaran pengembangan IT di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi diantaranya:

1. Anggaran pengembangan IT mengalami peningkatan setiap tahun, namun fluktuatif tergantung kebutuhan.
2. Anggaran IT tidak dapat dipastikan setiap tahun, karena menyesuaikan dengan kebutuhan dan pagu anggaran.
3. Besar kecilnya anggaran tergantung kebutuhan dan pagu anggaran. Misalnya, tahun ini anggaran besar untuk pembangunan mikrotik di seluruh SKPD maka tahun depan tinggal pemeliharaan dan anggarannya kecil.
4. Pos anggaran yang selalu disediakan yaitu untuk alokasi dana pemeliharaan (maintenance).
5. Selain dari dana APBD, dana CSR dari perusahaan swasta seperti Telkom turut membantu dalam pengembangan IT di Kabupaten Banyuwangi salah satu contoh melalui program pemasangan 1.400 titik @wifi.id di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi. Contoh lain yaitu migrasi kabel FO yang dilakukan oleh provider seperti Biznet, Telkomsel, Indosat.
6. Prosedur penggunaan anggaran IT sudah tersistem mulai dari perencanaan, pencairan dana hingga penatausahaan laporan penggunaan dana di Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD).

5.3.1.3 Data Perkembangan Aplikasi e-Government

Dari sisi jumlah dan jenis aplikasi e-Government yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Untuk menganalisis perkembangan aplikasi, peneliti menggunakan dokumen RSTI, wawancara maupun menggunakan data master layanan online yang ada.

- a. Kondisi pengembangan e-Government sebelum tahun 2011 dilihat dari sisi aplikasi.

Berdasarkan analisis *existing conditions* pada dokumen RSTI tahun 2008-2012, disebutkan bahwa jumlah aplikasi untuk mendukung manajemen pemerintahan di masing-masing unit kerja masih kurang memadai. Disamping dari segi jumlah masih kurang, fungsi aplikasi pun tidak berfungsi secara optimal

dikarenakan tidak sesuainya aplikasi yang ada dengan proses bisnis yang ada di Pemkab Banyuwangi dan juga tidak adanya SDM yang memiliki kualitas yang memadai dalam pengelolaan aplikasi tersebut. Selain itu, sebagian besar aplikasi yang dibangun pada saat itu tidak berbasis open source sehingga pemeliharaannya sangat bergantung pada pengembang aplikasi yang seringkali sulit dihubungi dan membutuhkan waktu yang relatif lama dan biaya yang mahal untuk mendatangkannya. Berikut adalah daftar aplikasi yang ada di Pemkab Banyuwangi pada tahun 2008.

Tabel 5.5 Daftar Aplikasi e-Government di SKPD Pemkab Banyuwangi Tahun 2008

No	Aplikasi	SKPD Pengelola	Fungsi
1	INOVA	Sekda Bag.Keuangan, Bag.Pembangunan, Bag.Pemerintahan	Aplikasi keuangan
2	SI AK	Dispenduk	Aplikasi kependudukan
3	SIMPEG	BKD, Dinas Kesehatan dan KB, Dinas Kimpraswil	Aplikasi kepegawaian
4	SIMKUDA	Sekda Bag.Keuangan dan Bag.Umum	Aplikasi keuangan
5	SIMAKDA	Sekda Bag.Keuangan	Aplikasi keuangan
6	SI ADINDA	Dinas Perikanan dan Kelautan	Aplikasi keuangan
7	SISPT	Dinas Perikanan dan Kelautan	Pengolahan data perikanan
8	SISKO	Dinas Perindag, Penanaman Modal dan Koperasi	Aplikasi untuk pengelolaan koperasi
9	SAIPID	Dinas Perindg, Penanaman Modal dan Koperasi	Aplikasi perindustrian
10	DJIKM	Dinas Perindag, Penanaman Modal dan Koperasi	Direktori IKM
11	SIDDIKNAS	Dinas Pendidikan	Keperluan surat-menyerat
12	SCHOOLMAPPING	Dinas Pendidikan	Surat keterangan dan Ijasah
13	PADATIWEB	Dinas Pendidikan	Membuat Laporan
14	KANTAYA	Kantor Arsip dan PDE	Office automation

15	SIM ARSIP	Kantor Asip dan PDE	Aplikasi Kearsipan
16	SIMDA	Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan	Sistem Informasi Manajemen Daerah
17	CBS	RSUD Genteng	Data pasien

(Sumber: Dokumen RSTI Pemkab Banyuwangi Tahun 2008-2012)

Berdasarkan data diatas, dapat diambil beberapa kesimpulan terkait kondisi implementasi e-Government sebelum tahun 2011 dilihat dari sudut pandang aplikasi antara lain:

1. Untuk pengelolaan keuangan, masih belum adanya sebuah sistem besar yang berfungsi untuk pengelolaan keuangan di seluruh SKPD. Sistem keuangan yang ada masih bersifat sektoral, antar SKPD berbeda sistem keuangan sehingga integrasi (*sharing*) data masih sulit dilakukan.
2. Aplikasi yang ada masih berfokus untuk pelayanan internal SKPD, belum ada satu pun aplikasi yang berfungsi untuk pelayanan publik terhadap masyarakat dan bisnis.
3. Dilihat dari kepemilikan aplikasi, ego sektoral antar SKPD masih sangat tinggi. Hal ini dibuktikan dengan minimnya sharing data antar SKPD melalui aplikasi yang terintegrasi oleh seluruh SKPD.
4. Aplikasi yang ada masih belum mampu mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan efektif (*good governance*). Aplikasi yang ada belum memenuhi konsep transparansi, akuntabilitas, responsif maupun efektifitas dan efisiensi birokrasi.

Beberapa uraian diatas diperkuat dengan pernyataan dari informan tentang kondisi implementasi e-government sebelum tahun 2011 yang dilihat dari sisi aplikasi. Berikut pernyataan informan tentang kondisi implementasi e-government sebelum tahun 2011 yang menguatkan uraian diatas.

Wcr.Pem.Joni.Stat17: “Pengalaman dari kami biasanya kalau kebutuhan IT(aplikasi/SIM) itu dipenuhi dari kita tanpa kita memperhatikan kebutuhan SKPD **kadang-kadang mereka tidak mau pakai**. Tapi **sekarang sejak 5 tahun** yang lalu jadi kita itu membuat sesuai dengan kebutuhan dia, dia yang usul jadi kita sebagai konsultannya (pembuatan aplikasi, penambahan infrastruktur) nah itu perlu dikonsultasikan dengan kita harapannya adalah biar matching barangkali ada data yang diintegrasikan”.

Wcr.Pem.Joni.Stat18: “Beda dengan dulu ketika **katakanlah SKPD membuat aplikasi kepada pihak ketiga tanpa konsultasi terlebih dahulu** ke kita itu **masih pulau-pulau (ego sektoral tinggi)** semacam **ada ketergantungan misalnya data tidak bisa diintegrasikan**, alat pun juga tidak bisa disharing”.

Wcr.Pem.Joni.Stat46: “Kalau dulu ya katakanlah sebelum kita pakai sistem online, **data akan terjadi banyak perbedaan** tapi kalau sekarang karena kita memakai 1 acuan (misalkan SIMRAL) **pasti keakuratan data akan valid**. Terus juga seperti yg saya sampaikan diawal **sekarang kalau kita mau minta data nggak perlu menunggu besok** atau besok lusa, **sekarang-sekarang kita bisa** jadi kaitannya dengan setelah diimplementasikannya egov **pelayanan birokrasi akan semakin cepat dan efisien**”.

Wcr.Pem.Joni.Stat48: “Kalau dulu **sistem perencanaan berdiri sendiri** dibawah otoritas BAPPEDA (ada sistem sendiri), **kemudian perencanaan anggaran juga di BAPPEDA juga masih manual**. Terus bagian keuangan itu sendiri (**masih manual juga tahun 2007**) yang menangani proses pencairan dana dan penatausahaan keuangan. Bila dibandingkan dengan menggunakan sistem ini (SIKD) **jauh lebih efektif** kalau kita bicaranya sekarang”.

- b. Kondisi pengembangan e-Government setelah tahun 2011 dilihat dari sisi aplikasi.

Sejak tahun 2011, pemerintah memasukkan IT sebagai fokus pembangunan khususnya untuk mereformasi birokrasi. Seiring dengan dibentuknya Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika pada tahun 2011 dengan dimasukkannya bidang informatika dan data ke dalam struktur organisasi Dishubkominfo dan didukung dengan Perbup No.1 tahun 2010 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah dan RPJMD tahun 2010-2015, segala sesuatu yang berkaitan dengan pengembangan IT di SKPD harus dikoordinasikan dengan Dishubkominfo. Beberapa aplikasi yang telah ada sebelumnya sebagian tidak dipakai dan dibuat ulang, namun ada juga yang dikembangkan lebih lanjut. Hal ini karena beberapa alasan diantaranya: (1) aplikasi tidak berbasis kode terbuka (*open source*) sehingga menyulitkan pengembangan modul-modul, (2) beberapa unit atau bagian yang dahulu tergabung dalam satu SKPD sekarang lepas dan menjadi dinas/badan sendiri seperti penanaman modal yang dibentuk menjadi Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) pada tahun 2011 dan Kantor Arsip dan PDE yang dihapus dan digabungkan dengan Dishubkominfo, dan secara proses bisnis dan kewenangan otomatis berubah total.

1. Data situs resmi SKPD dan kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Salah satu wujud nyata dari pengembangan e-Government yaitu melalui situs resmi pemerintah. Tabel 5.6 dibawah ini merupakan data situs resmi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hingga saat ini.

Tabel 5.6 Daftar Situs Resmi SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

No	Dinas / Badan	Alamat Situs	Status Situs
1	Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	banyuwangikab.go.id	Aktif
2	BAPPEDA	bappeda.banyuwangikab.go.id	Aktif
3	BPPT	bppt.banyuwangikab.go.id	Aktif
4	Inspektorat	inspektorat.banyuwangikab.go.id	Aktif
5	DISHUBKOMINFO	dishubkominfo.banyuwangikab.go.id	Aktif
6	Dinas Kesehatan	dinkes.banyuwangikab.go.id	Aktif
7	Dinas Pemuda dan Olahraga	dispora.banyuwangikab.go.id	Aktif
8	Dinas Pendidikan	pendidikan.banyuwangikab.go.id	Aktif
9	Dinas Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	distanhutbun.banyuwangikab.go.id	Aktif
10	DPRD	dprd.banyuwangikab.go.id	Aktif
11	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	dkp.banyuwangikab.go.id	Aktif
	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	dispendukcapil.banyuwangikab.go.id	Aktif
12	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan	disperindagtam.banyuwangikab.go.id	Aktif
13	Dinas PU Pengairan	pengairan.banyuwangikab.go.id	Aktif
14	Dinas Pendapatan	dispenda.banyuwangikab.go.id	Aktif
15	Dinas Peternakan	disnak.banyuwangikab.go.id	Aktif
16	Badan Kepegawaian Daerah (BKD)	bkd.banyuwangikab.go.id	Aktif
17	Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)	bpbd.banyuwangikab.go.id	Aktif
18	Badan Lingkungan Hidup (BLH)	blh.banyuwangikab.go.id	Aktif
19	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol)	kesbangpol.banyuwangikab.go.id	Aktif

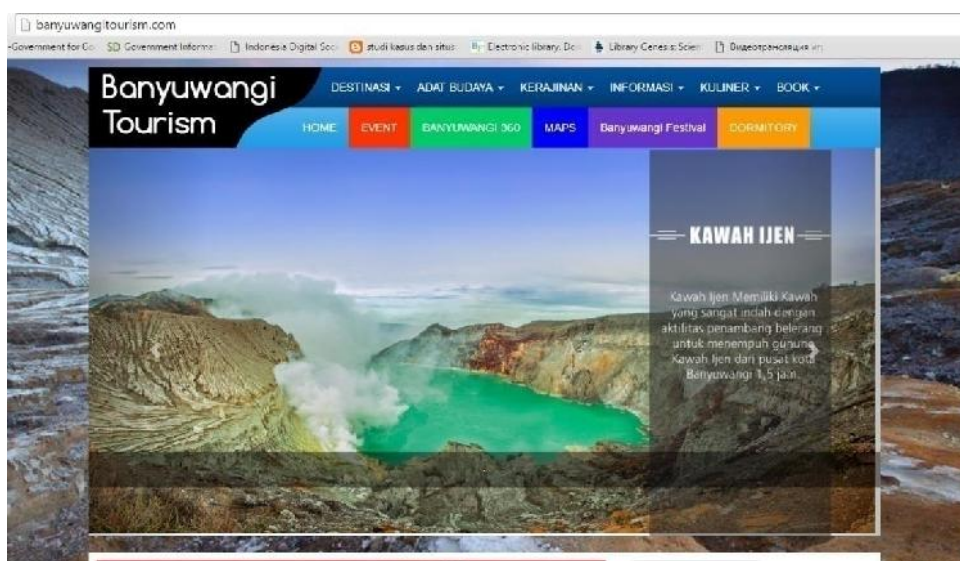
20	Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB	bppkb.banyuwangikab.go.id	Aktif
21	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa	bpm.banyuwangikab.go.id	Aktif
22	Dinas Pariwisata	banyuwangitourism.com	Aktif
23	Dinas PU Bina Marga	dinaspu.banyuwangikab.go.id	Aktif
24	Dinas Kelautan dan Perikanan	diskanlabwi.blogspot.co.id	Aktif
25	Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi	<i>belum memiliki situs</i>	Tidak
26	Puskesmas Kelurahan Sobo	pkmsobo.banyuwangikab.go.id	Aktif
27	RSUD Banyuwangi	rsudbwi.banyuwangikab.go.id	Aktif
28	Klinik UMKM Dinas Koperasi	klinikumkm.banyuwangikab.go.id	Aktif
29	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	<i>belum memiliki situs</i>	Tidak
30	Dinas Koperasi dan UMKM	diskopumkm.banyuwangikab.go.id	Aktif
31	Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi	perpusda.banyuwangikab.go.id	Aktif

(Sumber: Dishubkominfo Banyuwangi)

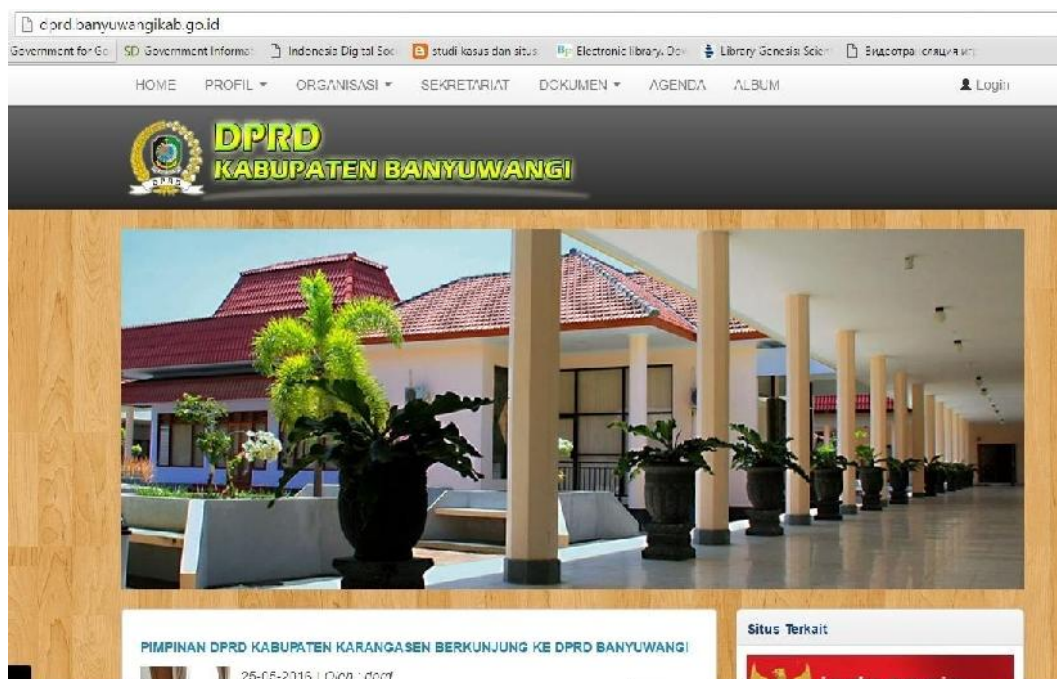
Dari 31 dinas dan badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, hanya dua dinas dan badan yang belum memiliki situs resmi yaitu Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Peneliti melakukan pengecekan secara langsung dengan mengakses masing-masing alamat situs tersebut untuk memastikan situs masih aktif dan dapat diakses. Berikut adalah beberapa tampilan situs resmi dari SKPD seperti pada gambar 5.8 sampai dengan 5.10.



Gambar 5.8 Tampilan Situs Resmi Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi
(Sumber: dispora.banyuwangikab.go.id)



Gambar 5.9 Tampilan Situs Resmi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Banyuwangi
(Sumber: banyuwangitourism.com)



Gambar 5.10 Tampilan Situs Resmi DPRD Kab. Banyuwangi
(Sumber: dprd.banyuwangikab.go.id)

Selain dinas dan badan pemerintah, SKPD kecamatan juga didorong untuk membuat dan mengoptimalkan situs untuk mempublikasikan kegiatan dan informasi yang berguna bagi masyarakat. Hal ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Bupati Banyuwangi No. 555 tahun 2012 tentang optimalisasi pemanfaatan website. Tabel 5.7 dibawah ini merupakan daftar alamat situs pemerintah kecamatan di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 5.7 Daftar Situs Resmi Pemerintah Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi

No	Kecamatan	Alamat Situs	Status
1	Kecamatan Pesanggaran	pesanggaran.banyuwangikab.go.id	Aktif
2	Kecamatan Siliragung	siliragung.banyuwangikab.go.id	Aktif
3	Kecamatan Bangorejo	bangorejo.banyuwangikab.go.id	Aktif
4	Kecamatan Purwoharjo	purwoharjo.banyuwangikab.go.id	Aktif
5	Kecamatan Tegaldlimo	tegaldlimo.banyuwangikab.go.id	Aktif
6	Kecamatan Muncar	muncar.banyuwangikab.go.id	Aktif
7	Kecamatan Cluring	cluring.banyuwangikab.go.id	Aktif
8	Kecamatan Gambiran	gambiran.banyuwangikab.go.id	Aktif
9	Kecamatan Tegalsari	tegalsari.banyuwangikab.go.id	Aktif
10	Kecamatan Glenmore	glenmore.banyuwangikab.go.id	Aktif
11	Kecamatan Kalibaru	kalibaru.banyuwangikab.go.id	Aktif
12	Kecamatan Genteng	genteng.banyuwangikab.go.id	Aktif

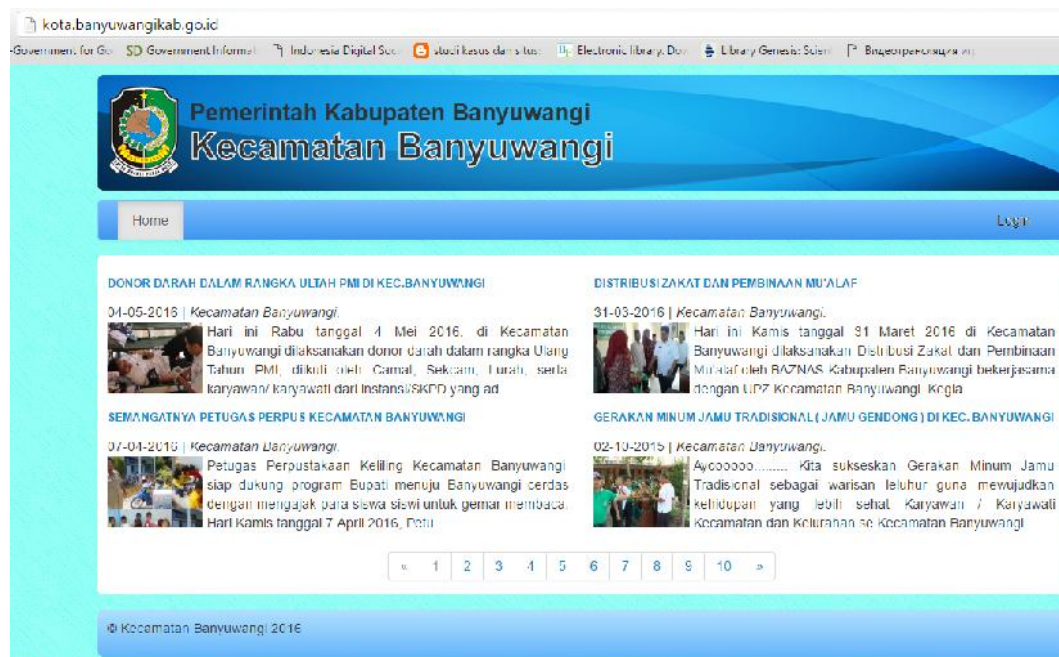
13	Kecamatan Srono	srono.banyuwangikab.go.id	Aktif
14	Kecamatan Rogojampi	rogojampi.banyuwangikab.go.id	Aktif
15	Kecamatan Kabat	kabat.banyuwangikab.go.id	Aktif
16	Kecamatan Singojuruh	singojuruh.banyuwangikab.go.id	Aktif
17	Kecamatan Sempu	sempu.banyuwangikab.go.id	Aktif
18	Kecamatan Songgon	songgon.banyuwangikab.go.id	Aktif
19	Kecamatan Glagah	glagah.banyuwangikab.go.id	Aktif
20	Kecamatan Licin	licin.banyuwangikab.go.id	Aktif
21	Kecamatan Banyuwangi	kota.banyuwangikab.go.id	Aktif
22	Kecamatan Giri	giri.banyuwangikab.go.id	Aktif
23	Kecamatan Kalipuro	kalipuro.banyuwangikab.go.id	Aktif
24	Kecamatan Wongsorejo	wongsorejo.banyuwangikab.go.id	Aktif

(Sumber: Dishubkominfo Banyuwangi)

Dari data diatas dapat diketahui bahwa saat ini seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Banyuwangi telah memiliki situs resmi yang berfungsi untuk menyebarluaskan informasi berupa kegiatan pemerintah, kegiatan masyarakat, sosialisasi dan lain-lain. Peneliti melakukan pengecekan secara langsung dengan mengakses masing-masing alamat situs tersebut untuk memastikan situs masih aktif dan dapat diakses. Berikut adalah beberapa tampilan situs resmi kecamatan yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.



Gambar 5.11 Tampilan Situs Resmi Kecamatan Purwoharjo
(Sumber: purwoharjo.banyuwangikab.go.id)



Gambar 5.12 Tampilan Situs Resmi Kecamatan Banyuwangi
(Sumber: kota.banyuwangikab.go.id)



Gambar 5.13 Tampilan Situs Resmi Kecamatan Genteng
(Sumber: kota.banyuwangikab.go.id)

Berdasarkan hasil pengecekan langsung ke seluruh alamat situs pemerintah kecamatan, ada beberapa kesimpulan yang didapat antara lain:

1. Seluruh alamat situs pemerintah kecamatan masih aktif dan berfungsi.
2. Tampilan situs antara kecamatan sama, karena menggunakan satu *template* yang sama.
3. Fungsi keseluruhan situs sama yaitu untuk menyebarluaskan informasi kegiatan kecamatan, program pemerintah maupun informasi lain yang berguna bagi masyarakat.
4. Sebagian besar situs update dalam memperbarui informasi (konten) yang ada di situs, namun beberapa situs juga masih kurang update dalam memperbarui informasi (konten) di situs seperti pada gambar 5.11 dan 5.13 diatas.

2. Data aplikasi e-Government yang ada di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Hingga saat ini, telah banyak dikembangkan aplikasi-aplikasi yang mendukung reformasi birokrasi dan juga untuk mendukung perwujudan *good governance* di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Berikut adalah daftar aplikasi e-Government yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 5.8 Daftar aplikasi pendukung e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

No	Nama Aplikasi	Fungsi Aplikasi	Alamat	Tahun
1	SIKD	Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Monitoring laporan keuangan daerah.	sikd.banyuwangikab.go.id	2009
2	Layanan Pengaduan	Layanan pengaduan masyarakat	pengaduan.banyuwangikab.go.id	2011
3	GIS Banyuwangi	Sistem informasi geografis terintegrasi beberapa data	gis.banyuwangikab.go.id	2015
4	TKPK	Untuk manajemen tim TKPK dalam menurunkan angka kemiskinan.	tkpk.banyuwangikab.go.id	2014
5	SISMIOP	Pendaftaran, penilaian, pendataan, serta pengolahan data objek dan subjek pajak bumi dan bangunan (PBB)	pbb.banyuwangikab.go.id	2012
6	SIMPEG	Manajemen kepegawaian	simpeg.banyuwangikab.go.id	2014
7	SIMBPPT	Manajemen pelayanan perizinan	simbppt.banyuwangikab.go.id	2014
8	PPID	Pengelolaan informasi dan dokumentasi publik	ppid.banyuwangikab.go.id	2014

10	JDIH	Jaringan dokumentasi dan informasi hukum	jdih.banyuwangikab.go.id	2015
11	One Stop Service	Pelayanan publik berupa pengurusan segala surat keterangan di kelurahan dan kecamatan	portal.banyuwangikab.go.id	2010
12	e-Village Budgeting (e-VB)	Perencanaan, tata kelola, dan evaluasi anggaran pemerintah desa	evb.banyuwangikab.go.id	2014
13	e-Monitoring System (e-MS)	Monitoring pembangunan desa	ems.banyuwangikab.go.id	2015
14	SIPO	Pendaftaran perizinan online	sipo.banyuwangikab.go.id	2014
15	SIM LPPD	Pengisian dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah daerah	portal.banyuwangikab.go.id/lppd	2015
16	SIM LPPDes	Pengisian dan pelaporan penyelenggaraan pemerintah desa	portal.banyuwangikab.go.id/lppdes	2015
17	SABA	Administrasi persuratan	saba.banyuwangikab.go.id	2011
18	SIMBADA	Manajemen barang dan aset daerah	siva.banyuwangikab.go.id	2014
19	e-Kinerja	Penilaian kinerja PNS	kinerja.banyuwangikab.go.id	2015
20	Lahir Procot Pulang Bawa Akta	Pengurusan akta kelahiran online	akta.banyuwangikab.go.id	2014
21	Banyuwangi-Mall.com	Marketplace online UMKM	banyuwangi-mall.com	2016
22	Helpdesk IT	Pengaduan teknis IT	helpdesk.banyuwangikab.go.id	2014
23	Si Jempol Sehat Si Jempol Wangi	Sistem terintegrasi dengan 85 lembaga pelayanan kesehatan (RS, Puskesmas, Klinik) untuk mendukung pelayanan kesehatan yang optimal.		2012
24	Sistem Informasi manajemen Puskesmas (SIMPUSWANGI)	Manajemen Puskesmas (registrasi loket, pelayanan poli, aset puskesmas, dll)	dinkes.banyuwangikab.go.id/simpus/pelayanan/index.php	2012
25	LPSE	Pengadaan secara online	lpse.banyuwangikab.go.id	2009
26	Zone Minder	Aplikasi integrasi monitoring CCTV	live.banyuwangikab.go.id/cctv	2014
27	PBB Online	Pembayaran PBB online		2012
28	PKB Online	Pembayaran pengujian kendaraan bermotor online melalui Bank Jatim		2015
29	PPDB Online	Penerimaan siswa baru online	ppdb2.banyuwangikab.go.id	2015
30	e-Demografi	Pusat data terintegrasi Banyuwangi	demografi.banyuwangikab.go.id	2015
31	Banyuwangi in your Hand	Aplikasi Augmented Reality berbasis android		2014

32	Banyuwangi Sunrise of Java	Aplikasi pariwisata berbasis android		2014
33	SMS Center	Kritik dan Saran	082131545555	2014
34	Call Center Ambulance	Call Center Ambulance	118	2014
35	Perpustakaan Digital	Layanan perpustakaan berbasis online	perpusda.banyuwangikab.go.id	2014

(Sumber: Dishubkominfo Banyuwangi)

Secara keseluruhan, kondisi penerapan e-Government apabila dibandingkan dengan kondisi sebelum tahun 2011 dan kondisi sekarang sudah mengalami peningkatan yang signifikan baik dari segi kualitas, kuantitas, hingga budaya (culture). Selain perkembangan dari segi kualitas dan kuantitas seperti yang telah diuraikan diatas, peningkatan lainnya yaitu pada aspek SDM dan ego sektoral antar SKPD. Sebelum tahun 2011, SDM masih nyaman dengan budaya manual dan ketika pemerintah mencoba menerapkan aplikasi IT ke dalam manajemen internal tingkat resistensi atau penolakannya sangat tinggi. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari informan sebagai berikut:

Wcr.Pem.Joni.Stat09: “Tapi kalau dibandingkan dengan sebelum 2011 dan sekarang ini memang **bisa dibilang resistensi SKPD berkurang**. Kalau dulu masih memikirkan “duh nanti gimana ya, bisa apa nggak ya”, tapi sekarang sudah nggak. Nanti ini menggunakan sistem online, mereka sudah ngerti dan nggak resistensi lagi. Artinya kalau kita membandingkan antara sebelum 2011 dan saat ini **pastinya sudah banyak peningkatan**.”

Wcr.Pem.Joni.Stat19: “Tetapi setelah **katakanlah 5 tahun sejak danya perbup dan peraturan** lain teman-teman di SKPD **mulai memikirkan o dengan adanya aplikasi itu mudah**. Dan juga dengan adanya instruksi untuk membuat **program unggulan / inovasi** mereka **dituntut untuk membuat inovasi nah kalau bidang IT** itu pasti nggak mubadzir karena sesuai dengan kebutuhan SKPD.”

Wcr.Pem.Joni.Stat27: “Kita kemarin joke (bercanda) dengan teman-teman ketika ada sosialisasi, kita ngomong nanti program ini akan diganti. Wah mereka langsung menolak, mereka sekarang resiten/ketergantungan dengan sistem yang lebih mudah. Karena kita tinggal klak klik klak klik sudah ada semuanya di sistem”.

Aspek lain yang mengalami peningkatan yaitu ego sektoral antar SKPD. Sebelum tahun 2011, ego sektoral di SKPD masih sangat tinggi. Sulit untuk berbagi (sharing) data dengan SKPD lain. “Dataku ya dataku, datamu ya datamu” istilah tersebut sangat tepat untuk menggambarkan kondisi ego sektoral SKPD pada saat itu. Termasuk ketika pengadaan aplikasi dan infrastruktur pendukung

aplikasi, SKPD yang bersangkutan tidak berkoordinasi dengan Kantor Arsip dan PDE selaku badan yang menangani IT pada saat itu. Tetapi sejak dikeluarkannya perbup dan instruksi bupati yang mengatur reformasi tata kelola IT perlahan-lahan ego sektoral antar SKPD mulai berkurang. Hal ini sesuai dengan pernyataan informan sebagai berikut:

Wcr.Pem.Agus.Stat37_Stat38: “Dulu bandwidthnya sebelum 2010 hanya 4 MB sekarang sudah 200 MB, dan sekarang juga **sudah ada kesadaran-kesadaran dari SKPD untuk saling open data** dan yang terpenting adalah itu. **Tidak ada ini dataku ini datamu**, yang ada adalah **ini data banyuwangi**. Jadi data-data yang terintegrasi tadi itu **akan memudahkan untuk pengambilan kebijakan**. Dulu **SKPD kalau mau bikin aplikasi ya termasuk jaringannya bikin sendiri**, tower bikin sendiri dulu **sebelum ada konsep SIMDA yang tertuang di Perbup th 2010 tentang SIMDA**.”

Wcr.Pem.Joni.Stat18: “Ada peralatan yang click, **beda dengan dulu ketika katakanlah SKPD membuat aplikasi kepada pihak ketiga tanpa konsultasi terlebih dahulu** ke kita itu masih **pulau-pulau** (red: ego sektoral tinggi) semacam ada ketergantungan misalnya b”.

Wcr.Pem.Joni.Stat35: “Artinya **kalau dulu itu masih pulau-pulau-pulau (ego sektoral)** sedikit demi sedikit **pulau-pulau itu sudah ada jembatannya**”.

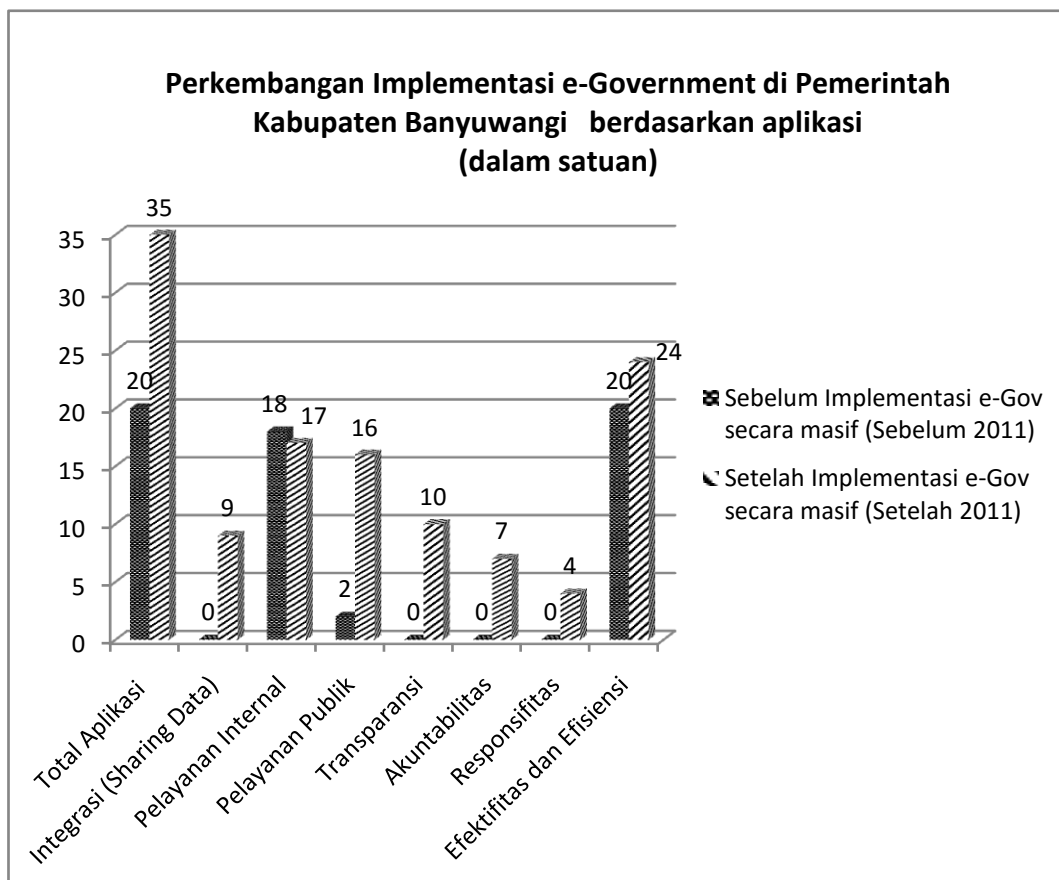
Secara keseluruhan, perkembangan implementasi e-Government dilihat dari sisi aplikasi di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dari sebelum masa implementasi e-Government secara masif (sebelum tahun 2011) dan setelah tahun 2011 hingga saat ini disajikan pada tabel 5.9 dibawah ini.

Tabel 5.9 Perkembangan e-Government dilihat dari sisi aplikasi

Komponen	Kurun Waktu	
	Sebelum MasaImplementasi e-Government secara Masif (Sebelum 2011)	Setelah Masa Implementasi e-Government secara Masif (Setelah 2011)
Jumlah Aplikasi / Layanan e-Government	20 Aplikasi	35 Aplikasi
Jumlah Aplikasi Integrasi Data (Sharing Data)	-	9 Aplikasi (SIKD, GIS Banyuwangi, SIMPEG, e-Village Budgeting, Lahir Procot Pulang Bawa Akta, SIMBADA, Si Jempol Wangi, Simpuswangi, e-Demografi)

Jumlah Aplikasi Pelayanan Internal Pemerintahan	18 Aplikasi	17 Aplikasi
Jumlah Aplikasi Pelayanan Publik	2 Aplikasi (One Stop Service dan LPSE)	16 Aplikasi
Aplikasi dengan fungsi Transparansi	-	9 Aplikasi + 1 Website
Aplikasi dengan fungsi Akuntabilitas	-	6 Aplikasi + 1 Website
Aplikasi dengan fungsi Responsifitas	-	4 Aplikasi
Aplikasi dengan fungsi Efektifitas dan Efisiensi pelayanan	20 Aplikasi	24 Aplikasi
Ego sektoral antar SKPD	Masih Sangat Tinggi sulit untuk sharing data dengan SKPD lain	Berkurang SKPD mau sharing data melalui beberapa aplikasi terintegrasi

(Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2016)



Gambar 5.14 Grafik Perkembangan Aplikasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Dukungan aplikasi untuk mewujudkan *good governance* sangat membantu karena tujuan/fungsi aplikasi yang sejalan dengan konsep *good governance*. Berikut adalah pemetaan aplikasi e-Government yang ada berdasarkan konsep *good governance* yang terdiri dari transparansi, akuntabilitas, responsif, dan efektifitas dan efisiensi.

Tabel 5.10 Pemetaan Jenis Aplikasi e-Gov ke dalam Konsep Good Governance

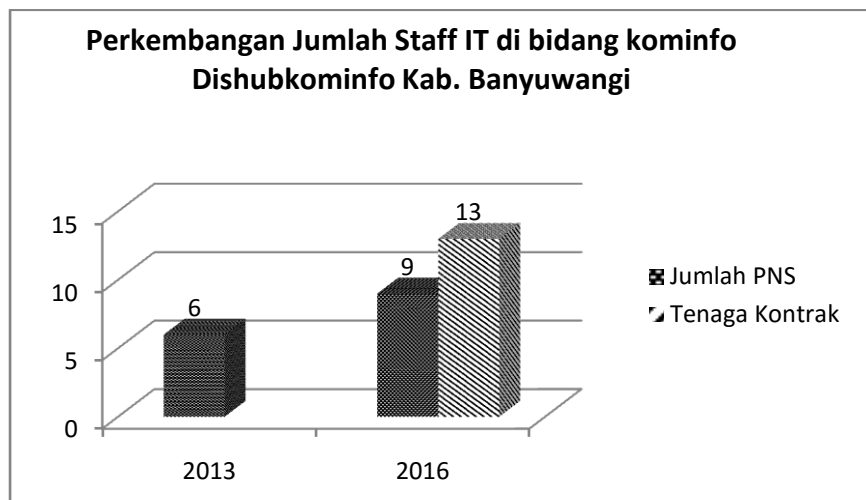
TRANSPARANSI	SIKD		SIKD	EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI
	PPID		e-Demografi	
	JDIH		PPDB Online	
	e-VB		PKB Online	
	e-MS		PBB Online	
	banyuwangikab.go.id		Zone Minder	
	e-Demografi		LPSE	
	GIS Banyuwangi		Simpuswangi	
	Layanan Pengaduan		Si Jempol Wangi	

	LPSE		Akta Online	
			e-Kinerja	
RESPONSIF	Layanan Pengaduan		SABA	
	SMS Center		SIMBADA	
	Call Center Ambulance		LPPD	
	Helpdesk IT		LPPDes	
			SIPO	
			SIMBPPT	
AKUNTABILITAS	SIKD		SISMIOP	
	SIM LPPDes		e-VB	
	SIM LPPD		e-MS	
	e-Kinerja		One Stop Service	
	e-VB		SIMPEG	
	e-MS		TKPK	
	banyuwangikab.go.id			

(Sumber: Hasil Analisis, 2016)

5.3.1.4 Data Perkembangan Staff IT

Untuk staff IT yang ada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi khususnya di Dishubkominfo, mengalami peningkatan namun jumlahnya tidak banyak. Kondisi saat ini, staff IT yang ada di bidang kominfo total berjumlah 22 orang dengan rincian 9 PNS + 13 THL (Tenaga Kontrak). Kondisi ini mengalami penambahan tenaga PNS baru pada tahun 2013 sebanyak 3 orang. Untuk data terkait THL sendiri tidak terdokumentasikan dengan baik karena kontrak kerja yang tidak permanen dan sering keluar masuk tenaga kontrak baru. Berikut grafik perkembangan staff IT di bidang kominfo Dishubkominfo Kabupaten Banyuwangi.



Gambar 5.15 Data Staff IT bidang kominfo Dishubkominfo Kab. Banyuwangi

Dilihat dari jumlah staff IT PNS yang tidak terlalu banyak, namun para penentu kebijakan di bidang kominfo memiliki kemampuan yang mumpuni baik secara individual maupun secara tim ketika dikolaborasikan dapat saling mensupport. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kasie. Pengelolaan Data Elektronik, Bapak Joni Priyanto, S.ST sebagai berikut: ***“Kami juga jujur boleh bangga secara SDM teman-teman yang ada disini katakanlah penentu-penentu kebijakan masalah TI boleh dikatakan sangat mumpuni baik secara individu maupun secara tim ketika dipadukan bisa berkolaborasi bisa saling mensupport” (Wcr.Pem.Joni.Stat30).*** Temuan ini memberikan gambaran **bahwa kualitas SDM lebih berperan daripada kuantitas SDM**. Walaupun jumlahnya sedikit, namun kapasitas yang dimiliki baik dan mampu berkolaborasi akan memberikan hasil yang baik.

Dalam hal pengembangan sistem / aplikasi, pembangunan aplikasi lebih banyak memanfaatkan konsultan atau pihak ketiga seperti yang disampaikan oleh Kasie. TIK, Bapak Agustinus Suko Basuki, S.T berikut ini: ***“Kalau SDM itu sebenarnya kita cukup sebagai mandor saja, di manajemennya saja. Kalau semua semua kita tangani dari nol kita butuh sangat banyak SDM. Kita mestinya memposisikan manajemen untuk mengelola. Kita sampaikan kita punya rel nya ini ini ini, batasannya ini ini ini itu yang kita sampaikan kepada misalnya pihak ketiga. Setelah pengembangan selesai kita tagih mana dokumetasinya, ayo ajari kami TOT kami ” (Wcr.Pem.Agus.Stat29).***

Selain menyangkut jumlah staff IT, penelitian ini juga mengidentifikasi kondisi pelatihan terhadap staff IT yang dilakukan oleh Dishubkominfo dalam

rangka meningkatkan kualitas kemampuan staff IT yang ada. Berikut kutipaan pernyataan informan tentang kondisi pelatihan bagi staff IT di Dishubkominfo.

Wcr.Pem.Agus.Stat27: “Kalau pelatihan kita memang masih terbatas undangan dari kementerian atau apa, dan itu memang masih belum menjadi prioritas.”

Wcr.Pem.Agus.Stat28: “Untuk pelatihan aplikasi itu tergantung dari pengguna, seperti EVB itu kan tanggung jawabnya dari BPM-PD kita biasanya diikuti sebagai narasumber untuk pelatihan tetapi acara yang handle sana. Misalnya one stop service yang handle dari kecamatan kita diundang untuk ngajari. Misalkan e-purchasing itu ranahnya bagian pembangunan nanti yang mengundang kami. **Dan itu sifatnya kontinyu.**”

Berdasarkan kata kunci: *“masih terbatas undangan”, “belum menjadi prioritas”, “tergantung dari pengguna”, “sifatnya kontinyu”* menunjukkan bahwa **pelatihan bagi staff IT di lingkungan Dishubkominfo masih minim dilakukan**. Selama ini masih mengandalkan undangan pelatihan dari kementerian dan sebagainya, dan itu masih belum menjadi prioritas bagi pimpinan SKPD.

Untuk pelatihan penggunaan aplikasi tergantung dari pengguna dan penanggungjawab aplikasi. Misalnya, e-Village Budgeting dibawah tanggung jawab Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa (BPM-PD), perwakilan dari kominfo diundang sebagai narasumber untuk pelatihan bagi perangkat desa namun acara tetap dikelola oleh BPMPD. Begitu pun untuk pelatihan aplikasi-aplikasi lainnya.

5.3.1.5 Data Perkembangan Master Plan IT

Master Plan IT yang digunakan untuk analisis yaitu dokumen Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2008-2012 dan 2012-2017. Secara pembahasan, dokumen RSTI Pemkab Banyuwangi terdiri dari analisis kondisi e-Government, kebijakan dan strategi, dan rencana pengembangan e-Government.

1. Rencana Pengembangan Sistem Informasi tahun 2008 – 2012

Berdasarkan pengamatan terhadap dokumen RSTI tahun 2008-2012, Pemerintah Kabupaten telah menetapkan rencana pengembangan sistem informasi untuk mendukung pengembangan e-Government. Isi dari dokumen RSTI sangat detail hingga kepada prediksi kebutuhan komputer di masing-masing SKPD.

Berikut adalah rencana pengembangan sistem informasi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2008-2012.

Tabel 5.11 Rencana Pengembangan Sistem Informasi tahun 2008-2012

No	Sistem Informasi	Kategori	Aksi	Th I	Th II	Th III	Th IV	Th V
				2008	2009	2010	2011	2012
1	Portal Pemda	K	Upgrade					
2	SI Kependudukan & Ketenagakerjaan	B	Upgrade					
3	SI Pendaftaran & Perizinan	K						
4	SI Eksekutif	K						
5	SI Keuangan Daerah	B	Upgrade					
6	SI Perencanaan Daerah	B						
7	SI Tata Naskah	K						
8	SI Arsip	K						
9	SI JPS	K						
10	SI Kesehatan	B						
11	SI Pendidikan	B	Upgrade					
12	SI Industri & UMKM	B	Upgrade					
13	SI Pengawasan Daerah	K						
14	Tata ruang (GIS)	B						
15	SI Perhubungan	B						
16	SI Pengelolaan Pendapatan Daerah	S						
17	SI Sistem Kas & Perbendaharaan	K						
18	SI Lingkungan Hidup	S						
19	SI Perpustakaan	K						
20	SI Potensi Daerah	K						
21	SI Pengelolaan Hukum dan UU	K						
22	SI Perikanan & Kelautan	S	Upgrade					
23	SI Perhutanan dan Pertanian	B						
24	SI Peternakan	S	Upgrade					
25	SI Pengairan	S						
26	SI Kepegawaian	B						
27	SI Pengelolaan Pasar	K						
28	SI Pariwisata	S						
29	SI Pertambangan & Energi	K						
30	SI Pengelolaan Perusda	K						
31	SI Pengadaan dan Pengelolaan Barang Daerah	B						
32	SI Penyelenggaraan Pemerintahan	K						
33	Office Automation	B	Upgrade					
34	SI Ketentraman & Ketertiban	K						
35	Sistem Administrasi DPRD	K						

Keterangan: K = Kecil, S = Sedang, B = Besar

Dari sekian banyak rencana pengembangan aplikasi diatas, pada tahun 2012 realisasi ketercapaian rencana sangat rendah. Hanya beberapa aplikasi saja yang berhasil dikembangkan sesuai target seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 5.12 Realisasi Rencana Pengembangan Aplikasi RSTI tahun 2008-2012

No	Sistem Informasi	Nama Aplikasi	Tahun Rilis
1	Portal Pemda	Layanan Pengaduan	
2	SI Perencanaan Daerah	SIKD	2009
3	SI Pengelolaan Pendapatan Daerah	SISMIOP	2012
4	SI Pengadaan dan Pengelolaan Barang	LPSE	2009
5	SI Kesehatan	Simpus Wangi Sijempol Wangi	2012 2012
6	Office Automation	SABA One Stop Service	2011 2010
Total Penambahan Aplikasi Baru		8	
Prosentase Ketercapaian		$8 / 27 * 100 = 29,6\%$	

Berdasarkan ketercapaian realisasi pengembangan aplikasi setelah disusunnya RSTI tahun 2008-2012, penambahan aplikasi hanya sebanyak 8 aplikasi. Berarti prosentase ketercapaian realisasi aplikasi sebesar 29,6% dari total target aplikasi baru sebanyak 27 aplikasi.

2. Rencana Pengembangan Sistem Informasi tahun 2012 – 2017

Analisis selanjutnya yaitu menggunakan dokumen RSTI tahun 2012-2017. Isi dari dokumen RSTI tahun 2012-2017 tidak sedetail dari RSTI tahun 2008-2012. **Pada dokumen RSTI tahun 2012 tidak ada rencana pengembangan sistem informasi seperti pada RSTI sebelumnya.** Analisa strategi seperti analisis SWOT, Critical Succes Factor (CSF) pun tidak jauh berbeda dengan analisa strategi RSTI sebelumnya. Namun dari sisi output pengembangan aplikasi

baru, hingga tahun 2016 ini telah banyak aplikasi baru dikembangkan seperti yang sudah dijelaskan pada tabel 5.8 diatas. Berikut perbandingan ketercapaian realisasi pengembangan aplikasi dalam dua periode RSTI.

Tabel 5.13 Perbandingan Ketercapaian Rencana Pengembangan Aplikasi Baru berdasarkan RSTI

Periode RSTI	Target / Rencana Pengembangan Aplikasi Baru	Realisasi Pengembangan Aplikasi diakhir periode RSTI
RSTI 2008-2012	27 Aplikasi	8 Aplikasi
RSTI 2012-2017	Tidak terdefiniskan	27 Aplikasi

Kondisi dua periode diatas menarik untuk ditelusuri lebih mendalam karena terjadi dua perbedaan yang cukup unik. Di satu sisi dengan perencanaan yang matang dan detail dengan rincian waktu / timeline pengembangan aplikasi namun jauh dari target yang diharapkan. Di periode lain, perencanaan yang kurang detail dan matang, bahkan tidak mencanangkan timeline target pengembangan aplikasi dalam periode tersebut namun hasil akhirnya menunjukkan realisasi aplikasi yang sangat banyak dan tepat sasaran guna mendukung terwujudnya good governance di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Hasil identifikasi melalui wawancara kepada informan pemerintahan didapatkan beberapa fakta yang terjadi di lapangan terkait kondisi diatas:

- a. Master Plan yang dibuat belum menjadi kebijakan sehingga sangat lemah dalam pelaksanaan rencana yang telah dibuat

Wcr.Pem.Agus.Stat24: “Kalau master plan kita istilahnya RSTI (Rencana Strategis Teknologi Informasi). Emm dijadikan pedoman mas, **tetapi memang kelemahannya itu belum menjadi kebijakan.** Tetap itu menjadi pedoman kami di kominfo, **tapi karena tidak diperbupkan sehingga kekuatan kami untuk implementasi kesulitan,** tapi **secara teknis kita mengacu pada RSTI tersebut.”**

Wcr.Pem.Agus.Stat26: “Disana sebenarnya tertuang juga ada acuan-acuan seperti organisasi bentuknya harus seperti ini seperti itu **tapi karena ya itu tadi renstra yang kita susun tidak dijadikan kebijakan ya ibaratnya macan nggak punya gigi.** Tapi kalau teknisnya kita mengikuti itu.”

b. Kebijakan dan Program Bupati Abdullah Azwar Anas

Sejak kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas, langsung menunjukkan komitmen untuk memasukkan IT sebagai komponen untuk meningkatkan kualitas layanan di masing-masing SKPD. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan yaitu program inovasi pelayanan bagi SKPD, dimana masing-masing SKPD mengusulkan inovasi teknologi / IT yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan. Selain itu, Smart Kampung yang menjadi program unggulan dari Kabupaten Banyuwangi saat ini juga lahir dari pemikiran Bupati Abdullah Azwar Anas. Berikut kutipan pernyataan informan yang mendukung:

Wcr.Pem.Ilam.Stat23: “Kita SKPD hanya diberi anggaran pengembangan saja. Tapi kami ada program inovasi namanya, disitu kami dituntut mengagendakan inovasi-inovasi yang berbau teknologi atau IT yang dapat digunakan dalam pelayanan, dan kami di BPPT tahun ini membuat inovasi digital sign untuk bisa tanda tangan dari gadget pimpinan.”

Wcr.Pem.Joni.Stat17: “Pengalaman dari kami biasanya kalau kebutuhan IT(aplikasi/SIM) itu dipenuhi dari kita tanpa kita memperhatikan kebutuhan SKPD kadang-kadang mereka tidak mau pakai. Tapi sekarang sejak 5 tahun yang lalu jadi kita itu membuat sesuai dengan kebutuhan dia, dia yang usul jadi kita sebagai konsultannya (pembuatan aplikasi, penambahan infrastruktur) nah itu perlu dikonsultasikan dengan kita harapannya adalah biar matching barangkali ada data yang diintegrasikan”.

Wcr.Pem.Agus.Stat21: “Pak bupati ini pun saya anggap cerdas, cerdas artinya menangkap apa yang disampaikan oleh pusat, oleh Pak Jokowi dan segala macam dengan prioritas desa. Nah dari situ dirangkai dengan visi-misi beliau dan segala macam membuat inovasi tentang “APA DESA”. Nah ini Pak Bupati inginnya ada percontohan tentang smart kampung digabungkan nantinya dengan rumah kreatif. 2 program ini tidak hanya ICT melulu tentunya menggandeng sektor-sektor lain seperti budaya, pariwisata, pendidikan, nah dari sektor-sektor smart kampung ini nantinya dirangkai dimasukkan ke dalam sistem”.

Wcr.Pem.Agus.Stat51: “Perubahan suatu sistem kan juga mengubah ekosistem. Dimana yang dulunya sudah nyaman dengan prosedur yang manual, kemudian dirubah secara total dengan menggunakan sistem dulunya banyak perdebatan. Tetapi dengan adanya kebijakan yang ditentukan oleh Pak Bupati kita mau nggak mau ngikuti, dan teman-teman di SKPD sekarang Alhamdulillah sudah terbiasa by system”.

5.3.2 Perkembangan Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Salah satu faktor yang membentuk tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi hingga saat ini yaitu peran dari penerapan aplikasi e-Government yang telah dilakukan oleh pemerintah sejak beberapa tahun terakhir. Berikut beberapa data yang menunjukkan perkembangan tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka mewujudkan good governance dalam dua kurun waktu yang berbeda.

5.3.2.1 Data Perkembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Berikut adalah data yang menggambarkan peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebelum dan sesudah implementasi e-Government secara masif yang dilakukan oleh pemerintah.

Tabel 5.14 Perkembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Komponen	Indikator	Kurun Waktu	
		Sebelum Masa Implementasi e-Government secara Masif (Sebelum 2011)	Setelah Masa Implementasi e-Government secara Masif (Setelah 2011)
TRANSPARANSI	Publikasi data anggaran / keuangan daerah	Publikasi terkait anggaran keuangan masih sebatas konten / berita di website	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah tersedia menu transparansi mencakup perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan dan pertanggungjawaban daerah di website www.banyuwangikab.go.id - Penyelenggaraan Festival Transparansi Anggaran sejak tahun 2014 - Publikasi melalui media massa dan baliho-baliho - Lounge Pelayanan Publik tersedia seluruh data terkait Banyuwangi
	Publikasi	Belum memiliki JDIH	- JDIH Kabupaten dengan

	peraturan / regulasi	baik JDIH Kabupaten maupun JDIH terintegrasi dengan Propinsi Jawa Timur	alamat jdi.h.banyuwangikab.go.i d - JDIH Integrasi Propinsi dengan alamat kabbanyuwangi. jdi.h.jatimprov.go.id
AKUNTABILITAS	Pertanggung jawaban anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanggungjawaban masih sebatas konten/berita di website - Belum dibentuk PPID Pembantu maupun PPID Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah tersedia menu transparansi mencakup perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan dan pertanggungjawaban daerah di website www.banyuwangikab.go.id - Penyelenggaraan Festival Transparansi Anggaran sejak tahun 2014 - Sudah dibentuk PPID Pembantu dan Kabupaten untuk memfasilitasi publik mengetahui detail data-data pemerintahan termasuk anggaran
	Pertanggung jawaban kinerja pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Belum memiliki aplikasi pelaporan kinerja instansi (LAKIP) - Peringkat LPPD tahun 2010 ranking 162 se-Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan kinerja dan evaluasi sudah menggunakan 2 aplikasi yaitu LPPD dan LPPDes. - Data LAKIP Pemkab Banyuwangi tersedia di website www.banyuwangikab.go.id - SAKIP Tahun 2015 terbaik di Jawa Timur dengan predikat B (Nilai 65,41) - Peringkat LPPD tahun 2012 ranking 26 - Peringkat LPPD tahun 2013 ranking 16

RESPONSIFITAS	Responsifitas terhadap kritik dan saran	<ul style="list-style-type: none"> - Belum memiliki layanan pengaduan online baik itu website maupun sms center 	<ul style="list-style-type: none"> - Penggunaan layanan pengaduan berbasis website dan sms center menjadikan pemerintah lebih peka terhadap masalah di lapangan - Interaksi komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah lebih meningkat - 2016 terbaru diluncurkan Banyuwangi Children Center
	Responsifitas terhadap pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> - Hanya aplikasi One Stop Service yang termasuk pelayanan publik. 	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan diluncurkan beberapa aplikasi pelayanan publik seperti Lahir Procot, SIPO memberikan kecepatan dalam pelayanan - Contoh program One Day Service dalam perizinan SIUP kecil
EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI	Birokrasi pelayanan publik lebih mudah	<ul style="list-style-type: none"> - Birokrasi pelayanan publik masih kurang baik karena belum banyak pelayanan publik berbasis online 	<ul style="list-style-type: none"> - Birokrasi pelayanan lebih cepat dan mudah - Salah satu contoh aplikasi yang menyederhanakan birokrasi yaitu Lahir Procot Pulang Bawa Akta, One Stop Service dan SIPO
	Manajemen internal lebih mudah	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak bisa memonitoring proses pelayanan karena belum online - Manajemen keuangan, aset dan sebagainya masih sulit - LKPD sebelum periode Bupati AAA sempat mendapatkan opini “disclaimer” - Monitoring kinerja 	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan layanan online mudah menelusuri proses pelayanan, tahap mana yang mengalami kendala. - Manajemen keuangan sudah bagus, aset dan lain-lain karena semua sudah tersistem dengan baik - LKPD sejak tahun 2012-2015 mendapat predikat WTP(Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. - Dengan e-Kinerja

		SDM sulit dilakukan	memudahkan untuk mengevaluasi kinerja SDM
--	--	---------------------	---

(Sumber: Hasil analisis, 2016)

5.3.2.2 Data Penghargaan terkait Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Sejak diimplementasikannya e-Government secara masif pada tahun 2011 sangat berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sejalan dengan itu banyak penghargaan yang diraih oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi atas capaian khususnya dalam hal reformasi birokrasi yang dilakukan oleh pemerintah. Berikut beberapa data penghargaan yang diraih dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 5.15 Penghargaan Banyuwangi dalam hal Tata Kelola Pemerintahan

No	Penghargaan	Pemberi Penghargaan	Tahun
1	12th UNWTO Awards 2016 Kategori Inovasi Kebijakan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	United Nations World Tourism Organization (UNWTO), PBB	2015
2	Government Awards 2016. Kota dengan pertumbuhan ekonomi terbaik	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional	2016
3	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) LKPD 4 Tahun berturut-turut 2012-2015	Badan Pemeriksa Keuangan	2012-2015
4	SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Terbaik se-Jawa Timur Tahun 2015	Kemenpan-RB	2015
5	Green Awards 2016	Kementerian Lingkungan Hidup	2016
6	KABTA Web Awards 2015. Halaman Digital Pemerintah Daerah Terbaik Kedua di Indonesia	Beritasatu.com	2015
7	Pangripta Nusantara 2015. Kabupaten dengan Perencanaan Pembangunan Daerah terbaik	Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional	2015
8	Pangripta Nusantara Jawa Timur 2015.	Gubernur Jawa Timur	2015

	Kabupaten dengan Perencanaan Pembangunan Darah Terbaik di Jawa Timur		
9	Inovasi Pelayanan Publik Terbaik 2015. Lahir Procot Pulang Bawa Akta	Kemenpan-RB	2015
10	Tata Ruang Terbaik se-Indonesia Tahun 2014	Kementerian PU dan Perumahan Rakyat	2014

(Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2016)

5.3.3 Perkembangan Nilai Investasi di Kabupaten Banyuwangi

5.3.3.1 Data Perkembangan Nilai Investasi

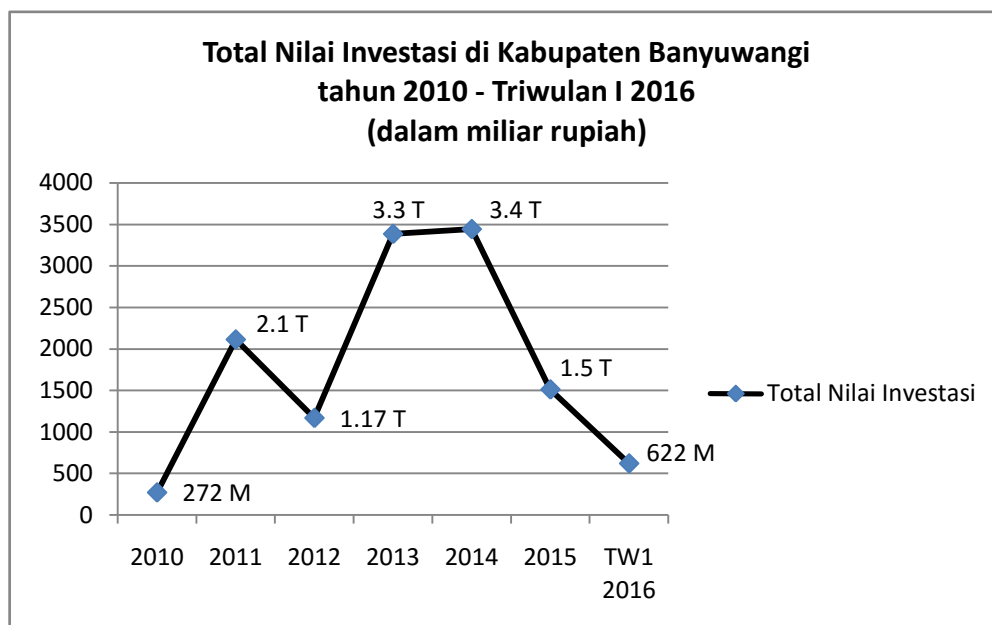
Tipe investasi terbagi menjadi tiga, yaitu penanaman modal asing (PMA), penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan investasi daerah. Data nilai investasi di Kabupaten Banyuwangi dari tahun 2010 hingga triwulan I tahun 2016 disajikan pada tabel 5.16 dibawah ini.

Tabel 5.16 Data Nilai Investasi Tahun 2010 - TW1 2016

Tahun	Nilai Investasi (dalam rupiah)			Total Nilai Investasi
	PMA	PMDN	Investasi Daerah	
2010	9.455.556.000	17.800.000.000	245.357.030.000	272.612.586.000
2011	959.325.000.000	803.866.011.000	350.356.982.000	2.114.640.493.000
2012	83.048.272.000	645.248.742.0000	441.217.000.000	1.169.514.014.000
2013	-	2.450.018.000.000	937.366.458.000	3.387.384.458.000
2014	-	2.345.246.900.000	1.099.721.661.577	3.444.968.561.577
2015	6.983.200.000	299.596.200.000	1.206.475.069.397	1.513.054.469
Tw1 2016	21.066.428.100	271.807.600	329.709.171.000	622.583.199.100

Berdasarkan data tabel 5.16 diatas dapat dilihat bahwa nilai investasi di Kabupaten Banyuwangi meningkat signifikan pada tahun 2011 dan setelahnya. Diakhir tahun 2010 total nilai investasi di Kabupaten Banyuwangi hanya sekitar Rp. 272 miliar namun diakhir tahun 2011 nilai investasi meningkat sekitar 700% menjadi Rp. 2,1 triliun. Kalau dilihat dari data diatas, jenis investasi yang konsisten mengalami peningkatan yaitu investasi daerah. Investasi daerah yaitu investasi skala UMKM dan investasi skala menengah yang tidak memerlukan fasilitas pemerintah. Sedangkan untuk investasi jenis PMA cenderung tidak

konsisten dengan pola pertumbuhan nilai naik turun. Menurut Kabid Penanaman Modal BPPT Kabupaten Banyuwangi, tahun 2015 mengalami penurunan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan meningkatnya harga lahan di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Grafik peningkatan dan penurunan nilai investasi selengkapnya disajikan pada gambar 5.16 dibawah ini.



Gambar 5.16 Data Nilai Investasi di Kab. Banyuwangi Tahun 2010 - TW1 2016

5.3.3.2 Data Perkembangan Realisasi Izin Investasi

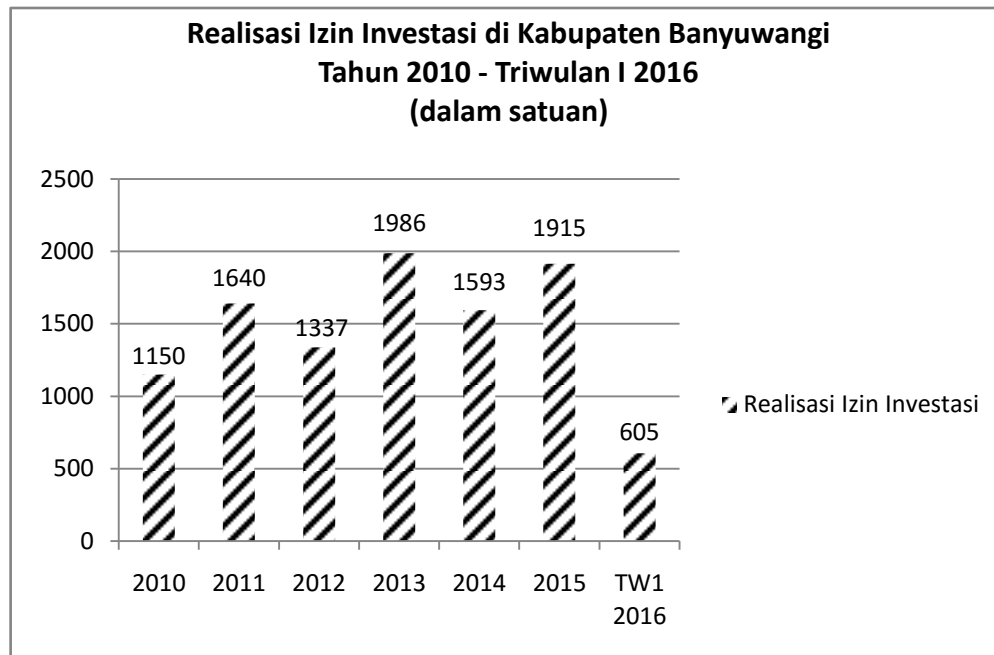
Dalam hal realisasi izin investasi, beberapa tahun terakhir juga mengalami peningkatan apabila dibandingkan tahun 2010. Pada tahun 2010 jumlah realisasi izin investasi sebanyak 1150 izin, sedangkan pada akhir tahun 2015 jumlah izin investasi yang dikeluarkan sebanyak 1915 izin seperti yang dijelaskan pada tabel 5.17 dan gambar 5.17 dibawah ini.

Tabel 0.17 Perkembangan Realisasi Izin Investasi di Kab. Banyuwangi Tahun 2010-TW1 2016

Tipe Investasi	2010	2011	2012	2013	2014	2015	TW1 2016
PMA	4	4	1	0	0	11	8
PMDN	1	1	1	5	5	7	2

Investasi Daerah	1.145	1.635	1.335	1.981	1.588	1.897	595
Total Izin	1.150	1.640	1.337	1.986	1.593	1.915	605

(Sumber: BPPT Kab. Banyuwangi)



Gambar 5.17 Perkembangan Realisasi Izin Investasi di Kab. Banyuwangi Tahun 2010-TW1 2016

Berdasarkan tabel 5.17 dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya (1) potensi investasi di Banyuwangi mampu menarik investasi PMDN masuk ke Banyuwangi seperti data diatas apabila dibandingkan dengan tahun 2010 hanya ada satu investasi PMDN namun sejak tahun 2013 meningkat dengan masuknya beberapa investasi besar seperti pembangunan pabrik packing plant Semen Bosowa dan masuknya Hotel Santika di Banyuwangi, (2) potensi investasi di Banyuwangi mampu menarik investasi daerah masuk lebih banyak setelah tahun 2010 dengan jumlah realisasi izin investasi daerah cenderung meningkat dan tidak pernah lebih rendah dari realisasi izin investasi daerah tahun 2010, (3) nilai investasi PMA di Banyuwangi mengalami fluktuatif pada kurun waktu 2010 – 2014, namun tahun 2015 meningkat tajam dan memasuki triwulan 1 tahun 2016 sudah terealisasi izin PMA sebanyak 8 izin.

5.4 Analisis Data Studi Kasus

Seperti yang telah dijelaskan pada bab 4 sebelumnya, analisis data pada penelitian ini menggunakan teknik analisis studi kasus yang terdiri dari tiga tahapan yaitu penjodohan pola, pembuatan eksplanasi dan analisis deret waktu.

5.4.1 Penjodohan Pola (*Pattern Matching*)

Tahapan analisis yang pertama yaitu penjodohan pola. Penjodohan pola dilakukan dengan membandingkan pola prediksi yang dibangun berdasarkan kajian teori dengan pola aktual yang diidentifikasi berdasarkan temuan selama penelitian di lapangan. Untuk memudahkan dalam penjodohan pola, terlebih dahulu dibangun pola-pola kecil yang akan menjadi sub pola pembentuk pola besar.

5.4.1.1 Identifikasi Pola Prediksi

Tujuan utama penelitian ini yaitu untuk mengetahui manfaat implementasi e-Government dalam mendukung perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), sehingga dengan tata kelola pemerintahan yang baik akan menjadi daya tarik investasi daerah yang akan meningkatkan investasi masuk ke daerah. Oleh karena itu, peneliti memulai dengan mengidentifikasi sub-pola yang nantinya sebagai pembentuk pola prediksi secara keseluruhan. Sub-pola tersebut antara lain: (1) manfaat implementasi e-Government, (2) manfaat terwujudnya *good governance*, dan (3) pembentuk daya tarik investasi daerah.

5.4.1.1.1 Sub-pola 1 : Manfaat implementasi e-Government

Sub-pola yang pertama yaitu manfaat implementasi e-Government bagi pemerintah. Manfaat implementasi e-Government merupakan dampak positif yang dirasakan oleh pemerintah ketika mengimplementasikan e-Government. Untuk mengidentifikasi sub-pola ini peneliti menggunakan kajian terhadap beberapa paper untuk mengidentifikasi manfaat apa saja yang didapatkan oleh pemerintah ketika mengimplementasikan e-Government dalam proses pemerintahannya. Sebelum disusun pola dalam bentuk gambar, maka terlebih dahulu diidentifikasi manfaat-manfaat apa saja yang didapatkan oleh pemerintah

ketika mengimplementasikan e-Government seperti yang disajikan pada tabel 5.18 dibawah ini.

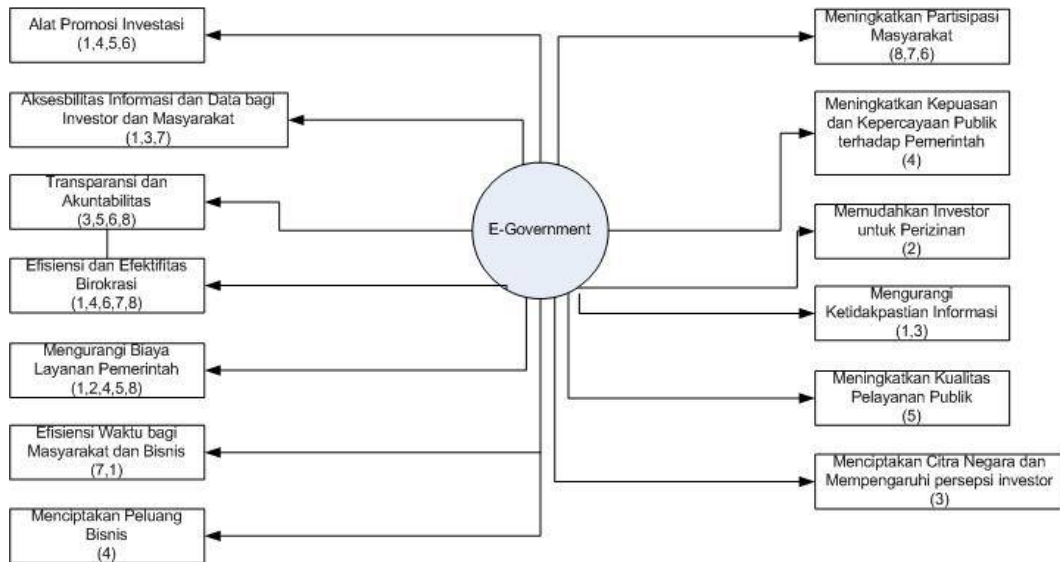
Tabel 5.18 Identifikasi sub-pola Manfaat Implementasi e-Government

No	Manfaat	Referensi
1	Alat promosi investasi	Al-Azzam & Abu-Shanab (2014); Edwin Lau (2005); Ndou (2004); Seifert & Bonham (2004)
2	Aksesibilitas informasi dan data bagi masyarakat dan investor	Al-Azzam & Abu-Shanab (2014); Azubuike (2006); Deloitte Research Group (2004)
3	Transparansi dan Akuntabilitas	Azubuike (2006); Ndou (2004); Seifert & Bonham (2004); Bhatnagar (2003)
4	Efisiensi dan Efektifitas Birokrasi	Al-Azzam & Abu-Shanab (2014); Edwin Lau (2005); Seifert & Bonham (2004); Deloitte Research Group (2004); Bhatnagar (2003)
5	Mengurangi biaya untuk layanan pemerintah	Al-Azzam & Abu-Shanab (2014); Kachwamba (2011); Edwin Lau (2005); Ndou (2004); Bhatnagar (2003)
6	Efisiensi waktu bagi masyarakat dan bisnis	Deloitte Research Group (2004); Al-Azzam & Abu-Shanab (2014)
7	Menciptakan peluang bisnis	Edwin Lau (2005)
8	Meningkatkan partisipasi masyarakat	Seifert & Bonham (2004); Deloitte Research Group (2004); Bhatnagar (2003)
9	Meningkatkan kepuasan dan kepercayaan publik terhadap pemerintah	Edwin Lau (2005)
10	Memudahkan investor untuk perizinan	Kachwamba (2011)
11	Mengurangi ketidakpastian informasi	Al-Azzam & Abu-Shanab (2014); Azubuike (2006)
12	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Ndou (2004)
13	Menciptakan citra/image	Azubuike (2006)

(Sumber: Diolah dari berbagai sumber)

Setelah diidentifikasi beberapa manfaat implementasi e-Government, selanjutnya yaitu pembuatan sub-pola manfaat implemetasi e-Government seperti pada gambar 5.18 dibawah ini.

- Sumber:
1. Al-Azzam dan Abu-Shanab (2014)
 2. Kachwamba (2011)
 3. Azubuike (2006)
 4. Edwin Lau (2005)
 5. Ndou (2004)
 6. Selfert dan Bonham (2004)
 7. Deloitte Research Group (2004)
 8. Bhatnagar (2003)



Gambar 5.18 Sub-pola manfaat implementasi e-Government
(Sumber: Hasil Analisis, 2016)

5.4.1.1.2 Sub-pola 2 : Manfaat *Good Governance*

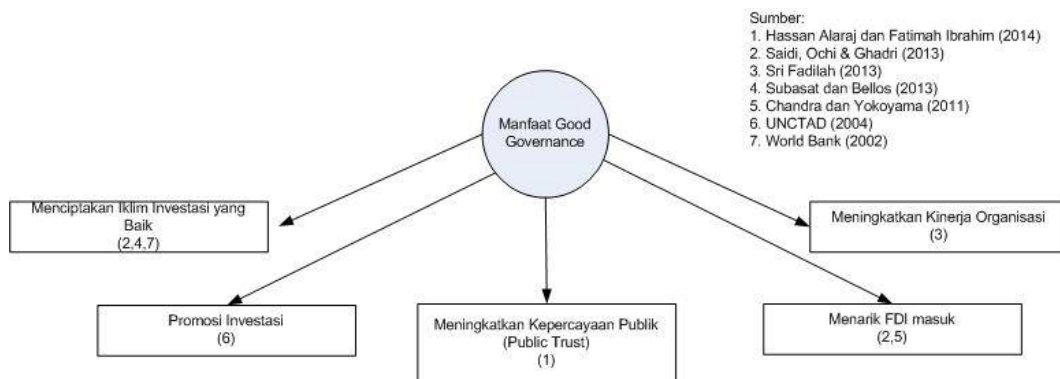
Sub-pola yang kedua yaitu manfaat good governance. Good governance seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya yaitu tata kelola pemerintahan baik, bersih, transparan, adil, akuntabel dan lain-lain. Implementasi e-Government merupakan salah satu cara untuk mewujudkan good governance baik di pemerintah level negara maupun daerah. Untuk mengidentifikasi sub-pola ini peneliti menggunakan kajian terhadap beberapa paper untuk mengidentifikasi manfaat apa saja yang didapatkan oleh pemerintah ketika mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Sebelum disusun pola dalam bentuk gambar, maka terlebih dahulu diidentifikasi manfaat-manfaat apa saja yang didapatkan oleh pemerintah ketika mampu mewujudkan good governance seperti yang disajikan pada tabel 5.19 dibawah ini.

Tabel 5.19 Identifikasi sub-pola Manfaat Good Governance

No	Manfaat	Referensi
1	Menciptakan iklim investasi yang baik	Saidi, et.al (2013); Subasat & Bellos (2013); The World Bank (2002)
2	Meningkatkan kepercayaan publik (public trust)	Hassan Alaraj & Fatimah Ibrahim (2014)
3	Promosi investasi	UNCTAD (2004)
4	Meningkatkan kinerja organisasi	Sri Fadilah (2013)
5	Menarik investasi asing langsung / Foreign Direct Investment (FDI) masuk	Saidi, et.al (2013); Chandra & Yokoyama (2011)

(Sumber: Diolah dari berbagai sumber)

Setelah diidentifikasi beberapa manfaat *good governance*, selanjutnya yaitu pembuatan sub-pola manfaat *good governance* seperti pada gambar 5.19 dibawah ini.

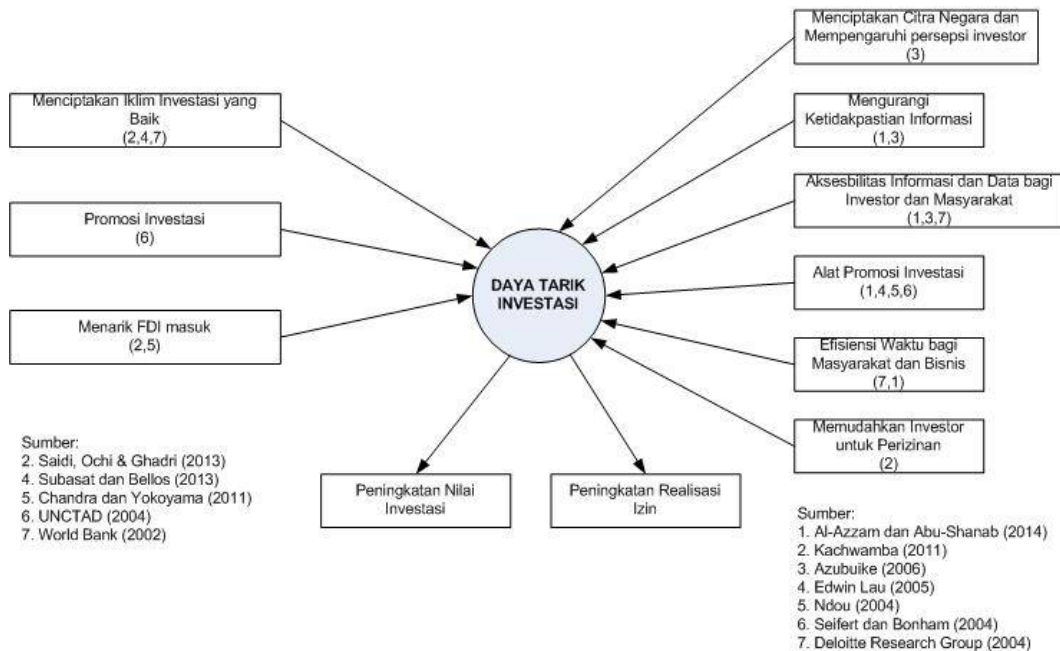


Gambar 5.19 Sub-pola manfaat good governance
(Sumber: Hasil analisis, 2016)

5.4.1.1.3 Sub-pola 3 : Pembentuk daya tarik investasi daerah

Sub pola yang terakhir yaitu faktor-faktor pembentuk daya tarik investasi daerah. Daya tarik investasi daerah memiliki peran penting dalam menarik investasi masuk ke daerah. Oleh karena itu, masing-masing daerah berlomba untuk menciptakan daya tarik investasi bagi daerahnya agar mampu memikat hati calon investor. Pada penelitian ini peneliti mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi pembentuk daya tarik investasi daerah yang dibentuk dari manfaat

implementasi e-government dan good governance seperti pada gambar 5.20 dibawah ini.



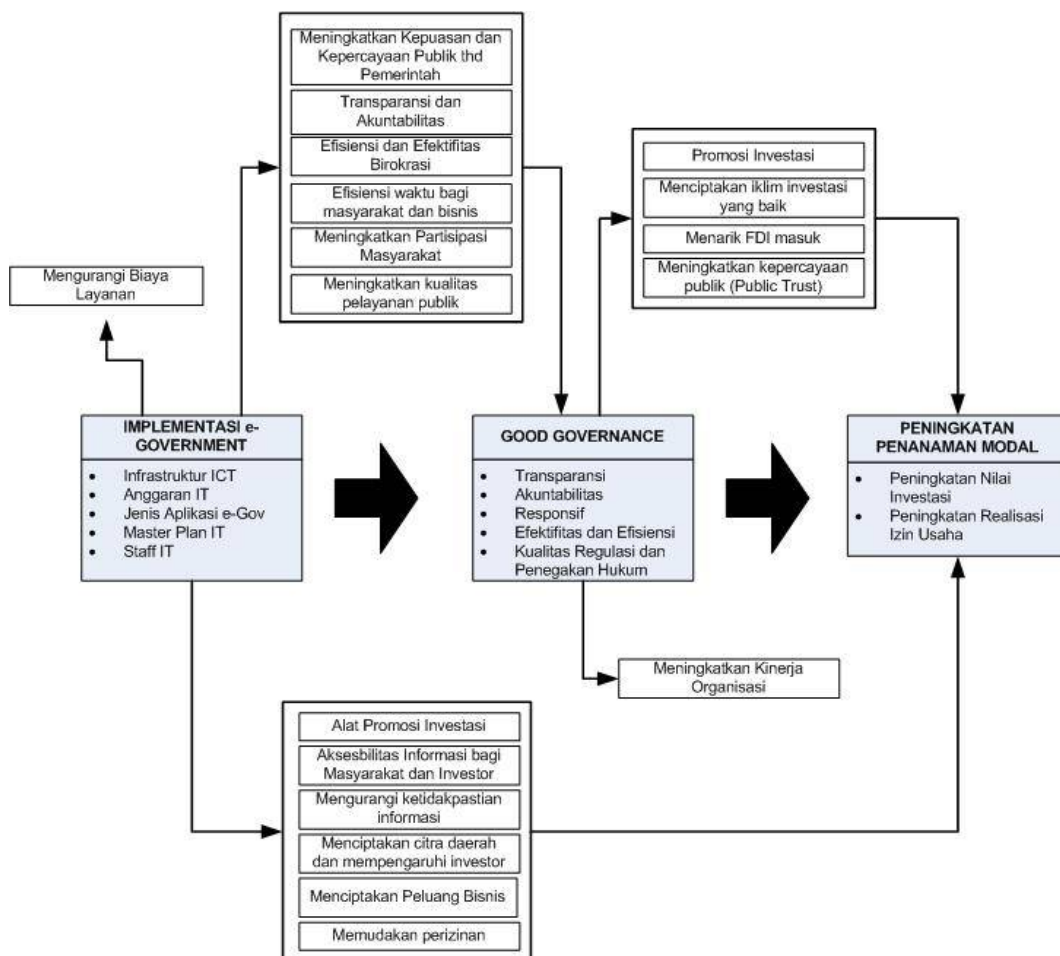
Gambar 5.20 Sub-pola pembentuk daya tarik investasi daerah
(Sumber: Hasil analisis, 2016)

5.4.1.1.4 Pola Prediksi Penelitian

Setelah seluruh sub pola teridentifikasi dan juga spesifikasi pola prediksi ditentukan, maka selanjutnya yaitu menggambarkan pola prediksi secara keseluruhan yang akan digunakan. Pembuatan pola prediksi didasarkan pada hasil identifikasi sub-pola yang dikombinasikan dengan proposisi-proposisi yang telah dibangun sebelumnya. Berikut adalah spesifikasi dari pola prediksi yang dibangun pada penelitian ini:

- Implementasi e-Government akan membantu pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
- Implementasi e-Government akan membantu pemerintah untuk menciptakan citra positif di kalangan investor.
- Implementasi e-Government turut berkontribusi dalam menciptakan daya tarik investasi daerah.

- d. Ketika pemerintah mampu mengelola pemerintahan dengan baik, akan meningkatkan kinerja organisasi dan membangun kepercayaan publik (*public trust*).
- e. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) turut berkontribusi dalam menciptakan daya tarik investasi daerah.
- f. Daya tarik investasi daerah akan meningkatkan investasi masuk ke daerah.



Gambar 5.21 Pola Prediksi Penelitian
(Sumber: Hasil analisis, 2016)

5.4.1.2 Identifikasi Pola Aktual

Identifikasi pola aktual didasarkan pada hasil pengumpulan data selama di lapangan. Untuk menghasilkan pola aktual, peneliti terlebih dahulu

mengidentifikasi temuan-temuan dari sub pola aktual sesuai dengan model konseptual penelitian dan juga pola prediksi. Data yang digunakan untuk identifikasi pola aktual yaitu data berupa wawancara, data fisik berupa laporan-laporan dan pedoman, dan juga data visual hasil observasi langsung selama di lapangan. Pada tahapan identifikasi pola aktual ini terbagi menjadi tiga bagian utama yaitu implementasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan daya tarik investasi di Kabupaten Banyuwangi.

5.4.1.2.1 Implementasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

1. Infrastruktur ICT

Infrastruktur ICT meliputi: ketersediaan layanan internet, jaringan telekomunikasi, ketersediaan software dan hardware yang mendukung pengembangan e-Government di sebuah pemerintahan. Pada kasus ini peneliti ingin mengetahui bagaimana peran ketersediaan infrastruktur ICT dalam mendukung proses pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pertanyaan yang diajukan kepada informan yaitu: *“Menurut bapak, bagaimana peran infrastruktur ICT dalam mendukung keberlangsungan implementasi e-Government di Banyuwangi ? ”*. Berikut kutipan pernyataan hasil wawancara terhadap informan:

Wcr.Pem.Agus.Stat08: “Emmm **sangat sangat** dinantikan peran dari infrastruktur itu dari awal mas. Dinantikan karena **infrastruktur itu kan sebagai core (inti)** dari pengembangan IT”

Wcr.Pem.Ilam.Stat07_Stat08: “Saya kira infrastruktur itu **sangat penting** ya karena **menyangkut ketersediaan software dan hardware termasuk didalamnya jaringan**. Jadi tanpa itu kita tidak bisa mengaplikasikan sistem secara online, jadi sangat sangat mendukung infrastruktur ICT tersebut.”

Wcr.Pem.Ilam.Stat10: “Karena begini, kalau kita bicara online, sistem yang berbaur “e apa e apa” maka **syarat mutlak infrastruktur IT nya sangat berperan**”

Wcr.Pem.Anas.Stat01_Stat02: “ICT adalah instrumen penting untuk mendorong kemajuan daerah. Sudah tidak bisa lagi kita tidak menggunakan ICT. Oleh karena itu, **ICT jadi pilihan wajib**. Kalau mengandalkan SDM saja akan kesusahan mengikuti tuntutan kemajuan zaman dan tuntutan kualitas pelayanan dari masyarakat.”

Wcr.Pem.Anas.Stat06_Stat07: “ICT adalah syarat mutlak E-Government. Banyuwangi punya banyak elemen e-gov. Misalnya soal anggaran yang bisa dipantau realtime penyerapannya. juga bagian dari egov. Kemudian sistem Transparansi anggaran yang mengintegrasikan jaringan pelayanan kesehatan dan sebagainya. One Stop Service yang ada di kecamatan dan desa juga terlaksana **berkat adanya infrastruktur ICT seperti jaringan.**”

Kata-kata kunci seperti: *“sangat dinantikan”, “sebagai core (inti)”, “sangat penting”, “syarat mutlak”, “instrumen penting” “ICT pilihan wajib”, „ICT adalah syarat mutlak”, “berkat adanya”* menunjukkan bahwa **ketersediaan infrastruktur ICT di Kabupaten Banyuwangi memiliki peranpenting dalam keberlangsungan implementasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.** Segala pelayanan yang serba online, menuntut pemerintah untuk memfasilitasi infastruktur ICT sebagai inti dari pengembangan IT. Salah satu contoh layanan online yang ada di Banyuwangi yaitu One Stop Service, dimana aplikasi itu digunakan di desa dan kecamatan untuk pelayanan publik pembuatan surat keterangan seperti surat miskin, surat pengantar SKCK dan lain-lain. Apabila di kantor desa dan kecamatan belum terkoneksi dengan internet (LAN / WiFi) tentu pemanfaatan layanan online akan kurang optimal.

Ketersediaan infrastruktur ICT di Kabupaten Banyuwangi juga turut membantu dalam hal aktivitas penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi. Pertanyaan yang diajukan kepada informan yaitu: *“Menurut bapak, apakah ketersediaan infrastruktur ICT turut andil dalam menciptakan daya tarik investasi di Banyuwangi ?”* Berikut kutipan pernyataan hasil wawancara terhadap informan:

Wcr.Pem.Anas.Stat08_Stat09: “Itu salah satunya. **Orang tidak mau dong berinvestasi ke daerah yang ICT-nya tidak memadai.** Predikat **kota digital society pertama di Indonesia** saya rasa membantu dalam **meng-create daya tarik investasi** baik UMKM maupun investor besar.”

Wcr.Pem.Ilam.Stat11_Stat12: “Karena dengan adanya infrastruktur ICT tersebut begini, yang pertama akan **memudahkan pelayanan perizinan** baik pendaftaran online maupun kita di internal dalam memproses perizinan, kita bisa secara cepat melaksanakan pelayanan. Kemudian untuk investor karena kita sudah menyediakan website menyediakan apa namanya **layanan perizinan online**, maka dia bisa **melihat secara**

langsung potensi investasi maupun daftar secara online perijinan usahanya, saya kira itu”.

Kata-kata kunci seperti: *“orang tidak mau dong”, “kota digital society”, “meng-create daya tarik investasi”, “memudahkan pelayanan perizinan”, “layanan perizinan online”* “potensi investasi”, *“daftar secara online”* menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur ICT di Kabupaten Banyuwangi memiliki peran dalam menambah nilai daya tarik investasi di Kabupaten Banyuwangi. Predikat sebagai Kota Digital Society pertama di Indonesia turut menyumbang nilai plus bagi daya tarik investasi Banyuwangi. Disamping itu dengan infrastruktur ICT akan mempercepat pelayanan perizinan baik pelayanan perizinan internal di BPPT, maupun pendaftaran perizinan melalui online.

2. Alokasi Anggaran IT

Alokasi anggaran IT meliputi anggaran dan alokasi dana yang jelas untuk pengembangan e-Government. Pada kasus ini peneliti ingin mengetahui bagaimana peran alokasi anggaran untuk pengembangan IT dalam mendukung proses pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pertanyaan yang diajukan kepada informan yaitu: *“Menurut bapak, bagaimana peran anggaran IT dalam mensukseskan implementasi e-Government di Banyuwangi ?”* Berikut kutipan pernyataan hasil wawancara terhadap informan:

Wcr.Pem.Ilam.Stat16_Stat17: “Jadi untuk **anggaran tentu sangat mendukung** karena ini menyangkut bagaimana **memberikan jasa** kepada pihak-pihak yang mengembangkan IT (software dan hardware). Kalau **anggaran kecil** tentu kita untuk **pengembangan terbatas**, tapi **anggaran besar** kita bisa **mengembangkan modul-modul dalam sistem tersebut secara baik.**”

Wcr.Pem.Anas.Stat10: “Ketersediaan ICT **pasti berkaitan dengan anggaran.**”

Wcr.Pem.Joni.Stat15: “Idealnya sih iya. Kalau misalnya semuanya dicukupi dengan APBD ya **tentunya sangat ideal** bagi pengembangan IT. Tetapi kan ya itu tadi keterbatasannya tidak semua kebutuhan kita tercukupi oleh APBD.”

Wcr.Pem.Anas.Stat11_Stat13: “Selain dari APBD, kami juga mengajak **perusahaan menyalurkan CSR untuk sektor ICT.** Setiap tahun ada **peningkatan anggaran**

pengembangan IT, seperti untuk beli bandwidth, **namun jumlahnya fluktuatif tergantung kebutuhan.**"

Wcr.Pem.Joni.Stat08: "Jadi kita tidak hanya didalam gedung, diluar pun kita bisa menggunakan fasilitas. **Artinya tidak semua infrastruktur dari APBD kita**, misalnya bisa juga dari **CSR swasta seperti telkom (@wifi.id)** itu dari sisi infrastruktur ya".

Wcr.Pem.Anas.Stat12: "Seperti **Telkom** yang membantu kami **memasang 1400 titik wifi**. Kemudian ada **NGO** yang **menyupervisi berbagai program reformasi birokrasi** di Banyuwangi berbasis IT".

Kata-kata kunci seperti: *"sangat mendukung", "memberikan jasa", "pengembangan terbatas", "pasti berkaitan", "tentu sangat ideal" "peningkatan anggaran", "CSR swasta"* menunjukkan bahwa **ketersediaan anggaran IT sangat memegang peranan penting dalam implementasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi**. Hal ini menyangkut untuk pengadaan komponen e-Government baik itu hardware dan software. Untuk memenuhi (pengadaan) infrastruktur ICT, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tidak hanya mengandalkan dana dari APBD melainkan bekerja sama dengan perusahaan swasta untuk menyalurkan dana CSR melalui program-program kerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

3. Jenis Aplikasi e-Government

Jenis aplikasi e-government yang dimaksud adalah apakah seluruh aplikasi e-government yang ada telah mencakup prinsip-prinsip *good governance* (transparansi, akuntabilitas, responsif, dan menjadikan proses birokrasi menjadi efektif dan efisien). Pertanyaan yang diajukan kepada informan yaitu; *"Apakah jenis dan fungsi aplikasi yang sudah online merepresentasikan indikator good governance (transparansi, akuntabilitas, responsif, efektifitas dan efisiensi) ?"*. Berikut kutipan pernyataan hasil wawancara terhadap informan:

Wcr.Pem.Ilam.Stat18_Stat19:"Ya saya kira sudah, karena misalkan **di website kita investor / pemohon sudah bisa langsung mengetahui SOP** kita, kemudian **transparansi biaya , prosedur** dan sebagainya. **Termasuk status perizinan pemohon bisa mengecek** status permohonannya sudah sampai tahap mana dengan memasukkan nomor registrasi dapat dicek, saya kira itu **mengefisiensikan waktu bagi pemohon.**"

Wcr.Pem.Agus.Stat22:“Kita kan sekarang memang sudah ada beberapa sistem informasi yang bisa **mengarah kesana** seperti pengolahan kependudukan (**OSS**), kemudian juga pengelolaan keuangan **desa (EVB)**, dan aplikasi-aplikasi lain lah seperti pariwisata database pariwisata, kesenian, UMKM.”

Wcr.Pem.Joni.Stat21_Stat22:“Tentunya ya yang kita rasakan ya setelah adanya penghargaan baik dari pemerintah maupun non pemerintah, **secara transparansi** di web kita **ada transparansi anggaran**. Itu **datanya darimana ?juga dari egov yang kita kelola** dan data itu terkoneksi dengan sistem. Misalnya transparansi anggaran itu kita ngambilnya dari **Sistem Informasi Perencanaan Penganggaran dan Pelaporan (SIMRAL)** yang kita gunakan. Misalnya juga **E-Village Budgeting untuk manajemen alokasi dana desa**, tentunya dari **sisi keefektifan** kalau dibandingkan dulu misalnya harus bawa flashdisk itupun datanya masih word excel. Kode transaksi, kode rekening, kode urusan program **biasanya selegence (salah / tidak match antara satu dengan lainnya)**karena memang masih manual.”

Wcr.Pem.Joni.Stat25:“Kemudian juga program namanya One Stop Services. One Stop Services itu kan pelayanan persuratan yang ada di desa dan kecamatan, **jadi warga yang ada di desa tidak perlu ke kantor kecamatan.**”

Wcr.Pem.Anas.Stat17_Stat18_Stat19:“Belum ideal, tapi kita sedang mengarah ke sana. Soal anggaran misalnya, **semuanya transparan dan bisa dibuka semua di website**. **Pengaduan berbasis IT menjadikan kita lebih responsif**. Misalnya, ada kasus masyarakat mengadukan ada orang sakit belum tertangani pada pukul 06.00 pagi, jam 09.00 sudah direspons dan dibawa ke rumah sakit.”

Kata-kata kunci seperti: **“bisa langsung mengetahui SOP”, “transparansi biaya”, “status perizinan”, “mengefisienkan waktu”, “mengarah kesana” “transparansi anggaran”, “menjadikan kita lebih responsif”** menunjukkan bahwa **kondisi aplikasi e-Government yang ada saat ini mengarah untuk mendukung perwujudan good governance di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.**

Dari sisi transparansi misalnya, pengelolaan seluruh keuangan tersistem dengan baik di Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Mulai dari input perencanaan, pelaksanaan pencairan keuangan, hingga penatausahaan laporan keuangan semua tersistem dan dapat dimonitoring langsung oleh eksekutif dalam hal ini Bupati dan juga akses BPK untuk monitoring laporan keuangan. Dari sisi responsifitas, publik dapat menyampaikan keluhan melalui channel pengaduan baik melalui layanan pengaduan online (pengaduan.banyuwangikab.go.id) atau melalui SMS Center. Dari sisi akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

saat ini telah menerapkan sistem evaluasi kinerja pemerintah secara online baik evaluasi untuk instansi maupun individu pegawai melalui e-Kinerja maupun SIM LPPD dan SIM LPPDes. Selanjutnya dalam hal efektifitas dan efisiensi pelayanan baik internal pemerintah maupun pelayanan publik kepada masyarakat dan bisnis sudah sangat banyak sekali aplikasi yang berfungsi untuk memangkas waktu birokrasi agar lebih cepat dan mudah seperti pada data tabel diatas.

4. Master Plan IT

Master plan IT digunakan untuk mengetahui sejauh mana pemerintah daerah merencanakan strategi pengembangan IT dalam kurun waktu tertentu. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki dokumen Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri, dokumen RSTI digunakan sebagai pedoman teknis untuk langkah-langkah pengembangan IT di Kabupaten Banyuwangi. Pertanyaan yang diajukan kepada informan yaitu: *“Menurut bapak, apa fungsi dari master plan IT dalam pengembangan e-Government di Banyuwangi ?”* Berikut adalah kutipan pernyataan hasil wawancara dengan informan:

Wcr.Pem.Agus.Stat24: “Kalau master plan kita istilahnya RSTI (Rencana Strategis Teknologi Informasi) 2012-2017. Emm dijadikan pedoman mas, tetapi memang kelemahannya itu belum menjadi kebijakan. Tetap itu menjadi pedoman kami di kominfo, tapi karena tidak diperbupkan sehingga kekuatan kami untuk, tapi secara teknis kita mengacu pada RSTI tersebut.”

Wcr.Pem.Anas.Stat20: “Kita memasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 maupun RPJMD 2016-2021 yang sekarang sedang disusun oleh Pemkab Banyuwangi. Di antaranya adalah proyek percontohan Smart Kampung di 24 desa di mana di desa-desa tersebut pelayanannya harus sepenuhnya berbasis IT.”

Wcr.Pem.Ilzam.Stat23: “Kita SKPD hanya diberi anggaran pengembangan saja. Tapi kami ada program inovasi namanya, disitu kami dituntut mengagendakan inovasi-inovasi yang berbau teknologi atau IT yang dapat digunakan dalam pelayanan, dan kami di BPPT tahun ini membuat inovasi digital sign untuk bisa tanda tangan dari gadget pimpinan.”

Wcr.Pem.Ilzam.Stat24: “Tentu masterplan IT menjadi pedoman dan arah untuk pengembangan IT, bagaimanapun itu harus terintegrasi karena sistem yang dibangun itu tidak bisa berdiri sendiri per SKPD”

Kata-kata kunci seperti: *“dijadikan pedoman”, “secara teknis mengacu”, “RPJMD”, “program inovasi”, “mengagendakan inovasi” “belum menjadi kebijakan”* menunjukkan bahwa pelaksanaan dari rencana pengembangan IT yang tertuang dalam dokumen RSTI memiliki kelemahan dikarenakan belum menjadi kebijakan (perbup/instruksi bupati/keputusan bupati). Namun, untuk pedoman teknis baik pengembangan infrastruktur maupun pengembangan konten tetap mengacu pada dokumen RSTI tersebut. Selain dokumen RSTI, strategi pengembangan IT di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015 dan RPJMD 2016-2021 yang saat ini sedang dalam proses penyusunan. Selain dokumen RSTI, pengembangan IT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga berangkat dari usulan-usulan dari SKPD yang dikemas dalam bentuk program inovasi dimana program inovasi tersebut memberikan kesempatan kepada SKPD untuk mengusulkan beberapa inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan di masing-masing SKPD.

5. Staff IT

Peran dari SDM yang memiliki keahlian di bidang IT sangat memegang peranan penting dalam keberlangsungan proses implementasi IT, tak terkecuali e-Government. Keberadaan staff IT tidak hanya untuk bagaimana mengembangkan sebuah aplikasi, namun staff IT juga memiliki peran untuk pemeliharaan dan operasional aplikasi sehari-hari termasuk didalamnya memberikan pelatihan penggunaan aplikasi kepada pengguna aplikasi di lingkungan pemerintahan. Pertanyaan yang diajukan kepada informan yaitu: *“Menurut bapak bagaimana peran staff IT dalam keberlangsungan implementasi e-Government di Banyuwangi ?”* Berikut adalah kutipan pernyataan wawancara dengan informan terkait dengan peran staff IT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam rangka keberlangsungan proses implementasi e-Government.

Wcr.Pem.Ilam.Stat27: *“Ya saya kira staff itu sangat penting ya. Pelayanan kita tidak bisa berhenti setiap hari setiap saat, dan 2 staff ini memang selalu siap standby. Beda cerita kalau pelayanan kita masih manual mungkin staff IT tidak terlalu penting.”*

Wcr.Pem.Joni.Stat29_Stat30: “Bukan penting lah. Tapi sangat sangat penting, **sangatnya harus berkali-kali**. Secanggih-canggihnya alat kalau tidak ada yang mengoperasikanya sama saja. Kami juga jujur boleh bangga **secara SDM teman-teman yang ada disini katakanlah penentu-penentu kebijakan masalah TI boleh dikatakan sangat mumpuni baik secara individu maupun secara tim** ketika dipadukan bisa berkolaborasi bisa saling mensupport.”

Kata-kata kunci seperti: *“sangat penting”, “tidak bisa berhenti”, “selalu siap”, “sangat mumpuni”* menunjukkan bahwa peran staff IT dalam rangka operasional pelayanan online di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sangat penting, dan SDM penentu-penentu kebijakan di Kominfo sangat mumpuni baik secara individu maupun tim.

Dalam hal pelatihan kepada staff IT di Dishubkominfo masih sangat terbatas undangan dari kementerian dan belum menjadi prioritas dari pimpinan. Staff IT lebih banyak belajar mandiri. Untuk pelatihan kepada pengguna aplikasi e-Government yang ada di SKPD, tergantung dari pengguna dan penanggung jawab sedangkan staff IT dari Dishubkominfo sebagai narasumber. Misalnya, aplikasi e-Village Budgeting yang merupakan tanggung jawab dari Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD). Ketika akan mengadakan pelatihan di desa A, maka sebagai narasumber dari BPM-PD dan perwakilan dari bagian kominfo Dishubkominfo. Berikut dua pertanyaan yang diajukan terkait pelatihan: *“(1) Apakah ada pelatihan staff IT untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem ?, (2) Apakah staff IT rutin melakukan pelatihan penggunaan aplikasi baik kepada pengguna internal SKPD maupun pengguna SKPD terkait yang menggunakan aplikasi ?”*. Berikut kutipan pernyataan tentang pelatihan penggunaan aplikasi e-Government di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Wcr.Pem.Ilzam.Stat26: “Kalau internal kita sifatnya insidentil saja, kemudian untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem juga **insidentil misalnya ketika ada kendala** staff pelayanan kok sistemnya eror begini ?maka langsung ditangani oleh staf khusus IT tersebut.”

Wcr.Pem.Ilzam.Stat27: “Kalau dari dishubkominfo **biasanya ada setahun dua kali** karena **staff IT secara mandiri bisa melakukan pemeliharaan dan pengembangan sistem.**”

Wcr.Pem.Agus.Stat27: “Kalau pelatihan kita memang masih terbatas undangan dari kemneterian atau apa, dan itu memang masih belum menjadi prioritas.”

Wcr.Pem.Ilzam.Stat28_Stat29: “Ada, untuk internal BPPT bagian pelayanan kita secara rutin setahun 2x, tetapi untuk penyelesaian kendala-kendala langsung insidentil. Kemudian untuk SKPD, kebetulan kita terintegrasi dengan beberapa SKPD terkait data **investasi jadi pada saat kita memberikan hak akses / username sekaligus kita latih untuk penggunaannya**. SKPD yang terintegrasi, BAPPEDA, DISPENDA, Disperindag, dan kalangan Perbankan untuk mengecek SIUP dan data investasi lainnya. “

Wcr.Pem.Agus.Stat28: “Untuk **pelatihan aplikasi itu tergantung dari pengguna**, seperti EVB itu kan tanggung jawabnya dari BPM-PD kita biasanya diikuti sebagai narasumber untuk pelatihan tetapi acara yang handle sana. Misalnya one stop service yang handle dari kecamatan kita diundang untuk ngajari.”

6. Manfaat Implementasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil wawancara terhadap seluruh informan yang ada, implementasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki banyak manfaat baik manfaat untuk pemerintah maupun untuk publik. Tiga pertanyaan yang diajukan kepada informan yaitu; *“(1) Menurut bapak, apa manfaat implementasi e-Government bagi pemerintah dan masyarakat?, (2) Menurut bapak bagaimana peran implementasi e-Government dalam menciptakan iklim investasi di Banyuwangi?, (3) Menurut bapak, bagaimana kondisi implementasi e-Government sebelum tahun 2011 dan sesudah 2011 ?”*. Berikut adalah kutipan pernyataan hasil wawancara terhadap informan tentang manfaat implementasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi:

Wcr.Pem.Ilzam.Stat20_Stat21: “Tentu sangat berbeda ya sebelum 2011 kita masih manual belum punya sistem, **belum punya database sehingga pelayanan lambat**. Kita juga tidak punya informasi data investasi yang valid, **tapi setelah 2011 pelayanan menjadi mudah dan cepat, transparan dan juga data-data investasi kita punya.**”

Wcr.Pem.Ilzam.Stat59_Stat60: “Kalau ngomongin birokrasi tentu kita ngomongin prosedur pelayanan di pemerintah. **Dari sisi internal tentu kita tertuntut untuk lebih cepat dalam memberikan pelayanan**, karena proses demi proses pelayanan perizinan **terpantau di dalam sistem**. Jadi posisi berkas ini sampai dimana, mengapa kok lama itu bisa terpantau di sistem.”

Wcr.Pem.Agus.Stat30_Stat31: "Manfaatnya itu yang dirasakan ya kita nggak bisa bicara manfaat pakai angka. **Ya manfaatnya adalah adanya transparansi, efektifitas, efisiensi itulah yang kita rasakan.** Dan yang menilai adalah orang lain kita. **dapat reward banyak sekali penghargaan mulai dari IDSA, kemudian juga pangripta kemudian ICT Pura dan hal-hal lain** Dan kita juga banyak dapat kunjungan dari kabupaten-kabupaten lain."

Wcr.Pem.Joni.Stat31: "Dari sisi pemerintah pun juga terbantu misalnya **monitoring penatausahaan keuangan kita itu sudah dimonitoring secara online oleh BPK melalui SIMRAL.** Sehingga kita **3 tahun berturut-turut mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian)** salah satunya pihak BPK diberi fasilitas untuk melihat langsung melalui hak akses."

Wcr.Pem.Anas.Stat14_Stat5_Stat16: "Bagi pemerintah, **e-gov ini memudahkan pelayanan. Kami jadi lebih praktis bekerja dan pelayanan lebih optimal.** Tapi pasti tidak bisa langsung, karena ini adalah transisi bagaimana kita mengubah PNS berparadigma lama menjadi paradigma baru. **Tapi yang jelas sekarang menjadi lebih mudah** dalam beberapa proses sejak adanya aplikasi-aplikasi yang kita buat".

Wcr.Pem.Anas.Stat19: "Pengaduan berbasis IT menjadikan kita lebih responsif. Misalnya, ada kasus masyarakat mengadukan ada orang sakit belum tertangani pada pukul 06.00 pagi, jam 09.00 sudah direspons dan dibawa ke rumah sakit".

Wcr.Pem.Agus.Stat37_Stat38: "Dulu bandwidthnya sebelum 2010 hanya 4 MB sekarang sudah 200 MB, dan sekarang juga **sudah ada kesadaran-kesadaran dari SKPD untuk saling open data** dan yang terpenting adalah itu. Tidak ada ini dataku ini datamu, yang ada adalah ini data banyuwangi. Jadi **data-data yang terintegrasi** tadi itu akan memudahkan untuk pengambilan kebijakan. **Dulu SKPD kalau mau bikin aplikasi ya termasuk jaringannya bikin sendiri, tower bikin sendiri** dulu sebelum ada konsep SIMDA yang tertuang di Perbup th 2010 tentang SIMDA".

Wcr.Pem.Anas.Stat24_Stat25: "Sudah sangat meningkat. Soal pendataan misalnya, **dulu kita tidak punya data** masyarakat secara detail. **Sekarang kita punya data lengkap masyarakat,** misalnya soal masyarakat yang rumahnya perlu dibedah. Foto, nama, alamat, dan semuanya detail ada di website, mana yang sudah diperbaiki, mana yang belum sampai pelosok desa".

Wcr.Pem.Ilam.Stat31_Stat32: "Ya akhirnya kita memberikan kemudahan akses kepada masyarakat khususnya pemohon izin / investor karena dia sudah bisa mengakses secara online tidak perlu datang dulu ke kantor kita. Nanti setelah berkas-berkasnya lengkap baru bisa dihantarkan ke kantor kita. **Tapi untuk mendaftar pertama sudah bisa mendaftar online** melalui sistem untuk mendapatkan nomor registrasi".

Wcr.Pem.Joni.Stat33: "Kita pun juga merasakan ya terkait dengan pemanfaatan data bersama sehingga **tidak perlu memakan waktu yang lama-lama, misalkan data SIAK (Kependudukan) bisa digunakan dengan BPJS/Rumah Sakit tinggal klik namanya**

sudah bisa, bayangkan kalau datanya tidak ada pasti menunggu lama dan masyarakat kalau sudah lama disuruh menunggu 1-2 menit saja sudah komplain macam-macam”.

Wcr.Pem.Ilam.Stat12: “Kemudian untuk investor karena kita sudah menyediakan website menyediakan apa namanya layanan perizinan online, maka dia bisa melihat secara langsung potensi investasi maupun daftar secara online perijinan usahanya, saya kira itu “.

Wcr.Pem.Agus.Stat35: “Sistem perizinan itu dibangun kan karena ada permintaan, tetapi itu dulu kan generic dari BPPT Jakarta, seiring berjalannya waktu supaya menciptakan transparansi, efisiensi dan segala macam itu kita menggagas SIPO untuk pengawasan / tracking perizinan sampai dimana”.

Wcr.Pem.Anas.Stat08_Stat09: “Itu salah satunya. Orang tidak mau dong berinvestasi ke daerah yang ICT-nya tidak memadai. Predikat kota digital society pertama di Indonesia saya rasa membantu dalam meng-create daya tarik investasi baik UMKM maupun investor besar”.

Wcr.Pem.Anas.Stat27_Stat28: “IT pasti memiliki peran untuk menggaet investor disamping beberapa faktor lainnya. Ya semua bersinergi bersatu membentuk iklim investasi yang positif di banyuwangi. Dengan IT kami mengubah image Banyuwangi yang dulunya dikenal dengan kota santet, sekarang kami pelan-pelan mengubur julukan itu. Paling tidak kita sudah punya dua julukan yaitu. Kota Digital Society Pertama di Indonesia dan juga Kota Festival dengan agenda Banyuwangi FestivalnyaMungkin itu turut membantu promosi investasi di Banyuwangi”.

Kata-kata kunci seperti: *“pelayanan mudah dan cepat”, “transparan”, “tertuntut lebih cepat”, “terpantau di sistem”, “efektifitas dan efisiensi”, “dapat penghargaan”, “dapat kunjungan”, “monitoring penatausahaan keuangan”, “mendapat predikat WTP”, “lebih praktis bekerja”, “pelayanan optimal”, “lebih responsif”, “integrasi data”, “kemudahan pendaftaran online”, “melihat potensi investasi”, “tracking perizinan”, “meng-create daya tarik investasi”, “membentuk iklim investasi”, “mengubah image”, “promosi investasi”* menunjukkan beberapa manfaat dari implementasi e-Government di lingkungan pemerintah Kabupaten Banyuwangi antara lain:

- Dengan menggunakan aplikasi, menjadikan pelayanan menjadi mudah, cepat, transparan, efektifitas, dan efisiensi waktu.
- Dengan adanya aplikasi pelayanan online akan menjadi trigger bagi pemerintah untuk mempercepat waktu pelayanan.

- Dengan diterapkannya aplikasi, pemerintah mendapatkan reward (penghargaan) baik penghargaan dari pemerintah maupun lembaga non pemerintah.
- Mendapatkan kepercayaan menjadi tujuan study banding kabupaten lain.
- Memudahkan monitoring penatausahaan keuangan secara online baik oleh eksekutif maupun BPK, sehingga 3 tahun berturut-turut mendapatkan predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK.
- Dengan aplikasi-aplikasi pelayanan online, menjadikan pemerintah lebih responsif terhadap keluhan dan masukan dari masyarakat.
- Dengan penggunaan aplikasi online, kesadaran antar SKPD untuk sharing data semakin baik, sehingga dengan integrasi data yang baik akan memudahkan eksekutif untuk mengambil kebijakan.
- Pendaftaran online (mendapatkan nomor registrasi) perizinan bagi pemohon izin.
- Sharing data SIAK dengan BPJS/Rumah Sakit sehingga mempercepat proses administrasi di puskesmas/rumah sakit/dan klinik di Banyuwangi.
- Prosedur dan persyaratan pelayanan perizinan jelas tersedia di website.
- Potensi investasi juga tersedia di website dan dapat diakses oleh calon investor.
- Implementasi SIPO menciptakan transparansi, efisiensi dan kemudahan tracking perizinan.
- Predikat Kota Digital Society membantu dalam menciptakan daya tarik investasi di Banyuwangi.
- IT mampu mengubah image Banyuwangi menjadi kota digital yang dulunya dikenal dengan mistis “santet”.

7. Peran implementasi e-Government dalam mewujudkan tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang baik (good governance).

Pengimplementasian aplikasi e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sangat membantu mewujudkan komitmen pemerintah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Kabupaten Banyuwangi. Pertanyaan yang diajukan kepada informan yaitu:

“Menurut bapak, apakah peran e-Government sangat signifikan dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Banyuwangi? ”. Berikut adalah kutipan pernyataan hasil wawancara tentang peranan implementasi e-Government yang telah berjalan dalam mendukung keberhasilan untuk mewujudkan good governance di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Wcr.Pem.Ilam.Stat33_Stat34: “Ya, saya kira sangat signifikan. Karena dengan adanya e-gov itu tentu ada transparansi di dalam pelayanan sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana prosedur dan biaya perizinan, **nah ini tentu bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik**. Sehingga kita bisa meminimalisir permainan-permainan yang dilakukan oleh oknum-oknum misalnya makelar izin”.

Wcr.Pem.Ilam.Stat35: “Selain transparan, dengan e-gov juga akan mempercepat prosedur pelayanan dan itu tentu menjadi bagian dari tata kelola yang baik”.

Wcr.Pem.Agus.Stat32: “Itulah yang ingin kita sampaikan bahwa Pak Bupati menyampaikan harus ada dashboard di kecamatan-kecamatan dan mengapa IT nya harus diperkuat karena supaya masyarakat tidak terbebani harus wira wiri ngurus dokumen yang semestinya bisa dalam satu tempat”.

Wcr.Pem.Agus.Stat33: “Terus juga masalah transparansi dengan adanya tersistematis mulai dari perencanaan sampai penatausahaan laporan keuangan maka tidak ada celah lagi individu-individu untuk ngakali misalnya laporannya di tipe-x dan sebagainya.”

Wcr.Pem.Agus.Stat34: “Termasuk akuntabilitas dan segala macam karena keuangan juga prosesnya by sistem jadi nggak perlu ngitung kalkulator lagi tinggal resume-resume dari transaksi-transaksi sudah bisa keluar laporan yang akuntabel.”

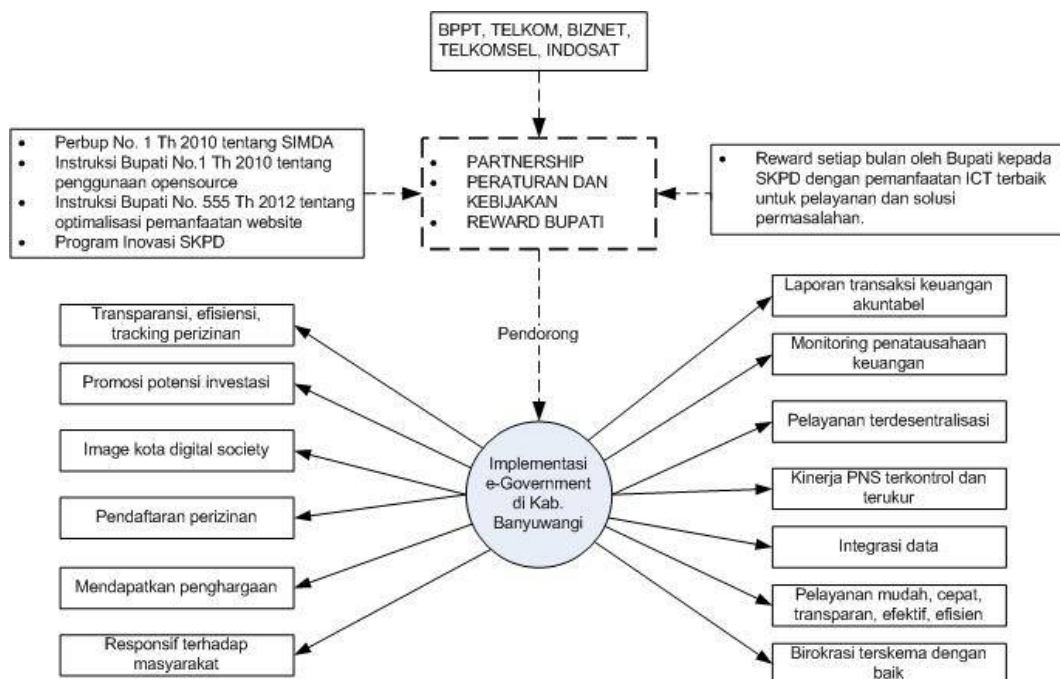
Wcr.Pem.Anas.Stat21_Stat22: “Sangat signifikan. Dulu, harus diakui birokrasi kerjanya tidak terskema, tidak terukur. Kita tidak tahu PNS A berhasil atau tidak. Tapi sekarang semua jelas. Kinerja PNS diukur. Kalau IT kan tidak bisa dibohongi karena dia sistem. Artinya setiap PNS dituntut untuk bekerja produktif dan tentu itu akan berdampak terhadap tata kelola pemerintahan”.

Wcr.Pem.Anas.Stat23 “Bahkan, secara pribadi setiap bulan saya mengumumkandinas apa yang paling bagus merespons permasalahan dengan menggunakan instrumen ICT. Jadi mereka terpacu.”

Dari kutipan pernyataan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa manfaat dari implementasi e-Government dalam mendukung Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan good governance di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi antara lain:

1. Penggunaan e-government menjadikan pelayanan menjadi transparan.
2. Penggunaan e-government meminimalisir permainan oknum makelar perizinan.
3. Penggunaan e-government mempercepat prosedur pelayanan baik pelayanan internal antar SKPD maupun pelayanan publik.
4. Penggunaan e-government menjadikan pelayanan ter-desentralisasi dengan adanya dashboard di kecamatan-kecamatan.
5. Penggunaan e-government menjadikan transaksi dan laporan keuangan akuntabel karena semua by sistem.
6. Penggunaan e-government menjadikan birokrasi terskema dengan baik.
7. Penggunaan e-government menjadikan kinerja PNS terkontrol dan terukur dengan baik karena kinerja PNS dimonitoring oleh sistem yaitu e-Kinerja.
8. Penghargaan rutin setiap bulan oleh Bupati untuk dinas, memacu SKPD untuk menggunakan ICT dalam merespon permasalahan yang ada di dinas.

Berdasarkan uraian pembahasan mengenai identifikasi pola aktual implementasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, maka dapat digambarkan sebuah sub pola temuan di lapangan tentang manfaat implementasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi seperti pada gambar 5.22 dibawah ini.



Gambar 5.22 Sub-pola Aktual 1: Manfaat Implementasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
(Sumber: Hasil analisis, 2016)

5.4.1.2.2 Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Implementasi *e-government* akan membawa dampak pada reformasi birokrasi pemerintahan yang lebih baik (Al-Azzam & Abu-Shanab, 2014; Lau, 2005). Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) telah menetapkan beberapa strategi yang dikemas dalam program percepatan reformasi birokrasi salah satunya dengan pengembangan sistem elektronik pemerintah(e-Government).

Pada penelitian ini, unsur tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) terdiri atas transparansi, akuntabilitas, responsif, kualitas regulasi dan penegakan hukum, dan efektifitas dan efisiensi birokrasi. Pembahasan mengenai praktek good governance di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan dijelaskan dibawah ini.

1. Transparansi

Transparansi yang dimaksud adalah keterbukaan pemerintah untuk memberikan informasi (peraturan, laporan, data-data keuangan, dan lain-lain) yang dibutuhkan oleh *stakeholders* (masyarakat dan sektor bisnis).Pertanyaan

yang diajukan kepada informan yaitu; *“Apakah pemerintah terbuka terhadap masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan informasi laporan penggunaan keuangan daerah? Melalui media apa penyampaian informasi tersebut? ”*.

Berikut adalah kutipan pernyataan hasil wawancara tentang praktek transparansi terhadap keuangan dan penggunaan anggaran di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi:

Wcr.Pem.Ilam.Stat37: “Banyuwangi saya kira kabupaten yang mungkin **menggagas untuk transparansi keuangan, karena masyarakat nanti bisa mengakses APBD secara online** baik secara global maupun per skpd sudah bisa dilihat di website nya pemma nanti disediakan **subdomain tentang transparansi** tentang APBD”.

Wcr.Pem.Anas.Stat35_Stat36: “Melalui website di www.banyuwangikab.go.id, media massa, dan **baliho-baliho** berukuran besar di jalan”. Jika Anda ke Banyuwangi saat awal tahun atau pertengahan tahun, kita **pasang rincian APBD di baliho-baliho**, sehingga masyarakat jadi tahu”.

Wcr.Pem.Anas.Stat37: “Selain itu, **sejak 2014 kita gelar Festival Transparansi Anggaran** di depan Taman Sayu Wiwit. Di sana semua program dibuka. Tahun ini namanya kami ganti jadi **Festival Pelayanan Publik yang akan digelar 9-12 Agustus 2016**, di sana akan dipaparkan berbagai program pemma sekaligus sebagai pertanggungjawaban”.

Wcr.Pem.Joni.Stat40_Stat41_Stat42: “Kalau menu transparansi yang ada di web itu mulai tahun 2012 atau 2013 kalau nggak salah. Nah ini perlu digarisbawahi bahwasanya transparansi tidak hanya menyangkut laporan anggaran dsb, **pelaporan hasil pembangunan juga termasuk transparansi. Sebelum kepemimpinan Pak Anas** kita juga melaporkan **“NAMUN”** dalam bentuk berita (postingan di web). Jadi kita secara bertahap memang”.

Wcr.Pem.Agus.Stat39: “Mm kalau untuk transparansi ya seperti yang saya sampaikan tadi karena **pengelolaan yang sudah tersistem mulai dari perencanaan, laporan penatausahaan sampai pada laporan pencairan itu sudah bisa diakses oleh publik dan itu ada di banyuwangikab.go.id**. mulai dari transparansi perencanaan keuangan daerah dan transparansi pengelolaan keuangan daerah sudah ada semua. Dan itu selalu diupdate oleh pihak yang mengelola keuangan.”

Wcr.Pem.Joni.Stat39: “Memang secara regulasi (UU) kan **keterbukaan informasi publik itu diamanatkan harus diumumkan kepada masyarakat**. Jadi informasi apa saja yang wajib disampaikan kepada masyarakat terutama terkait pembangunan lebih-lebih yang menggunakan dana/anggaran, sehingga atas dasar UU tersebut kita harus menyajikan data tersebut”.

Kata-kata kunci seperti: *“transparansi keuangan”, “masyarakat bisa mengakses”, “subdomain tentang transparansi”, “media massa”, “baliho”,*

”festival transparansi anggaran”, ”pengelolaan tersistem” menunjukkan bahwa penggunaan SIKD sangat membantu dalam mewujudkan transparansi keuangan karena seluruh proses dari perencanaan hingga penatausahaan tersistem dengan baik. Dan media yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mempublikasikan transparansi antara lain melalui website www.banyuwangikab.go.id , baliho-baliho dan festival transparansi anggaran. Sebelum tahun 2010, publikasi terkait anggaran pemerintah hanya dilaporkan dalam bentuk posting berita di situs pemkab. Dukungan regulasi(UU) yang menuntut praktek transparansi turut berperan penting dalam mewujudkan transparansi di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Unsur transparansi selanjutnya yaitu transparansi terhadap peraturan atau kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Pertanyaan yang diajukan kepada informan yaitu: *“Apakah pemerintah selalu mempublikasikan peraturan/kebijakan daerah melalui website resmi pemerintah?”*. Berikut kutipan pernyataan wawancara tentang transparansi peraturan atau kebijakan di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Wcr.Pem.Ilam.Stat38: “Kalau publikasi peraturan masing-masing SKPD sudah tersedia di website masing”, kemudian untuk kumpulan perda, perbup sudah disediakan oleh bagian hukum yang terintegrasi dengan jawa timur di JDIH (Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum)”.

Wcr.Pem.Anas.Stat38_Stat39: “Kami juga mempunyai Lounge Pelayanan Publik di kantor pemda. Di sana semua bisa lihat data apapun yang dibutuhkan. Data orang miskin, orang sakit, peraturan, dan sebagainya dipaparkan. Di sana orang juga bisa lihat aktivitas pelayanan di Puskesmas, RS, dan dinas-dinas yang berkaitan langsung dgn pelayanan publik lewat CCTV. Itu sedang kami siapkan biar bisa dilihat di website juga”.

Wcr.Pem.Agus.Stat40: “Ada juga. Dari bagian hukum mereka kan dibuatkan JDIH (Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum) yang menjadi perpanjangan tangan untuk bisa transparansi mulai dari SK-SK, Perbup-Perbup, dan sebagainya”.

Kata-kata kunci seperti: *“website masing-masing”, “disediakan oleh bagian hukum”, “JDIH”, “lounge pelayanan publik”* menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) kabupaten maupun JDIH yang terintegrasi dengan JDIH

Propinsi Jawa Timur dengan alamat jdih.banyuwangikab.go.id dan kabbanyuwangi.jdih.jatimprov.go.id. Melalui JDIH tersebut, bagian hukum Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mempublikasikan produk hukum pemerintah seperti perda, perbup, kepurusan bupati dan instruksi bupati. Selain melalui media, seluruh data dan aktivitas pelayanan di dinas, RS, puskesmas dapat dilihat di Lounge Pelayanan Publik di Kantor Bupati.

Berikut adalah beberapa hasil pengamatan terhadap praktek transparansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan sekaligus menjadi bukti yang dapat mendukung penjelasan diatas.



Gambar 5.23 Menu Transparansi di Situs Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
(Sumber: www.banyuwangikab.go.id)

The screenshot shows the website of the Banyuwangi Government. The header includes the logo and name 'Banyuwangi' and a navigation menu with links: Beranda, Berita, Profil Daerah, Pemerintahan, Pariwisata, Informasi, and Book. Below the header, there is a section titled 'Tahun Anggaran 2015' which contains a table of financial reports.

No	Dokumen	Tahun Anggaran
1	Laporan	2015
2	Lampiran	2015
3	Peraturan Daerah	2015
4	Ringkasan DPA	2015
5	Peraturan Bupati	2015
6	Ringkasan DPA	2015
7	SP2D	2015
8	Ringkasan RKA SKPD	2015
9	Ringkasan RKA PKPD	2015
10	Rancangan Ringkasan RKA SKPD	2015
11	Realisasi Perbandingan	2015
12	Laporan Tambahan	2015

Gambar 5.24 Data Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2015

(Sumber: www.banyuwangikab.go.id)

2. Akuntabilitas

Akuntabilitas yang dimaksud adalah pertanggung jawaban dari pemerintah kepada *stakeholders* terkait kinerja lembaga baik di bidang manajemen, organisasi dan pelayanan publik. Akuntabilitas pada penelitian ini menyangkut bagaimana pemerintah melaporkan pertanggungjawaban kinerja pemerintah dan pertanggungjawaban anggaran daerah. Pertanyaan yang diajukan kepada informan yaitu: *“Apakah pemerintah setiap tahun / periode tertentu melaporkan pertanggungjawaban anggaran dan kinerja pemerintah? Melalui media apa melaporkannya?”*. Berikut adalah kutipan pernyataan wawancara tentang pelaporan pertanggungjawaban kinerja dan anggaran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi:

Wcr.Pem.Joni.Stat43: “Kalau yang bisa diakses oleh publik itu data tahun yang sudah lewat, kalau tahun yang sedang berjalan belum karena datanya kan belum mateng. Kalau kegiatan/laporan yang sudah diperiksa/diaudit baru sudah tersedia”.

Wcr.Pem.Joni.Stat44: “Kalaupun ada permintaan data dengan format yang khusus kita sudah punya yang namanya PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi), jadi secara perseorangan maupun lembaga bisa mengajukan surat permohonan data publik. Itu kalau overall banyuwangi, nah di masing-masing SKPD kita juga punya namanya PPID Pembantu”.

Wcr.Pem.Ilzam.Stat43: “Kalau untuk pemkab nanti bisa ditanyakan ke bagian pemerintahan ya, tapi **untuk masing-masing SKPD secara berkala dimintai laporan LAKIP melalui sistem aplikasi**, nani tinggal ngisi di sistem dan diakumulasi di bagian pemerintahan”.

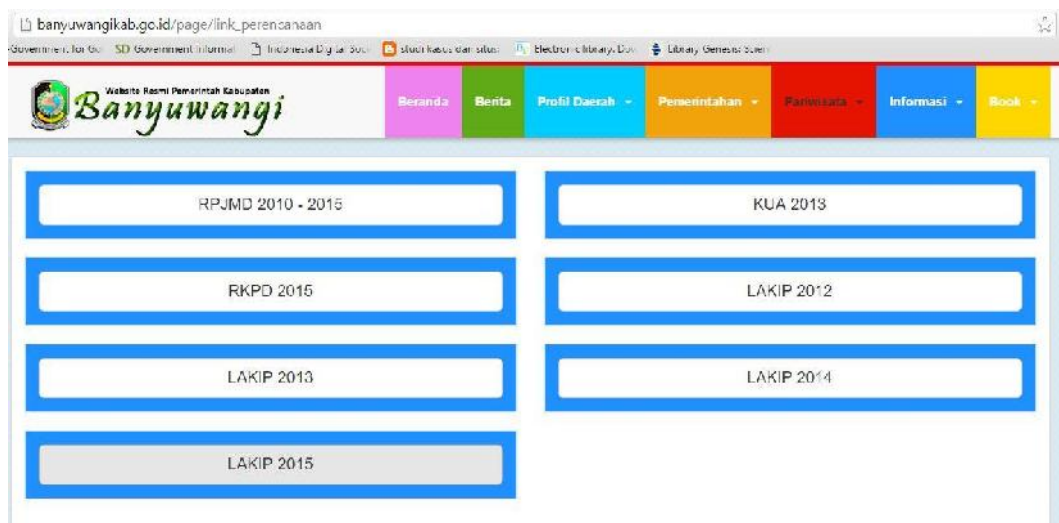
Wcr.Pem.Agus.Stat44: “Oiya setiap tahun. **Kan kita ada sistemnya LPPD, LPPDes**, sampai desa pun diperinci oleh pemerintah untuk laporan LAKIPnya”.

Wcr.Pem.Anas.Stat40: “**SAKIP kita tahun 2015 punya nilai tertinggi di Jatim** dari Kementerian PAN dan Reformasi Birokrasi”.

Kata-kata kunci seperti: ***“yang bisa diakses publik”, “data tahun yang sudah lewat”, “PPID”, “PPID Pembantu”, “LPPD”, “LPPDes”, “SAKIP”*** menggambarkan bahwa:

- Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi (SAKIP) tahun 2015, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi meraih predikat B dengan nilai 65,41 dan terbaik di Jawa Timur.
- Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sejak tahun 2011 telah menerapkan aplikasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPDes). Dengan aplikasi ini memudahkan untuk pendataan kinerja di tingkat SKPD, memangkas waktu dan juga kesesuaian pengisian indikator kinerja sesuai dengan regulasi yang berjalan.
- Untuk pelaporan anggaran daerah, pemerintah telah melaporkan melalui beberapa cara antara lain publikasi di situs www.banyuwangikab.go.id, baliho-baliho, festival transparansi anggaran, melalui jaringan PPID Kabupaten maupun PPID Pembantu di masing-masing SKPD.

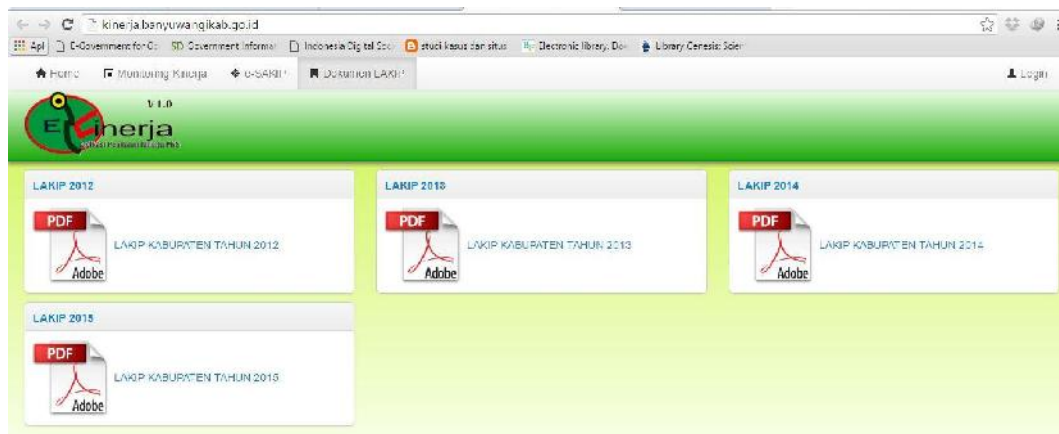
Berikut adalah beberapa hasil pengamatan terhadap praktek akuntabilitas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan sekaligus menjadi bukti yang dapat mendukung penjelasan diatas.



Gambar 5.25 Data Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Sumber: www.banyuwangikab.go.id)

No	Dokumen	Tahun Anggaran
3	Lampiran Perda Pertanggungjawaban	2012
4	Perbup LKPD	2012
Tahun Anggaran 2013		
1	Neraca	2013
2	Perda LKPD	2013
3	Lampiran Perda Pertanggungjawaban	2013
4	Perbup LKPD	2013
Tahun Anggaran 2014		
1	Neraca	2014
2	Perda LKPD	2014

Gambar 5.26 Data Laporan Pertanggungjawaban Anggaran
(Sumber: www.banyuwangikab.go.id)



Gambar 5.27 Aplikasi e-Kinerja untuk Monitoring Kinerja Pegawai
(Sumber: kinerja.banyuwangikab.go.id)

3. Responsif

Responsif yang dimaksud adalah kemampuan pemerintah untuk cepat dan tanggap dalam melayani kepentingan dari semua *stakeholders*. Responsif disini juga diartikan sebagai keterbukaan pemerintah terhadap masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari *stakeholders*. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mengimplementasikan beberapa layanan yang dapat digunakan oleh *stakeholders* untuk berinteraksi dengan pemerintah seperti memberikan kritik dan saran salah satunya yaitu layanan pengaduan masyarakat (pengaduan.banyuwangikab.go.id). Selain itu responsifitas pemerintah juga diwujudkan melalui percepatan pelayanan publik dengan menggunakan aplikasi online salah satunya layanan lahir procot pulang bawa akta. Pertanyaan yang diajukan kepada informan yaitu: *“Bagaimana responsifitas pemerintah dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat dan bisnis?”*. Berikut kutipan pernyataan hasil wawancara tentang responsifitas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam hal kecepatan dalam memberikan pelayanan kepada publik:

Wcr.Pem.Ilam.Stat57: *“Untuk pelayanan saya kira sudah sesuai SOP ya, terutama untuk SIUP (pengajuan SIUP) kecil yang berkasnya sudah lengkap bisa kita tangani dalam sehari. Semua harus lengkap, kalau belum lengkap tentu kita tidak bisa menerbitkan itu karena sudah ada SOP nya”*.

Wcr.Pem.Ilzam.Stat58:“Kita juga punya **mobile service** untuk keliling di ruang-ruang publik tujuannya untuk memfasilitasi pemohon-pemohon yang akan mengajukan permohonan perizinan”.

Wcr.Pem.Agus.Stat50“Ya njenengan sudah ngalamin itu, **One stop service** yang pertama. Kemudian **lahir procot pulang bawa akta**.”

Kata-kata kunci seperti: *“sesuai SOP”, “tangani dalam sehari”, “mobile service”, “onse stop service”, “lahir procot pulang bawa akta”* menunjukkan bahwa untuk waktu pelayanan khususnya di bagian perizinan, seluruh layanan sudah memiliki SOP masing-masing. Program unggulan dari BPPT yaitu One Day Service untuk pengajuan SIUP kecil yang berkasnya sudah lengkap. Contoh layanan lain yaitu One Stop Service berupa pelayanan permohonan persuratan bagi warga yang tersebar di kecamatan dan desa. Dengan adanya One Stop Service ini akan mempercepat pelayanan yang tanpa harus ke dinas di kota tetapi cukup di dashboard-dashboar yang tersebar di desadan kecamatan.

Selain kecepatan dalam pelayanan publik, bentuk responsifitas pemerintah juga diwujudkan dalam respon terhadap pengaduan dari publik baik berupa kritik dan saran. Pertanyaan yang diajukan kepada informan yaitu: *“Bagaimana responsifitas pemerintah dalam menanggapi pengaduan?”*. Berikut adalah kutipan pernyataan hasil wawancara tentang respon pemerintah terhadap kritik dan saran dari publik:

Wcr.Pem.Ilzam.Stat56: “Nah jadi untuk respon kritik dan saran langsung mas, jadi hari itu memang untuk apa namanya yang via website dikordinasi oleh dishubkominfo kerjasama dengan bagian organisasi begitu ada keluhan atau apa **langsung ditanggapi** dan **dishare** kepada SKPD terkait dan **kita pada saat hari itu juga harus memberikan jawaban atau respon**”.

Wcr.Pem.Anas.Stat48: “Di handphone saya ada grup-grup penanganan pengaduan. Misal ada warga lapor ada masalah A, saya kirim ke grup tersebut dan **harus ditangani maksimal 4 jam**. Laporannya **harus berbasis foto**. Jadi petugas terkait harus ke lapangan dan memotretnya setelah ditangani”.

Wcr.Pem.Anas.Stat49: “**Sekarang kami sedang bentuk UPT Penanganan Kemiskinan**. Disana masalah yang mendesak. Misalnya ada orang sakit tapi belum tertangani karena datanya belum masuk **harus direspons dalam waktu maksimal 4 jam**, harus segera direspons”.

Wcr.Pem.Agus.Stat49: “Kalau responsibilitasnya di pengaduan sih **sesuai dengan SOP** nya. Jadi di bagian organisasi menampung dulu laporan dari website atau sms atau juga dari email selanjutnya didisposisikan kepada skpd/dinas yang sesuai dengan pengaduannya. Kalau waktu responnya sih **maksimal 2-3x 24jam ya mestinya**. Tapi itu gak saklek juga tergantung dari permasalahan yang disampaikan.”

Kata-kata kunci seperti: *“langsung mas”, “langsung ditanggapi”, “dishare”, “harus memberikan respon”, “harus ditangani maksimal 4 jam”, “sesuai dengan SOP”* menunjukkan bahwa responsifitas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pengaduan yang disampaikan oleh publik menjadi lebih baik. Prosedur penanganan pengaduan telah diatur oleh SOP yang mengatur tentang waktu respon pengaduan. Jadi, SKPD yang dituju untuk menyampaikan pengaduan harus menanggapi secepatnya dengan memberikan respon jawaban terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan penanganan.

Berikut adalah beberapa hasil pengamatan terhadap responsifitas Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap pengaduan dari masyarakat melalui layanan pengaduan dan layanan terbaru dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu Banyuwangi Children Center.



Gambar 5.28 Responsifitas Bupati dalam menanggapi pertanyaan masyarakat

(Sumber: Akun twitter @_azwarnas)



Gambar 5.29 Responsifitas Instansi dalam Menanggapi Pengaduan Masyarakat (Sumber: pengaduan.banyuwangikab.go.id)



Gambar 5.30 Layanan Banyuwangi Children Center (Sumber: Akun twitter @a_azwarnas)

4. Kualitas Regulasi dan Penegakan Hukum

Kualitas regulasi yaitu bagaimana kebijakan / peraturan yang dibuat oleh pemerintah mendukung sektor bisnis, tidak memberatkan masyarakat, dan juga menciptakan iklim yang tertib dan kondusif di lingkungan stakeholders. Sedangkan penegakan hukum yaitu bagaimana penerapan regulasi secara adil, obyektif dan tidak berpihak pada satu golongan. Pertanyaan yang diajukan kepada informan yaitu: *“Menurut bapak, bagaimana kualitas regulasi yang dikeluarkan oleh pemkab? Apakah adil untuk seluruh stakeholder dan tidak memberatkan salah satu pihak? ”*. Berikut adalah kutipan pernyataan hasil wawancara terhadap informan tentang kualitas regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi:

Wcr.Pem.Ilam.Stat45: **“Ya saya kira harus begitu ya, harus seimbang antara kepentingan investasi dengan kepentingan masyarakat.** Sehingga peraturan yang disusun pemerintah pun harus adil”.

Wcr.Pem.Ilam.Stat46: **“Misalkan, sebuah usaha kita sudah menetapkan izin gangguan, izin mendirikan bangunan, Nah izin gangguan itu salah satu syaratnya harus mendapatkan persetujuan oleh tetangga di sekitar lokasi investasi, termasuk nanti bagaimana kajian tentang lingkungan hidup juga kita masukkan dalam persyaratan maka kalau itu tidak dipenuhi maka izin tidak bisa kita keluarkan.”**

Wcr.Pem.Ilam.Stat51: **“Bahkan retribusi kita untuk IMB, HO tergolong murah kalau dibandingkan dengan kabupaten lain. Misalkan kita disini untuk IMB kediaman 5000/meter dikota lain sudah 3x lipat, jadi biaya retribusi masih cukup rendah lah di banyuwangi dan menurut saya itu jadi keunggulan juga”.**

Wcr.Pem.Anas.Stat42_Stat43_Stat44_Stat45: **“Harus diupayakan ke arah sana. Tapi sebagai pemerintah, harus saya katakan bahwa kita tidak bisa menyenangkan semua pihak. Ada trade-off. Ada pilihan-pilihan.** Sebagai contoh, di kawasan Alun-Alun, tidak kita izinkan ada bangunan baru seperti untuk mall atau hotel karena dalam tata ruang kita, di sekitar alun-alun adalah bangunan penunjang alun-alun seperti taman, perpustakaan, dan sebagainya. Itu tidak menyenangkan semua pihak karena ada orang ingin punya bangunan komersial di daerah sana. Tapi pasti kami berupaya seoptimal mungkin agar semua pihak senang dengan kebijakan”.

Berdasarkan kutipan pernyataan diatas menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Banyuwangi berusaha untuk merumuskan kebijakan/regulasi yang seimbang bagi kepentingan pemerintah, masyarakat dan bisnis. Namun prakteknya hal itu sulit dilakukan, sebagai contoh perda yang melarang

pembangunan seperti mall atau hotel disekitar alun-alun. Di dalam rencana tata ruang wilayah (RTRW), yang boleh ada di sekitar alun-alun adalah bangunan penunjang alun-alun seperti taman, perpustakaan dan sebagainya dan tidak boleh ada bangunan komersil. Tentu dengan perda tersebut tidak bisa menyenangkan pihak bisnis karen tidak dapat memiliki bangunan komersil disana.

Dalam hal kebijakan menyangkut retribusi perizinan di Kabupaten Banyuwangi, menurut BPPT retribusi untuk izin IMB dan HO (gangguan) tergolong murah apabila dibandingkan dengan retribusi di kota lain. Dan itu menjadi salah satu keunggulan juga dalam hal perizinan di Kabupaten Banyuwangi.

Hal terpenting dari regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu bagaimana penerapannya dan penegakan terhadap hukum yang mengaturnya. Pertanyaan yang diajukan kepada informan yaitu: *“Bagaimana pemerintah menyikapi jika terjadi pelanggaran terhadap regulasi yang dikeluarkan pemerintah? Apakah pemerintah konsisten dalam pemberian sanksi jika terjadi pelanggaran peraturan? ”*. Berikut adalah kutipan pernyataan hasil wawancara terhadap informan tentang konsistensi penegakan hukum di wilayah Kabupaten Banyuwangi:

Wcr.Pem.Ilam.Stat47: “Ya misalnya terkait izin mendirikan bangunan. **Kalau ada sebuah usaha tanpa memegang izin**, nanti pemegang wilayah seperti kecamatan, kelurahan/desa itu yang akan memantau kemudian **melaporkan kepada satpol PP untuk diberikan sanksi tegas berupa pemberhentian bangunan**”.

Wcr.Pem.Anas.Stat54_Stat55: “Ya ditertibkan sesuai aturan. Biasanya pertama ada **peringatan** dan seterusnya. **Seperti kawasan sekitar bandara yang dalam Perda Tata Ruang kami tidak boleh ada bangunan yang mengganggu**. Kami sengaja bikin sekitar bandara tetap sawah. **Tidak akan kami keluarkan IMB jika ada yang membangun**”.

Wcr.Pem.Anas.Stat56: “**Harus konsisten** karena jadi contoh bagi masyarakat yang lain dan Alhamdulillah hingga saat ini kami **masih konsisten** terhadap **penindakan pelanggaran aturan-aturan**”.

Kata-kata kunci seperti: *“melaporkan kepada Satpol PP”, “sanksi tegas”, “pemberhentian bangunan”, “peringatan”, “tidak akan kami keluarkan”, “harus konsisten”, “masih konsisten”, “penindakan pelanggaran”*

menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi konsisten dalam penegakan hukum khususnya menyangkut perizinan. Sebagai contoh, pendirian usaha/bangunan yang tanpa memiliki izin maka pemangku wilayah seperti kecamatan, kelurahan/desa akan memantau dan kemudian melaporkan kepada Satpol PP untuk diberikan sanksi tegas berupa pemberhentian bangunan.

5. Efektifitas dan Efisiensi

Efektifitas dan efisiensi menyangkut bagaimana kemampuan pemerintah dalam pengelolaan sumber daya dengan cara yang paling baik (efisien) sehingga meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efektif. Dari sekian banyak aplikasi e-Government yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi manfaat utama yang dirasakan tentu memberikan kemudahan dan kecepatan dalam pelayanan baik internal maupun pelayanan kepada publik. Pertanyaan yang diajukan kepada informan yaitu: *“Setelah diimplementasikannya e-Government, bagaimana dampak terhadap birokrasi pelayanan publik?”*. Berikut adalah kutipan pernyataan mengenai efektifitas dan efisiensi birokrasi dalam pelayanan publik:

Wcr.Pem.Joni.Stat45: “Iya sebenarnya pelayanan publik ini kan nggak cuma kepada masyarakat dan stakeholder, **antar SKPD pun sebenarnya pelayanan publik**. Ya yang kita rasakan ini **birokrasinya lebih cepat lebih efisien** dan apa ya **pengambilan kesimpulan/keputusannya itu dari satu data (data terintegrasi)**”.

Wcr.Pem.Anas.Stat50_Stat51_Stat52: “Sudah semakin membaik, meski belum ideal. Seperti program akta kelahiran online bernama “Lahir Prokot Pulang Bawa Akta”. Sudah lebih dari 50.000 bayi mendapat fasilitas ini. Seperti sistem perijinan online juga yang **memudahkan pelaku usaha** apply permohonan pembuatan SIUP, TDP dsb. Beberapa contoh tadi adalah dampak positif dari penggunaan layanan online”.

Wcr.Pem.Ilam.Stat59_Stat60: “Kalau ngomongin birokrasi tentu kita ngomongin prosedur pelayanan di pemerintah. **Dari sisi internal tentu kita tertuntut untuk lebih cepat dalam memberikan pelayanan**, karena proses demi proses pelayanan perizinan **terpantau di dalam sistem**. Jadi posisi berkas ini sampai dimana, mengapa kok lama itu bisa terpantau di sistem.”

Kata-kata kunci seperti: *“birokrasinya lebih cepat dan efisien”, “pengambilan keputusan dari satu data”, “memudahkan pelaku usaha”, “tertuntut lebih cepat”, “terpantau di sistem”* menunjukkan bahwa sejak

diterapkannya beberapa aplikasi/pelayanan berbasis online di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sangat berdampak pada efektifitas dan efisiensi pelayanan yang semakin baik. Pelayanan kepada masyarakat semakin baik dengan diterapkannya beberapa aplikasi yang dapat digunakan masyarakat seperti One Stop Service, Lahir Procot Pulang Bawa Akta, Sistem Perizinan Online (SIPO).

Selain pelayanan publik kepada masyarakat, pelayanan juga dapat berarti pelayanan internal antar elemen pemerintahan. Pertanyaan yang diajukan kepada informan yaitu: “”. Berikut adalah kutipan pernyataan tentang efektifitas dan efisiensi manajemen internal di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Wcr.Pem.Ilam.Stat61: “Iya jelas sangat berbeda, **karena sebelum ada aplikasi online kita tidak bisa menelusuri dari sebuah layer**, karena sifatnya masih manual maka kesulitan untuk menelusuri proses pelayanannya”.

Wcr.Pem.Ilam.Stat62: “Iya lebih memudahkan karena terutama untuk **evaluasi kinerja internal**. Kita setiap 2 minggu sekali melakukan **evaluasi internal** mana-mana yang menjadi kendala di dalam pelayanan”.

Wcr.Pem.Ilam.Stat63: “Ya saya kira implementasi e-gov memiliki peran yang sangat penting ya, karena **memang inilah alat untuk memantau kinerja pemerintah**. Sehingga hubungan antara pemerintah dengan masyarakat tidak ada sekat lagi.”

Wcr.Pem.Anas.Stat53: “Pasti. **Manajemen keuangan kami lebih bagus** karena semua terskema di SIMRAL, semua proses keuangan dari perencanaan sampai penatausahaan **tertata rapi**. Tidak bisa melanggar. **Manajemen SDM juga lebih tertata karena ada kinerjanya terekam**.”

Wcr.Pem.Agus.Stat52: “Ya itu tadi contohnya bisa dilihat dari **monitoring dashboard**. Ini dishub belum ngisi, **nggak perlu ditelponin** semua kan dari situ sudah kelihatan transparansinya. O ini dishub baru ngisi 5 dari 10, atau belum nanggapi pengaduan itu sangat jelas sekali”.

Kata-kata kunci seperti: **“evaluasi kinerja internal”, “memantau kinerja pemerintah”, “manajemen keuangan”, “kinerja SDM terekam”, “monitoring dashboard”, “nggak perlu ditelponin”** menunjukkan bahwadengan penerapan aplikasi e-Government, manajemen internal di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi semakin mudah dan cepat. Monitoring penyerapan anggaran lebih mudah, monitoring pelayanan perizinan lebih mudah melalui sebuah layer.

Manajemen keuangan lebih terskema dengan baik, manajemen SDM lebih tertata karena kinerja pegawai terekam, manajemen layanan pengaduan lebih mudah dimonitoring.

6. Manfaat terwujudnya tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang baik (good governance)

Praktek good governance di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sendiri masih belum ideal, namun sudah banyak mengalami peningkatan yang signifikan apabila dibandingkan tahun-tahun sebelumnya khususnya sejak diterapkannya beberapa aplikasi e-Government. Dengan mewujudkan good governance banyak manfaat yang dirasakan oleh pemerintah. Pertanyaan yang diajukan kepada informan yaitu: *“Menurut bapak, mengapa pemerintah berlomba-lomba untuk mewujudkan good governance? apa manfaat yang didapatkan ketika tata kelola pemerintahan menjadi lebih baik? ”*. Berikut adalah kutipan pernyataan hasil wawancara terhadap informan tentang manfaat yang dirasakan pemerintah dengan mewujudkan good governance di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Wcr.Pem.Anas.Stat59_Stat60: “Good governance ini memberi kepastian dan kemudahan, bukan hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi semua pihak (masyarakat umum, pelaku usaha, dan sebagainya). Good governance juga membangun kepercayaan publik, termasuk didalamnya pelaku usaha dan investor”.

Wcr.Pem.Ilzam.Stat65: “Karena begini daya saing antar daerah kan semakin kuat, sehingga banyuwangi harus memiliki daya saing yang kuat untuk menarik investor untuk datang ke banyuwangi, dan salah satunya diantara sekian banyak faktor adalah kualitas tata kelola pemerintah banyuwangi sendiri”.

Wcr.Pem.Anas.Stat64_Stat65: “Itu menjadi salah satu daya tarik. Investor mau masuk karena pemerintahnya transparan, bersih, perizinan tidak ribet”.

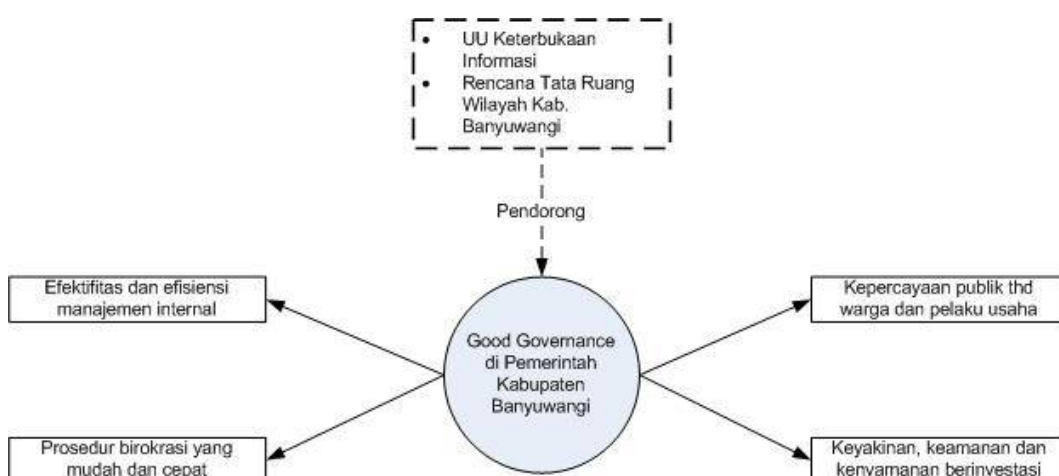
Wcr.Pem.Anas.Stat67: “Kami sangat mendukung penuh siapapun yang mau investasi di Banyuwangi, kami tawarkan kemudahan-kemudahan, kami tawarkan apa yang tidak dimiliki daerah lain”.

Wcr.Pem.Ilzam.Stat68: “Investor itu ketika mau datang itu pasti yang ditanyakan bagaimana transparansi perizinan, bagaimana transparansi biaya, kemudian bagaimana keamanan berinvestasi tentu dengan tata kelola pemerintahan yang baik terutama melalui e-gov akan meyakinkan investor bahwa daerah ini memang nyaman untuk berinvestasi. Karena begini mas, investor itu maunya pasti, cepat, dan gak ribet”.

Dari kutipan pernyataan diatas manfaat yang dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan mewujudkan good governance di pemerintahan lain:

- Good governance akan memberikan kepastian, kemudahan, kecepatan bagi pemerintah dan semua stakeholder khususnya melalui prosedur birokrasi yang lebih mudah.
- Good governance membangun kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kabupaten Banyuwangi termasuk pelaku usaha dan investor.
- Good governance memberikan keyakinan kepada investor dalam hal kenyamanan berinvestasi.

Dari uraian diatas mengenai manfaat good governance yang sedang diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, maka dapat digambarkan pola temuan tentang manfaat good governance pada penelitian ini seperti pada gambar 5.31 dibawah ini.



Gambar 5.31 Sub-pola Aktual 2: Manfaat Good Governance di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
(Sumber: Hasil analisis, 2016)

5.4.1.2.3 Daya Tarik Investasi Kabupaten Banyuwangi

Berdasarkan hasil penggalan informasi di lapangan terhadap informan pemerintah maupun investor, dapat diidentifikasi beberapa faktor yang menjadi daya tarik investasi di Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan hasil wawancara

terhadap informan internal pemerintah dan eksternal (penanam modal), faktor-faktor yang menjadi daya tarik investasi di Kabupaten Banyuwangi antara lain:

1. Tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Tata kelola pemerintah disini menyangkut bagaimana pengelolaan pemerintahan Kabupaten Banyuwangi yang transparan, akuntabel, responsif, dukungan regulasi yang baik dan konsistensi dalam penegakan hukum khususnya dalam bidang investasi. Berikut kutipan pernyataan yang tentang peran tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menarik minat investor masuk ke Banyuwangi.

Wcr.Pem.Anas.Stat59_Stat60: “**Good governance ini memberi kepastian dan kemudahan**, bukan hanya bagi pemerintah, tapi juga bagi semua pihak (masyarakat umum, pelaku usaha, dan sebagainya). **Good governance juga membangun kepercayaan publik, termasuk didalamnya pelaku usaha dan investor**”.

Wcr.Pem.Anas.Stat64_Stat65: “Itu menjadi salah satu daya tarik. **Investor mau masuk karena pemerintahnya transparan, bersih, perizinan tidak ribet**”.

Wcr.Pem.Ilzam.Stat65: “Karena begini daya saing antar daerah kan semakin kuat, sehingga banyuwangi harus memiliki daya saing yang kuat untuk menarik investor untuk datang ke banyuwangi, dan **salah satunya diantara sekian banyak faktor adalah kualitas tata kelola pemerintah banyuwangi sendiri**”.

Wcr.Pem.Ilzam.Stat69: “Jadi memang salah satunya karena tata kelola pemerintahan yang baik, karena dengan **pelayanan perizinan yang transparan, keamanan dan kenyamanan berinvestasi** tentu ini akan menggugah minat investasi.

Wcr2.Inv.Febby.Stat32_Stat33: “Gini mas, apa yaaa mungkin lebih ke image/citra ya mas ya. Kalau sebuah **pemerintah bisa transparan** dan sebagainya pasti akan semacam **dicap jujur, bersih, transparan** oleh rakyatnya bahkan bisa juga orang luar banyuwangi. Nah mungkin juga ini **ada kaitannya dengan niat berinvestasi disini** mas ya. Bisa jadi orang diluar sana memandang banyuwangi karena transparan pemerintahannya dan sebagainya”

Wcr2.Inv.Febby.Stat42_Stat43: “Tentu mas, kita sebagai katakanlah investor ya mas walaupun skala UMKM hehe. Saya rasa **siapa pun pelaku usaha dimanapun suka dengan kepastian, suka dengan hal yang pasti**. Pasti dalam artian **prosedurnya, kejelasan birokrasinya, kejelasan biaya nya** kalau misal ada biaya perijinan dan sebagainya. Dan yang satu lagi **kita maunya gampang dan cepet mas**.”

Wcr.Inv.Zunita.Stat17: “Ya jadi kalau menurut saya selaku pelaku usaha, **transparansi dan akuntabilitas pemerintah kabupaten banyuwangi saat ini luar biasa**”.

Wcr.Inv.Zunita.Stat11: “Jadi gini itu semua memang menjadi salah satu pertimbangan kami untuk memperbesar bisnis. Ee secara langsung apa ya saya rasa semua ini **kepercayaan, kepercayaan dari kita kepada pemerintah.**”

Wcr.Inv.Zunita.Stat20: “Jadi mas dari dukungan pemerintah dari **transparansi, akuntabilitas dan good corporate governance** nya itu memberikan kepada kami **keyakinan, trust, kepercayaan dan kepastian kami untuk mengembangkan usaha** ini untuk lebih besar, lebih luas dari yang sebelumnya “

Kata-kata kunci seperti: ***“kepastian”, “kemudahan”, “kepercayaan publik”, “pemerintahan transparan”, “izin tidak ribet”, “nggak perlu ditelponin”, “keamanan dan kenyamanan”, “menggugah minat investasi”, “image atau citra”, “kejelasan birokrasi”, “kejelasan biaya”, “keyakinan atau trust”*** menunjukkan bahwa kualitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini sudah cukup baik menurut perspektif internal pemerintah maupun investor. Good governance yang diwujudkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi turut menjadi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi di Kabupaten Banyuwangi.

2. Ketersediaan infrastruktur ICT

Berikut kutipan pernyataan yang mengatakan bahwa ketersediaan infrastruktur ICT di Kabupaten Banyuwangi turut menyumbang daya tarik bagi investasi di Banyuwangi.

Wcr.Pem.Anas.Stat08_Stat09: “Itu salah satunya. **Orang tidak mau dong berinvestasi ke daerah yang ICT-nya tidak memadai.** Predikat **kota digital society pertama** di Indonesia saya rasa membantu dalam meng-create daya tarik investasi baik UMKM maupun investor besar.”

Wcr.Pem.Anas.Stat26: “Pasti. Terbukti nilai investasi kami meningkat. **IT ini jadi penunjang di samping faktor lain seperti kebijakan mendorong pertumbuhan ekonomi dan sebagainya.**”

Wcr.Pem.Anas.Stat27_Stat28: “**IT pasti memiliki peran untuk menggaet investor disamping beberapa faktor lainnya. Ya semua bersinergi bersatu membentuk iklim investasi yang positif di banyuwangi. Dengan IT kami mengubah image Banyuwangi yang dulunya dikenal dengan kota santet,** sekarang kami pelan-pelan mengubah julukan itu. Paling tidak kita sudah punya dua julukanyaitu **Kota Digital Society Pertama di Indonesia dan juga Kota Festival dengan agenda Banyuwangi Festivalnya.** Mungkin itu turut membantu **promosi investasi di Banyuwangi.**”

Wcr.Inv.Putra.Stat20: “Sebenarnya sangat berpengaruh ya dengan adanya penambahan istilahnya banquet ataupun wifi. **Sangat berpengaruh untuk kami**”.

Wcr.Inv.Putra.Stat21_Stat22: “Termasuk disini kami diberikan titik @wifi.id oleh pemerintah. Sehingga tamu-tamu yang datang keBanyuwangi ini lebih mempermudah mengakses dunia maya, misalkan o pengen lihat tempat penginapan yang bagus di Banyuwangi mereka lebih cepat mengakses. Jadi ada pengaruh untuk kami secara positif untuk membantu mempromosikan hotel juga.”

Wcr2.Inv.Febby.Stat40_Stat41_Stat42: “Tapi begini mas, kalau ibaratnya pemerintahnya itu udah IT-minded atau melek IT lah katakan otomatis akan menambah nilai jual daerah mas. Orang akan memandang o daerah ini maju IT nya. Daerah ini infrastruktur IT nya bagus, otomatis image birokrasinya mudah itu pasti dah mas. Kembali lagi kalau menurut saya dampaknya pada pembentukan brand / image / citra banyuwangi sendiri. Citra yang positif tapi lo mas ya.”

Wcr2.Inv.Febby.Stat23_Stat24: “Terlebih sekarang ini segera dirilis BanyuwangiMall.com mungkin ini juga salah satu bentuk e-gov mungkin mas ya cuman fokus di wadah jual beli apapun itu yang berbau banyuwangi. Nah seperti kita gini ni sangat mengapresiasi mas terobosan baru itu. Dan nanti pasti juga akan menarik pelaku usaha-usaha lain untuk masuk ke banyuwangi mas. Ini mungkin bisa dibilang apa ya salah satu wujud penggunaan IT di pemerintahan untuk memajukan sektor UMKM. “

Kata-kata kunci seperti: *“Banyuwangi-Mall.com”, “@wifi.id”, “image birokrasi mudah”, “predikat Kota Digital Society”* menunjukkan bahwaketersediaan infrastruktur ICT di Kabupaten Banyuwangi mampu mengubah image Kabupaten Banyuwangi yang dahulu identik dengan kota “santet / mistis”. Dengan didukung fasilitas ribuan titik @wifi.id yang tersebar di seluruh area Kabupaten Banyuwangi akan membentuk mindset birokrasi yang mudah dengan mengutamakan pelayanan. Ketersediaan infrastruktur ICT menjadi salah satu faktor pendukung dalam menarik investasi masuk ke Kabupaten Banyuwangi.

3. Transparansi dan kemudahan pelayanan perizinan

Berikut kutipan pernyataan yang menjelaskan bahwa faktor transparansi dan kemudahan pelayanan perizinan membawa dampak pada investasi di Kabupaten Banyuwangi.

Wcr.Pem.Anas.Stat64: “Itu menjadi salah satu daya tarik. Investor mau masuk karena pemerintahnya transparan, bersih, perizinan tidak ribet”.

Wcr.Pem.Ilzam.Stat18_Stat19: “Ya saya kira sudah, karena misalkan di website kita investor / pemohon sudah bisa langsung mengetahui SOP kita, kemudian transparansi biaya , prosedur dan sebagainya. Termasuk status perizinan pemohon bisa mengecek status permohonannya sudah sampai tahap mana dengan memasukkan nomor registrasi dapat dicek, saya kira itu mengefisiensikan waktu bagi pemohon.”

Wcr.Pem.Ilzam.Stat12: “Kemudian untuk investor karena kita sudah menyediakan website menyediakan apa namanya layanan perizinan online, maka dia bisa melihat secara langsung potensi investasi maupun daftar secara online perijinan usahanya, saya kira itu “.

Wcr.Pem.Ilzam.Stat33_Stat34: “Ya, saya kira sangat signifikan. Karena dengan adanya e-gov itu tentu ada transparansi di dalam pelayanan sehingga masyarakat dapat mengetahui secara jelas bagaimana prosedur dan biaya perizinan, nah ini tentu bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga kita bisa meminimalisir permainan-permainan yang dilakukan oleh oknum-oknum misalnya makelar izin”.

Wcr.Pem.Ilzam.Stat39_40: “Saya kira dengan adanya transparansi itu akan membangun kepercayaan publik kepada pemerintah sehingga dengan adanya dukungan publik yang begitu besar akan bermanfaat untuk program-program pemerintah dapat berjalan dengan baik. Khusus untuk perizinan misalnya tentu akan memberikan trust kepada investor / pemohon izin sehingga dia tidak ragu-ragu lagi dalam merealisasikan investasinya”.

Wcr.Pem.Ilzam.Stat67_Stat68_Stat69: Ya saya kira betul teori itu, karena investor itu ketika mau datang itu pasti yang ditanyakan bagaimana transparansi perizinan, bagaimana transparansi biaya, kemudian bagaimana keamanan berinvestasi tentu dengan tata kelola pemerintahan yang baik terutama melalui e-gov akan meyakinkan investor bahwa daerah ini memang nyaman untuk berinvestasi. Karena begini mas, investor itu maunya pasti, cepat, dan gak ribet. Iya kalau dianggap salah satu memang iya. Jadi memang salah satunya karena tata kelola pemerintahan yang baik, karena dengan pelayanan perizinan yang transparan, keamanan dan kenyamanan berinvestasi tentu ini akan menggugah minat investasi”.

Wcr2.Inv.Febby.Stat42_Stat43: “Tentu mas, kita sebagai katakanlah investor ya mas walaupun skala UMKM hehe. Saya rasa siapapun pelaku usaha dimanapun suka dengan kepastian, suka dengan hal yang pasti. Pasti dalam artian prosedurnya, kejelasan birokrasinya, kejelasan biaya nya kalau misal ada biaya perijinan dan sebagainya. Dan yang satu lagi kita maunya gampang dan cepet mas.”

Wcr.Inv.Putra.Stat8: “Dan proses perizinan pun tidak memakan waktu yang cukup lama tergantung dari jenis perizinannya itu sendiri”.

Wcr.Inv.Nunung.Stat1_Stat2: “ Mmm iya memang dulu saya yang ngurus mas kami ada tim, dapat mandat dari bu ita sama pak han untuk mengurus perizinan waktu itu tahun 2014 kalaau gak salah mas. Dan menurut kami gak ribet kok mas seluruh proses /

prosedur tertata jelas. Waktu itu kalau gak salah saya ngurus beberapa izin kaya IMB, NPWP, SIUP, TDP datang langsung ke kantor perizinan”.

Wcr.Inv.Putra.Stat10_Stat11: “Tetapi kalau izin-izin yang lain itu relatif cepat misalnya izin wajib lapor karyawan, izin peraturan perusahaan, izin HO itu relatif cepat karena tidak perlu analisa yang terlalu dalam. Kita mendaftarkan **dicek kurang lebih satu hari dan hari kedua izin sudah bisa keluar.** Itu **relatif cepat lah** dan itu **sangat membantu** kami selaku pelaku bisnis.”

Wcr.Inv.Nunung.Stat3: “Kalau soal retribusi perizinan menurut saya **sangat transparan, jelas semuanya** didepan segini segini **gak ada apa namanyaaa up up** atau katakanlah **pungutan-pungutan** gitu mas”.

Kata-kata kunci seperti: *“perizinan tidak ribet”, “pemerintah transparan”, “transparansi biaya”, “prosedur jelas”, “relatif cepat”, “sangat membantu”, “gak ada pungutan”, “gak ribet”, “prosedur tertata jelas”, “memberikan trust”* menunjukkan bahwa salah satu hal utama yang ditanyakan ketika calon investor datang yaitu mengenai transparansi dan kemudahan pelayanan perizinan. Di BPPT, sejauh ini pelayanan perizinan yang diterapkan sudah sangat baik dimulai dari penyebaran informasi prosedur, persyaratan, hingga retribusi perizinan sudah dapat dilihat di situs BPPT termasuk didalamnya SOP waktu pelayanan perizinan. Waktu pelayanan perizinan yang relatif cepat sangat membantu pelaku usaha di Banyuwangi.

4. Promosi potensi investasi melalui website

Berikut adalah kutipan pernyataan yang menunjukkan peran promosi potensi investasi Kabupaten Banyuwangi yang efektif dalam menarik investasi masuk di Kabupaten Banyuwangi.

Wcr.Pem.Joni.Stat52_Stat53: “Jadi tidak hanya egov nya saja yang digenjut tapi bagaimana upaya egov sebagai salah satu trigger pemicunya ini bisa berperan, misalnya **promosi investasi melalui website, media sosial dan lain-lain.** Yang jelas dengan adanya ini saya berkeyakinan/berpendapat bahwa ini **pasti berdampak terhadap keyakinan investor untuk mau menanamkan modal di banyuwangi**”.

Wcr.Inv.Nunung.Stat18: “Mungkin kalau IT nya bagi kami lebih ke **bagaimana IT sebagai alat promosi** mas ya. Promosi ini ya **promosinya banyuwangi** ya promosiin **Osing Deles.**”

Wcr.Inv.Nunung.Stat19_Stat20: “Memang harus diakui kalau mas lihat di internet bagaimana **promosi gencar-gencaran** yang dilakukan oleh banyuwangi entah itu melalui **website, media sosial maupun media online** lainnya. Tentu dengan **promosi yang dikemas apik** akan menunjukkan kepada orang banyak bahwa ini lo banyuwangi saat ini, dengan pariwisatanya, potensi-potensi investasi yang sangat menjanjikan ini tentu kedepan **akan lebih banyak menarik pelaku usaha untuk masuk** ke banyuwangi.”

Wcr2.Inv.Febby.Stat25_Stat26_Stat27: “Nah iya kalau saya sih dulu itu suka kepo mas waktu sebelum buka nagud ini. **Saya ngepoin web nya banyuwangi.** Disamping berbagai macam agenda festival yang diadakan banyuwangi, bagusya lagi dari banyuwangi yaitu dia **mampu mempromosikannya melalui website dan juga media sosial** gitu gitu mas. **Promosinya dikemas secara menarik di web** nya itu ada kayak semacam banner yang berjalan gitu. Terus saya juga kepo di media sosialnya pemkab sebagai jalan bagi saya untuk **penjajakan mempelajari** sebelum memutuskan membuka nagud ini.”

Wcr2.Inv.Febby.Stat28_Stat29: “Ya bagi saya dengan saya bisa **mempelajari potensi-potensi banyuwangi melalui online** itu **memudahkan** saya mas ya. Karena **kita gak perlu datang** (misalnya kalau kita orang jauh mas ya), dengan buka buka di web nya, di pesbuk dan media sosial lainnya yang berkaitan dengan banyuwangi. **Kita bisa mempelajari** kira-kira cocok buka usaha apa nih di banyuwangi. Mungkin seperti itu mas.

Kata-kata kunci seperti: *“promosi melalui website”, “media sosial”, “alat promosi”, “mempelajari potensi”, “memudahkan”, “gak perlu datang”, “dikemas secara menarik”, “gak ribet”, “prosedur tertata jelas”, “memberikan trust”* diatas menunjukkan bahwa promosi potensi Kabupaten Banyuwangi yang dikemas menarik melalui website pemerintah dan media sosial mampu mempengaruhi minat investor untuk masuk ke Banyuwangi. Penjajakan potensi daerah melalui online memudahkan calon investor untuk mempelajari peluang usaha tanpa harus datang ke lokasi calon investasi.

5. Ketersediaan infrastruktur pendukung

Ketersediaan infrastruktur pendukung juga menjadi pertimbangan bagi investor yang akan melangsungkan investasinya di Kabupaten Banyuwangi. Keberadaan infrastruktur pendukung meliputi jalan, pelabuhan, bandara, bis, dan lain-lain. Berikut kutipan pernyataan yang mendukung penjelasan diatas.

Wcr.Pem.Ilzam.Stat70: “Tapi mungkin ya mungkin, **faktornya tidak terlalu besar kalau dibandingkan dengan infrastruktur pendukung industri atau pendukung investasi,**

karena banyak juga investor yang udahlah berapapun retribusinya dibayar yang penting infrastruktur pendukungnya ada”.

Wcr.Pem.Joni.Stat49: “Kalau menyangkut data investasi lengkapnya mungkin di BPPT ya. Tapi yaitu tadi, pasti investor kalau mau menanamkan modal pasti melihat kondisi yang ada di tempat yang dituju. **Artinya saya tidak ngomong hanya IT ya, faktornya macem-macam misalnya infrastruktur-infrastruktur sudah dibenahi dan ditambah IT itu juga salah satu cara untuk menambah keyakinan investor untuk datang kesini**”.

Wcr.Pem.Joni.Stat50”Disamping infrastruktur seperti pelabuhan, bandara, ada kereta api, jalan sudah bagus, kondisi ekonomi masyarakatnya juga tumbuh berkembang, termasuk sarana prasarana TI nya maju”.

Wcr.Inv.Zunita.Stat16: “Kemudian pengembangan pariwisata yang semakin maju, kemudian juga dari sisi **infrastruktur jalan, sarana publik, akses ke tempat wisata dan akses ke tempat kami pusat oleh-oleh**”.

Wcr.Inv.Putra.Stat3: “Terus yang kedua **infrastruktur** atau istilahnya yang menjembatani kami bisa kesini minimum sudah difasilitasi misalnya ada **kereta api, bis dan akses udara** pun sudah tersedia”.

6. Potensi Pariwisata dan Budaya

Salah satu faktor yang tak kalah penting dalam menarik minat investasi ke Banyuwangi yaitu faktor potensi pariwisata. Berikut kutipan pernyataan yang menunjukkan peran potensi pariwisata dalam menarik minat investor berinvestasi di Kabupaten Banyuwangi.

Wcr2.Inv.Febby.Stat20_Stat21: “Ya seperti yang saya sampaikan kapan hari mas ya, **banyuwangi sekarang semakin maju, budaya, pariwisatanya** juga semakin berkembang pesat. Pokok sejak dipimpin Pak Anas ini melalui kebijakan-kebijakan dan programnya yang pro rakyat dan usaha khususnya UMKM sangat membawa perubahan bagi banyuwangi.”

Wcr2.Inv.Febby.Stat39: Misalkan kaya saya ini, saya juga melihat **kemajuan pariwisata dan budaya banyuwangi** yang dikemas melalui beragam festival budaya yang diadakan oleh pemda.”

Wcr.Inv.Zunita.Stat16: “Kemudian pengembangan **pariwisata yang semakin maju**, kemudian juga dari sisi infrastruktur jalan, sarana publik, akses ke tempat wisata dan akses ke tempat kami pusat oleh-oleh”.

Wcr.Inv.Nunung.Stat7_Stat8: “Hebatnya itu **pariwisatanya semakin maju** mas pertama, terus ekonomi kreatif digalakkan disana, sektor-sektor kecilnya dibangkitkan mas kaya salah satu festivalnya itu festoval sego cawuk. Sebelumnya kan gak pernah ada

sego cawuk itu apa orang gak tau. Nah disitu pedagang-pedagangnya dirangkul dibuatin festival.”

Wcr.Inv.Putra.Stat2: ”Potensi yang besar itu pertama kita lihat dari kacamata bisnisnya. Yang pertama **potensi destinasi wisata** di Banyuwangi itu sangat banyak, pulaunya, pantainya, gunungnya, culture/budaya nya, itu membawa potensi daya tarik untuk kami”.

Kata-kata kunci seperti: *“semakin maju”, “potensi budaya”, “pariwisatanya semakin maju”, “potensi destinasi wisata* menunjukkan bahwa kemajuan pariwisata Banyuwangi dan kekayaan budaya yang dimiliki mampu menarik minat investasi para investor untuk masuk ke Banyuwangi.

7. Program Banyuwangi Festival

Program Banyuwangi Festival mulai diselenggarakan tahun 2012 dengan fokus kegiatan yaitu festival promosi budaya, pariwisata, pelayanan publik, dan lain-lain. Banyuwangi Festival diadakan full setahun dengan puluhan agenda festival berskala nasional dan internasional. Dengan dibuatnya program tersebut, ternyata menjadi daya tarik investasi yang menjanjikan di Kabupaten Banyuwangi. Berikut kutipan pernyataanya:

Wcr.Inv.Putra.Stat18_Stat19: “Pengenalan untuk daerah juga semakin meningkat, disamping itu oo disini ada santika to dan itu kita ikut terbawa. Jadi iklim bisnis di Banyuwangi dengan **program Banyuwangi Festival sangat membantu kami para investor untuk meningkatkan bisnisnya.**”

Wcr.Inv.Febby.Stat22: “Begini mas, seperti contohnya melalui **Banyuwangi Festival** yang menjadi event tahunan. Nah UMKM seperti saya ini diberi kesempatan untuk turut **berpartisipasi mempromosikan usahanya** terlebih kalau yang dijual barang khas banyuwangi. Pokoknya usaha apapun yang mengangkat budaya lokal dan memajukan ekonomi kreatif di Banyuwangi beliau ini sangat suka.”

Wcr.Inv.Zunita.Stat19: “Semakin baik dengan disusun **Banyuwangi Festival** yang dari tahun ke tahun **selalu meningkat**. Dengan **banyaknya festival-festival Banyuwangi** tersebut, dan dengan transparansi pemerintah terhadap anggaran-anggaran yang telah disusun dan direncanakan, kami selaku pelaku usaha yang bergerak di bidang bisnis oleh-oleh ini **yakin punya peluang yang besar** sehingga **kami punya keyakinan dan kepercayaan untuk mengembangkan usaha ini.**”

Wcr.Inv.Nunung.Stat5: “Jadi Pak Anas itu punya beberapa program yang tujuannya untuk memajukan banyuwangi mas ya, misalnya aja **banyuwangi festival** yang full

setahun dengan puluhan agenda festival. Dengan begitu **orang akan semakin banyak ke banyuwangi, penasaran dan tentu artinya banyak wisatawan datang.**"

Kata-kata kunci seperti: ***"banyuwangi festival", "selalu meningkat", "meningkatkan bisnisnya", "banyak wisatawan datang", "yakini punya peluang besar", "mempromosikan usaha"*** menunjukkan bahwa rangkaian agenda Banyuwangi Festival yang menjadi agenda tahunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dianggap sebagai salah satu faktor yang memiliki potensi bagus untuk keberlangsungan usaha di Kabupaten Banyuwangi.

8. Regulasi / Kebijakan Pro Sektor Bisnis

Faktor terakhir yang memiliki pengaruh terhadap daya tarik investasi di Kabupaten Banyuwangi yaitu dukungan regulasi/kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah yang mendukung sektor bisnis di Kabupaten Banyuwangi. Berikut kutipan pernyataan yang mendukung temuan tersebut.

Wcr2.Inv.Febby.Stat21: "Pokok sejak dipimpin Pak Anas ini melalui **kebijakan-kebijakan dan programnya yang pro rakyat dan usaha khususnya UMKM sangat membawa perubahan bagi banyuwangi.**"

Wcr2.Inv.Febby.Stat22_Stat23_Stat24: "Begini mas, seperti contohnya melalui **Banyuwangi Festival** yang menjadi event tahunan. Nah UMKM seperti saya ini diberi kesempatan untuk turut berpartisipasi mempromosikan usahanya terlebih kalau yang dijual barang khas banyuwangi. Pokoknya usaha apapun yang mengangkat budaya lokal dan memajukan ekonomi kreatif di Banyuwangi beliau ini sangat suka. Terlebih sekarang ini segera dirilis **BanyuwangiMall.com** mungkin ini juga salah satu bentuk e-gov mungkin mas ya cuman fokus di wadah jual beli apapun itu yang berbau banyuwangi. Nah seperti kita gini ni sangat mengapresiasi mas terobosan baru itu. Dan nanti pasti juga akan menarik pelaku usaha-usaha lain untuk masuk ke banyuwangi mas. Ini mungkin bisa dibilang apa ya salah satu wujud penggunaan IT di pemerintahan untuk memajukan sektor UMKM. "

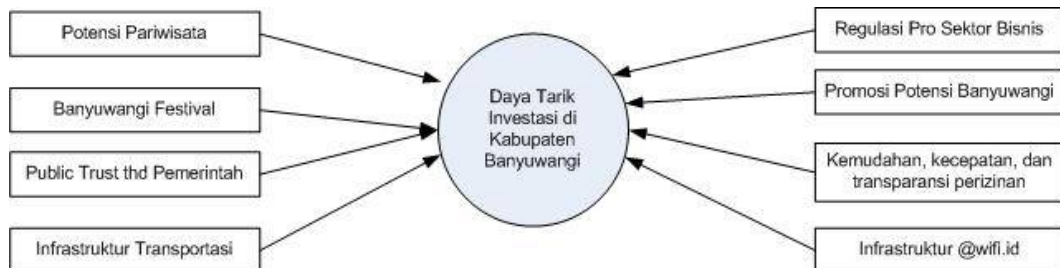
Wcr.Inv.Putra.Stat15: "Dari sisi regulasi juga kita didukung dengan **tidak diijinkannya bikin hotel kelas melati** oleh pemerintah".

Wcr.Inv.Nunung.Stat7_Stat8: "Hebatnya itu pariwisatanya semakin maju mas pertama, terus **ekonomi kreatif digalakkan** disana, **sektor-sektor kecilnya dibangun** mas kaya salah satu festivalnya itu festoval sego cawuk. Sebelumnya kan gak pernah ada sego cawuk itu apa orang gak tau. Nah disitu pedagang-pedagangnya dirangkul dibuatin festival."

Wcr.Inv.Nununng.Stat9: “Terus ada lagi misalkan soal pendanaan perbankan, dulu usaha-usaha kaya gini kurang mendapat perhatian mas ya gak kaya sekarang lebih gampang buat dapat pinjaman perbankan.”

Kata-kata kunci seperti: *“kebijakan”, “pro rakyat dan UMKM”, “membawa perubahan”, “banyuwangi festival”, “banuwangi-mall.com”, “tidak diijinkannya hotel kelas melati”, “ekonomi kreatif digalakkan”, “sektor kecil dibangkitkan”, “pendanaan perbankan”* menunjukkan bahwa komitmen Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memajukan sektor usaha di Banyuwangi ditunjukkan melalui program/regulasi/kebijakan yang mendukung setiap sektor usaha seperti larangan pendirian hotel kelas melati, dukungan permodalan perbankan, penggerakan ekonomi kreatif, program banyuwangi festival dan yang terbaru yaitu diluncurkannya marketplace online bagi sektor UMKM melalui Banyuwangi-Mall.com

Setelah faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik investasi di Kabupaten Banyuwangi diidentifikasi baik berdasarkan dari informan pemerintah maupun informan penanam modal, maka didapatkan sub pola aktual daya tarik investasi di Kabupaten Banyuwangi seperti pada gambar 5.32 dibawah ini.



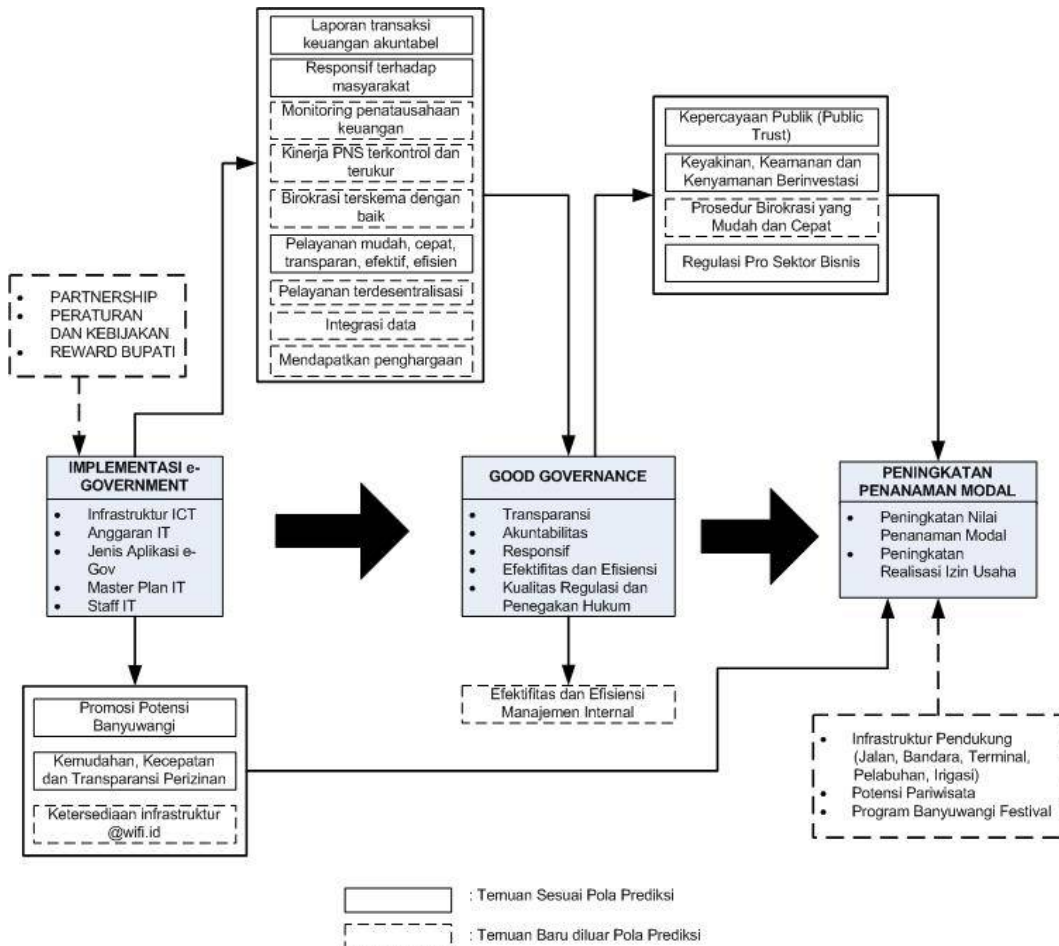
Gambar 5.32 Sub-pola Aktual 3: Daya Tarik Investasi di Kabupaten Banyuwangi

(Sumber: Hasil analisis, 2016)

5.4.1.2.4 Pola Aktual Hasil Penelitian

Setelah seluruh sub-pola aktual diidentifikasi, maka selanjutnya yaitu menggambarkan secara keseluruhan pola aktual dari penelitian yang ditemukan di lapangan. Pola aktual ini nantinya akan dijodohkan dengan pola prediksi yang telah dibangun sebelumnya untuk dapat menambah kekuatan hasil penelitian ini.

Gambar 5.33 dibawah ini merupakan pola aktual penelitian yang ditemukan di lapangan.



Gambar 5.33 Pola Aktual Hasil Penelitian
(Sumber: Hasil analisis, 2016)

5.4.2 Pembuatan Eksplanasi (*Explanation Building*)

Setelah dilakukan penjodohan pola, tahap analisis studi kasus selanjutnya yaitu pembuatan eksplanasi. Pembuatan eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan detail dari temuan kasus yang sedang diteliti. Pembuatan eksplanasi memiliki hubungan yang erat dengan hasil dari tahap penjodohan pola karena berguna untuk memperbaiki proposisi-proposisi teoritis yang telah dibangun diawal penelitian. Pembuatan eksplanasi dilakukan dengan cara membuat penjelasan

naratif secara berurutan dari pertama sampai dengan akhir. Serangkaian pengulangan eksplanasi yang dilakukan dengan:

1. Membuat suatu pernyataan teoritis atau proposisi awal
2. Membandingkan temuan kasus awal dengan pernyataan prososisi awal
3. Memperbaiki pernyataan teoritis atau proposisi
4. Membandingkan temuan kasus lebih lanjut untuk memperbaiki proposisi
5. Memperbaiki kembali proposisi
6. Begitu seterusnya hingga temuan-temuan telah ditemukan secara lengkap dan dirasa cukup oleh peneliti.

5.4.2.1 Membuat pernyataan teoritis atau proposisi awal

Diawal penelitian ini, peneliti telah menentukan proposisi awal yang dibangun berdasarkan kajian teoritis. Proposisi awal ini yang digunakan sebagai pedoman selama penelitian berlangsung. Berikut adalah proposisi awal yang telah ditentukan di awal penelitian:

a. Proposisi Minor

1. Implementasi *e-government* di tingkat pemerintah daerah akan menciptakan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*)
2. Tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good governance*) akan meningkatkan daya tarik investasi daerah, sehingga penanaman modal di daerah akan meningkat.

b. Proposisi Mayor

1. Penanam modal mempertimbangkan tata kelola pemerintahan yang baik sebagai indikator dalam memilih lokasi investasi.
2. Penanam modal menyukai daerah yang pengembangan *e-government* nya sudah berjalan.

5.4.2.2 Membandingkan temuan kasus awal dengan proposisi awal

Untuk membandingkan temuan kasus awal dengan proposisi awal, dilakukan dengan membuat serangkaian narasi untuk menjelaskan temuan-temuan dalam penelitian. Untuk memudahkan dalam pembuatan narasi, peneliti membagi narasi ke dalam tiga bagian yaitu (1) implementasi e-government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, (2) good governance di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, dan (3) daya tarik investasi di Kabupaten Banyuwangi.

a. Implementasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Pengembangan e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dilakukan secara bertahap yang dimulai sejak tahun 2008 yang dimulai dengan pembuatan Rencana Strategis Teknologi Informasi (RSTI) tahun 2008-2012 dan mulai pembangunan infrastruktur berupa tower di beberapa titik di wilayah Kabupaten Banyuwangi. Perkembangan implementasi e-Government mulai mengalami peningkatan pada tahun 2011 yang ditandai dengan penguatan infrastruktur ICT dan juga mulai dikembangkannya beberapa aplikasi e-Government.

Sebelum tahun 2011, secara kelembagaan perencanaan dan pengembangan IT di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi masih dibawah otoritas Kantor Arsip dan PDE. Dari sisi infrastruktur ICT masih sangat minim. Misalnya ketersediaan jaringan internet dari seluruh SKPD hanya 40% SKPD yang telah tersambung dengan LAN, 70% SKPD tersambung dengan WLAN dari Kantor Arsip dan PDE. Ketersediaan personal computer (PC) juga masih sangat sedikit rasio antara jumlah PC dengan jumlah pegawai tidak seimbang. Dari sisi anggaran, pengembangan IT masih bergantung pada APBD dan ketersediaan anggaran masih belum ideal karena pada saat itu pengembangan IT masih belum menjadi prioritas pembangunan daerah. Selain itu karena tingkatan Kantor Arsip dan PDE belum setara badan atau dinas menjadikan alokasi anggaran masih terbatas. Dari sisi ketersediaan aplikasi e-government, sebelum tahun 2011 pengelolaan aplikasi belum tertata rapi. Belum ada aplikasi terintegrasi yang dapat dipakai seluruh SKPD. Seperti contoh, aplikasi keuangan dinas A dengan dinas B berbeda dan menyebabkan pengelolaan keuangan daerah belum tersistematis dan tidak

termonitoring dengan baik. Aplikasi yang ada pada saat itu masih berfokus pada pelayanan internal pemerintah (administrasi, persuratan dan sebagainya) belum ada satu pun aplikasi untuk pelayanan publik.

Pada tahun 2011, dimulainya penguatan IT di pemerintahan dengan diwujudkan mulai dikeluarkannya regulasi yang mengatur pemanfaatan IT di lingkungan pemerintahan, dimasukkannya IT kedalam prioritas pembangunan pemerintah yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2010-2015, dan juga mulai dikembangkan beberapa aplikasi terintegrasi berbasis open source dan juga pemanfaatan website daerah maupun website instansi atau SKPD. Seiring berjalannya waktu, pengembangan e-Government di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2013 yaitu dengan diluncurkannya program Banyuwangi Digital Society yang inti dari program tersebut yaitu pemasangan 1200 titik @wifi.id kerjasama dengan PT. Telkom Indonesia hingga saat ini berkembang menjadi 1400 titik yang tersebar di seluruh kantor pemerintahan, ruang publik, RTH, dan pusat aktivitas desa di seluruh Kabupaten Banyuwangi.

Dari sisi pengembangan aplikasi, hingga saat ini pengembangan aplikasi e-Government mengalami peningkatan yang cukup signifikan seperti yang telah dibahas pada sub bab 5.3.2.3 diatas. Dengan dukungan infrastruktur jaringan internet yang mendukung hingga ke pelosok desa, penerapan e-Government di Kabupaten Banyuwangi tidak terlalu mengalami kendala pada aspek konektivitas. Aplikasi e-Government yang ada saat ini telah mencakup 4 tipe relasi e-Government yaitu Government to Citizen (G2C), Government to Business (G2B), Government to Government (G2G), dan Business to Citizen (B2C) seperti yang sudah dijelaskan pada sub bab 5.3.2.3. Berdasarkan temuan di lapangan, penggunaan aplikasi e-Government di Kabupaten Banyuwangi memberikan banyak manfaat baik bagi pemerintah, masyarakat maupun pelaku usaha di Banyuwangi. Berikut adalah manfaat dari implementasi e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi:

1. Pelayanan publik transparan, mudah dan cepat

Salah satu aplikasi yang memberikan manfaat kecepatan dan kemudahan pelayanan publik yaitu One Stop Service (OSS). One Stop Service

merupakan aplikasi untuk pengurusan surat keterangan bagi warga dimana aplikasi ini tersebar di desa/kelurahan. Sehingga yang tadinya sebelum ada aplikasi OSS warga harus datang ke kantor kecamatan, dengan adanya OSS ini warga cukup menunggu di kantor desa untuk pencetakan surat keterangan. Sistem yang berjalan bukan manusia yang berjalan. Hal ini mendukung hasil penelitian dari Bhatnagar (2003), Deloitte (2004) dan Ndou (2004) yang menyebutkan bahwa penggunaan e-Government akan meningkatkan kualitas service delivery, memudahkan warga untuk menggunakan layanan pemerintah meningkatkan efisiensi waktu dalam pelayanan.

2. Birokrasi terskema dengan baik

Dulu sebelum diimplementasikannya aplikasi e-Kinerja birokrasi tidak terskema. Eksekutif tidak tahu apakah PNS A berhasil atau tidak. Namun sejak diimplementasikannya e-Kinerja, setiap PNS telah memiliki agenda dan target kerja masing-masing yang dapat dimonitoring langsung oleh eksekutif. Sehingga berdampak pada birokrasi di setiap hari karena masing-masing PNS telah memiliki rencana kerja / target yang harus diselesaikan pada hari itu. Hal ini mendukung hasil penelitian Al-Azzam & Abu-Shanab (2014) yang menyebutkan bahwa implementasi e-Government akan membawa dampak pada reformasi birokrasi yang lebih efisien.

3. Integrasi data

Sebelum tahun 2011, ego sektoral di masing-masing SKPD masih sangat tinggi hal ini berdampak pada tidak terintegrasinya data antar SKPD sehingga eksekutif dalam hal ini Bupati tidak memiliki sumber data yang akurat dalam membantu proses pengambilan keputusan/kebijakan. Namun saat ini telah diimplementasikannya beberapa aplikasi seperti GIS Banyuwangi dan e-Demografi yang mencakup seluruh data administratif dan demografi Kabupaten Banyuwangi dan ego sektoral di SKPD semakin berkurang. Hal ini berdampak pada kualitas pengambilan keputusan oleh eksekutif yang didukung dengan data yang terintegrasi. Temuan ini mendukung hasil penelitian Ndou (2004) yaitu salah satu manfaat

implementasi e-Government akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

4. Kinerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) terkontrol dan terukur

Dengan diterapkannya e-Kinerja, maka kinerja seluruh PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkontrol dan terukur. Terkontrol yang dimaksud adalah pejabat atasan di instansi maupun Bupati dapat memantau langsung kinerja PNS yang bersangkutan. Terukur karena masing-masing PNS telah menginputkan target atau rencana kerja yang harus diselesaikan setiap hari, jadi apabila target tersebut tidak tercapai maka berdampak pada evaluasi kinerja pegawai.

5. Pelayanan terdesentralisasi

Program utama Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat yaitu dengan mewajibkannya tersedia dashboard di masing-masing kecamatan dan beberapa desa yang sudah siap. Dashboard disini yang dimaksud adalah loket pelayanan. Sebagai contoh layanan surat keterangan yang harus diurus di dinas yang ada di kota, cukup diurus di kantor kecamatan atau kantor desa. Sehingga sistem yang berjalan. Dengan demikian problem luas wilayah Kabupaten Banyuwangi yang dulu warga harus menempuh puluhan bahkan ratusan kilometer untuk ke dinas di kota sekarang cukup ke kantor desa atau kecamatan terdekat. Hal ini mendukung hasil penelitian dari Seifert & Bonham(2004) yaitu salah satu manfaat penggunaan e-government yaitu untuk desentralisasi pelayanan publik.

6. Monitoring penatausahaan keuangan

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah memiliki sistem keuangan terintegrasi (SIKD). Di SIKD tersebut sudah mengakomodir proses perencanaan, penggunaan hingga penatausahaan laporan keuangan berbasis akrual. Selain itu di SIKD tersebut eksekutif dalam hal ini Bupati dapat memonitoring penyerapan anggaran secara realtime dan pemberian akses monitoring kepada BPK, sehingga sudah 4 tahun berturut-turut

Banyuwangi memperoleh predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) oleh BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD).

7. Responsif terhadap masyarakat

Sejak diimplementasikannya layanan pengaduan berbasis website pada tahun 2011, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan baik berupa kritik dan saran kepada SKPD yang dituju. Selanjutnya SKPD yang bersangkutan akan menanggapi pengaduan dari masyarakat dalam kurun waktu 2-3 x 24 jam sesuai SOP yang ada namun memungkinkan ditanggapi dalam waktu sehari. Dengan layanan ini pemerintah lebih mudah untuk mengetahui permasalahan atau kejadian di wilayah secara cepat dan memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk lebih responsif terhadap pengaduan masyarakat. Temuan ini mendukung hasil penelitian Seifert & Bonham (2004) yang menyebutkan bahwa salah satu manfaat dari implementasi e-Government yaitu meningkatkan partisipasi masyarakat.

8. Kemudahan pendaftaran perizinan

Pada tahun 2014, Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT) telah meluncurkan sistem informasi pendaftaran izin online (SIPO). Dengan menggunakan SIPO, pemohon izin dapat mendaftarkan perizinan yang akan diurus untuk mendapatkan nomor pendaftaran verifikasi fisik di loket pelayanan. Dengan adanya SIPO ini memangkas waktu untuk mendapatkan nomor pendaftaran di loket pelayanan. Temuan ini mendukung hasil penelitian Deloitte Research Group (2004) yang menyebutkan bahwa dengan penggunaan e-Government akan membuat transaksi seperti pembayaran pajak dan pembuatan izin usaha menjadi lebih mudah, efektif dan hemat biaya.

9. Memberikan image Kota Digital Society

Pada tahun 2013, Banyuwangi dinobatkan sebagai Kota Digital Society Pertama di Indonesia dengan program 1.200 titik @wifi.id yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Banyuwangi yang merupakan hasil kerjasama dengan PT. Telkom Indonesia. Dengan predikat sebagai Kota Digital Society ini akan memudahkan masyarakat Banyuwangi untuk membuka

pintu dunia dengan akses internet tidak terbatas. Predikat Kota Digital Society juga memberikan image/citra positif bagi Banyuwangi dimata publik yang sedikit banyak berpengaruh terhadap nilai jual Kabupaten Banyuwangi di kalangan investor. Hal ini sesuai dengan penelitian Azubuike (2006) yang menyebutkan lima alasan mengapa e-Government dapat membantu calon investor dalam mengambil keputusan sebelum melakukan investasi salah satunya yaitu e-Government berkontribusi dalam menciptakan image/citra sebuah negara dan mempengaruhi persepsi investor. Addison & Heshmati (2003) juga menyebutkan bahwa daerah yang memiliki infrastruktur ICT yang baik akan berpotensi untuk menarik minat investor masuk untuk melakukan investasi.

10. Promosi potensi investasi

Pemanfaatan website Pemerintah Kabupaten Banyuwangi benar-benar dioptimalkan sejak diterbitkannya Instruksi Bupati No.555 Tahun 2012 tentang optimalisasi pemanfaatan website. Website www.banyuwangikab.go.id selain digunakan sebagai media publikasi oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, juga dijadikan sebagai alat promosi potensi investasi Banyuwangi dan juga promosi potensi unggulan pariwisata, budaya, dan program layanan publik pemerintah. Pemanfaatan e-Government sebagai media promosi di Kabupaten Banyuwangi sejalan dengan temuan beberapa penelitian diantaranya Azubuike, 2006; Al-Azzam & Abu-Shanab, 2014; Ndou, 2004.

11. Transparansi, efisiensi dan tracking perizinan

Selain dapat mendaftar perizinan melalui SIPO, pemohon izin juga dapat mengecek (tracking) status perizinan yang diajukan telah sampai di tahapan mana melalui SIPO. Dengan ini pemohon akan mengefisiensi waktu untuk dapat mengetahui status perizinannya hanya dengan mengecek melalui online.

12. Mendapatkan penghargaan

Sejak diterapkannya beberapa aplikasi e-Government sejak tahun 2011, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sering mendapatkan penghargaan baik

berupa award dari pemerintah pusat / lembaga non pemerintah maupun kunjungan study banding dari pemkab/pemkot lain di Indonesia.

b. Good governance di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Salah satu faktor yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan Banyuwangi yang bersih dan akuntabel yaitu penggunaan e-Government yang memiliki fungsi yang sejalan dengan prinsip good governance. Good governance pada penelitian ini berfokus pada prinsip transparansi, akuntabilitas, responsif, efektifitas dan efisiensi, dan kualitas regulasi dan penegakan hukum.

Di sisi transparansi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memanfaatkan website pemerintah untuk mempublikasikan segala informasi menyangkut transparansi perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan dan pertanggungjawaban anggaran daerah setiap tahun lengkap hingga data di tingkat SKPD. Untuk data yang tersedia di menu transparansi tersebut merupakan data yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Selain itu di setiap awal tahun anggaran pemerintah selalu memasang baliho-baliho di titik-titik keramaian di kota dan kecamatan terkait alokasi anggaran APBD di masing-masing sektor sehingga warga dapat mengetahui anggaran di masing-masing sektor seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan lain-lain.

Di sisi akuntabilitas, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2015 memperoleh penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terbaik se-Jawa Timur dengan nilai 65,41 (Predikat B). Berdasarkan hasil wawancara di lapangan, keberhasilan Kabupaten Banyuwangi memperoleh SAKIP terbaik se-Jawa Timur ini salah satunya karena faktor pemanfaatan aplikasi e-Government Lembaga Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang dimiliki Banyuwangi. LPPD ini berfungsi sebagai aplikasi untuk monitoring terkait apa saja yang sudah dilakukan oleh SKPD. Sebelum diterapkan LPPD, pendataan kinerja instansi dilakukan secara manual dan mengakibatkan sering terjadinya kesalahan data.

Di sisi responsifitas pemerintah, salah satu aplikasi e-Government yang mampu meningkatkan responsifitas pemerintah yaitu layanan pengaduan online

(pengaduan.banyuwangikab.go.id). Dengan layanan tersebut masyarakat dapat memberikan masukan baik kritik dan saran kepada pemerintah. Berdasarkan pengamatan di layanan pengaduan tersebut, SKPD yang menjadi tujuan pengaduan laporan dari masyarakat cukup responsif dalam menanggapi pengaduan. Apabila solusi dari pengaduan tersebut membutuhkan tindakan lebih lanjut maka laporan segera ditindaklanjuti dalam waktu sesegera mungkin.

Dengan diterapkannya beberapa aplikasi e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi semakin meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan baik pelayanan internal pemerintah maupun pelayanan publik. Dari sisi internal, manajemen internal pemerintahan lebih mudah dan cepat dengan penerapan beberapa aplikasi seperti e-Village Budgeting untuk perencanaan dan pengelolaan anggaran dana desa (ADD), e-Monitoring System untuk monitoring pembangunan di desa, e-Kinerja untuk monitoring dan evaluasi kinerja PNS dan lain-lain. Di sisi pelayanan publik, salah satu layanan yang menjadi unggulan Kabupaten Banyuwangi yaitu Lahir Procot Pulang Bawa Akta. Dengan memanfaatkan aplikasi tersebut, pengurusan akta kelahiran bagi calon bayi akan lebih mudah dan cepat, dapat dilakukan oleh puskesmas/rumah sakit tempat ibu bersalin.

Berdasarkan temuan di lapangan, seiring dengan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mewujudkan good governance ada beberapa manfaat yang dirasakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi antara lain:

1. Efektifitas dan efisiensi manajemen internal pemerintah

Seperti yang telah dijelaskan diatas, dengan diimplementasikannya beberapa aplikasi e-Government sangat membantu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mengelola internal pemerintah. Tentu hal ini akan berdampak pada efektifitas dan efisiensi manajemen internal pemerintahan.

2. Prosedur birokrasi yang mudah dan cepat

Manfaat lain yang dirasakan oleh pemerintah maupun masyarakat dan pelaku usaha dengan semakin membaiknya tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu prosedur birokrasi yang lebih sederhana. Salah satu contohnya yaitu birokrasi perizinan yang mudah dan cepat.

3. Membangun kepercayaan publik

Dampak yang paling penting dari terwujudnya good governance di Kabupaten Banyuwangi yaitu terciptanya public trust di kalangan masyarakat maupun pelaku usaha terhadap pemerintah. Menurut informan 1 (Bupati Banyuwangi) dengan upaya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mewujudkan good governance akan menciptakan public trust. Public trust ini sangat berperan penting dalam kelangsungan pembangunan di Kabupaten Banyuwangi. Karena kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menjadi dukungan bagi keberlangsungan program-program pembangunan pemerintah. Selain itu public trust bagi kalangan pelaku usaha akan memberikan kepastian dan kenyamanan bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya di Kabupaten Banyuwangi. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Alaraj & Ibrahim (2014).

4. Memberikan keyakinan, keamanan dan kenyamanan berinvestasi

Manfaat terakhir dari good governance di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu memberikan keyakinan, keamanan dan kenyamanan berinvestasi di Banyuwangi. Dengan public trust yang dihasilkan oleh pemerintah, dan didukung dengan regulasi yang jelas terkait kegiatan usaha di Kabupaten Banyuwangi serta konsistensi aparat pemerintah dalam menjamin kelangsungan kegiatan investasi maka akan memberikan jaminan kepada investor berupa kepastian / keyakinan, keamanan dan kenyamanan berinvestasi di Kabupaten Banyuwangi. Temuan ini mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Subasat & Bellos, 2013; Saidi et.al, 2013 dan World Bank, 2002. Hasil dari penelitian tersebut menyebutkan bahwa good governance yang didukung dengan regulasi yang baik akan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga menarik FDI masuk ke sebuah negara.

c. Daya tarik investasi di Kabupaten Banyuwangi

Sejak tahun 2011, geliat dunia investasi di Kabupaten Banyuwangi semakin membaik hal ini dibuktikan dengan nilai investasi dan realisasi izin usaha

di Kabupaten Banyuwangi yang semakin meningkat seperti yang dijelaskan pada sub bab 5.3.1. Meningkatnya nilai investasi tidak terlepas dari peran daya tarik Banyuwangi yang menggugah minat investasi para investor. Berdasarkan hasil identifikasi di lapangan terkait faktor-faktor yang menjadi daya tarik investasi di Kabupaten Banyuwangi ditemukan beberapa faktor yang menjadi daya tarik investasi di Kabupaten Banyuwangi antara lain: (1) public trust terhadap pemerintah di kalangan sektor bisnis, (2) potensi pariwisata, (3) program Banyuwangi Festival, (4) ketersediaan infrastruktur transportasi pendukung, (5) insentif bagi investor skala besar, (6) kemudahan, kecepatan dan transparansi perizinan, (7) ketersediaan infrastruktur @wifi.id, (8) dukungan regulasi pro sektor bisnis, (9) dan promosi potensi Banyuwangi yang efektif.

Seluruh faktor-faktor yang disebutkan diatas memiliki keterkaitan yang sangat erat dan sulit untuk menentukan faktor mana yang paling berpengaruh, pernyataan ini merujuk pada kutipan wawancara informan 1 (Bupati Banyuwangi) dan informan 2 (Kepala Bidang Penanaman Modal BPPT). Berdasarkan perspektif dari seluruh investor yang menjadi informan dalam penelitian ini, faktor utama yang dilihat sebelum memutuskan berinvestasi di Kabupaten Banyuwangi yaitu faktor yang menjadi perhitungan bisnis misalnya segmentasi pasar bisnis. Setelah melihat bahwa faktor perhitungan bisnis terpenuhi selanjutnya baru melihat faktor faktor pemerintahan dan lain-lain yang salah satunya yaitu trust yang diberikan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan pengelolaan pemerintahan yang transparan, akuntabel dan mendukung sektor bisnis di Kabupaten Banyuwangi.

5.4.2.3 Memperbaiki kembali proposisi

Setelah membandingkan temuan di lapangan dengan proposisi awal yang telah dibangun, maka perlu ada perbaikan proposisi menyesuaikan dengan temuan penelitian di lapangan. Perbaikan proposisi mengacu pada hasil identifikasi pola aktual pada tahapan penjudohan pola yang dijabarkan pada eksplanasi diatas.

a. Perbaikan proposisi mayor

Berikut adalah perbaikan proposisi mayor pada penelitian ini berdasarkan temuan di lapangan:

1. [Pma.1] Penanam modal mempertimbangkan faktor potensi bisnis sebelum memutuskan berinvestasi

Faktor potensi bisnis yang dimaksud yaitu faktor yang menjadi perhitungan bisnis seperti segmentasi pasar. Berdasarkan temuan di lapangan, seluruh informan dari sisi penanam modal menyebutkan bahwa alasan utama melakukan investasi di Kabupaten Banyuwangi yaitu melihat potensi bisnis di sektor pariwisata dan agenda Banyuwangi Festival yang tentu berdampak kepada wisatawan yang datang ke Kabupaten Banyuwangi sehingga peluang segmentasi pasar sangat baik terlebih usaha perhotelan dan pusat oleh-oleh seperti yang dijalankan oleh informan.

2. [Pma.2] Penanam modal mempertimbangkan faktor tata kelola pemerintahan setelah perhitungan potensi bisnis terpenuhi

Setelah melihat potensi bisnis, faktor yang menjadi pertimbangan oleh penanam modal yaitu kualitas tata kelola pemerintahan daerah. Menurut informasi yang disampaikan oleh informan penanam modal, alasan mempertimbangkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah karena dengan tata kelola pemerintahan yang baik akan memberi sugesti positif bagi kelangsungan bisnis informan. Kelangsungan bisnis menyangkut kepastian dan kenyamanan berinvestasi di Kabupaten Banyuwangi. Sugesti positif dapat dicontohkan seperti transparansi pemerintah terhadap publik, komitmen pemerintah untuk memajukan sektor bisnis.

3. [Pma.3] Implementasi e-Government di level pemerintah daerah membantu dalam mewujudkan tata kelola pemerintah daerah yang baik (*good governance*)

Dengan diterapkannya beberapa aplikasi e-Government oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam beberapa tahun terakhir, terbukti memberikan dampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan. Menurut informan internal pemerintah, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi saat ini sedang dalam proses mewujudkan *good governance*. Salah satu cara untuk mewujudkan *good*

governance tersebut melalui penerapan aplikasi e-Government yang menjadikan pelayanan lebih mudah dan cepat, manajemen internal pemerintahan lebih mudah, desentralisasi pelayanan publik hingga ke desa dan sebagainya seperti yang telah dijelaskan di pembahasan sebelumnya.

4. [Pma.4] Praktek good governance di level pemerintah daerah membantu dalam meningkatkan daya tarik investasi daerah.

Kualitas tata kelola pemerintahan Kabupaten Banyuwangi yang baik akan menambah daya saing daerah. Menurut informan 2 (Kepala Bidang Penanaman Modal), daya saing antar daerah saat ini sangat kuat. Dengan daya saing yang dimiliki oleh masing-masing daerah ini akan berdampak pada minat investor untuk masuk ke daerah. Salah satu faktor yang dapat menambah daya saing Kabupaten Banyuwangi yaitu kualitas tata kelola pemerintahan. Selain itu berdasarkan perspektif penanam modal, tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang transparan, akuntabel dan didukung dengan regulasi yang pro terhadap sektor bisnis memberikan kepercayaan, kepastian dan kenyamanan bagi penanam modal dalam melangsungkan investasinya di Kabupaten Banyuwangi.

b. Perbaikan proposisi minor

Berikut adalah perbaikan proposisi minor pada penelitian ini berdasarkan temuan di lapangan:

1. [Pmi.1] Implementasi e-Government di level pemerintah daerah akan meningkatkan kualitas pelayanan internal dan pelayanan publik

Salah satu tujuan utama penggunaan e-Government pada pemerintahan yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Berdasarkan temuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, penggunaan e-Government dalam proses bisnis pemerintahan akan meningkatkan kualitas pelayanan internal pemerintahan dan kualitas pelayanan publik. Dari sisi internal pemerintahan, sebagai contoh dengan diterapkannya SIM LPPD (Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) akan meningkatkan kualitas data laporan kinerja instansi yang dahulu ketika masih belum menggunakan sistem sering terjadi ketidak cocokan data, format dan

ketidak sesuaian indikator laporan dengan regulasi yang ada. Dengan digunakannya SIM LPPD ini memudahkan pemerintah untuk manajemen laporan kinerja instansi sehingga berdampak pada hasil laporan kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Kabupaten Banyuwangi. Dari sisi pelayanan publik, salah satu contoh penggunaan aplikasi e-Government yaitu Lahir Procot Pulang Bawa Akta. Dengan layanan tersebut memudahkan ibu calon bayi untuk mengurus pembuatan akta kelahiran sebelum bayi dilahirkan dengan mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan terlebih dahulu termasuk nama bayi, sehingga ketika bayi lahir tidak perlu menunggu waktu lama untuk mendapatkan akta kelahiran.

2. [Pmi.2] Implementasi e-Government di level pemerintah daerah akan mempermudah monitoring transaksi hingga penatausahaan transaksi keuangan

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi memiliki dua aplikasi terintegrasi untuk pengelolaan keuangan daerah yaitu Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dan e-Village Budgeting. SIKD dapat digunakan mulai perencanaan, realisasi, hingga penatausahaan laporan keuangan untuk seluruh SKPD dan Kecamatan. Sedangkan e-Village Budgeting digunakan untuk perencanaan, realisasi, dan penatausahaan anggaran dana desa (ADD) bagi desa dan kelurahan di Kabupaten Banyuwangi. Dengan penggunaan SIKD, eksekutif seperti Bupati dapat memonitoring langsung secara real time progress penyerapan anggaran di masing-masing SKPD, selain itu keunggulan dari SIKD yaitu akses yang diberikan kepada BPK Jawa Timur untuk monitoring langsung proses penatausahaan laporan keuangan. Dengan diberikannya akses tersebut BPK dapat mengoreksi perkembangan laporan keuangan daerah sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan kecil yang dapat menjadi kesalahan besar.

3. [Pmi.4] Implementasi e-Government di level pemerintah daerah akan meningkatkan responsifitas pemerintah terhadap masyarakat

Penggunaan layanan pengaduan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi melalui website dan SMS center dapat memfasilitasi masyarakat untuk melaporkan pengaduan dengan mudah dan cepat. Di sisi pemerintah pun melalui

SKPD terkait tertuntut untuk lebih responsif menanggapi pengaduan dari masyarakat. Dengan penggunaan layanan pengaduan akan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memberi masukan kritik dan saran kepada pemerintah, dan akan menjadikan pemerintah lebih tanggap dalam merespon setiap pengaduan dari masyarakat.

4. [Pmi.5] Implementasi e-Government di level pemerintah daerah akan meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh eksekutif

Beberapa aplikasi terintegrasi yang digunakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu SIKD, e-Demografi, GIS Banyuwangi. Aplikasi tersebut memaksa SKPD untuk berbagi data dengan seluruh elemen. Seperti aplikasi e-Demografi disana terdapat data kesehatan, kependudukan, pendidikan, data ekonomi, perkebunan, peternakan dan lain-lain seluruh Kabupaten Banyuwangi. Dulu sebelum dikeluarkan peraturan dan diterapkannya aplikasi-aplikasi tersebut, beberapa SKPD ego sektoralnya masih tinggi termasuk kepemilikan data. Tidak mau berbagi data dan belum adanya wadah untuk berbagi data secara keseluruhan, sehingga pengambilan keputusan pun belum maksimal karena keberadaan data yang terpisah-pisah. Namun sekarang dengan integrasi data yang semakin baik lebih meningkatkan kualitas pengambilan keputusan oleh eksekutif.

5. [Pmi.6] Implementasi e-Government di level pemerintah daerah akan menjadikan birokrasi terskema dengan baik

Salah satu aplikasi e-Government yang mendukung proposisi ini yaitu e-Kinerja. Dengan e-Kinerja yang diterapkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, kinerja seluruh PNS lebih terskema dengan baik. Target pekerjaan harian yang harus diselesaikan tersusun dengan baik, evaluasi kinerja perorangan pun dapat dipantau. Menurut informan 1 (Bupati Banyuwangi), dulu sebelum diterapkannya e-Kinerja, pemerintah tidak dapat mengetahui PNS mana yang berhasil dan tidak berhasil karena tidak mampu memantau kinerja dan mengevaluasinya. Namun saat ini kinerja PNS lebih terskema dengan baik dan evaluasi kinerja dapat dilakukan menggunakan sistem.

6. [Pmi.7] Implementasi e-Government di level pemerintah daerah akan menjadikan pelayanan terdesentralisasi

Desentralisasi pelayanan yang dimaksud yaitu pemerataan pelayanan yang tidak berfokus pada satu tempat. Di Kabupaten Banyuwangi, telah diterapkan layanan One Stop Service yang tersebar di seluruh kecamatan dan beberapa desa. Fungsi dari OSS tersebut yaitu pelayanan persuratan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan diterapkannya OSS ini menjadikan pelayanan tidak fokus di sentral kabupaten, masyarakat cukup melakukan di kecamatan atau kantor desa terdekat.

7. [Pmi.8] Praktek good governance di level pemerintah daerah memberikan *public trust* terhadap masyarakat dan pelaku usaha

Berdasarkan hasil wawancara terhadap seluruh informan, salah satu output dari penyelenggaraan good governance di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu terciptanya public trust di kalangan masyarakat dan pelaku usaha. Bagi pemerintah, dengan dukungan kepercayaan publik terhadap pemerintah akan mendukung keberlangsungan program-program pembangunan pemerintah. Menurut informan 1 (Bupati Banyuwangi) kunci dari pembangunan daerah adalah dukungan yang kuat dari masyarakat. Sedangkan di sisi lain public trust bagi pelaku usaha akan menambah keyakinan untuk pengembangan usaha yang lebih besar lagi.

8. [Pmi.9] Praktek good governance di level pemerintah daerah memberikan keyakinan, keamanan dan kenyamanan berinvestasi

Selain menciptakan public trust, good governance juga memberikan keyakinan bagi investor untuk kelangsungan investasinya, memberikan jaminan keamanan berupa perlindungan hukum di lingkungan usaha dan tentu pada akhirnya memberikan kenyamanan berinvestasi. Berdasarkan temuan di lapangan, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi konsisten dalam memberikan perlindungan bagi investor ketika ada oknum yang tidak bertanggungjawab mengancam keberlangsungan investasinya. Hal ini menjadi salah satu keunggulan juga dalam

menarik investor untuk masuk. Karena, menurut seluruh informan penanam modal, para penanam modal menginginkan lokasi investasi yang pasti, aman dan nyaman untuk melangsungkan investasinya.

9. [Pmi.11] Potensi pariwisata daerah menjadi daya tarik investasi daerah

Temuan lain yang didapatkan di lapangan yaitu peran potensi pariwisata daerah mampu menjadi pertimbangan tersendiri bagi penanam modal sebelum memutuskan untuk berinvestasi. Kabupaten Banyuwangi memiliki potensi pariwisata yang menjanjikan dimulai dari wisata alam, gunung, pantai, budaya yang saat ini sedang populer. Selain itu dukungan program Banyuwangi Festival yang menjadi unggulan dari Kabupaten Banyuwangi turut menjadi pertimbangan tersendiri bagi penanam modal untuk masuk ke Kabupaten Banyuwangi.

10. [Pmi.12] Ketersediaan infrastruktur transportasi pendukung menjadi daya tarik investasi daerah

Ketersediaan infrastruktur transportasi pendukung juga menambah daya tarik investasi daerah. Ketersediaan sarana kereta api, pelabuhan, transportasi darat (bus) dan bandara di Kabupaten Banyuwangi menjadi faktor yang mempengaruhi investor untuk masuk berinvestasi. Dengan ketersediaan sarana transportasi tersebut akan memudahkan aksesibilitas wisatawan yang hendak dari dan menuju Banyuwangi sehingga akan berdampak pada kunjungan wisatawan yang tentu pada akhirnya memberi dampak pada pelaku usaha di Kabupaten Banyuwangi.

11. [Pmi.13] Dukungan regulasi pemerintah yang mendukung sektor bisnis menjadi daya tarik investasi daerah

Regulasi/kebijakan yang dikeluarkan pemerintah khususnya yang mendukung sektor bisnis juga turut menciptakan daya tarik investasi. Berdasarkan temuan di lapangan, regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam mendukung sektor bisnis sangat berdampak pada kelangsungan iklim investasi. Beberapa regulasi/kebijakan yang menurut informan penanam modal menguntungkan bisnisnya antara lain: dukungan

pemerintah untuk mendapatkan permodalan perbankan, launching marketplace online UMKM Banyuwangi-Mall.com, program Banyuwangi Festival, dan Perbup yang mengatur pelarangan pendirian hotel kelas melati baru.

12. [Pmi.14] Promosi potensi daerah yang dilakukan oleh pemerintah membantu mempengaruhi persepsi penanam modal untuk berinvestasi

Promosi yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mengenalkan potensi dan keunggulan daerah merupakan salah satu cara untuk menarik investor masuk ke daerah untuk berinvestasi. Berdasarkan pengamatan di lapangan, pemanfaatan website www.banyuwangikab.go.id untuk mempromosikan potensi Kabupaten Banyuwangi sudah dilakukan cukup baik, termasuk di dalam website tersebut terdapat menu khusus potensi investasi yang ada di Kabupaten Banyuwangi sehingga orang yang mengakses dapat mengetahui titik-titik yang memiliki potensi untuk didirikan sebuah usaha. Promosi yang dilakukan pemerintah ini terbukti mampu menarik minat investasi salah satu informan dalam penelitian ini yaitu owner UMKM Nagud!. Sebelum membuka usaha, owner Nagud! menelusuri potensi Banyuwangi melalui website dan media sosial hingga akhirnya menemukan peluang dan memutuskan untuk membuka usaha kaos etnis dan pusat oleh-oleh khas Banyuwangi.

5.5 Temuan dan Model Akhir Penelitian

5.5.1 Temuan Penelitian

Di akhir penelitian ini, peneliti menemukan 6 temuan besar yang menjadi hasil pada penelitian ini antara lain:

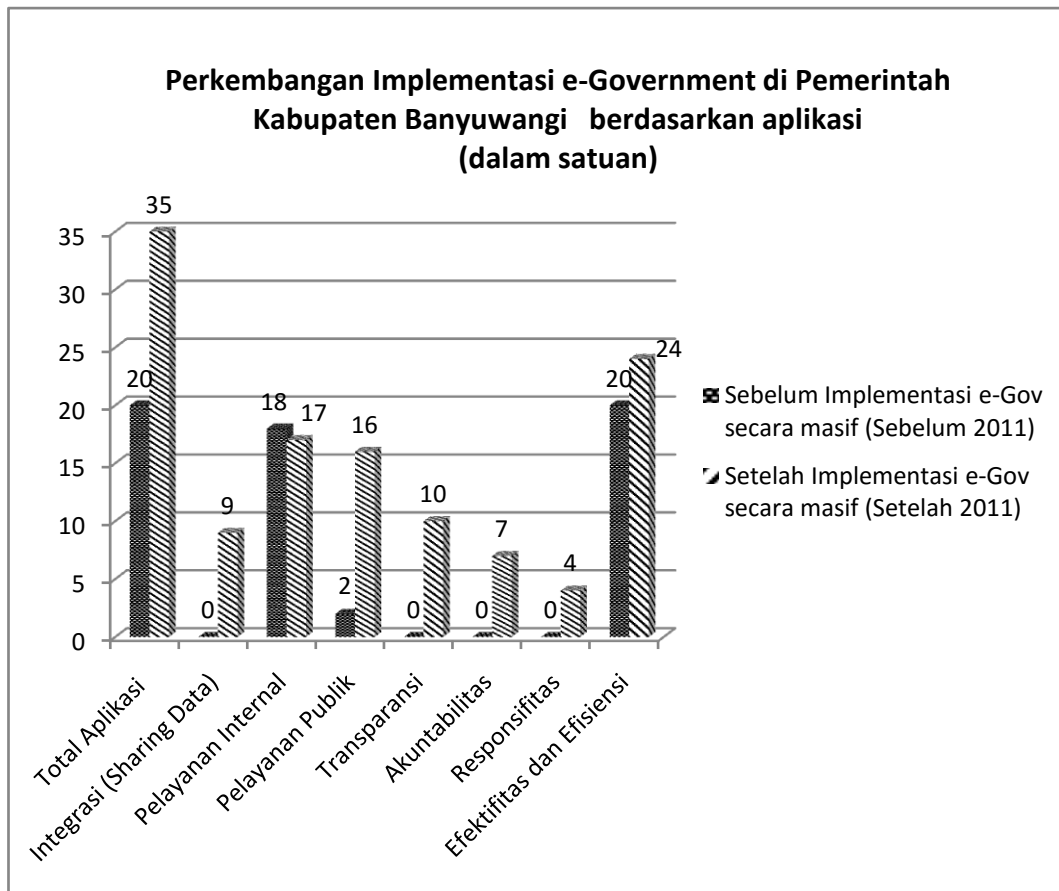
1. Terjadi peningkatan implementasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu sebelum dan sesudah inisiasi e-Government secara masif dilakukan.

Seperti yang telah diuraikan diatas, secara global implementasi e-Government di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan yang signifikan sejak insiasi pengembangan e-Government secara

masif dilakukan pada tahun 2011. Berikut data peningkatan implementasi e-Government yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 5.20 Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur ICT di Kabupaten Banyuwangi sebelum dan sesudah masa implementasi e-Government secara masif

Komponen	Kurun Waktu	
	Sebelum Masa Implementasi e-Government secara Masif (Sebelum Tahun 2011)	Sesudah Masa Implementasi e-Government secara Masif (Sesudah Tahun 2011)
Jaringan Fixed Internet (LAN)	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagian besar PC tanpa koneksi (stand alone) • Hanya 40% SKPD yang sudah terkoneksi dengan jaringan LAN • Bandwidth 4 MB 	<ul style="list-style-type: none"> • Sekitar 2/3 dari total PC sudah terkoneksi dengan LAN • Seluruh SKPD, kecamatan dan 95% desa sudah terkoneksi dengan Dishubkominfo • Bandwidth 200 MB
Jaringan Wireless	<ul style="list-style-type: none"> • Belum seluruh SKPD tersedia jaringan wifi. • Maksimal hanya di kecamatan dan beberapa desa yang aware 	<ul style="list-style-type: none"> • Tersebar di seluruh kantor pemerintahan, rumah sakit, sekolah dan ruang publik (RTH, pasar) di seluruh Banyuwangi • Tahun 2013 sebanyak 1200 titik @wifi.id • Tahun 2015 sebanyak 1400 titik @wifi.id
Saluran Telepon	<ul style="list-style-type: none"> • Masih menggunakan kabel cooper (coax) 	<ul style="list-style-type: none"> • Sedang proses migrasi dari kabel cooper menjadi kabel fiber optik (FO)
Personal Computer (PC)	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah PC secara keseluruhan 198 buah, sedangkan total pejabat struktural di Pemkab Banyuwangi sebanyak 336 orang 	<ul style="list-style-type: none"> • Rasio jumlah PC dengan Pegawai 1:1



Gambar 5.34 Perkembangan Implementasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi berdasarkan sisi aplikasi

2. Terjadi peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu sebelum dan sesudah inisiasi e-Government secara masif dilakukan

Seiring dengan pengembangan e-Government yang sejalan dengan misi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk mewujudkan good governance di lingkungan pemerintah, berdampak pula terhadap peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Berikut data peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 5.21 Perkembangan Kualitas Tata Kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

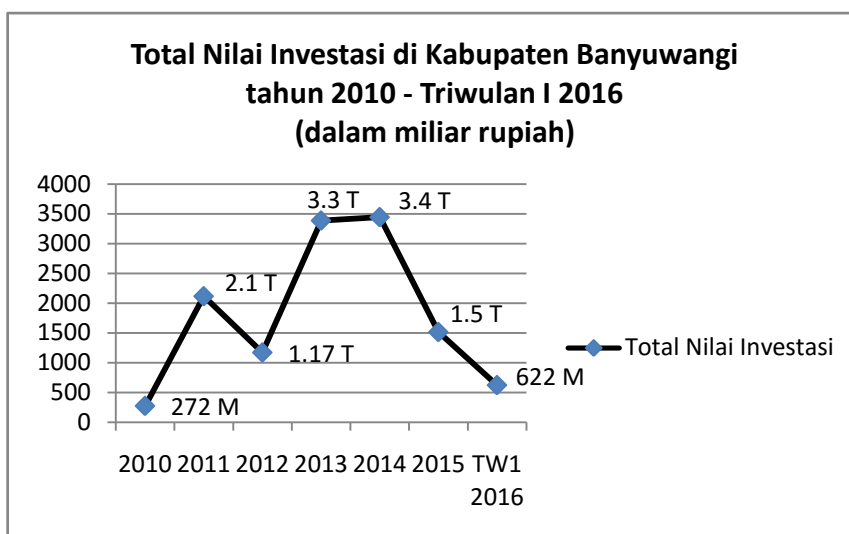
Komponen	Indikator	Kurun Waktu	
		Sebelum Masa Implementasi e-Government secara Masif (Sebelum 2011)	Setelah Masa Implementasi e-Government secara Masif (Setelah 2011)
TRANSPARANSI	Publikasi data anggaran / keuangan daerah	Publikasi terkait anggaran keuangan masih sebatas konten / berita di website	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah tersedia menu transparansi mencakup perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan dan pertanggungjawaban daerah di website www.banyuwangikab.go.id - Penyelenggaraan Festival Transparansi Anggaran sejak tahun 2014 - Publikasi melalui media massa dan baliho-baliho - Lounge Pelayanan Publik tersedia seluruh data terkait Banyuwangi
	Publikasi peraturan / regulasi	Belum memiliki JDIH baik JDIH Kabupaten maupun JDIH terintegrasi dengan Propinsi Jawa Timur	<ul style="list-style-type: none"> - JDIH Kabupaten dengan alamat jdih.banyuwangikab.go.id - JDIH Integrasi Propinsi dengan alamat kabbanyuwangi.jatih.jatimprov.go.id
AKUNTABILITAS	Pertanggung jawaban anggaran	<ul style="list-style-type: none"> - Pertanggungjawaban masih sebatas konten/berita di website - Belum dibentuk PPID Pembantu maupun PPID Kabupaten 	<ul style="list-style-type: none"> - Sudah tersedia menu transparansi mencakup perencanaan pembangunan daerah, pengelolaan dan pertanggungjawaban daerah di website www.banyuwangikab.go.id - Penyelenggaraan Festival Transparansi Anggaran

			sejak tahun 2014 - Sudah dibentuk PPID Pembantu dan Kabupaten untuk memfasilitasi publik mengetahui detail data-data pemerintahan termasuk anggaran
	Pertanggung jawaban kinerja pemerintah	- Belum memiliki aplikasi pelaporan kinerja instansi (LAKIP) - Peringkat LPPD tahun 2010 ranking 162 se-Indonesia	- Pendataan kinerja dan evaluasi sudah menggunakan 2 aplikasi yaitu LPPD dan LPPDes. - Data LAKIP Pemkab Banyuwangi tersedia di website www.banyuwangikab.go.id - SAKIP Tahun 2015 terbaik di Jawa Timur dengan predikat B (Nilai 65,41) - Peringkat LPPD tahun 2012 ranking 26 - Peringkat LPPD tahun 2013 ranking 16
RESPONSIFITAS	Responsifitas terhadap kritik dan saran	- Belum memiliki layanan pengaduan online baik itu website maupun sms center	- Penggunaan layanan pengaduan berbasis website dan sms center menjadikan pemerintah lebih peka terhadap masalah di lapangan - Interaksi komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah lebih meningkat - 2016 terbaru diluncurkan Banyuwangi Children Center
	Responsifitas terhadap pelayanan	- Hanya aplikasi One Stop Service yang termasuk pelayanan publik.	- Dengan diluncurkan beberapa aplikasi pelayanan publik seperti Lahir Procot, SIPO memberikan kecepatan dalam pelayanan - Contoh program One

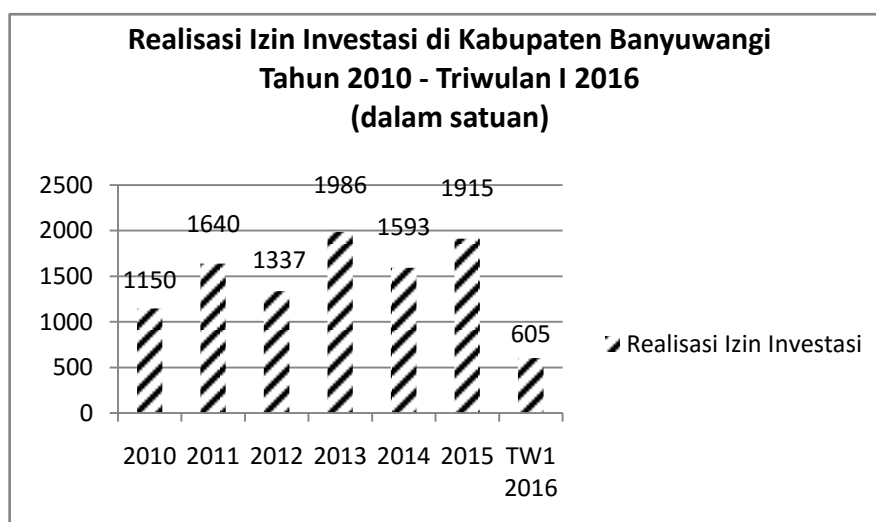
			Day Service dalam perizinan SIUP kecil
EFEKTIFITAS DAN EFISIENSI	Birokrasi pelayanan publik lebih mudah	<ul style="list-style-type: none"> - Birokrasi pelayanan publik masih kurang baik karena belum banyak pelayanan publik berbasis online 	<ul style="list-style-type: none"> - Birokrasi pelayanan lebih cepat dan mudah - Salah satu contoh aplikasi yang menyederhanakan birokrasi yaitu Lahir Procot Pulang Bawa Akta, One Stop Service dan SIPO
	Manajemen internal lebih mudah	<ul style="list-style-type: none"> - Tidak bisa memonitoring proses pelayanan karena belum online - Manajemen keuangan, aset dan sebagainya masih sulit - LKPD sebelum periode Bupati AAA sempat mendapatkan opini “disclaimer” - Monitoring kinerja SDM sulit dilakukan 	<ul style="list-style-type: none"> - Dengan layanan online mudah menelusuri proses pelayanan, tahap mana yang mengalami kendala. - Manajemen keuangan sudah bagus, aset dan lain-lain karena semua sudah tersistem dengan baik - LKPD sejak tahun 2012-2015 mendapat predikat WTP(Wajar Tanpa Pengecualian) dari BPK. - Dengan e-Kinerja memudahkan untuk mengevaluasi kinerja SDM

3. Terjadi peningkatan nilai penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi dalam kurun waktu sebelum dan sesudah inisiasi e-Government secara masif dilakukan.

Nilai penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi juga mengalami peningkatan yang signifikan antara sebelum tahun 2011 dan sesudah tahun 2011. Berikut data peningkatan nilai penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi.



Gambar 5.35 Data Nilai Investasi di Kab. Banyuwangi Tahun 2010 - TW1 2016



Gambar 5.36 Perkembangan Realisasi Izin Investasi di Kab. Banyuwangi Tahun 2010-TW1 2016

4. **[4.a] Terdapat hubungan antara implementasi e-Government dengan peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi**
[4.b] Terdapat hubungan antara peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan peningkatan nilai penanaman modal.
[4.c] Terdapat hubungan antara implementasi e-Government dengan peningkatan nilai penanaman modal.

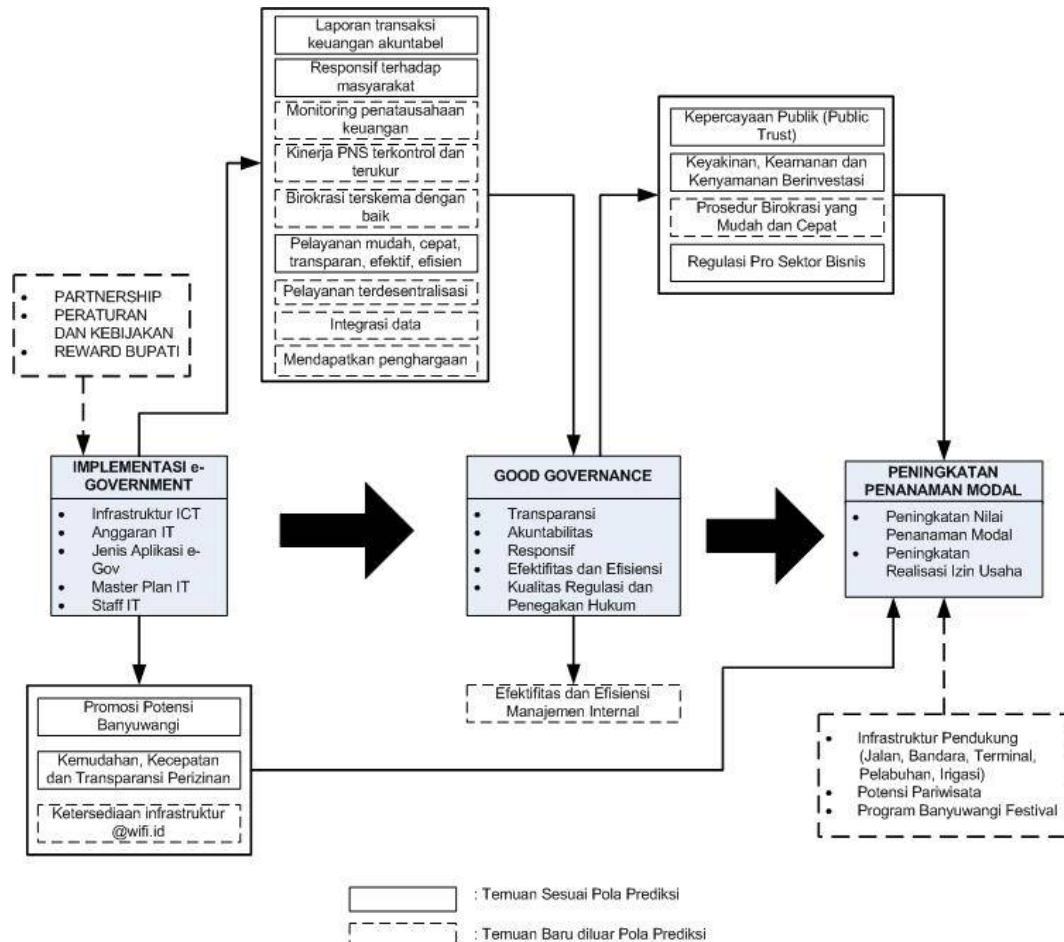
Temuan selanjutnya dari penelitian ini yaitu ditemukannya hubungan antara (1) implementasi e-Government terhadap peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, (2) peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan terhadap peningkatan nilai penanaman modal, dan (3) implementasi e-Government terhadap peningkatan nilai penanaman modal. Temuan ini merupakan pola aktual yang dihasilkan dari analisis penelitian untuk menjawab tujuan dan rumusan masalah penelitian ini.

Hubungan antara implementasi e-Government terhadap peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dibuktikan dengan manfaat penggunaan e-Government antara lain: monitoring penatausahaan keuangan, laporan transaksi keuangan akuntabel, mendapatkan penghargaan, kinerja PNS terukur dan terkontrol, birokrasi terskema dengan baik, pelayanan lebih mudah, cepat efektif dan efisien, desentralisasi pelayanan, integrasi data dan responsif terhadap masyarakat.

Hubungan antara kualitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap peningkatan nilai penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi dibuktikan dengan manfaat perwujudan good governance antara lain: memberikan kepercayaan publik (public trust), memberikan keyakinan, keamanan dan kenyamanan berinvestasi bagi investor, dukungan regulasi pro sektor bisnis dan birokrasi (perizinan) yang mudah dan cepat.

Hubungan antara implementasi e-Government terhadap peningkatan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi dibuktikan dengan manfaat penggunaan e-Government sebagai pendukung daya tarik investasi antara lain: pemanfaatan website pemerintah untuk promosi investasi, memberikan

kemudahan, kecepatan dan transparansi perizinan, dan ketersediaan infrastruktur @wifi.id. Berikut pola aktual penelitian yang mendukung temuan diatas.



Gambar 5.37 Pola Aktual Hasil Penelitian yang Mendukung Temuan Penelitian

5. Temuan baru diluar prediksi penelitian

Penelitian ini juga menghasilkan beberapa temuan baru diluar prediksi penelitian ini. Temuan baru ini didapatkan di masing-masing domain implementasi e-Government, good governance, dan peningkatan penanaman modal. Berikut temuan baru yang dihasilkan pada penelitian ini.

Tabel 5.22 Temuan Baru diluar Prediksi Penelitian

Sub-pola	Unsur	Kesesuaian dengan Pola Prediksi	
		Sesuai	Temuan Baru
Pendorong e-Government (Trigger)	Partnership dengan BPPT, Telkom, Biznet, Telkomsel dan Indosat		√
	Dukungan peraturan / kebijakan tentang penggunaan dan pengelolaan IT		√
	Reward oleh Bupati untuk SKPD dengan pemanfaatan ICT terbaik setiap bulan		√
Manfaat Implementasi e-Government	Promosi Potensi Banyuwangi	√	
	Kemudahan, kecepatan dan transparansi perizinan	√	
	Mendapatkan penghargaan		√
	Monitoring penatausahaan laporan keuangan	√	
	Kinerja PNS terukur dan terkontrol		√
	Responsif terhadap masyarakat	√	
	Pelayanan transparan, efektif dan efisien	√	
	Laporan transaksi keuangan akuntabel	√	
	Pelayanan terdesentralisasi		√
	Integrasi data		√
	Birokrasi terskema dengan baik		√
Manfaat Good Governance	Menciptakan kepercayaan publik (public trust)	√	
	Menciptakan keyakinan, keamanan dan kenyamanan berinvestasi	√	
	Efektifitas dan efisiensi manajemen internal		√
	Birokrasi mudah dan cepat		√
Daya Tarik Investasi di Kabupaten Banyuwangi	Kepercayaan publik (public trust)	√	
	Keyakinan, keamanan dan kenyamanan berinvestasi	√	
	Prosedur birokrasi yang mudah dan cepat	√	
	Dukungan regulasi pro sektor bisnis		√
	Infrastruktur transportasi		√
	Potensi pariwisata		√
	Program Banyuwangi Festival		√
	Promosi potensi investasi	√	
	Kemudahan dan kecepatan perizinan	√	
	Ketersediaan infrastruktur @wifi.id		√

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa temuan baru dari masing-masing sub-pola prediksi penelitian. Temuan baru ini merupakan hasil yang didapatkan diluar pola prediksi penelitian namun pada fakta di lapangan temuan baru ini memang sesuatu yang dialami pada studi kasus dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Berikut rangkuman beberapa temuan baru dari masing-masing sub-pola penelitian:

1. Manfaat implementasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi:

- a. Peran partnership dengan badan pemerintah dan perusahaan membantu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam implementasi e-Government.
- b. Dukungan peraturan/kebijakan memiliki pengaruh yang besar khususnya dalam hal pembuatan aplikasi baru di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
- c. Reward Bupati yang diumumkan setiap bulan untuk mengapresiasi SKPD yang mampu menjadikan ICT sebagai solusi dari permasalahan khususnya menyangkut pelayanan, mendorong SKPD untuk memaksimalkan peran ICT dalam peningkatan kualitas pelayanan.
- d. Implementasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membawa dampak diraihnya beberapa penghargaan terkait pengembangan IT di Kabupaten Banyuwangi.
- e. Implementasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadikan kinerja pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan pemerintahan terukur dan terkontrol
- f. Implementasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadikan pelayanan publik terdesentralisasi di seluruh kecamatan dan desa
- g. Implementasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengintegrasikan beberapa data yang berguna untuk meningkatkan kualitas pengambilan kebijakan oleh eksekutif.
- h. Implementasi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menjadikan birokrasi di pemerintahan lebih terskema dengan baik.

2. Manfaat terwujudnya good governance di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi:

- a. Dengan tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang semakin baik menjadikan manajemen internal pemerintahan lebih efektif dan efisien.
- b. Dengan tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang semakin baik menjadikan birokrasi lebih mudah dan cepat

3. Faktor-faktor yang menjadi daya tarik investasi di Kabupaten Banyuwangi

- a. Dukungan regulasi yang pro terhadap sektor bisnis di Kabupaten Banyuwangi menjadi daya tarik investasi bagi investor
- b. Ketersediaan infrastruktur transportasi (jalan, kereta api, bus, pelabuhan, bandara) menjadi daya tarik investasi bagi investor
- c. Potensi pariwisata yang dimiliki Kabupaten Banyuwangi menjadi daya tarik tersendiri bagi investor
- d. Program Banyuwangi Festival yang merupakan ajang festival budaya, pariwisata dan promosi potensi daerah menjadi daya tarik investasi bagi investor.

6. Unsur pola prediksi yang tidak ditemukan di lapangan

Selain beberapa temuan baru diluar pola prediksi penelitian, beberapa unsur dari pola prediksi tidak didukung dengan temuan di lapangan. Unsur-unsur dari pola prediksi yang tidak ditemukan di lapangan antara lain:

a. Manfaat Implementasi e-Government

1. Menciptakan peluang bisnis

Hasil dari penelitian ini tidak mendukung temuan dari Edwin Lau (2005) yang menyatakan bahwa implementasi e-Government akan menciptakan peluang bisnis.

2. Mengurangi biaya layanan pemerintah

Hasil dari penelitian ini tidak mendukung temuan dari Al-Azzam & Abu-Shanab (2014), Kachwamba (2011), Edwin Lau (2005), Ndou

(2004), Bhatnagar (2003) yang menyatakan bahwa implementasi e-Government akan mengurangi biaya layanan pemerintah.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat

Hasil dari penelitian ini tidak mendukung temuan dari Seifert & Bonham (2004), Deloitte Research Group (2004), Bhatnagar (2003) yang menyatakan bahwa implementasi e-Government akan meningkatkan partisipasi masyarakat.

4. Mengurangi ketidakpastian informasi

Hasil dari penelitian ini tidak mendukung temuan dari Al-Azzam & Abu-Shanab (2014), Azubuike (2006) yang menyatakan bahwa implementasi e-Government akan mengurangi ketidakpastian informasi bagi masyarakat dan stakeholder.

b. Manfaat Good Governance

1. Meningkatkan kinerja organisasi

Hasil dari penelitian ini tidak mendukung temuan dari Sri Fadilah (2013) yang menyatakan bahwa dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan akan meningkatkan kinerja organisasi dalam hal ini pemerintahan.

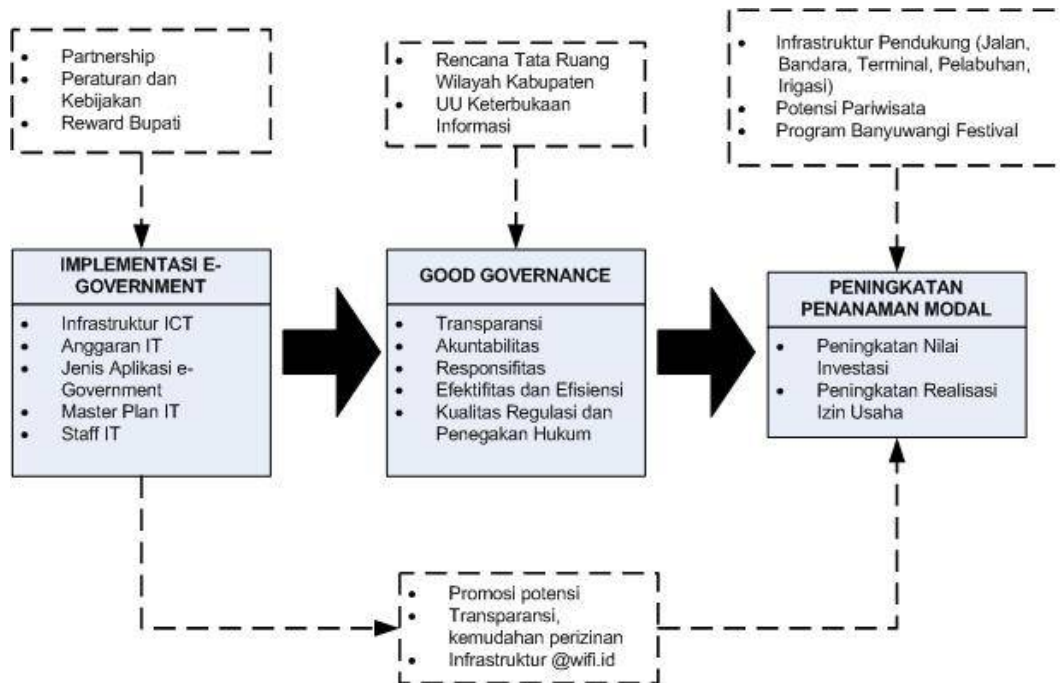
2. Menarik FDI masuk

Hasil dari penelitian ini tidak mendukung temuan dari Saidi, et.al (2013), Chandra & Yokoyama (2011) yang menyatakan bahwa dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan akan lebih banyak menarik FDI masuk. Data yang ditemukan di lapangan, investasi asing atau FDI tidak mengalami peningkatan yang signifikan dan cenderung tidak stabil.

5.5.2 Model Akhir Penelitian

Setelah seluruh tahapan analisis dilakukan, dan temuan-temuan dari penelitian dijabarkan diatas maka akan berdampak pada pengembangan model penelitian. Model penelitian yang disusun diawal mengalami perubahan seiring

dengan temuan-temuan di lapangan. Model akhir dari penelitian ini seperti pada gambar 5.38 dibawah ini.



Gambar 5.38 Model Akhir Penelitian

(Sumber: Hasil analisis, 2016)

5.6 Pengecekan Keabsahan Data Penelitian

Untuk melakukan pengecekan keabsahan hasil penelitian ini, peneliti merujuk pada teknik pengecekan keabsahan data penelitian menurut Sugiyono (2014) yang terdiri dari uji kredibilitas, uji transferability, uji dependability, dan uji confirmability.

5.6.1 Uji Kredibilitas

5.6.1.1 Triangulasi

Pada penelitian ini, peneliti melakukan tiga jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber data, triangulasi teknik pengumpulan data, dan triangulasi waktu pengumpulan data.

1. Triangulasi Sumber Data

Untuk triangulasi sumber data, peneliti melakukan penggalan informasi kepada:

- Bapak Joni Priyanto, S.ST selaku Kasie. Pengelolaan Data Elektronik (PDE) Dishubkominformasi. Keputusan untuk mewawancarai Bapak Joni Priyanto merupakan usulan dari Bapak Agustinus Suko Basuki, S.T yang terlebih dahulu diwawancarai oleh peneliti. Tujuan mewawancarai Bapak Joni Priyanto karena tugas pokok dan fungsi Kasie. PDE berkaitan dengan data elektronik yang disimpan dan dikelola pada aplikasi e-Government.
- Ibu Fatati Noeryana (Bu Nunung) selaku Manajer Osing Deles. Keputusan untuk mewawancarai Bu Nunung merupakan rekomendasi dari Owner Osing Deles Ibu dr. Zunita yang terlebih dahulu diwawancarai. Tujuan mewawancarai Bu Nunung karena yang bersangkutan memahami dan terlibat dalam proses pengurusan perizinan pengembangan usaha Osing Deles pada tahun 2014.

2. Triangulasi Teknik Pengumpulan Data

Peneliti selain mengumpulkan data melalui wawancara, juga melakukan pengumpulan data melalui dokumen-dokumen pendukung baik hard copy maupun soft copy. Selain itu peneliti mengamati langsung dengan mendokumentasikan foto.

3. Triangulasi Waktu Pengumpulan Data

Untuk triangulasi waktu, peneliti melakukan kepada informan penanam modal dikarenakan waktu yang lebih fleksibel apabila dibandingkan dengan informan pemerintahan.

Tabel 5.23 Triangulasi Waktu Pengumpulan Data

Nama Informan	Usaha	Tanggal Wawancara ke		Tempat
		I	II	
Annisa Febby Chaurina	Nagud!	22 Maret 2016 (Malam)	5 April 2016	Wcr I : Outlet Wcr II : Taman

			(Siang)	Blambangan
dr Zunita Ahmada	Osing Deles	22 Mei 2016 (Siang)		Outlet
Fatati Noeryana	Osing Deles	22 Mei 2016 (Malam)		Outlet

5.6.1.2 Member Checking

Tujuan dari member checking adalah untuk memastikan kembali data atau hasil penelitian yang telah diperoleh sesuai dengan informasi yang disampaikan informan dan sesuai dengan realita di studi kasus. Pada penelitian ini, member checking dilakukan setelah temuan atau kesimpulan dilakukan. Lembar member checking terlampir.

5.6.2 Uji Transferability

Uji transferability pada penelitian kualitatif sama artinya dengan generalisasi pada penelitian kuantitatif. Uji transferability dilakukan dengan cara menyusun laporan hasil penelitian secara tersistematis dan menjelaskan agar hasil dari penelitian ini dapat ditransferkan atau diterapkan pada obyek atau daerah lain yang memiliki kemiripan karakteristik studi kasus penelitian ini. Rincian dari uji transferability terlampir

5.6.3 Uji Dependability dan Uji Confirmability

Uji dependability dan uji confirmability dapat dilakukan secara bersamaan. Uji dependability untuk mengaudit keseluruhan rangkaian tahapan penelitian, sedangkan uji confirmability dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil penelitian dan mengaudit apakah tahapan-tahapan penelitian yang telah dilakukan sesuai dengan standar yang berlaku. Uji dependability dan uji confirmability dilakukan oleh auditor independen dalam hal ini dosen pembimbing penelitian ini.

5.7 Kontribusi Penelitian

5.7.1 Kontribusi Teoritis

Kontribusi teoritis yang dihasilkan dari penelitian ini antara lain:

1. Memberikan sebuah model penelitian yang komprehensif di bidang dampak e-government terhadap peningkatan nilai investasi melalui peningkatan good governance.
2. Penggunaan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus tunggal yang detail dan mendalam untuk penelitian dengan topik di bidang dampak penggunaan e-government pada level pemerintah kabupaten.

5.7.2 Kontribusi Praktis

Kontribusi praktis dari penelitian ini antara lain:

1. Hasil penelitian ini sebagai hasil evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terhadap manfaat dari implementasi e-Government yang selama ini dilakukan khususnya terhadap peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan sebagai mendukung peningkatan penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi.
2. Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan nilai investasi di daerah, maka perlu meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dengan salah satu caranya yaitu meningkatkan kualitas e-government.

5.8 Keterbatasan Penelitian

Ada beberapa hal yang menjadi keterbatasan dalam penelitian ini antara lain:

1. Studi kasus yang digunakan dalam penelitian ini studi kasus tunggal
2. Pemilihan investor dalam penelitian ini berdasarkan nilai investasi (mikro kecil – menengah – besar). Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah kategori investor berdasarkan jenis investasi (PMA – PMDN – Investasi Daerah), sehingga memungkinkan mengetahui informasi berdasarkan perspektif investor asing.

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian telah menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian mengenai hubungan antara implementasi e-Government terhadap peningkatan penanaman modal di daerah antara lain:

- 1. Implementasi e-Government pada level pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).**

Dengan diterapkannya beberapa aplikasi e-Government yang memiliki fungsi sebagai transparansi, akuntabilitas, responsifitas, dan memudahkan pelayanan sangat berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah yang lebih transparan, efektif dan efisien. Hal ini menjawab rumusan masalah penelitian ini yaitu *“Bagaimana dampak implementasi e-Government terhadap peningkatan kualitas good governance di pemerintah daerah ?”*.

- 2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah akan membentuk citra dan kepercayaan publik (public trust) di kalangan masyarakat dan pelaku usaha yang berdampak pada minat investasi oleh penanam modal.**

Dengan tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan, akuntabel, responsif, pelayanan yang mudah dan cepat serta didukung dengan regulasi yang mendukung sektor bisnis sangat berdampak pada pembentukan citra/image pemerintahan daerah yang positif dan juga kepercayaan publik (public trust) terhadap pemerintah daerah. Dua dampak tersebut mampu menjadi daya tarik investasi daerah dan mampu mempengaruhi persepsi calon penanam modal maupun pelaku usaha di daerah untuk berinvestasi atau lebih meningkatkan investasi menjadi lebih

besar. Hal ini menjawab dua rumusan masalah penelitian ini yaitu *“Bagaimana dampak kualitas good governance pemerintah daerah terhadap peningkatan nilai investasi di daerah ?”*

3. Implementasi e-Government pada level pemerintah daerah mampu memberikan aksesibilitas informasi potensi daerah kepada calon penanam modal.

Salah satu wujud layanan e-Government yaitu website instansi / pemerintah. Pemanfaatan secara optimal website Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk media promosi potensi Kabupaten Banyuwangi termasuk didalamnya potensi investasi yang menjanjikan berdampak pada aksesibilitas informasi bagi calon penanam modal. Hal ini menjawab rumusan masalah penelitian ini yaitu *“Bagaimana dampak implementasi e-government terhadap peningkatan nilai investasi di daerah’ ?*

4. Peran partnership, dukungan peraturan dan kebijakan, serta apresiasi dari kepala daerah turut mendorong keberlangsungan implementasi e-Government pada level pemerintah daerah.

Peran partnership dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun perusahaan, dukungan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan e-Government, serta apresiasi (reward) yang diberikan oleh kepala daerah terhadap SKPD turut mendorong keberlangsungan implementasi e-Government di daerah. Bentuk dorongan tersebut antara lain penguatan komponen infrastruktur ICT, trigger untuk memaksimalkan pemanfaatan ICT dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini memberikan temuan baru dalam hal faktor-faktor yang menjadi pendorong kesuksesan implementasi e-Government pada level pemerintah daerah.

5. Daya tarik investasi daerah dibentuk pula melalui faktor ketersediaan infrastruktur transportasi, potensi pariwisata daerah, dukungan agenda/program pemerintah daerah pada sektor pariwisata, serta dukungan regulasi/kebijakan yang mendukung sektor bisnis.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan sektor-sektor yang dapat dijadikan daya tarik investasi daerah seperti pariwisata, infrastruktur pendukung,

termasuk didalamnya kebijakan pemerintah yang mendukung (pro) terhadap kemajuan sektor bisnis di daerah. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan utama bagi penanam modal sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

6.2 Saran

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat ditindaklanjuti untuk pengembangan penelitian di masa yang akan datang. Berikut saran dari penelitian ini:

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus tunggal, kedepannya perlu menggunakan multi kasus dengan menambahkan beberapa daerah lain sebagai studi kasus.
2. Pemilihan informan penanam modal dalam penelitian ini berdasarkan kategori skala investasi (mikro kecil, menengah, dan besar) yang dilihat dari besaran nilai investasi dalam rupiah. Kedepannya dapat menambahkan kategori investasi berdasarkan jenis investasi (investasi asing (PMA), investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi daerah) untuk berkesempatan mendapatkan informasi berdasarkan perspektif penanam modal asing.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan pemilihan informan dari usaha atau investasi yang mengalami penurunan atau bahkan sampai menutup usahanya.

LAMPIRAN

A. Transferability Hasil Penelitian

Dalam penelitian kualitatif khususnya yang menggunakan pendekatan studi kasus tunggal, transferability berkenaan dengan sejauh manakah hasil penelitian dapat diterapkan atau diaplikasikan dalam kasus lain. Pada konteks penelitian ini, agar hasil penelitian dapat diterapkan pada daerah lain maka daerah tersebut harus memiliki kemiripan karakteristik dengan studi kasus dalam penelitian ini yaitu Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Berikut karakteristik Kabupaten Banyuwangi yang berkaitan dengan penelitian ini:

Tabel Lampiran 1. Karakteristik Kabupaten Banyuwangi

Aspek	Karakteristik
Strategi Pengembangan e-Government	Tertuang dalam RPJMD 2010-2015 dan 2016-2021
	RSTI Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tahun 2012-2017
	Peraturan Bupati No.1 tahun 2010 tentang Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)
	Instruksi Bupati No.1 tahun 2010 tentang Migrasi dan Penggunaan FOSS yang berlisensi bebas dan legal
	Instruksi Bupati No.555 tahun 2012 tentang Optimalisasi Pemanfaatan Website
	Program Inovasi SKPD
Kondisi e-Government	Tersedia jaringan internet dan intranet yang terkoneksi dengan 34 SKPD, 24 kecamatan, 189 desa, 28 kelurahan dan 60 RS / puskesmas
	Tersedia kurang lebih 1400 titik @wifi.id yang tersebar di seluruh RTH, kantor pemerintahan, fasilitas publik (sekolah, pasar), obyek wisata, dan lain-lain.
	Memiliki aplikasi e-Government dengan fungsi utama yang sejalan dengan prinsip good governance (transparansi, akuntabilitas, responsifitas, efektifitas dan efisiensi)
	Beberapa aplikasi e-Government telah terintegrasi dengan sharing data maupun aplikasi lain

	Status Kota Digital Society Pertama di Indonesia
Kondisi Tata Kelola Pemerintahan	Komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola pemerintahan yang baik dan efektif (good governance) dengan menempatkan pada urutan pertama dalam 20 pokok pilar pembangunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi
	Perwujudan aplikasi e-Government yang mendukung tercapainya good governance
	Transparan terhadap perencanaan, hingga laporan penggunaan anggaran daerah melalui website, baliho-baliho dan festival transparansi anggaran.
	Dukungan regulasi/kebijakan yang mendorong kemajuan sektor bisnis
Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal	Memiliki unit pelayanan terpadu satu pintu (PTSP) yang fokus pada pelayanan perizinan dan penanaman modal yaitu Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu (BPPT)
	Memiliki sistem pelayanan perizinan (SIMBPPT) untuk mempercepat proses pelayanan perizinan
	Memiliki sistem pendaftaran perizinan online (SIPO)
	Memiliki program unggulan One Day Service khusus penerbitan izin SIUP tanpa tinjau lokasi
	Promosi potensi investasi yang dilakukan di website BPPT maupun www.banyuwangikab.go.id
Potensi Pariwisata dan Infrastruktur Transportasi	Tersedia infrastruktur transportasi pendukung: kereta api, pelabuhan ferry dan pelabuhan peti kemas, bandara, bus, dan jalan nasional utama yang menghubungkan Jawa dengan Bali.
	Memiliki agenda tahunan Banyuwangi Festival yang terdiri dari puluhan rangkaian festival pariwisata, budaya, pemerintahan, lingkungan selama setahun.
	Potensi pariwisata mulai dari potensi laut, gunung, alam, dan budaya.

Supaya hasil dari penelitian ini dapat diterapkan pada daerah lain, maka daerah tersebut perlu memiliki kemiripan karakteristik Kabupaten Banyuwangi seperti pada tabel diatas sehingga akan memudahkan daerah lain untuk

mentransfer dan mengadopsi hasil penelitian ini untuk diterapkan. Karena hasil penelitian ini sangat bergantung pada karakteristik Kabupaten Banyuwangi diatas

Halaman ini sengaja dikosongkan

B. Pedoman Wawancara

A. Pertanyaan wawancara untuk informan internal (Pemerintah)

Keterangan:

Informan 1 : Bupati Banyuwangi

Informan 2 : Kabid. Penanaman Modal BPPT Kab. Banyuwangi

Informan 3 : Kasie. Teknologi Informasi Dishubkominfo Kab. Banyuwangi

Informan 4 : Kasie. Pengelolaan Data Elektronik Kab. Banyuwangi

No	Indikator	Item	Pertanyaan	Informan Internal			
1	Implementasi E-Government			1	2	3	4
	Infrastruktur ICT	Ketersediaan Jaringan Fixed Internet	1. Bagaimana dengan ketersediaan LAN sebelum 2011 dan setelah 2011 hingga saat ini? Apakah ada peningkatan ?		√	√	√
		Ketersediaan wireless	2. Apakah di instansi bapak tersedia wifi ?		√	√	
		Ketersediaan saluran telepon	3. Apakah tersedia saluran telepon di instansi bapak		√	√	
		Ketersediaan PC	4. Apakah tersedia PC untuk melakukan pelayanan publik baik offline maupun online ?		√	√	√
			5. Bagaimana dengan ketersediaan PC sebelum 2011 dan setelah 2011 hingga saat ini ? Apakah ada peningkatan ?		√	√	√
	Infrastruktur ICT ~ Implementasi e-government		6. Menurut Bapak, bagaimana peran infrastruktur ICT dalam mendukung implementasi e-government di Banyuwangi ?	√	√	√	√
			7. Menurut Bapak, Apakah ketersediaan infrastruktur ICT turut andil dalam menciptakan daya tarik investasi di Banyuwangi ?	√	√	√	√

2	Alokasi Anggaran IT	Alokasi anggaran IT yang jelas	8. Apakah selalu tersedia dalam RAB Pemkab Banyuwangi alokasi anggaran untuk pengembangan IT aplikasi online / SIM / e-government ?		√	√	√
		Ketersediaan sumber dana	9. Bagaimana mengenai nilai (jumlah) anggaran IT sebelum tahun 2011 dan setelah 2011 ? Apakah terjadi peningkatan ?	√	√	√	
		Mekanisme penggunaan anggaran IT	10. Apakah mekanisme penggunaan anggaran tertata dengan jelas ? ada SOP nya ?		√	√	
	Alokasi anggaran IT ~ Implementasi e-government		11. Menurut bapak, bagaimana peran anggaran IT dalam mensukseskan implementasi e-government di Pemkab Banyuwangi ?	√	√	√	√
3	Jenis Aplikasi e-government (SKPD)	Jumlah aplikasi yang sudah online	12. Berapa jumlah aplikasi yang sudah online?		√	√	
		Jumlah aplikasi yang sudah online dan dipakai	13. Berapa jumlah aplikasi yang sudah online dan dipakai dalam pelayanan baik internal maupun pelayanan publik?		√	√	
		Jumlah aplikasi yang sudah online tetapi tidak dipakai	14. Berapa jumlah aplikasi yang sudah online namun tidak terpakai? (nganggur)		√	√	√
		Kesesuaian jenis aplikasi dengan prinsip good governance	15. Apakah jenis dan fungsi aplikasi yang ada sudah merepresentasikan indikator good governance (transparansi, akuntabilitas, responsif, efektifitas dan efisiensi) ?	√	√	√	√
	Jenis Aplikasi e-gov ~ Implementasi e-government		16. Menurut bapak, Apa manfaat yang dirasakan dengan adanya aplikasi e-gov / SIMDA / SIM yang telah berjalan saat ini ?	√	√	√	√
			17. Apabila dibandingkan sebelum tahun 2011, apakah mengalami		√	√	

			peningkatan dalam hal penggunaan (jumlah) aplikasi e-gov/ SIMDA / SIM ?				
4	Master Plan IT	Tersedia Master Plan IT (pengembangan e-gov)	18. Apakah Pemkab Banyuwangi memiliki master plan IT yang berisi roadmap pengembangan IT/e-gov ? apakah benar-benar dijadikan pedoman dalam implementasi IT ?	√	√	√	
	Master Plan IT ~ Implementasi e-government		19. Menurut bapak, apa fungsi dari masterplan IT dalam pengembangan e-government di Banyuwangi ?		√	√	
5	Staff IT	Memiliki Staff IT	20. Apakah di instansi bapak ada staff IT? Berapa jumlahnya ?		√	√	
		Pelatihan Staff IT	21. Apakah ada pelatihan staff IT untuk pengembangan dan pemeliharaan sistem?		√	√	
			22. Apakah staff IT rutin melakukan pelatihan penggunaan aplikasi baik kepada pengguna internal SKPD maupun pengguna SKPD terkait yang menggunakan aplikasi?		√	√	
	Staff IT ~ Implementasi e-government		23. Menurut bapak, seberapa penting kah keberadaan staff IT dalam keberlangsungan proses pengembangan e-government (mulai dari pembuatan - pemeliharaan) ?		√	√	√
	Implementasi e-government ~ Good Governance		24. Menurut bapak, apa manfaat dari implementasi e-government (aplikasi / SIMDA / SIM) bagi pemerintah dan juga masyarakat ? - Bagi Pemerintah: - Bagi Masyarakat:	√	√	√	√
			25. Menurut bapak, apakah peran e-gov sangat signifikan dalam	√	√	√	√

		meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan ?				
		26. Menurut bapak, lebih baik mana kondisi implementasi IT sebelum tahun 2011 dan sesudah 2011 ? Dilihat dari infrastruktur, jumlah aplikasi, anggaran pengembangan IT.	√	√	√	√
6	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)					
	Transparansi	Publikasi data keuangan, penggunaan anggaran	27. Apakah pemerintah terbuka terhadap masyarakat dan pelaku usaha dalam memberikan informasi laporan penggunaan keuangan daerah? Melalui media apa penyampaian informasi tersebut ?	√	√	√
		Publikasi peraturan / kebijakan	28. Apakah pemerintah selalu mempublikasikan peraturan/kebijakan/regulasi melalui website resmi pemerintah ?	√	√	√
	Transparansi ~ Good Governance		29. Menurut anda apa manfaat dari transparan sehingga pemerintah berlomba untuk mengedepankan asas transparansi ?	√	√	√
			30. Menurut penilaian bapak, bagaimana praktek transparansi di Pemkab Banyuwangi saat ini jika dibandingkan sebelum tahun 2011 ? Apakah terjadi peningkatan atau penurunan.		√	√
7	Akuntabilitas	Pertanggungjawaban anggaran	31. Apakah Pemerintah / SKPD setiap tahun atau periode tertentu melaporkan pertanggungjawaban anggaran ? Melalui media apa melaporkannya?	√	√	√
		Pertanggungjawaban kinerja pemerintah	32. Apakah pemerintah / SKPD setiap tahun melaporkan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah (LAKIP)? Melalui media apa melaporkannya?	√	√	√
	Akuntabilitas ~ Good Governance		33. Menurut bapak, apa yang didapatkan oleh pemerintah ketika pemerintah selalu mempertanggungjawabkan anggaran dan kinerja		√	√

			instansi terhadap ?				
8	Kualitas Regulasi dan Penegakan Hukum	Kebijakan dan peraturan yang sehat dan adil	34. Menurut bapak, sejauh ini bagaimana penilaian terhadap kebijakan/peraturan baik keseluruhan maupun yg menyangkut di dinas bapak. Apakah adil untuk seluruh stakeholder (masyarakat/bisnis)?	√	√		
		Sanksi yang tegas terhadap pelanggaran regulasi	35. Bagaimana pemberian sanksi yang tegas dari pemerintah kalau terjadi pelanggaran terhadap peraturan/kebijakan?	√	√		
	Kualitas regulasi dan penegakan hukum ~ Good Governance		36. Menurut bapak, secara keseluruhan bagaimana kualitas regulasi yang dikeluarkan oleh pemkab banyuwangi ? apakah adil dan tidak memberatkan salah satu pihak ?	√	√	√	
			37. Bagaimana pendapat bapak tentang hubungan kualitas regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah sebagai salah satu indikator tata kelola pemerintahan yang baik?		√		
			38. Menurut bapak, bagaimana peran konsistensi dalam penegakan hukum/kebijakan dalam rangka menarik investor masuk ke Banyuwangi?	√	√		
9	Responsif	Cepat tanggap terhadap kritik dan saran	39. Apakah pemerintah memiliki layanan kritik dan saran ? Call Center, SMS Center, Website Keluhan, Media Sosial, dll ?		√	√	
			40. Apakah pemerintah merespon dengan cepat dan menanggapi kritik dan saran dari stakeholder (masyarakat dan bisnis)	√	√	√	
		Cepat tanggap dalam pelayanan	41. Bagaimana dengan kecepatan dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakat dan bisnis ? Berikan salah satu contoh bentuk kecepatan pemerintah dalam pelayanan publik		√	√	

10	Efektifitas dan efisiensi	Birokrasi pelayanan lebih mudah dan efektif	42. Setelah diimplementasikannya e-gov (aplikasi online), bagaimana dampak terhadap birokrasi pelayanan publik ? Berikan contoh aplikasinya.	√	√	√	√
			43. Bagaimana kondisi birokrasi saat ini apabila dibandingkan sebelum adanya aplikasi online ?		√	√	√
		Manajemen internal instansi lebih mudah	44. Setelah diimplementasikannya e-gov, bagaimana dampak terhadap pengelolaan manajemen internal ? apakah memudahkan ? berikan contohnya.	√	√	√	√
	Efektifitas dan efisiensi ~ Good Governance		45. Bagaimana peran implementasi e-gov dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan efisien ?	√	√		√
	Good Governance ~ Peningkatan Penanaman Modal		46. Mengapa pemerintah berlomba-lomba untuk mewujudkan good governance ? apa manfaat yang didapatkan ketika tata kelola pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien ?	√	√	√	
			47. Bagaimana penilaian anda tentang kondisi birokrasi di Pemkab banyuwangi sebelum tahun 2011 dan saat ini setelah diimplementasikannya beberapa aplikasi / SIM untuk birokrasi ?	√	√		
			48. Bagaimana pendapat anda terkait teori yang mengatakan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) akan berdampak pada meningkatnya investor sehingga nilai penanaman modal akan semakin meningkat. (Disesuaikan dengan kondisi di banyuwangi)		√		√
			49. Apakah tingginya minat investasi di Banyuwangi saat ini salah satunya karena faktor tata kelola pemerintah banyuwangi?	√	√		√

B. Pertanyaan wawancara untuk informan eksternal (Penanam Modal)

Keterangan :

Informan 5 : Owner Osing Deles Merchandise

Informan 6 : Owner UMKM Nagud! Banyuwangi

Informan 7 : Manajer Osing Deles Merchandise

Informan 8 : HRD Manager Hotel Santika Banyuwangi

No	Pertanyaan	Informan Eksternal			
		5	6	7	8
1	Mengapa anda memilih Banyuwangi sebagai lokasi investasi ? Berikan alasan anda	√	√	√	
2	Pada saat mengurus perizinan usaha, pendaftaran dilakukan melalui online atau offline?	√	√	√	
3	Bagaimana penilaian anda terhadap prosedur pelayanan perizinan usaha di Banyuwangi ? Apakah mudah atau ribet ?	√		√	√
4	Aplikasi / layanan online apa yang biasa anda gunakan dalam proses usaha anda ?	√	√		
5	Bagaimana penilaian anda terhadap tata kelola pemerintahan Kabupaten Banyuwangi ? Dilhat dari aspek transparansi, akuntabilitas, responsifitas, kualitas regulasi dan penegakan hukum, serta efektifitas dan efisiensi birokrasinya.	√	√		√
6	Apakah faktor tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel menjadi pertimbangan tersendiri bagi perusahaan anda dalam memilih lokasi investasi? Mengapa itu penting bagi anda sebagai penanam modal?	√	√	√	√
7	Apakah anda memilih Banyuwangi sebagai tujuan investasi juga karena dipengaruhi faktor IT yang dimiliki Banyuwangi ?	√		√	√

Catatan : selama proses wawancara di lapangan, ada beberapa pertanyaan detail tambahan yang diajukan seiring dengan informasi yang disampaikan oleh informan selama wawancara berlangsung.

Halaman ini sengaja dikosongkan

C. Validasi Hasil Penelitian (Member Checking)

1. Ilzam Nuzuli, S.E – Kepala Bidang Penanaman Modal BPPT Kab. Banyuwangi

LMC.PEM.IN.01

LEMBAR VALIDASI HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian : Analisis Hubungan Implementasi e-Government terhadap Peningkatan Penanaman Modal di Daerah (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi)

Peneliti : Beny Prasetyo

Dosen Pembimbing : Tony Dwi Susanto, S.T.,M.T.,Ph.D.,ITIL

Telah dilakukan penggalan data melalui wawancara dan observasi langsung terhadap informan penelitian sebagai berikut:

Nama Informan : Ilzam Nuzuli, S.E

NIP : 19750923 200501 1 002

Jabatan : Kepala Bidang Penanaman Modal

Instansi : Badan Pelayanan dan Perizinan Terpadu

Tanggal Wawancara : 4 Maret 2016

Lokasi Wawancara : Cafe Investasi BPPT Kab. Banyuwangi

Hasil Penelitian : **TERLAMPIR SESUAI LAPORAN PENELITIAN**

Berikan checklist (✓) pada kolom dibawah ini:

Komponen Validasi	Sesuai dengan fakta di lapangan	
	YA	TIDAK
Kondisi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	✓	
Kondisi tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	✓	
Kondisi penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi	✓	
Keterkaitan antara implementasi e-Government dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	✓	
Keterkaitan antara kualitas tata kelola pemerintahan dengan daya tarik investasi	✓	
Keterkaitan antara implementasi e-Government dengan daya tarik investasi	✓	
Temuan terkait Manfaat Implementasi e-Government	✓	
Temuan terkait Manfaat Good Governance	✓	
Temuan terkait faktor-faktor yang menjadi daya tarik investasi di Kabupaten Banyuwangi	✓	

Banyuwangi, 21 Juni 2016



Ilzam Nuzuli, S.E

NIP. 19750923 200501 1 002

2. Agustinus Suko Basuki, S.T – Kasie Teknologi Informasi Dinas
Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Banyuwangi

LMC.PEM.ASB.02

LEMBAR VALIDASI HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian : Analisis Hubungan Implementasi e-Government terhadap
Peningkatan Penanaman Modal di Daerah (Studi Kasus: Pemerintah
Kabupaten Banyuwangi)
Peneliti : Beny Prasetyo
Dosen Pembimbing : Tony Dwi Susanto, S.T.,M.T.,Ph.D.,ITIL

Telah dilakukan penggalan data melalui wawancara dan observasi langsung terhadap
informan penelitian sebagai berikut:

Nama Informan : Agustinus Suko Basuki, S.T
NIP : 19770502 200604 1 026
Jabatan : Kasie. Teknologi Informasi
Instansi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Tanggal Wawancara : 14 Maret 2016
Lokasi Wawancara : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
Hasil Penelitian : **TERLAMPIR SESUAI LAPORAN PENELITIAN**

Berikan checklist (✓) pada kolom dibawah ini:

Komponen Validasi	Sesuai dengan fakta di lapangan	
	YA	TIDAK
Kondisi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	✓	
Kondisi tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	✓	
Kondisi penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi	✓	
Keterkaitan antara implementasi e-Government dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	✓	
Keterkaitan antara kualitas tata kelola pemerintahan dengan daya tarik investasi	✓	
Keterkaitan antara implementasi e-Government dengan daya tarik investasi	✓	
Temuan terkait Manfaat Implementasi e-Government		
Temuan terkait Manfaat Good Governance	✓	
Temuan terkait faktor-faktor yang menjadi daya tarik investasi di Kabupaten Banyuwangi	✓	

Tambahan
kertas

Banyuwangi, 21 Juni 2016
Agustinus Suko Basuki, S.T
NIP. 19770502 200604 1 026

3. Joni Priyanto, S.ST – Kasie. Pengelolaan Data Elektronik Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Banyuwangi

LMC.PEM.JP.03

LEMBAR VALIDASI HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian : Analisis Hubungan Implementasi e-Government terhadap Peningkatan Penanaman Modal di Daerah (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi)

Peneliti : Beny Prasetyo

Dosen Pembimbing : Tony Dwi Susanto, S.T.,M.T.,Ph.D.,ITIL

Telah dilakukan penggalan data melalui wawancara dan observasi langsung terhadap informan penelitian sebagai berikut:

Nama Informan : Joni Priyanto, S.ST

NIP : 19720823 200501 1 002

Jabatan : Kasie. Pengelolaan Data Elektronik

Instansi : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika


Tanggal Wawancara : 05 April 2016

Lokasi Wawancara : Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika

Hasil Penelitian : **TERLAMPIR SESUAI LAPORAN PENELITIAN**

Berikan checklist (✓) pada kolom dibawah ini:

Komponen Validasi	Sesuai dengan fakta di lapangan	
	YA	TIDAK
Kondisi e-Government di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	✓	
Kondisi tata kelola Pemerintah Kabupaten Banyuwangi	✓	
Kondisi penanaman modal di Kabupaten Banyuwangi	✓	
Keterkaitan antara implementasi e-Government dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan	✓	
Keterkaitan antara kualitas tata kelola pemerintahan dengan daya tarik investasi	✓	
Keterkaitan antara implementasi e-Government dengan daya tarik investasi	✓	
Temuan terkait Manfaat Implementasi e-Government	✓	
Temuan terkait Manfaat Good Governance	✓	
Temuan terkait faktor-faktor yang menjadi daya tarik investasi di Kabupaten Banyuwangi	✓	



Banyuwangi, 21 Juni 2016

Joni Priyanto, S.ST
19720823 200501 1 002

4. dr. Zunita Ahmadah – Owner Osing Deles Merchandise

LMC.INV.ZA.05

LEMBAR VALIDASI HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian : Analisis Hubungan Implementasi e-Government terhadap Peningkatan Penanaman Modal di Daerah (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi)

Peneliti : Beny Prasetyo

Dosen Pembimbing : Tony Dwi Susanto, S.T.,M.T.,Ph.D.,ITIL

Telah dilakukan penggalian data melalui wawancara dan observasi langsung terhadap informan penelitian sebagai berikut:

Nama Informan : dr. Zunita Ahmadah

Jabatan : Owner

Perusahaan : Osing Deles

Skala Investasi : Investasi Menengah

Tanggal Wawancara : 22 Mei 2016



Lokasi Wawancara : Outlet Osing Deles

Hasil Penelitian : **TERLAMPIR SESUAI LAPORAN PENELITIAN**

Berikan checklist (✓) pada kolom dibawah ini:

Komponen Validasi	Sesuai dengan fakta di lapangan	
	YA	TIDAK
Keterkaitan antara kualitas tata kelola pemerintahan dengan daya tarik investasi	✓	
Keterkaitan antara implementasi e-Government dengan daya tarik investasi	✓	
Temuan terkait faktor-faktor yang menjadi daya tarik investasi di Kabupaten Banyuwangi	✓	

Banyuwangi, 21 Juni 2016



 dr. Zunita Ahmadah
 Owner Osing Deles Merchandise

5. Annisa Febby Chaurina – Owner UMKM Nagud! Banyuwangi

LMC.INV.AF.04

LEMBAR VALIDASI HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian : Analisis Hubungan Implementasi e-Government terhadap Peningkatan Penanaman Modal di Daerah (Studi Kasus: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi)

Peneliti : Beny Prasetyo

Dosen Pembimbing : Tony Dwi Susanto, S.T.,M.T.,Ph.D.,ITIL

Telah dilakukan penggalan data melalui wawancara dan observasi langsung terhadap informan penelitian sebagai berikut:

Nama Informan : Annisa Feby Chaurina

Jabatan : Owner

Perusahaan : UMKM Nagud! Banyuwangi

Skala Investasi : Investasi Kecil

Tanggal Wawancara : Wcr I : 22 Maret 2016, Wcr II : 5 April 2016


Lokasi Wawancara : Wcr I : Outlet Nagud!, Wcr II : Taman Blambangan Banyuwangi

Hasil Penelitian : **TERLAMPIR SESUAI LAPORAN PENELITIAN**

Berikan checklist (✓) pada kolom dibawah ini:

Komponen Validasi	Sesuai dengan fakta di lapangan	
	YA	TIDAK
Keterkaitan antara kualitas tata kelola pemerintahan dengan daya tarik investasi	✓	
Keterkaitan antara implementasi e-Government dengan daya tarik investasi	✓	
Temuan terkait faktor-faktor yang menjadi daya tarik investasi di Kabupaten Banyuwangi	✓	

Banyuwangi, 21 Juni 2016

nagud!

 Annisa Feby Chaurina
 Owner Nagud! Banyuwangi

BAB 6

KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran yang dihasilkan dari penelitian yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa hasil penelitian telah menjawab rumusan masalah dan tujuan penelitian.

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan dari penelitian mengenai hubungan antara implementasi e-Government terhadap peningkatan penanaman modal di daerah antara lain:

- 1. Implementasi e-Government pada level pemerintah daerah memiliki pengaruh terhadap terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).**

Dengan diterapkannya beberapa aplikasi e-Government yang memiliki fungsi sebagai transparansi, akuntabilitas, responsifitas, dan memudahkan pelayanan sangat berdampak pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintah daerah yang lebih transparan, efektif dan efisien. Hal ini menjawab rumusan masalah penelitian ini yaitu *“Bagaimana dampak implementasi e-Government terhadap peningkatan kualitas good governance di pemerintah daerah ?”*.

- 2. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah akan membentuk citra dan kepercayaan publik (public trust) di kalangan masyarakat dan pelaku usaha yang berdampak pada minat investasi oleh penanam modal.**

Dengan tata kelola pemerintahan menjadi lebih transparan, akuntabel, responsif, pelayanan yang mudah dan cepat serta didukung dengan regulasi yang mendukung sektor bisnis sangat berdampak pada pembentukan citra/image pemerintahan daerah yang positif dan juga kepercayaan publik (public trust) terhadap pemerintah daerah. Dua dampak tersebut mampu menjadi daya tarik investasi daerah dan mampu mempengaruhi persepsi calon penanam modal maupun pelaku usaha di daerah untuk berinvestasi atau lebih meningkatkan investasi menjadi lebih

besar. Hal ini menjawab dua rumusan masalah penelitian ini yaitu *“Bagaimana dampak kualitas good governance pemerintah daerah terhadap peningkatan nilai investasi di daerah ?”*

3. Implementasi e-Government pada level pemerintah daerah mampu memberikan aksesibilitas informasi potensi daerah kepada calon penanam modal.

Salah satu wujud layanan e-Government yaitu website instansi / pemerintah. Pemanfaatan secara optimal website Pemerintah Kabupaten Banyuwangi untuk media promosi potensi Kabupaten Banyuwangi termasuk didalamnya potensi investasi yang menjanjikan berdampak pada aksesibilitas informasi bagi calon penanam modal. Hal ini menjawab rumusan masalah penelitian ini yaitu *“Bagaimana dampak implementasi e-government terhadap peningkatan nilai investasi di daerah’ ?*

4. Peran partnership, dukungan peraturan dan kebijakan, serta apresiasi dari kepala daerah turut mendorong keberlangsungan implementasi e-Government pada level pemerintah daerah.

Peran partnership dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun perusahaan, dukungan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk memaksimalkan penggunaan e-Government, serta apresiasi (reward) yang diberikan oleh kepala daerah terhadap SKPD turut mendorong keberlangsungan implementasi e-Government di daerah. Bentuk dorongan tersebut antara lain penguatan komponen infrastruktur ICT, trigger untuk memaksimalkan pemanfaatan ICT dalam meningkatkan kualitas pelayanan. Hal ini memberikan temuan baru dalam hal faktor-faktor yang menjadi pendorong kesuksesan implementasi e-Government pada level pemerintah daerah.

5. Daya tarik investasi daerah dibentuk pula melalui faktor ketersediaan infrastruktur transportasi, potensi pariwisata daerah, dukungan agenda/program pemerintah daerah pada sektor pariwisata, serta dukungan regulasi/kebijakan yang mendukung sektor bisnis.

Pemerintah daerah perlu meningkatkan sektor-sektor yang dapat dijadikan daya tarik investasi daerah seperti pariwisata, infrastruktur pendukung,

termasuk didalamnya kebijakan pemerintah yang mendukung (pro) terhadap kemajuan sektor bisnis di daerah. Faktor-faktor ini menjadi pertimbangan utama bagi penanam modal sebelum memutuskan untuk berinvestasi.

6.2 Saran

Berdasarkan keseluruhan hasil penelitian ini, maka ada beberapa saran yang dapat ditindaklanjuti untuk pengembangan penelitian di masa yang akan datang. Berikut saran dari penelitian ini:

1. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus tunggal, kedepannya perlu menggunakan multi kasus dengan menambahkan beberapa daerah lain sebagai studi kasus.
2. Pemilihan informan penanam modal dalam penelitian ini berdasarkan kategori skala investasi (mikro kecil, menengah, dan besar) yang dilihat dari besaran nilai investasi dalam rupiah. Kedepannya dapat menambahkan kategori investasi berdasarkan jenis investasi (investasi asing (PMA), investasi dalam negeri (PMDN) dan investasi daerah) untuk berkesempatan mendapatkan informasi berdasarkan perspektif penanam modal asing.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mempertimbangkan pemilihan informan dari usaha atau investasi yang mengalami penurunan atau bahkan sampai menutup usahanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Addison, T., & Heshmati, A. (2003). The new global determinants of FDI flows to developing countries: The importance of ICT and democratization. *New Economy in Development* , 1-31.
- Alaaraj, H., & Ibrahim, F. W. (2014). Does Practicing Good Governance Enhance the Public Trust towards the Lebanese Government ? *International Journal of Scientific and Research Publications, Vol 4 Issue 10* , 1-4.
- Alaaraj, H., & Ibrahim, F. W. (2014). The Influence of E-Government practices on good governance from the perspective of public in Lebanon. *Journal of Public Administration and Governance Vol.4 No.3* , 171-185.
- Al-Azzam, A., & Abu-Shanab, E. (2014). E-government: The gate for attracting foreign investments. *6th International Conference on CSIT* , 161-165.
- Alshehri, M., & Drew, S. (2010). E-Government Fundamentals. *IADIS International Conference ICT, Society and Human Beings* , 35-42.
- Andriansyah, M. (2015, Maret 12). *www.merdeka.com*. Retrieved November 16, 2015, from *www.merdeka.com*: <http://www.merdeka.com/peristiwa/jelang-akhir-jabatan-anas-genjot-investasi-banyuwangi.html>
- Azubuike, A. A. (2006). Accesibility of E-Government Information as a Determinant of Inward Foreign Direct Investment in Africa. *72nd IFLA General Conference and Council* , 1-15.
- Banyuwangi, BPPT. (2015, Maret 08). *Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi*. Retrieved September 27, 2015, from Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Banyuwangi: <http://bppt.banyuwangikab.go.id/index.php/component/k2/item/21-penyelenggara-pelayanan-satu-pintu-terpadu-terbaik-th-2014>
- Bhatnagar, S. (2003). The Economic and Social Impact of E-Government. *UNDESA Publication* , 1-39.
- BKPM. (2014). *Realisasi Penanaman Modal Triwulan I 2014*. Jakarta: Badan Koordinasi Penanaman Modal.
- BPMP Jatim (2015, Oktober 27). *BPM Provinsi Jawa Timur*. Retrieved 11 24, 2015, from BPM Provinsi Jawa Timur:

http://bpm.jatimprov.go.id/bpm/index.php?page=content&id_menu=6&news_id=1006

- Buss, I., & Karkowski, H. (2005). eGovernment to improve the local business environment: A case study from America Latin. *Conference on Reforming the Business Environment* , 1-24.
- Cazzura-Cuervo, A. (2008). Better the devil you don't know: types of corruption and FDI in transition economies. *Journal of International Management* 14 , 12-27.
- Chandra, D. S., & Yokoyama, K. (2011). The Role of Good Governance in the knowledge-based economic growth of East Asia - A study on Japan, Newly Industrialized Economies, Malaysia and China. 『社会システム研究』 , 23-49.
- Danciu, A. R., & Strat, V. A. (2014). Factor Influencing the Choice of the Foreign Direct Investment Locations in the Romanian Regions. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* , 870 - 874.
- DeBenedicts, A., Howell, W., Figueroa, R., & Boggs, R. A. (2002). E-Government defined: an overview of the next big information technology challenge. *IACIS* , 130-136.
- Deloitte. (2004). *Enhancing Economic Competitiveness through E-Government*. USA: Deloitte Research Group.
- Dornbusch, R., Stanley, F., & Richard, S. (2004). *Makro Ekonomi [Edisi Bahasa Indonesia]*. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Economou, P. (2008). Harnessing ICT for FDI and Development. *OECD Global Forum on International Investment III* (pp. 1-12). Paris: Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD).
- Economy, T. N. (2003). E-Government Benefit Study. In T. N. Economy, *E-Government Benefit Study* (p. 13). Australia: NOIE.
- Emory, C. W., & Cooper, D. R. (1991). *Business Research Methods*. Homewood: Irwin.

- Fadilah, S. (2013). The Influence of Good Governance Implementation to Organizational Performance. *The International Journal of Social Sciences Vol 7 No 1* , 15-33.
- Fang, Z. (2002). E-Government in Digital Era: Concept, Practice and Development. *International Journal of The Computer, The Internet and The Management Vol 10, No 2* , 1-22.
- Globerman, S., Shapiro, D., & Tang, Y. (2004). Foreign Direct Investment in Emerging and Transition European Countries. 1-45.
- Gronlund, A., & Horan, T. A. (2004). Introducing e-Gov: History, Definitions and Issues. *Communications of The Association for Information Systems Vol 15* , 713-729.
- Hancock, B., Ockleford, E., & Windridge, k. (2009). *An Introduction to Qualitative Research*. Sheffield: The NIHR RDS EM / YH.
- Hidayat, F. (2014, Maret 13). *Berita Satu.com*. Retrieved September 27, 2015, from Berita Satu.com: <http://www.beritasatu.com/ekonomi/171290-investasi-yang-masuk-ke-banyuwangi-mencapai-rp-32-triliun.html>
- Ho, A. T. (2002). Reinventing Local Governments and the E-Government initiative. *Public Administration Review Vol.62 No.4* , 434-444.
- IDSa. (2015, Mei). *Indonesia Digital Society Award*. Retrieved 11 24, 2015, from Indonesia Digital Society Award: <http://www.idsa.co.id/index.php?3c86c2ce76d281b2025af83865a7993ab0ef8200fa4ed3f46dc4899c37ae5d28>
- IFAD. (1999). *Good Governance : An Overview*. Rome: Internal Fund For Agricultural Development.
- ITU. (2009). *A Framework for e-Government Readiness and Action Priorities*. Geneva: International Telecommunication Union.
- Jajeli, R. (2014, Maret 26). *Detik.com*. Retrieved September 27, 2015, from Detik.com: <http://finance.detik.com/read/2014/03/26/130528/2537158/4/rahasia-bupati-banyuwangi-azwar-anas-gaet-investasi-hingga-naik-175>

- Kachwamba, M. (2011). Impact of E-Government on transaction cost and FDI inflows: a proposed conceptual framework. *International Journal of Business Management Vol. 6 No. 11* , 285-296.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). *The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues*. Global Economy and Development Brookings.
- Kazmi, S. N., & Manarvi, I. (2009). A Methodology of Identifying Factors Influencing Foreign Direct Investment in ICT Industry. *IEEE* , 1452-1457.
- Keban, Y. T. (2000). Good Governance dan Capacity Building sebagai indikator utama dan fokus penilaian kinerja pemerintahan. *Naskah No. 20* , 1-12.
- Kotler, P., & Gertner, D. (2002). Country as brand, product, and beyond: A place marketing and brand management perspective. *Brand Management Vol 9* , 249-261.
- KPPOD. (2004). *Daya Tarik Investasi Kabupaten / Kota di Indonesia*. Jakarta: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah.
- Kusbiantoro, D. (2014, Februari 27). *Antara Jatim.com*. Retrieved September 27, 2015, from Antara [Jatim.com: http://www.antarajatim.com/lihat3/berita/127935/realisasi-investasi-di-banyuwangi-capai-rp32-triliun](http://www.antarajatim.com/lihat3/berita/127935/realisasi-investasi-di-banyuwangi-capai-rp32-triliun)
- La Porta, R., Lopez de Silanes, F., Shleifer, A., & Vishny, R. W. (1998). Law and Finance. *The Journal of Political Economy Vol.106 Issue 2* , 1113-1155.
- Lau, E. (2005). *E-government and the drive for growth and equity*. Dubai: Organization for Economic Cooperation and Development E-Government Project.
- Loibl, C., & Hira, T. K. (2009). Investor information search. *Journal of Economic Psychology 30* , 24-41.
- Maiti, D., & Mukherjee, A. (2013). Governance, foreign direct investment and domestic welfare. *International Review of Economics and Finance* , 406-415.
- Moriarty, J. (2011). *Qualitative Methods Overview*. London: The School for Social Care Research.

- Mucavele, F. G. (2003). Improving The Investment Climate through E-Government and E-Land Registry in Mozambique. *Global Forum on Environmental Investment* , 1-11.
- Nabafu, R., & Maiga, G. (2012). A Model of Success Factors for Implementing Local E-Government in Uganda. *Electronic Journal of e-Government Vo. 10 Issue 1* , 31-46.
- Ndou, V. (2004). E-Government for developing countries : Opportunities and Challenges. *EJISDC Vol 18 Issue 1* , 1-24.
- Nkohkwo, Q. & Islam, S. (2013). Challenges to the Successful Implementation of e-Government Initiatives in SUB-Saharan Africa: A Literature Review. *Electronic Journal of e-Government Vol 11 Issue 2* , 253-267.
- NOIE. (2003). *E-Government Benefits Study*. Australia: The National Office for the Information Economy.
- OECD. (2009). *The Financial and Economic Crisis Impact on E-Government in OECD Countries*. Malmo, Sweden: OECD.
- OECD. The Tangible benefits of Good Governance, *The Tangible benefits of Good Governance* (p. 169). OECD.
- Saidi, N., & Yared, H. (2002). eGovernment: Technology for Good Governance, Development and Democracy in the MENA countries. *Mediterranean Development Forum IV* , 1-25.
- Saidi, Y., Ochi, A., & Ghadri, H. (2013). Governance and FDI Attractiveness: Some Evidence from Developing and Developed Countries. *Global Journal of Management and Business Research Finance Vol.13 Issue 6* .
- Salim, M. (2011). Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Provinsi Papua. *Portal Garuda* , 1-9.
- Seifert, J. W., & Bonham, G. M. (2004). The Transformative Potential of E-Government in Transitional Democracies. 1-10.
- Singh, S. H. (2003). Governments in the digital era and human factors in e-governance. *Regional Workshop on E-Government* , 1-13.
- Sitompul, N. L. (2007). *Analisis Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja Terhadap PDRB Sumatera Utara*. Medan: USU.

- Subasat, T., & Bellos, S. (2013). Governance and Foreign Direct Investment in Latin America: A Panel Gravity Model Approach. *Latin America Journal of Economics (LAJE) Vol.50 No.1* , 107-131.
- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sulihanto, B. (2007). *Penerapan e-Government di Kabupaten Sragen*. Sragen: Pemerintah Kabupaten Sragen.
- Torre, J. d., & Moxon, R. W. (2001). E-commerce and global busines: the impact of information and communication technology revolution on the conduct of international business. *Journal of International Business Studies, Fourth Quarter* , 617-639.
- TUGI. (2003). *Issues Report Card Good Governance*. US: The Urban Governance Initiative.
- UNDESA. (2002). *Plan of Action E-Government for Development*. Italy: UNDESA.
- UNIDO. (2003). *Africa Foreign Investor Survey*. Vienna: United Nations Industrial Development Organization.
- UNPAN. (2014). *United Nations E-Government Survey 2014*. Washington D.C: UNDESA.
- Villaverde, J., & Maza, A. (2012). Foreign direct investment in Spain: Regional distribution and determinants. *International Business Review* , 722-733.
- World Bank (2002). *Global Development Finance, Financing the Poorest Countries*. Washington DC: The World Bank.
- World Bank. (2002). *Global Development Finance: Financing the Foorest Countries*. Washington: The World-Bank Group.
- World Bank. (2010). *Investing Across Borders 2010*. Washington D.C: The World Bank Group.

BIODATA PENULIS



Beny Prasetyo, lahir di Denpasar pada tanggal 17 Oktober 1991. Penulis telah menempuh pendidikan formal di SD Negeri 2 Gilimanuk, SMP Negeri 4 Melaya, dan SMA Negeri 1 Melaya. Pada tahun 2009 penulis melanjutkan pendidikan jenjang S1 di Program Studi Sistem Informasi Universitas Jember. Pada tahun 2013 penulis berhasil menyelesaikan studi S1 dengan tugas akhir yang berjudul “Perancangan dan Pembuatan Sistem Informasi Geografis Inspeksi Gangguan Penyulang di PT. PLN (Persero) Distribusi Jawa Timur Area Jember”. Pada tahun 2014 penulis memperoleh Beasiswa Unggulan dari Biro Kerjasama Luar Negeri Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (BU-KLN) untuk melanjutkan pendidikan jenjang S2 di Program Magister Sistem Informasi, Institut Teknologi Sepuluh Nopember. Pada penelitian tesis ini, penulis mengambil konsentrasi Manajemen Sistem Informasi (MSI) dengan topik e-Government. Kritik dan saran yang membangun dapat disampaikan melalui benyprasetyo68@gmail.com.